

# RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PENERAPAN PEMBANGUNAN EKONOMI BIRU 2025-2045

## PROVINSI SULAWESI SELATAN



Disusun oleh

BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PEMBANGUNAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bekerjasama dengan

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
YAYASAN STRATEGI KONSERVASI INDONESIA  
IPB UNIVERSITY-FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL



IPB University  
Bogor Indonesia



Yayasan Strategi  
Konservasi Indonesia



# **RINGKASAN EKSEKUTIF**

## **RENCANA INDUK DAN PETA JALAN**

### **PENERAPAN PEMBANGUNAN EKONOMI BIRU 2025-2045**

### **PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**Ekonomi Biru** adalah sistem pengelolaan seluruh sumber daya ekosistem akuatik termasuk ekosistem perairan laut dan ekosistem darat yang terkait dengan nilai ekonomi, keberlanjutan ekosistem dan sumber daya produksi, serta distribusi manfaatnya. Adopsi konsep ini di Indonesia menggunakan istilah **Ekonomi Biru yang Inklusif dan Berkelanjutan** untuk menekankan aspek pemerataan manfaat dari pengembangan ekonomi biru dengan memastikan keberlanjutan daya dukungnya.

Dalam Rencana Jangka Panjang Nasional 2025-2045, **Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan**. Negara Nusantara mengacu pada konsep negara kepulauan yang menekankan pada situasi geografis Indonesia yang dikelilingi oleh laut. Laut dilihat sebagai penghubung, bukan pemisah, yang menyediakan sumber daya pendukung kehidupan ekonomi dan menjadi perekat yang memfasilitasi hubungan dagang dan persaudaraan antara berbagai masyarakat yang mendiami pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Laut dan ekosistem perairan darat termasuk sungai-sungai, danau dan rawa sekaligus menjadi penghubung seluruh ekosistem alami antara daratan, lautan dan pulau-pulau. Pemerintah juga menegaskan bahwa ekonomi biru yang berbasis sumber daya kelautan akan menjadi sumber pertumbuhan baru perekonomian Indonesia. Menuju tahun emas kemerdekaan Indonesia 2045, Pemerintah melalui BAPPENAS sudah mengeluarkan Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia 2025-2045 yang mencakup seluruh sektor terkait. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga mengeluarkan Peta Jalan Ekonomi Biru 2025-2045 untuk lima sektor prioritas KKP dalam urutan: Konservasi Sumber Daya, Perikanan Tangkap Berkelanjutan, Pengembangan Budidaya Kelautan, Penguatan Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan Peningkatan Pengelolaan Sampah Laut terutama plastik.

**RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PENERAPAN PEMBANGUNAN EKONOMI BIRU 2025-2045 PROVINSI SULAWESI SELATAN** dirancang dengan mengacu pada seluruh kebijakan nasional di atas dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan 2025-2045. Dalam RPJPD 2025-2045 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan **Visi Pembangunan Sulawesi 2045** adalah **Sulawesi Selatan Mandiri, Maju dan Berkelanjutan dalam Ekosistem Ekonomi Biru**. Selain itu, seluruh rangkaian rencana dalam dokumen ini dikembangkan berdasarkan fakta dan kajian berikut atas berbagai isu strategis yang antara lain mencakup:

- a. Provinsi Sulawesi adalah provinsi dengan IBEI (*Indonesia Blue Economy Index*) tertinggi di Indonesia pada tahun 2023, yaitu 80,86 yang memberikan indikasi pentingnya peran kegiatan ekonomi berbasis ekosistem akuatik. Dari 3 pilar pembentuk indeks ini, pilar sosial memiliki skor tertinggi sebesar 85,5 diikuti oleh pilar ekonomi 52,0 dan pilar lingkungan 50,2. Indeks ini menunjukkan luasnya

peluang Provinsi Sulawesi Selatan untuk membangun sektor-sektor ekonomi biru guna peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan pemulihan ekosistem akuatik.

- b. Selain peluang tersebut, dengan target capaian tahun 2045 PDRB/kapita per tahun sebesar Rp 422 juta (dari Rp 69 juta tahun 2023) dan target capaian IBEI 275 (dari 80 tahun 2023) untuk Sulawesi Selatan yang ditetapkan Pemerintah melalui BAPPENAS, ada urgensi bagi Sulawesi Selatan untuk secara efektif menjadikan sektor-sektor ekonomi biru sebagai pemanfaat pertumbuhan sambil memastikan daya dukung sumber daya dan jasa ekosistemnya tetap tersedia secara berkelanjutan. Tanpa keseimbangan dan upaya yang sistematis, kedua target ini akan sukar dicapai.
- c. Kajian rinci dan komprehensif tentang potensi dan situasi sumber daya dan ekosistem perairan laut dan darat, dan kajian aspek sosial-budaya kehidupan masyarakat pesisir dan sungai di Sulawesi Selatan menimbulkan optimisme bahwa Provinsi Sulawesi Selatan akan dapat mewujudkan Visi 2045 nya dengan mengandalkan sektor-sektor ekonomi biru.
- d. Kajian tentang sektor-sektor ekonomi biru yang sudah berkembang, sektor-sektor pendukung utama, dan sektor-sektor yang baru tumbuh dan potensial untuk dikembangkan menunjukkan peluang yang menjadi basis pengembangan produk-produk baru dan hilirisasi industri pertambahan nilai yang dapat mendongkrak juga target industrialisasi ekonomi provinsi.
- e. Ketersediaan berbagai fasilitas pendidikan pendukung ekonomi biru seperti pendidikan vokasi pada tingkat sekolah menengah atas, politeknik sekolah tinggi dan universitas menjadi salah satu faktor pendukung kunci yang perlu disesuaikan kurikulumnya untuk percepatan pengembangan ekonomi biru.
- f. Adanya konsep wilayah-wilayah pertumbuhan Provinsi Sulawesi Selatan yang serasi dengan pembagian Wilayah Pengembangan Ekonomi Biru yang direncanakan berbasis kedekatan geografis wilayah administratif dan karakter dasar sumber daya dan ekosistem. Wilayah Pengembangan Ekonomi Biru ini terdiri: (1) Wilayah Teluk Bone; (2) Wilayah Selat Makassar; (3) Wilayah Laut Flores; (4) Wilayah Non-Pesisir.

Dari berbagai tahapan proses pengembangan dokumen rencana ini, termasuk analisis-analisis di atas dan rangkaian lokakarya intensif multipihak dengan pendekatan perencanaan skenario, *system thinking*, dan perencanaan teknis, dihasilkan keseluruhan rangkaian isi dokumen RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PENERAPAN PEMBANGUNAN EKONOMI BIRU 2025-2045 PROVINSI SULAWESI SELATAN dengan rangkuman sebagai berikut:

**Visi Ekonomi Biru Provinsi Sulawesi Selatan adalah Berdaya Saing, Menyejahterakan, Berkeadilan dan Berkelanjutan yang didukung oleh Integritas Tata Kelola dan Ekosistem Alami.** Visi ini akan diwujudkan melalui keberhasilan mencapai empat misi berikut: (i) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya untuk mendukung ekonomi biru; (ii) Mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui transformasi ekonomi biru yang berkeadilan; (iii) Mewujudkan ekosistem ekonomi biru yang berkelanjutan; (iv)

Mewujudkan **tata kelola pemanfaatan sumberdaya perairan yang transparan, terintegrasi, berintegritas dan adaptif** untuk menjamin keberlanjutan ekosistem perairan.

**Dalam semangat untuk merevitalisasi seluruh dimensi budaya maritim yang positif yang menjadi rumah bagi kehidupan ekonomi biru di Sulawesi Selatan, misi tersebut akan dicapai dengan landasan filosofis Menjunjung Sipakatuo untuk mengayomi pinisi berlayar, menjaga Somba Opu tegak, dan riak mamiri memberi kesejukan.**

**Menjunjung Sipakatuo** adalah menjunjung nilai-nilai luhur kultural lokal yang saling menghidupi dalam adab dan adat Sulawesi Selatan yang luhur. **Mengayomi Pinisi Berlayar** menggambarkan ekonomi biru dapat menjaga kehidupan dan mengantarkan masyarakat Sulawesi Selatan yang berbudaya maritim pada tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. **Menjaga Somba Opu Tegak** menggambarkan bagaimana pembangunan ekonomi biru mampu menegakkan harkat dan martabat masyarakat Sulawesi Selatan. **Riak Mamiri Memberi Kesejukan** adalah bagaimana ekonomi biru mendukung dinamika kehidupan sosial-budaya masyarakat Sulawesi Selatan yang berbasis sumberdaya perairan.

Dokumen ini menyajikan **Rencana Induk Pembangunan Ekonomi Biru Sulawesi Selatan pada tataran provinsi dengan secara ketat mengikuti pentahapan RPJMD** yang sesuai dengan tahapan transformasi pembangunan yang ditetapkan Pemerintah. **Peta Jalan Pembangunan Ekonomi Biru** disajikan pada Tingkat Wilayah Pembangunan Ekonomi Biru dengan memfokuskan pada rekomendasi kebijakan dan program prioritas untuk diadopsi ke dalam RPJMD 2025-2029 sebagai tahap awal perjalanan menuju Visi Pembangunan Sulawesi Selatan 2025-2045 dan upaya menempatkan keseluruhan pembangunan provinsi menuju Visi Ekosistem Ekonomi Biru yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**Makassar, 31 Agustus 2024**  
**BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

# KATA PENGANTAR

## RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PENERAPAN PEMBANGUNAN EKONOMI BIRU 2025-2045 PROVINSI SULAWESI SELATAN

(RANCANGAN) RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PENERAPAN PEMBANGUNAN EKONOMI BIRU 2025-2045 PROVINSI SULAWESI SELATAN dibuat dengan tujuan memperkuat poin-poin komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentang penerapan ekonomi biru di dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan 2025-2045 dan RPJMD 2025-2029. Dokumen ini berfungsi sebagai jembatan antara RPJPD 2025-2045 dengan RPJMD untuk mengkonkritkan arahan prioritas kebijakan dan program dalam RPJMD 2025-2049 sebagai bagian dari tahap pertama dari rencana pembangunan dan transformasi ekonomi Indonesia dan Provinsi Sulawesi Selatan sampai tahun 2045. Rencana ini disusun karena adanya urgensi untuk melihat lebih dalam kondisi dan potensi keseluruhan sumber daya akuatik yang ada, peluang untuk perluasan dan inovasi produk serta hilirisasi produk-produk ekonomi biru untuk menciptakan lebih banyak nilai tambah secara signifikan, serta tantangan-tantangan implementasi yang diantisipasi akan terjadi. Perencanaan dan pengembangan kebijakan penerapan ekonomi biru berbasis data dan pemahaman kondisi local ini diperlukan untuk merespon tantangan pertumbuhan ekonomi sebesar rata-rata 10% per tahun untuk meningkatkan pendapatan per kapita penduduk Sulawesi Selatan dari Rp 69 juta di tahun 2023 ke Tingkat Rp 422 juta di tahun 2045. Dengan luas laut yang meliputi 60% dari seluruh wilayah provinsi dan budaya maritim yang kental dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Sulawesi Selatan, menjadikan sektor-sektor ekonomi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru dan utama menjadi keniscayaan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memenuhi target pembangunan tersebut.

Dokumen ini menyajikan Rencana Induk Penerapan Pembangunan Ekonomi Biru dalam kerangka tahapan implementasi RPJPD 2025-2045 dalam empat masa RPJMD yang akan datang. Peta Jalan Pembangunan Ekonomi Biru yang memuat rekomendasi arahan kebijakan dan program prioritas difokuskan untuk periode RPJMD 2025-2029.

Rencana Induk dan Peta Jalan Penerapan Pembangunan Ekonomi Biru ini dibuat dengan arahan BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan, oleh Tim Ahli Gabungan melalui berbagai tahapan kajian dan lokakarya perencanaan scenario dan perencanaan teknis multi pihak. Tim Ahli Gabungan terdiri dari beberapa staff BAPPELITBANGDA, beberapa peneliti Universitas Hassanuddin dari bidang ekonomi Pembangunan dan sumber daya alam serta bidang ilmu kelautan dan perikanan, dan beberapa ekonom sumber daya alam dan Pembangunan berkelanjutan dari Yayasan Strategi Konservasi Indonesia/YSKI (Conservation Strategy Fund/CSF Indonesia).

Semoga menjadi sumbangsih dalam mewujudkan Visi Provinsi Sulawesi Selatan 2045 sebagai **Provinsi yang Mandiri, Maju dan berkelanjutan**.

Makassar, 31 Agustus 2024.

**TIM AHLI GABUNGAN**  
**PERUMUSAN RENCANA INDUK DAN PETA JALAN**  
**PENERAPAN PEMBANGUNAN EKONOMI BIRU 2025-2045**  
**SULAWESI SELATAN**

**Penasihat:**

1. Ir. H. Andi Bakti Haruni, C.E.S, Kepala (Plh) BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan; DR. Setiawan Aswad M.DevPlg, Kepala BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., Rektor Universitas Hassanuddin.

**Pengarah:**

1. Inyo, ST, M.Eng, Kepala Bidang Ekonomi, BAPPELITBANGDA Sulawesi Selatan.
2. Dr. Rijal Idrus, Kepala Pusat Penelitian Perubahan Iklim, Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Agus Salim, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Luky Adrianto, Kepala Lembaga Riset Internasional Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan, IPB University.
5. Dr. Mubariq Ahmad, Yayasan Strategi Konservasi Indonesia.

**Penulis dan kontributor:**

1. Dr. Alham R. Syahruna, BAPPELITBANGDA Sulawesi Selatan.
2. A. Dipa Rahayu, BAPPELITBANGDA Sulawesi Selatan.
3. Prof. Dr. Nita Rukmina Sari, Fakultas Kelautan dan Ilmu Perikanan, Universitas Hassanuddin.
4. Dr. Jamaluddin Fitrah Alam, Fakultas Kelautan dan Ilmu Perikanan, Universitas Hassanuddin.
5. Salman Samir, SE, M.Sc, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hassanuddin.
6. Randi Kurniawan, SE, M.Sc, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hassanuddin.
7. Rakhmat Nurul Prima Nugraha, SE., M.Sc, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hassanuddin.
8. Dr. Muhammad Yusuf, Universitas Cokroaminoto Makassar
9. Dr. Taryono Kodiran, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University.
10. Dinda Ratnasari, M.Sc, Yayasan Strategi Konservasi Indonesia.
11. Abdul Muis Sulaiman, MSc, Yayasan Strategi Konservasi Indonesia.
12. Nuraini, MSc, Yayasan Strategi Konservasi Indonesia.
13. C. Desta Pratama, Yayasan Strategi Konservasi Indonesia.
14. Dr. Umi Muawanah, Badan Riset dan Inovasi Nasional.

# **DAFTAR ISI**

RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan dan Sasaran.....	3
1.3 Dasar Hukum.....	4
1.4 Ruang Lingkup .....	4
1.5 Pendekatan, Metodologi, dan Kerangka Logis.....	5
BAB II EKONOMI BIRU ( <i>BLUE ECONOMY</i> ) .....	8
2.1 Definisi dan Urgensi Ekonomi Biru .....	8
2.2 Pokok-pokok Kebijakan Transformasi Ekonomi Biru Tingkat Nasional .....	9
BAB III EKONOMI BIRU DALAM PERSPEKTIF RPJPD SULAWESI SELATAN 2025-2025	14
3.1 Perkembangan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan.....	14
3.1.1 Capaian Pembangunan Ekonomi Sulawesi Selatan .....	14
3.1.2 Outlook Pembangunan Ekonomi Sulawesi Selatan Menuju 2045 .....	18
3.1.3 Perkembangan Ekonomi Biru di Sulawesi Selatan .....	20
3.2 Potensi Pengembangan Wilayah Ekonomi Biru Sulawesi Selatan .....	27
3.2.1 Wilayah Pengembangan Ekonomi Biru Teluk Bone.....	29
3.2.2 Wilayah Pengembangan Ekonomi Biru Selat Makassar .....	32
3.2.3 Wilayah Pengembangan Ekonomi Biru Laut Flores.....	35
3.2.4 Wilayah Pengembangan Ekonomi Biru Non-Pesisir.....	37
3.3 Kondisi dan Potensi Sumber Daya Alam Pendukung Ekonomi Biru Sulawesi Selatan.....	38
3.4.1 Sektor-sektor Prioritas Kelautan dan Perikanan .....	38
3.4.2 Sektor Non Kelautan dan Perikanan .....	59
3.4.3 Sektor-sektor Potensial dan Baru Tumbuh .....	72
3.5 Potensi Sosial Budaya Maritim dan Perairan Darat dalam mendukung Ekonomi Biru Sulawesi Selatan.....	77
3.5.1 Inklusi sosial .....	77
3.5.2 Kesetaraan Gender .....	79
3.5.3 Aspek Kelembagaan dan Nilai Kearifan Lokal.....	82
BAB IV ISU-ISU STRATEGIS EKONOMI BIRU SULAWESI SELATAN.....	88

4.1	Urgensi Akselerasi Pembangunan Ekonomi Biru .....	88
4.2	Kontribusi PDRB Sektor Maritim Melalui Hilirisasi Industri.....	89
4.3	Sektor-Sektor Potensial dan yang Sedang Berkembang .....	90
4.4	Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pengembangan Ekonomi Biru .....	91
4.5	Ketersediaan Energi Listrik Sebagai Kekuatan Pendorong Ekonomi Biru .....	92
4.6	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.....	93
4.7	Peran Pangan Biru Sebagai Sumber Pangan Utama Masyarakat.....	94
4.8	Penghidupan dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Lapangan Kerja di Sektor Maritim .....	95
4.9	Kelestarian Sumberdaya Maritim dan Perairan Darat.....	96
4.10	Kontribusi dalam Mitigasi Perubahan Iklim .....	100
4.11	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) .....	101
4.11.1	Perhitungan IBEI Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.....	102
4.12	Ketimpangan antar Wilayah Pengembangan Ekonomi Biru .....	104
4.12.1	Wilayah Ekonomi Biru Teluk Bone .....	105
4.12.2	Wilayah Ekonomi Biru Selat Makassar .....	106
4.12.3	Wilayah Ekonomi Biru Laut Flores .....	107
4.12.4	Wilayah Ekonomi Biru Non-Pesisir .....	107
4.13	Sumber Daya Manusia .....	108
4.13.1	Pemanfaatan Bonus Demografi .....	108
4.13.2	Kualitas Kesehatan Penduduk .....	109
4.13.3	Kualitas dan Pemerataan Akses Pendidikan .....	109
4.13.4	Perlambatan Penurunan Tingkat Kemiskinan .....	110
4.14	Pendanaan Pengembangan Ekonomi Biru.....	111
BAB V	RENCANA INDUK PEMBANGUNAN EKONOMI BIRU SULAWESI SELATAN .....	112
5.1	Visi Pembangunan Ekonomi Biru Sulawesi Selatan 2025-2045 .....	112
5.2	Misi Pembangunan Ekonomi Biru Sulawesi Selatan 2025-2045 .....	112
5.3	Moto Pembangunan Ekonomi Biru 2025-2045 .....	113
5.4	Isu-isu Penting Pembangunan Ekonomi Biru Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan 2025-2045 .....	113
5.5	Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan.....	115
5.6	Desain Rencana Pembangunan Ekonomi Biru .....	119
5.6.1	Prioritas Kebijakan Pembangunan Ekonomi Biru Sulawesi Selatan 2025-2045.....	119

5.6.2	Tahapan Implementasi Ekonomi Biru Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan .....	120
5.6.3	Arah dan Pentahapan Pembangunan Ekonomi Biru di Tingkat Wilayah Sub-Provinsi Sulawesi Selatan .....	123
BAB VI	PETA JALAN PEMBANGUNAN EKONOMI BIRU SULAWESI SELATAN .....	129
6.1	Peta Jalan Pembangunan Ekonomi Biru Wilayah Teluk Bone .....	129
6.1.1	Isu-isu Strategis Wilayah Ekonomi Biru Teluk Bone .....	129
6.1.2	Pembangunan Ekonomi Biru Teluk Bone .....	131
6.2	Peta Jalan Pembangunan Ekonomi Biru Wilayah Selat Makassar .....	144
6.2.1	Isu-isu Strategis Wilayah Ekonomi Biru Selat Makassar.....	144
6.2.2	Pembangunan Ekonomi Biru Selat Makassar .....	145
6.3	Peta Jalan Pembangunan Ekonomi Biru Wilayah Laut Flores.....	154
6.3.1	Isu-isu Strategis Wilayah Ekonomi Biru Laut Flores .....	154
6.3.2	Pembangunan Ekonomi Biru Laut Flores .....	156
6.4	Peta Jalan Pembangunan Ekonomi Biru Wilayah Non-Pesisir.....	180
6.4.1	Isu-Isu Strategis Wilayah Ekonomi Biru Non-Pesisir .....	180
6.4.2	Pembangunan Ekonomi Biru Kawasan Non-Pesisir .....	181
BAB VII	KAIDAH PENERAPAN EKONOMI BIRU SULAWESI SELATAN .....	192
7.1	Aspek regulasi teknis .....	192
7.2	Aspek Ekonomi dan Finansial.....	193
7.2.1	Insetif .....	193
7.2.2	Pendanaan Inovatif (APBN, APBD, PPP, Sumber-sumber lain) .....	194
7.3	Aspek Kelembagaan dalam Pengembangan Ekonomi Biru.....	195
7.3.1	Kelembagaan Pemerintah .....	195
7.3.2	Kelembagaan Non-Pemerintah .....	195
7.4	Nilai Kearifan Lokal dalam Pengembangan Ekonomi Biru .....	196
7.5	Aransemen kelembagaan .....	197
7.6	Aspek tata kelola .....	201
DAFTAR PUSTAKA.....		203
LAMPIRAN .....		205

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Sulawesi Selatan merupakan kontributor penting bagi pertumbuhan ekonomi di Sulawesi dan menjadi *hub* (pusat perputaran) bagi perekonomian Kawasan Timur Indonesia. Selama 19 tahun dari 2001-2019, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan cenderung melambat dari 8,9 persen menjadi 6,9 persen. Pada tahun 2020, akibat pandemi Covid-19 ekonomi Sulawesi Selatan mengalami kontraksi hingga tercatat minus 0,7 persen. Walaupun telah mengalami peningkatan kembali seusai pandemi covid, tetapi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan masih di bawah rata-rata nasional pada periode 2022-2023. Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian yang melambat dan stagnasi sektor pengolahan menjadi faktor penting perlambatan dari sisi penawaran. Sedangkan dari sisi permintaan, menurunnya konsumsi rumah tangga dan melemahnya investasi swasta merupakan dua kontributor penting bagi perlambatan ekonomi Sulawesi Selatan. Dari dimensi spasial, struktur ekonomi Sulawesi Selatan didominasi oleh Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan perairan Selat Makassar. Kawasan ini menyumbang lebih 50,3 persen ekonomi Sulawesi Selatan dengan Kota Makassar sebagai penyumbang terbesar yakni 34,7 persen atau lebih sepertiga total PDRB. Secara keseluruhan, peran kabupaten dan kota di Selat Makassar dalam mendukung perekonomian regional sangat signifikan karena keberadaan pelabuhan utama, pusat bisnis, dan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi.

Transformasi ekonomi Sulawesi Selatan masih perlu ditingkatkan menuju sektor pengolahan yang mempunyai nilai tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal. Tahun 2023, PDRB Sulawesi Selatan masih didominasi oleh sektor industri makanan dan olahan (57,66%) dan industri barang galian bukan logam (33,76%). Kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan dari 23,6% (2010) menjadi 21,69% (2023) sementara sektor pengolahan juga turun pada periode yang sama dari 13,47% menjadi 12,85%. Dari total USD 5,0 miliar realisasi investasi asing langsung (*FDI/Foreign Direct Investment*) di Sulawesi Selatan selama 2011-2023, hampir 70% persen berada di sektor pertambangan (40,8%), industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya (10,6%), serta listrik, gas dan air (15,1%). Ekonomi Sulawesi Selatan masih bertumpu dan berorientasi pada kegiatan ekstraktif yang kurang bernilai tambah tinggi dan kurang ramah lingkungan. Dengan perkembangan ini, perencanaan perlu arah baru pertumbuhan ekonomi yang berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing, berkelanjutan, baik secara komparatif maupun kompetitif.

Arah kebijakan pembangunan nasional yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan diinspirasi oleh tren global telah menempatkan ekonomi biru sebagai salah satu arah pembangunan ekonomi di Indonesia. RPJPN 2025-2045 memuat Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Dokumen tersebut juga menegaskan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Pada konteks ini, pembangunan akan diarahkan untuk memanfaatkan sumberdaya laut dan perairan

secara umum sebagai sumber baru ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Indeks ekonomi hijau dan indeks ekonomi biru di Sulawesi Selatan di targetkan masing-masing berada pada kisaran 77,03 dan 275 di tahun 2045. Dengan demikian, sebagai salah satu provinsi yang mempunyai potensi besar ekonomi dari sumberdaya laut dan perairan umum, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu merumuskan konsep pembangunan ekonomi biru sebagai arah utama pembangunan tanpa mengabaikan sektor-sektor yang sudah ada dan sedang berkembang.

Arahan pengembangan ekonomi biru Indonesia secara nasional mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang sudah berkembang dan sektor-sektor yang berpotensi berkembang (*emerging sectors*). Pengembangan ekonomi biru di Sulawesi Selatan perlu mengidentifikasi dan mengembangkan sektor-sektor tersebut untuk mendorong transformasi ekonomi Sulawesi Selatan ke arah perekonomian yang lebih inklusif, efisien dan berdaya saing pada industri pengolahan. Hal ini diperlukan karena sebagian besar sektor nilai ekonomi biru di Sulawesi Selatan masih bergantung pada permintaan akhir sehingga menunjukkan kecenderungan penciptaan nilai tambah yang rendah.

Inklusi sosial dan *gender-sensitive* perlu menjadi muatan filosofis untuk pengembangan ekonomi biru di Sulawesi Selatan. Hal ini untuk menjamin bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam implementasi ekonomi biru. Semua pihak perlu menjadi bagian dan berperan penting dalam implementasi ekonomi biru. Implementasi ekonomi biru harus memberikan ruang yang berkeadilan bagi semua kelompok masyarakat termasuk yang sering tidak mampu memberikan pendapat (*voiceless*), kelompok rentan, kelompok perempuan, dan kelompok skala usaha kecil.

Implementasi ekonomi biru di Sulawesi Selatan harus mampu menemukan *trade off* yang optimal antara pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dengan kepentingan kelestarian lingkungan dan *inclusive*. Konsepsi ini menunjukkan bahwa semangat implementasi ekonomi biru berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sehingga berprinsip kewilayahan (*spatial*) serta bersifat antar waktu (*intertemporal*) dan antar generasi (*intergeneration*). Orientasi peningkatan nilai tambah produk dan jasa lingkungan yang dihasilkan menjadi semangat penting dalam mengembangkan ekonomi biru sehingga meningkatkan nilai ekonomi dengan minimalisasi dampak terhadap lingkungan. Titik temu kepentingan lingkungan dan ekonomi menjadi senyawa untuk penyusunan rancangan, pelaksanaan dan evaluasi penyusunan rencana induk dan peta jalan. Implementasi ekonomi biru menjadi refleksi kepentingan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan baik untuk kondisi sekarang maupun untuk masa mendatang.

Desain rencana induk ekonomi biru dan peta jalan diperlukan untuk memberikan arahan bagi penyusunan rencana aksi yang rasional, dapat dilaksanakan secara efisien dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga diperlukan data dasar yang akurat, proses pengawasan yang efektif, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Data pendukung sangat diperlukan untuk dapat mengamati dan menganalisis jalannya rencana aksi implementasi ekonomi biru di Sulawesi Selatan sesuai dengan peta jalan yang dilakukan.

Penyusunan Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Ekonomi Biru Provinsi Sulawesi Selatan ini mengacu pada naskah rancangan akhir RPJPN 2025-2045, naskah Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan 2025-2045, Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia, dan Peta Jalan Ekonomi Biru yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dokumen rencana induk dan peta jalan ini berusaha menjamin kepentingan-kepentingan di atas terakomodasi secara terstruktur, lengkap dan terhubung dengan dokumen pembangunan lainnya. Sehingga dokumen ini bukan merupakan dokumen yang terpisah, tetapi saling terkait dan menguatkan dengan dokumen perencanaan lain, baik pada tingkat nasional dan provinsi, yang diharapkan menjadi rujukan bagi implementasi pada tingkat pemerintah kabupaten, kota, dan setiap desa di Provinsi Sulawesi Selatan. Penyusunan rencana pembangunan ekonomi biru ini telah dilakukan dengan kombinasi pendekatan teknokratik, partisipatif, dan *bottom-up* (bawah atas) dan *top-down (atas bawah)* dengan memperhatikan kepentingan lokal dengan pola partisipatif seluruh pemangku kepentingan, melihat kepentingan dan konektivitas dokumen perencanaan pembangunan lainnya, dengan tidak meninggalkan panduan penyusunan dokumen pembangunan yang berlaku.

## 1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan arahan yang telah diuraikan di atas, perlu mengidentifikasi potensi ekonomi biru Sulawesi Selatan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Tujuan umum dari penyusunan dokumen ini adalah untuk mendukung penguatan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan 2025-2045 dan penyiapan arah kebijakan dan program-proram prioritas RPJMD 2025-2029. Secara khusus, tujuan penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pembangunan Ekonomi Biru Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun landasan informasi status capaian pembangunan ekonomi biru di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Merumuskan arah dan strategi pembangunan ekonomi biru secara kewilayahan dan antar waktu 2025-2045
3. Merumuskan rujukan bagi implementasi pembangunan ekonomi biru di tingkat provinsi dan kabupaten-kota 2025-2045
4. Memberikan arahan tahapan pelaksanaan pembangunan ekonomi biru di Sulawesi Selatan 2025-2045 dan prioritas program untuk RPJMD 2025-2029.

Sasaran pengguna atau lembaga yang seyogyanya dapat memanfaatkan Rencana Induk dan Peta Jalan Pembangunan Ekonomi Biru Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

1. Seluruh organisasi perangkat daerah lingkup Pemprov Sulawesi Selatan
2. Seluruh organisasi perangkat daerah kabupaten dan kota seluruh Provinsi Sulawesi Selatan
3. Semua pemangku kepentingan yang mempunyai kepentingan dan berdampak terhadap pembangunan dan pengembangan ekonomi biru di Sulawesi Selatan.

Selain pengguna di atas, dalam batas waktu yang tersedia, dokumen ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan untuk menguatkan arah kebijakan pembangunan ekonomi biru dalam menuntaskan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025- 2029.

### **1.3 Dasar Hukum**

Penyusunan Rancangan Rencana Induk dan Peta Jalan Pembangunan Ekonomi Biru Provinsi Sulawesi Selatan dilandasi pada beberapa peraturan Perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri dan peraturan daerah sebagai berikut:

1. Undang-undang no 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
3. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia
4. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025
5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
6. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 118 tahun 2023 Tentang Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) TAHUN 2023-2030
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
8. Rancangan RPJPN 2025-2045
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);

### **1.4 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pembangunan Ekonomi Biru Provinsi Sulawesi Selatan yang disusun adalah sebagai berikut:

1. Perspektif ekonomi biru di tingkat nasional maupun di tingkat Sulawesi Selatan
2. Potensi ekonomi biru di Sulawesi Selatan

3. Isu strategis ekonomi biru di Sulawesi Selatan
4. Rencana pembangunan ekonomi biru di Sulawesi Selatan
5. Arah kebijakan pembangunan ekonomi biru di Sulawesi Selatan

## 1.5 Pendekatan, Metodologi, dan Kerangka Logis

Pengembangan dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Penerapan Pembangunan Ekonomi Biru Provinsi Sulawesi Selatan dikembangkan oleh Tim Gabungan BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan Tim Ahli Universitas Hassanuddin Makassar dan Tim Konsorsium YSKI-IPB University. Materi dibangun melalui berbagai tahapan lokakarya multipihak yang diikuti oleh wakil-wakil dari BAPPEDA dan Dinas Kelautan dan Perikanan dari seluruh Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan, wakil-wakil OPD terkait di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, wakil-wakil akademisi, wakil-wakil kelompok pengusaha, wakil-wakil organisasi masyarakat sipil dan tokoh-tokoh masyarakat yang terkait dengan isu-isu kemaritiman.

Secara singkat beberapa pendekatan yang digunakan dalam keseluruhan proses ini adalah sebagai berikut:

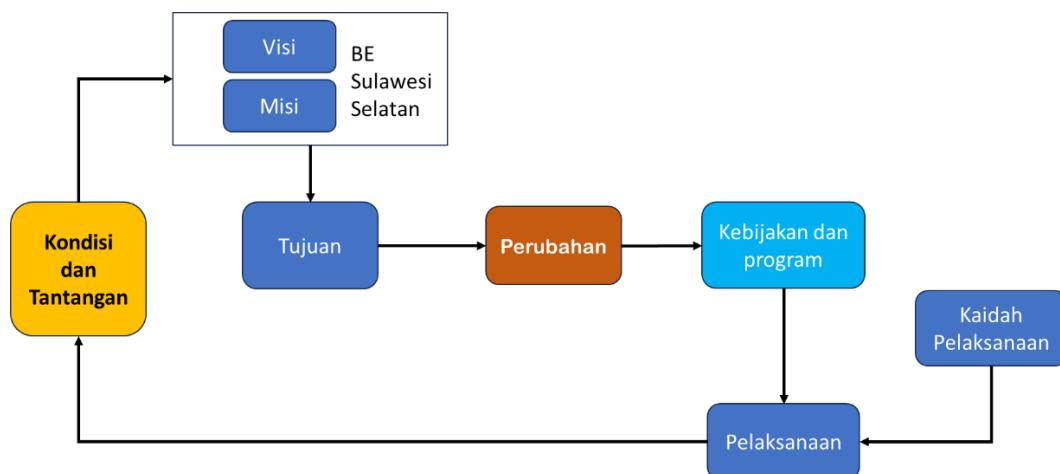
- Analisis kritis dalam studi latar belakang tentang situasi terkini, *trend* dan *outlook* pembangunan ekonomi secara umum, perkembangan ekonomi biru, sumber-daya perairan, dan aspek sosial budaya.
- Lokakarya pendahuluan ekonomi biru dengan menggunakan *system thinking* dalam perangkat *sprint method*.
- Lokakarya perencanaan skenario yang difasilitasi untuk memperdalam pemahaman *system thinking* untuk pengembangan ekonomi biru, dilanjutkan sampai ke tahap pengembangan program.

Penyusunan rencana induk dan peta jalan pembangunan ekonomi biru di Sulawesi Selatan dilakukan berdasarkan pada kerangka logis hubungan kausal seperti dalam gambar 1.1 di bawah ini.

Visi dari ekonomi biru adalah gambaran situasi yang ingin diwujudkan pada tahun 2045 sesuai kerangka waktu dokumen rencana induk ini. Sedangkan misi adalah capaian-capaiyan yang ingin diselesaikan dalam rentang waktu tersebut untuk mewujudkan visi atau cita-cita pada tahun 2045. Misi ini secara spesifik menggambarkan kebutuhan kebijakan dan program aksi untuk mengarahkan proses pembangunan ekonomi di Sulawesi Selatan sehingga cita-cita kondisi ekonomi biru tercapai pada tahun 2045. Visi dan misi mengarahkan tujuan dari pembangunan ekonomi biru di Sulawesi Selatan.

Cita-cita pembangunan dan kondisi yang diinginkan didasarkan pada kondisi sekarang ini dari kinerja sektor ekonomi biru di Sulawesi Selatan dan tantangannya. Tantangan tersebut menjadi isu dan masalah strategis yang harus diselesaikan dan memerlukan perubahan yang diinginkan dalam perjalanan menuju tahun 2045. Perubahan yang diinginkan tersebut mensyaratkan adanya kebijakan dan program yang diperlukan untuk mewujudkan visi dan menyelesaikan misi pembangunan ekonomi. Implementasi kebijakan dan program memerlukan beberapa kaidah pembangunan untuk menjamin proses tersebut dapat berjalan dengan baik dan akuntabel.

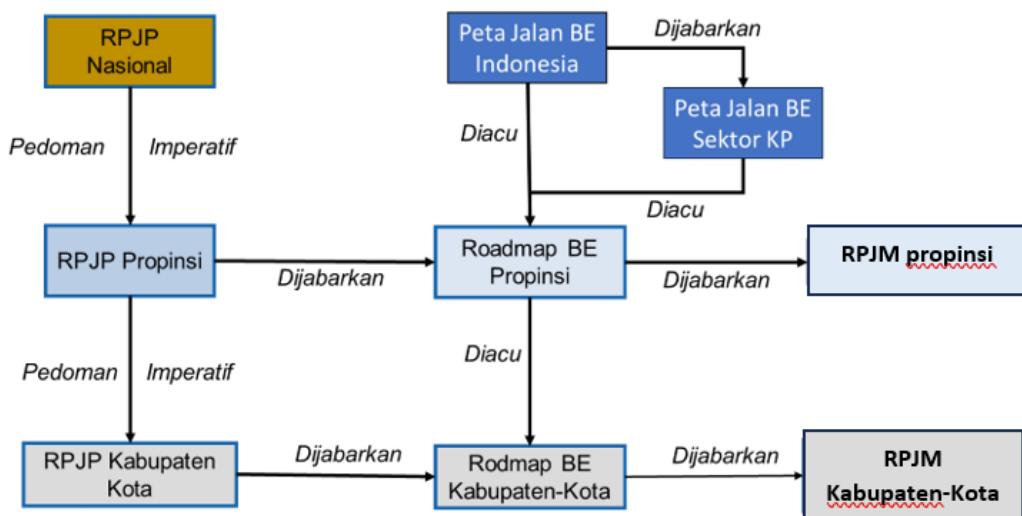
**Gambar 1. 1**  
**Kerangka Logis Rencana Induk dan Peta Jalan**  
**Ekonomi Biru Sulawesi Selatan**



Sumber: Tim Penyusun Ekonomi Biru Sulawesi Selatan.

Ekonomi biru telah menjadi bagian dari desain transformasi ekonomi dalam RPJP Nasional yang menjadi acuan dan imperatif bagi RPJPD Sulawesi Selatan yang secara hirarkis juga berlaku bagi RPJPD Kabupaten-Kota di Sulawesi Selatan. Secara hirarkis, posisi Rencana Induk dan Peta Jalan BE Sulawesi Selatan dapat dilihat dalam Gambar 1.2 berikut.

**Gambar 1. 2**  
**Hirarki Rencana Induk dan Peta Jalan Ekonomi Biru**  
**dalam Rencana Pembangunan**



Sumber: Tim Penyusun Ekonomi Biru Sulawesi Selatan.

Desain pembangunan ekonomi biru Sulawesi Selatan mengacu pada konsep transformasi ekonomi sesuai arahan RPJPN 2025=2045 dan dokumen Kerangka

Transformasi Ekonomi Biru yang dikeluarkan BAPPENAS. Transformasi berarti perubahan yang signifikan. Inisiatif ekonomi biru sebagai sarana transformasi ekonomi berarti menjadikan ekonomi biru sebagai motor penggerak perubahan struktur ekonomi melalui prioritisasi program dan investasi yang berbeda dengan pola sebelumnya. Agar transformasi dapat terjadi, secara khusus diperlukan *mindset* atau kerangka pikir dan pendekatan yang berbeda yang dapat mendorong perubahan-perubahan secara konkret di lapangan. Akan diperlukan juga penyesuaian dalam regulasi-regulasi terkait kerangka perencanaan pembangunan dan batasan-batasan nomenklatur program untuk dapat keluar dari jebakan ‘jalan yang sama hanya akan mengantarkan kita pada masa depan yang sama’. Transformasi untuk hasil yang berbeda secara signifikan hanya akan dicapai melalui pendekatan sistem perencanaan yang berbeda dari yang berlaku sebelumnya.

## BAB II EKONOMI BIRU (*BLUE ECONOMY*)

### 2.1 Definisi dan Urgensi Ekonomi Biru

Ekonomi biru adalah konsep pengembangan ekonomi dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut yang inklusif dan berkelanjutan (*Indonesia Blue Economy Roadmap*, 2017). Konsep ekonomi biru mendorong pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan lestari dengan tujuan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mata pencarian masyarakat luas dan lapangan pekerjaan serta kesehatan ekosistem laut.

Pada konteks paradigma keberlanjutan (*sustainability paradigm*), terminologi “Ekonomi Biru” pertama kali digagas oleh Prof. Gunter Pauli melalui bukunya *The Blue Economy: 10 Years-100 Innovations-100 Million Jobs*. Pendekatan pembangunan dengan model ekonomi biru akan bersinergi dengan pelaksanaan program *pro-poor* (pengentasan kemiskinan), *pro-job* (penyerapan tenaga kerja) dan *pro-environment* (melestarikan lingkungan).

Sementara itu, definisi lain dari ekonomi biru digagas oleh Bank Dunia dan sebuah kelompok kecil di PBB terkait dengan peluang lokomotif baru pembangunan yang bersumber dari jasa ekosistem laut (World Bank, 2017). Sebagai sebuah penekanan terhadap pentingnya ekosistem laut dalam pembangunan ekonomi, World Bank (2017) menggunakan terminologi ekonomi biru sebagai: “*a comprehensive concept to seek and promote economic growth, social inclusion, and the preservation or improvement of livelihoods while at the same time ensuring environmental sustainability of the oceans and coastal areas*”. Dalam konteks ini ekonomi biru menempatkan strategi “*decoupling*” antara pembangunan sosial ekonomi yang berbasis pada sektor-sektor yang terkait dengan laut dengan kerusakan ekosistem laut.

Adrianto, et.al (2019) mengintegrasikan kerangka paradigma keberlanjutan pembangunan (*sustainable development*) dengan konsep pembangunan ekonomi berbasis ekosistem laut dengan mendefinisikan ekonomi biru (*blue economy*) sebagai sistem ekonomi berbasis pemanfaatan berkelanjutan jasa ekosistem laut untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Berikut definisi ekonomi biru pada beberapa organisasi yang mengarah kepada konsep yang sama, seperti:

1. Menurut Komisi Eropa, ekonomi biru adalah semua kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan lautan, laut dan pantai. Ini mencakup berbagai sektor yang saling terkait, baik yang sudah mapan maupun yang baru berkembang.
2. Menurut PBB, ekonomi biru adalah sebuah konsep yang muncul untuk mendorong pengelolaan yang lebih baik atas sumber daya laut “biru”.

3. Menurut *Conservation International*, ekonomi biru mencakup manfaat ekonomi yang mungkin tidak dipasarkan, seperti penyimpanan karbon, perlindungan pantai, nilai budaya dan keanekaragaman hayati.
4. Menurut *Center for Blue Economy*, ekonomi biru adalah sebuah istilah yang sekarang banyak digunakan di seluruh dunia dengan tiga makna yang terkait tetapi berbeda, yakni kontribusi keseluruhan lautan terhadap perekonomian, perlunya mengatasi keberlanjutan lingkungan dan ekologis lautan, dan perekonomian laut sebagai peluang pertumbuhan bagi negara-negara maju dan berkembang.
5. Menurut perwakilan PBB baru-baru ini, ekonomi biru adalah sebuah perekonomian yang terdiri dari berbagai sektor ekonomi dan kebijakan terkait yang bersama-sama menentukan apakah penggunaan sumberdaya laut itu berkelanjutan. Tantangan utama dari ekonomi biru adalah memahami dan mengelola lebih baik berbagai aspek keberlanjutan lautan, mulai dari perikanan berkelanjutan hingga kesehatan ekosistem hingga mencegah pencemaran. Tantangan kedua, pengelolaan berkelanjutan sumber daya laut akan memerlukan kolaborasi lintas batas dan sektor melalui berbagai kemitraan, dan pada skala yang belum pernah dicapai sebelumnya.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara nusantara (negara kepulauan) yang hampir seluruh batas negaranya adalah laut, maka semua ekosistem alami di dalam wilayah Indonesia, termasuk ekosistem perairan darat, berada di dalam lingkup konsep negara kepulauan tersebut. Dengan demikian, dalam konteks ekosistem alami Indonesia, berbagai perspektif di atas dapat dirangkum sebagai berikut: ***ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan adalah sistem pengelolaan sumber daya akuatik di laut dan darat yang mempengaruhi nilai, keberlanjutan fungsi alami, dan distribusi manfaatnya.*** Definisi ini sejalan dengan yang tercantum dalam Undang-undang no 32 Tahun 2014 tentang Laut, yaitu: ***ekonomi biru merupakan pendekatan untuk meningkatkan pengelolaan kelautan yang berkelanjutan dan konservasi sumber daya laut dan pesisir dan ekosistemnya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan melibatkan masyarakat, efisiensi sumber daya, meminimalkan limbah, dan pelipatgandaan pendapatan.***

## 2.2 Pokok-pokok Kebijakan Transformasi Ekonomi Biru Tingkat Nasional

Dalam “Seminar Penjaringan Masukan Visi RPJPN 2025 – 2045: Negara Maritim yang Berdaulat, Maju dan Berkedauletan”, tanggal 20 Maret 2023 Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi menekankan bahwa visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara maritim harus menjadi *role model* (pusat

rujukan) dan pusat peradaban baru. Untuk mencapai visi tersebut, maka integrasi ruang darat dan laut mutlak diperlukan dalam setiap rancangan pembangunan nasional, baik dalam jangka pendek (RKP), menengah (RPJMN), maupun panjang (RPJPN) dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. Program dan kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi saja, namun juga dituntut untuk tetap memperhatikan prinsip-prinsip inklusifitas, holistik, inovatif, dan berkelanjutan seiring dengan tren pembangunan di berbagai negara di seluruh dunia yang berpedoman pada Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). SDGs merupakan hasil kesepakatan bersama atas inisiasi Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) yang disahkan pada 25 September 2015 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai kesepakatan pembangunan global. Dengan mengacu pada konsep negara maritim, visi pembangunan Indonesia dinyatakan dalam RPJPN 2025-2045 sebagai berikut: **“Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”**.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) yang sudah diadopsi di Indonesia dengan Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Laut; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) agar lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak

asasi manusia, serta inklusif dengan pelibatan Organisasi masyarakat sipil, media, Filantropi, Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar<sup>1</sup>.

Pemerintah Indonesia telah membangun pondasi dan peta jalan untuk mewujudkan Visi 2045 sebagai negara nusantara yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Sebagai wujud komitmen, *political will*, dan *positioning*, berbagai ide, strategi dan inisiatif yang didasarkan oleh prinsip-prinsip ekonomi biru (*blue economy*) dan TPB telah disosialisasikan di forum nasional dan internasional untuk mendukung dan mencapai visi tersebut. Namun, di era *Anthropocene* dengan karakteristik perubahan yang cepat, banyak kejutan (*surprising*), keterkaitan, dan ketidakpastian (*uncertainty*) baik di tingkat global, regional, nasional dan lokal, menjadi sebuah keniscayaan bahwa pondasi dan peta jalan tersebut seyogyanya terus diperkuat, dipertajam, beradaptasi, dan berinovasi sehingga sesuai dengan perubahan lingkungan dan harapan yang ada.

Saat ini sudah disusun beberapa dokumen yang mengarahkan perencanaan pembangunan Indonesia menuju 2045. Pemerintah Pusat melalui BAPPENAS sudah menerbitkan Peta Jalan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia 2025-2045 sebagai tindak lanjut dari penerjemahan Visi Indonesia Emas 2045, *Blue Economy Development Framework for Indonesia's Economic Transformation*, Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, dan Peta Jalan Ekonomi Biru Nasional yang mencakup arahan dan strategi besar untuk memandu pengembangan ekonomi kemaritiman yang terdiversifikasi dan berkelanjutan, serta berbasis pada kesehatan dan ketahanan ekosistem kelautan dan manfaat bagi generasi sekarang dan di masa yang akan datang. Arahan dan strategi tersebut diharapkan memberi payung kebijakan lintas sektor untuk menjadikan ekonomi biru sebagai salah satu penggerak produktivitas dalam rangka mempercepat transformasi ekonomi Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia juga akan menjadi rujukan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, dan RPJMN berikutnya sampai tahun 2045.

Ekonomi biru merupakan komponen penting dalam transformasi perekonomian Indonesia menuju Visi 2045, termasuk keluar dari jebakan pendapatan menengah sebelum tahun 2045. Ini akan membantu memastikan Indonesia memenuhi komitmen nasional dan internasional, serta mengoptimalkan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi, sejalan dengan Undang-undang No 32 Tahun 2014 tentang Laut, Pasal 14 paragraf 1 yang

---

<sup>1</sup> Sumber: <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>

menegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan Pengelolaan Kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya laut dengan menerapkan prinsip ekonomi biru.

Kerangka pembangunan Ekonomi Biru (*Blue Economy*) dijabarkan dalam amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, khususnya dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat maju dan tangguh melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan<sup>2</sup>. Peta Jalan Ekonomi Biru terdiri dari lima bagian: (1) Pengantar yang mendefinisikan ekonomi biru di Indonesia dan memberikan gambaran kebijakan serta kondisi saat ini, (2) Benchmarking yang menunjukkan upaya pengembangan ekonomi biru di Indonesia dan negara lain, (3) Peta Jalan yang menguraikan visi, misi, hasil, indikator, dan sektor prioritas, (4) Rencana Aksi Strategis yang merinci tindakan spesifik dengan otoritas, sumber daya, dan jangka waktu, dan (5) Mekanisme pendukung yang memandu struktur kelembagaan dan platform pendukung di tingkat nasional dan regional untuk pengembangan ekonomi biru.

Indonesia memiliki instrumen kebijakan utama yang menjadi dasar implementasi Peta Jalan Ekonomi Biru, antara lain:

1. Kebijakan Kelautan Indonesia 2017 dengan 6 prinsip dasar (Wawasan nusantara; Pembangunan berkelanjutan; Ekonomi biru; Pengelolaan yang terintegrasi dan transparan; Partisipasi; Kesetaraan dan pemerataan);
2. Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Indonesia;
3. Visi Indonesia 2045 dan target pertumbuhan ekonomi maritim 2045 mencapai 12.5% dari PDB;
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
5. ASEAN Leaders' Declaration on The Blue Economy 2021 dengan 3 pilar Asean Community (*Political, Economic & Socio-Culture*);
6. *Blue Economy Development Framework for Indonesia's Economic Transformation*;
7. Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025;
8. Rencana nasional untuk GHG/NDC terkait perubahan iklim<sup>3</sup>;
9. Indonesia Blue Economy Roadmap Bappenas, dan
10. Roadmap Blue Ekonomi KKP

---

<sup>2</sup> Sebelumnya, dengan mengacu pada TPB, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia (RPJMN) 2020-2024 menekankan pentingnya pengelolaan kelautan dengan baik untuk mencapai agenda pembangunan berkelanjutan.

<sup>3</sup> Ketika dokumen ini dibuat, besar kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam NDC Indonesia, belum ditetapkan pemerintah meskipun diyakini cukup signifikan.

Prinsip-prinsip utama pengembangan rencana implementasi ekonomi biru Sulawesi Selatan mengacu pada arahan nasional dalam dokumen pedoman penyusunan RPJPD 2025-2045.

Kinerja pengembangan ekonomi biru perlu diukur dan dievaluasi secara periodik. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) merupakan indikator yang dikembangkan untuk memahami kondisi ekonomi biru saat ini dan perkembangannya di tingkat nasional dan regional. Saat ini, IBEI dihitung di tingkat provinsi dan dirata-ratakan untuk mendapatkan angka nasional. Secara umum, perhitungan IBEI memiliki tujuan sebagai berikut (Bappenas, 2023):

1. IBEI berfungsi sebagai instrumen untuk memantau kinerja sektor-sektor ekonomi biru sebagai aset untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia menuju visi Indonesia 2045.
2. IBEI dibangun berdasarkan indikator terpilih, yang dapat menyoroti kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan di tingkat nasional dan regional yang terkait dengan sektor-sektor ekonomi biru.
3. IBEI mendorong koordinasi yang lebih baik antar lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang terlibat dalam sektor-sektor ekonomi biru, seperti pariwisata, perikanan, dan transportasi.
4. IBEI juga dapat memberikan informasi tentang provinsi dan kabupaten/kota mana yang perlu difokuskan untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan atau target kebijakan lainnya dalam pengembangan ekonomi biru.

Perhitungan IBEI dibangun di atas tiga pilar yang menjadi komponen utama pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Adapun cakupan masing-masing pilar sebagai berikut:

1. Pilar Ekonomi mencakup kontribusi sektor laut (perikanan tangkap dan budidaya, perdagangan, transportasi dan logistik, manufaktur berbasis kelautan, dan pariwisata berbasis laut) terhadap perekonomian
2. Pilar Lingkungan mencakup kualitas ekosistem pesisir dan laut yang menjadi proksi untuk ekonomi kelautan yang berkelanjutan. Lingkungan yang terjaga dengan baik akan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan. Di dalam pilar ini juga termasuk kualitas sumber daya laut dan konservasi serta energi terbarukan.
3. Pilar Sosial menekankan pada inklusivitas dari pengembangan ekonomi biru. Pilar ini mengukur bagaimana sektor laut dapat mendukung penciptaan kesejahteraan bagi rakyat, yang mencakup kehidupan yang lebih baik (tanpa kelaparan) dan kualitas hidup yang lebih tinggi (layanan pendidikan dan kesehatan).

## BAB III EKONOMI BIRU DALAM PERSPEKTIF RPJPD SULAWESI SELATAN 2025-2025

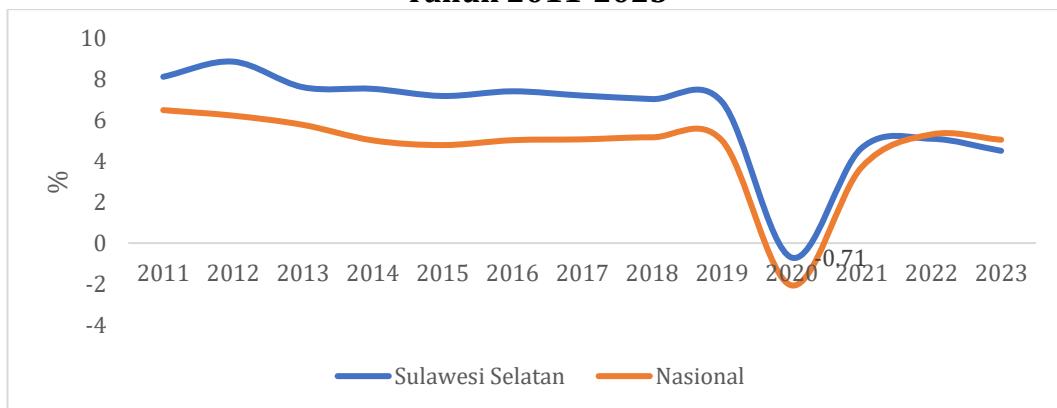
### 3.1 Perkembangan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan

#### 3.1.1 Capaian Pembangunan Ekonomi Sulawesi Selatan

Selama hampir dua dekade terakhir melalui pelaksanaan RPJPD 2008-2028, Sulawesi Selatan telah mencapai kemajuan yang berarti dalam berbagai bidang pembangunan termasuk ekonomi. Di tengah dinamika domestik maupun global, ekonomi Sulawesi Selatan tumbuh di atas rata-rata nasional dan berkontribusi lebih 30 persen terhadap perekonomian Sulampua (Sulawesi, Maluku dan Papua). Selain itu, kontribusi Sulawesi Selatan terhadap ekonomi nasional meningkat dari 1,7 persen pada tahun 2008 menjadi 3,1 persen di tahun 2023. Pendapatan per kapita meningkat hampir tiga kali lipat dari Rp24,3 juta pada tahun 2011 hingga mencapai Rp 69,7 juta pada tahun 2023.

Sejak tahun 2012 hingga 2019 (sebelum pandemi Covid-19) kinerja pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan cenderung melambat dari 8,9 persen menjadi 6,9 persen. Pada tahun 2020, akibat pandemi Covid-19 ekonomi Sulawesi Selatan mengalami kontraksi hingga tercatat minus 0,7 persen. Hingga pada tahun 2022, untuk pertama kalinya dalam dua dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan berada di bawah capaian Nasional dan kondisi ini berlanjut hingga tahun 2023.

**Gambar 3.1  
Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dan Nasional  
Tahun 2011-2023**

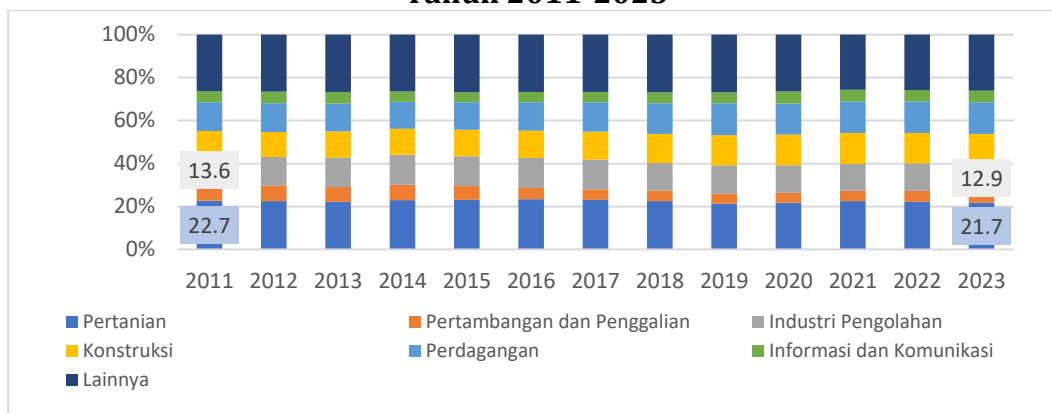


*Sumber: BPS, diolah*

Dari sisi produksi, melambatnya ekonomi Sulawesi Selatan terjadi terutama akibat turunnya kinerja pertanian dan stagnasi industri pengolahan. Kedua sektor ini menyumbang lebih dari sepertiga PDRB Sulawesi Selatan. Pertanian berkontribusi sekitar 22,7 persen pada tahun 2011, turun 1 persen menjadi 21,7 persen di tahun 2023. Pada tahun 2011, sektor industri

mencatatkan kontribusi 13,6 persen dari PDRB, lalu turun menjadi 12,9 persen di tahun 2023. Gambar 3.2 menunjukkan hampir tidak terjadi perubahan struktur perekonomian Sulawesi Selatan selama satu dekade terakhir. Karena itu pemerintah Sulawesi Selatan perlu mendorong pertumbuhan melalui industri pengolahan.

**Gambar 3.2**  
**Kontribusi PDRB Menurut Sektor-sektor Utama di Sulawesi Selatan**  
**Tahun 2011-2023**



Sumber: BPS, diolah

Inovasi yang rendah dan investasi dalam bidang yang tidak bernilai tambah tinggi menjadi pemicu stagnasi industri manufaktur dan rendahnya diversifikasi produk ekspor. Struktur industri manufaktur terutama terdiri dari industri yakni makanan dan minuman serta barang galian bukan logam (tidak terjadi diversifikasi industri). Ekspor masih didominasi oleh produk manufaktur sederhana dan komoditas (*raw materials*), terutama perikanan (lihat Gambar 3.3). Sulawesi Selatan masih tertinggal dalam menghasilkan produk yang lebih kompleks dengan menggunakan teknologi yang lebih maju (lihat Gambar 3.3). Dalam satu dekade terakhir ini, hanya sedikit diversifikasi ekspor.

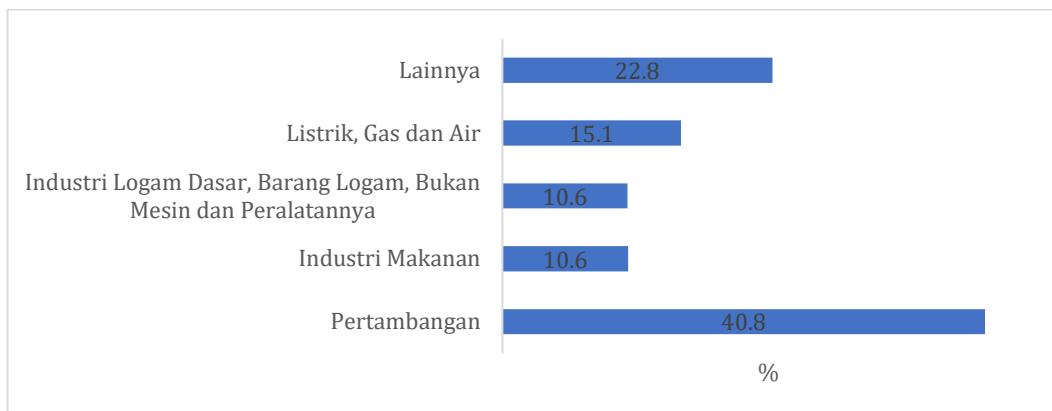
**Gambar 3.3**  
**Komposisi Ekspor Sulawesi Selatan Menurut Komoditas**  
**Tahun 2013 dan 2023**



Sumber: BPS, diolah

Struktur PDRB dari sisi permintaan masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga. Melambatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan melemahnya investasi swasta menjadi penyebab perlambatan ekonomi Sulawesi Selatan. Kedua pengeluaran ini berperan lebih dari 90 persen terhadap total PDRB Sulawesi Selatan. Selama tahun 2013-2023, porsi konsumsi rumah tangga terhadap PDRB terus menurun dari 57,3 persen menjadi 53,6 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh melambatnya daya beli masyarakat di tengah harga komoditas yang cenderung kurang stabil. Kinerja pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebagai cerminan investasi juga menunjukkan penurunan berarti dalam satu dekade terakhir. Pertumbuhan PMTB tertinggi terjadi pada tahun 2012 dengan mencapai 15,7 persen, lalu kemudian terus melambat menjadi 4,61 persen pada tahun 2023. Selain itu, sebagian besar investasi tidak dialokasikan pada sektor produktif dan cenderung meningkatkan kerusakan lingkungan serta mengganggu kelangsungan hidup masyarakat sekitar. Dari total USD 5,0 miliar realisasi FDI di Sulawesi Selatan selama 2011-2023, hampir separuhnya dialokasikan untuk sektor pertambangan dan berorientasi pada kegiatan ekstraktif yang tidak bernilai tambah tinggi dan tidak ramah lingkungan.

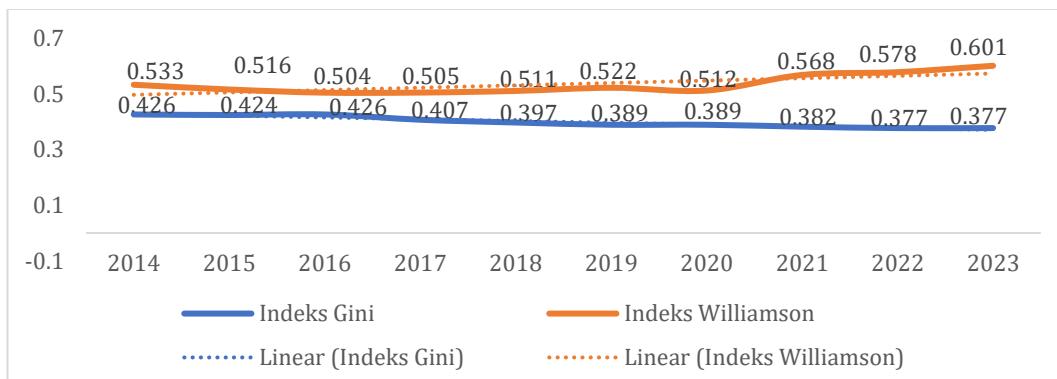
**Gambar 3. 4**  
**Porsi Realisasi FDI Sulawesi Selatan Menurut Sektor Tahun 2011-2023**



*Sumber: BPS, diolah.*

Upaya pemerataan pembangunan dalam satu dekade terakhir berhasil menurunkan ketimpangan pendapatan antar kelompok, namun belum optimal dalam menurunkan ketimpangan antar wilayah. Indeks Gini<sup>4</sup> Sulawesi Selatan semakin turun namun untuk ketimpangan wilayah semakin meningkat yang ditunjukkan oleh indeks Williamson terus bergerak naik, terutama pasca pandemi Covid-19 (Gambar 3.5).

**Gambar 3. 5**  
**Indeks Gini dan Indeks Williamson Sulawesi Selatan Tahun 2014-2023**



*Sumber: BPS, diolah*

Dari dimensi spasial, struktur ekonomi Sulawesi Selatan didominasi oleh Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan perairan Selat Makassar.

---

<sup>4</sup> Indeks Gini atau Gini Ratio adalah ukuran ketimpangan pendapatan antar kelompok penerima pendapatan rendah dengan kelompok pendapatan berpenghasilan tinggi dalam masyarakat. Indeks Gini dinyatakan dalam skala 0 (sangat merata) sampai dengan 1 (sangat timpang). Penurunan Indeks Gini menunjukkan kecenderungan perbaikan pemerataan pendapatan, kenaikan Indeks menunjukkan memburuknya ketimpangan pendapatan. Indeks Williamson memiliki perspektif yang sama namun digunakan untuk mengukur ketimpangan kesejahteraan/pendapatan antar daerah.

Kawasan ini menyumbang lebih dari 50,3 persen perekonomian Sulawesi Selatan dengan Kota Makassar sebagai penyumbang terbesar yakni 34,7 persen atau lebih sepertiga total PDRB. Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan perairan Laut Flores seperti, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, dan Kepulauan Selayar menyumbang 9,8 persen dari total PDRB. Kemudian daerah yang berbatasan dengan perairan Teluk Bone seperti Sinjai, Bone, Wajo, Luwu, Palopo, Luwu Utara dan Luwu Timur berperan terhadap pembentukan PDRB Sulawesi Selatan sebesar 25,5 persen. Sisanya 14,7 persen disumbang oleh kawasan yang tidak berbatasan langsung perairan laut seperti Gowa, Sidenreng Rappang, Soppeng, Enrekang, Tana Toraja dan Toraja Utara.

Ketimpangan struktur ekonomi antar daerah di Sulawesi Selatan turut berpengaruh terhadap timpangnya pendapatan antar wilayah. Pada tahun 2023, pendapatan per kapita tertinggi di Sulawesi Selatan yakni Kota Makassar sebesar Rp155,9 juta. Angka ini lebih dari dua kali lipat dari pendapatan per kapita Sulawesi Selatan dan lima kali lebih besar dari Jeneponto (Rp29,3 juta). Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi percepatan laju pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan belum disertai dengan perbaikan distribusi pendapatan antar wilayah.

### **3.1.2 Outlook Pembangunan Ekonomi Sulawesi Selatan Menuju 2045**

Selama dua puluh tahun ke depan, pembangunan ekonomi Sulawesi Selatan menuntut dilakukannya transformasi ekonomi di tengah perubahan besar yang akan dihadapi. Perubahan tersebut antara lain diprediksi mencakup perubahan iklim, bonus demografi, perubahan geopolitik dan digitalisasi. Transformasi ekonomi juga menjadi agenda Sulawesi Selatan yang merupakan kunci untuk mewujudkan Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (*Middle Income Trap* atau MIT). Untuk keluar dari jebakan tersebut, ekonomi Indonesia mesti tumbuh rata-rata 6,0 - 7,0 persen per tahun dengan target pendapatan per kapita mencapai 30.300 dollar AS (Rp 453 juta) pada tahun 2045 mendatang. Sementara itu, Sulawesi Selatan di targetkan pendapatan per kapita pada tahun 2045 antara Rp422,16 juta - Rp499,92 juta dengan kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB mencapai 18,62% - 19,92%. Indeks. Pencapaian pendapatan per kapita Sulawesi Selatan di tahun 2045 mendatang juga didorong oleh peningkatan daya saing daerah dan perbaikan kualitas manusia. Untuk mencapai tingkat pendapatan per kapita senilai Rp 422,2 juta, secara rata-rata diharapkan mengalami pertumbuhan sebesar 8,7% per tahun. Pada tahun 2045, Sulawesi Selatan ditargetkan memiliki indeks daya saing daerah sebesar 4,0, sedangkan indeks modal manusia sebesar 0,73.

**Tabel 3. 1**  
**Sasaran Utama Pencapaian Visi RPJPD Sulawesi Selatan 2025-2045**

No	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1.	Meningkatnya pendapatan/kapita	PDRB/kapita (Rp. Juta)	78,98 – 79,06	422 – 497
		Indeks Ekonomi Hijau	67,8	77,03
		Indeks Ekonomi Biru Indonesia	80,86	733,23
		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	12,51 – 12,58	18,62 – 19,92
2.	Berkurangnya kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat kemiskinan (%)	5,90 – 6,40	0,19 – 0,44
		Rasio Gini (Indeks)	0,371 – 0,376	0,309 – 0,332
		Kontribusi PDRB Provinsi (%)	3,25	3,23
3.	Meningkatnya daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,45	4,00
4.	Meningkatnya daya saing sumberdaya manusia	Indeks modal manusia	0,57	0,73
5.	Berkurangnya intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	Penurunan Intensitas emisi GRK (%)	37,00	89,74

*Sumber: Rancangan Akhir RPJPD Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045*

Transformasi ekonomi Sulawesi Selatan secara bertahap akan mengubah struktur ekonomi dari yang berbasis komoditas atau ekstraksi dan yang bernilai tambah rendah, menjadi berbasis pada industri yang bernilai tambah tinggi melalui dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, serta peran teknologi dan inovasi. Dalam mencapai hal tersebut, dilakukan hilirisasi komoditas unggulan, revitalisasi komoditas yang pernah berjaya, penguatan struktur industri (diversifikasi industri), peningkatan kapasitas riset dan inovasi, pengembangan ekonomi kreatif, penguatan integrasi ekonomi domestik dan global, peningkatan produktivitas tenaga kerja, kewirausahaan,

UMKM dan koperasi, serta penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, implementasi ekonomi biru dan ekonomi hijau akan menjadi penguat perekonomian Sulawesi Selatan masa depan. Ekonomi biru dan ekonomi hijau menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang menciptakan nilai tambah tinggi, inklusif dan berkelanjutan. Harapannya, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan di masa mendatang dapat memastikan keberlangsungan sumber daya alam di nikmati antar dan intra-generasi.

### **3.1.3 Perkembangan Ekonomi Biru di Sulawesi Selatan**

#### **3.1.3.1 Capaian Ekonomi Biru Sulawesi Selatan Dalam IBEI**

Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan perhitungan terhadap IBEI provinsi dan rata-rata nasional. Semakin tinggi Nilai IBEI menunjukkan kinerja yang semakin baik. Skor IBEI di tingkat nasional adalah 43,98 pada tahun 2023, naik dari posisi tahun 2022 sebesar 41,28. Jika dilihat per pilar, nilai indeks untuk pilar sosial adalah 53,21, pilar lingkungan sebesar 28,94, dan pilar ekonomi sebesar 20,15. Hal ini menunjukkan masih terjadinya ketimpangan indeks yang cukup signifikan antar pilar IBEI. Lebih lanjut, rendahnya indeks pilar ekonomi mengindikasikan belum optimalnya penciptaan nilai tambah dari pengelolaan sumber daya perairan. Begitupun dengan rendahnya indeks pilar lingkungan menunjukkan pengelolaan ekonomi biru yang belum ramah terhadap keberlanjutan lingkungan dan ekosistem perairan. Adapun kontribusi tinggi dari indeks pilar sosial berasal dari tingginya kinerja sub-pilar kesehatan, terutama konsumsi protein dan ikan.

Secara regional, Provinsi Sulawesi Selatan berada di posisi tertinggi dengan nilai IBEI sebesar 80,86 pada tahun 2023, disusul oleh Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan skor IBEI masing-masing sebesar 71,63 dan 68,50. Berdasarkan pilar, capaian IBEI Provinsi Sulawesi Selatan secara signifikan lebih tinggi pada pilar sosial, yaitu sebesar 85,5, sedangkan pilar ekonomi dan lingkungan masing-masing hanya sebesar 52,0 dan 50,2. Selain menunjukkan ketimpangan antar pilar, kondisi ini juga menandakan relatif belum optimalnya pemanfaatan sumber daya perairan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Sementara itu, kinerja aspek lingkungan yang relatif rendah juga menunjukkan bahwa masih rendahnya integritas lingkungan dan ekosistem perairan di Provinsi Sulawesi Selatan. Jika dibandingkan dengan Jawa Timur, indeks pilar ekonomi mencapai 74,3 merupakan yang tertinggi di Indonesia, terutama karena ditopang oleh sub-pilar manufaktur berbasis kelautan. Artinya, hilirisasi produk perikanan dan kelautan di Provinsi Sulawesi Selatan masih relatif tertinggal dibanding Provinsi Jawa Timur.

Perlu diperhatikan bahwa IBEI yang dipublikasikan oleh BAPPENAS, saat ini belum memasukkan aspek ekonomi biru dari kawasan ekosistem perairan darat sehingga masih memerlukan penyempurnaan. Dalam konteks negara Nusantara, ekonomi biru mencakup nilai yang berasal dari seluruh ekosistem akuatik, baik ekosistem perairan daratan maupun lautan.

### 3.1.3.2 Sektor-sektor Ekonomi Biru

Ekonomi biru mencakup sektor ekonomi baik berbasis sumberdaya perairan laut maupun sumberdaya perairan daratan, baik pada sektor/kegiatan yang sudah berkembang (*established*) maupun yang berpotensi berkembang (*emerging*). Mengacu pada dokumen Transformasi Ekonomi Biru yang dikeluarkan BAPPENAS dan Peta Jalan Ekonomi Biru yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, secara struktural, ekonomi biru dapat dikelompokkan menjadi Sektor Prioritas Kelautan dan Perikanan, Sektor Non Kelautan dan Perikanan dan Sektor Potensial. Struktur sektor ekonomi biru di Sulawesi Selatan dapat dilihat dalam Tabel berikut.

**Tabel 3. 2**  
**Struktur Sektor Ekonomi Biru di Sulawesi Selatan**

Sektor	Sub Sektor	Keterangan
Prioritas Kelautan dan Perikanan	Perikanan Tangkap dan Budidaya	Perikanan tangkap laut, perairan darat, budidaya laut, payau dan darat
	Industri Makanan dan Minuman Input Perikanan	Pengolahan rumput laut
	Industri Biotek Perikanan	Farmasi, Kosmetik
	Industri Sampah Laut	Pengolahan ALDFG ( <i>Abandoned, Lost, Discarded Fishing Gear</i> )
	Jasa Wisata Tirta	Wisata bahari, wisata danau, wisata sungai
Non Kelautan dan Perikanan	Industri Alat Angkut	Galangan kapal perikanan, galangan kapal angkutan laut, pinisi
	Angkutan Laut	Angkutan orang, angkutan barang, dan angkutan komoditas ikan
	Angkutan Sungai	Angkutan orang, angkutan barang, dan angkutan komoditas ikan
Sektor Potensial	Penggunaan Air	PLTA, Air minum
	Serapan Karbon dan Lamun	Kapasitas penyimpanan dan penyerapan karbon
	Pertambangan laut	Minyak, Gas dan Mineral

Ekonomi yang berbasis sumber daya perairan darat maupun laut sangat relevan dengan perekonomian Sulawesi Selatan, karena banyaknya wilayah yang berbatasan dengan laut dan memiliki potensi sungai, danau dan rawa. Sulawesi Selatan memiliki luas perairan laut kurang lebih 48.000 km<sup>2</sup> dan dengan garis pantai terbentang sepanjang 1.979,97 km<sup>2</sup> (Mosriula, 2019), dengan 314 pulau dan wilayah perairan laut mencakup Selat Makassar, Laut Flores, dan Teluk Bone (BPS, 2019). Sumber daya ini secara langsung menunjang perekonomian 24 Kabupaten/Kota, dan jika dikelola dengan baik dapat berkontribusi besar terhadap penurunan pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Kegiatan ekonomi biru kemungkinan ke depan akan menjadi sumber pertumbuhan baru, sumber pangan dan energi, serta pembukaan lapangan kerja baru di Sulawesi Selatan.

Meskipun potensinya besar, nilai tambah ekonomi biru belum dipahami dengan baik dan belum diukur perannya sepenuhnya dalam perekonomian Sulawesi Selatan. Laporan ini memperkirakan ukuran dan komposisi ekonomi biru di Sulawesi Selatan menggunakan tinjauan literatur dan data sekunder yang tersedia. Estimasi ini dimaksudkan sebagai indikasi awal mengenai peran sumber daya perairan bagi perekonomian Sulawesi Selatan. Nilai indikatif PDRB sektor-sektor ekonomi biru di Sulawesi Selatan diperkirakan mencapai Rp 89,93 Triliun atau sekitar 13,8 persen dari total PDRB tahun 2023. Hasil perhitungan ini sebagian besar merupakan kegiatan yang berbasis pasar, karena nilai non-pasar dari banyak jasa ekosistem perairan belum dinilai secara moneter dan menjadi bagian dari perhitungan PDB dan PDRB. Nilai PDRB ekonomi biru didominasi oleh perikanan (62,5%), perdagangan hasil perikanan (19,8%), industri makanan dan minuman input perikanan (7,5%), dan jasa pariwisata (3,9%). Perkiraan ini mungkin konservatif dan bahkan rendah, mengingat laporan ini belum mengukur atau memilah sejumlah sektor, seperti industri kreatif, jasa pendidikan, penelitian dan pengembangan di bidang perairan atau nilai-nilai non-pasar terkait keberadaan keanekaragaman hayati di Sulawesi Selatan.

Belum optimalnya pencapaian dalam nilai ekonomi biru tersebut memberikan dampak pada kegiatan pembangunan dan pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan. Untuk itu, diperlukan identifikasi dan penetapan sektor unggulan yang berbasis daerah, yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan pembangunan usaha kelautan dan perikanan Sulawesi Selatan. Hal ini diharapkan dapat menjadi usaha perikanan yang berproduktivitas serta memiliki daya saing yang tinggi, baik pasar dalam negeri maupun ekspor, sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian daerah,

Upaya yang dilakukan Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan produktivitas dan industrialisasi di sektor perikanan dan maritim yang

berkelanjutan telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian Sulawesi Selatan. Hal ini terlihat dari kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor perikanan Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2023, sebagaimana yang digambarkan bahwa kontribusi sektor perikanan atas dasar harga berlaku pada tahun 2019, sebesar 42.552,63 milyar (8,44 %), mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 42.987,78 milyar (8,53%), begitu juga pada tahun 2021 mencapai sebesar 50.676,78 milyar (9,30%) dan terjadi peningkatan tahun 2022 sebesar 56.379,16 milyar (9,32%), namun terjadi penurunan pada tahun 2023 sebesar 56.242,03 milyar (8,62%) (BPS, 2024). Terjadinya penurunan peran pada tahun 2023 disebabkan terjadi peningkatan kontribusi sektor Energi, Mineral (tambang). Selain itu secara umum kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan maupun terhadap perekonomian nasional masih belum optimal di tengah tantangan perubahan iklim.

Dengan peluang dan sumber daya yang tersedia, guna meningkatkan produksi perikanan baik budidaya maupun penangkapan, dapat dilakukan dengan 1) meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemberian pelatihan baik bagi pelaku usaha budidaya maupun penangkapan; 2) pemanfaatan sumber daya alam melalui optimalisasi pemanfaatan lahan budidaya; dan 3) meningkatkan investasi di sektor perikanan melalui penyediaan sarana dan prasarana budidaya, dan penyediaan alat penangkapan ikan modern yang ramah lingkungan.

**Tabel 3.3**  
**Nilai PDRB Indikatif Sektor Ekonomi Biru Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Rp Triliun)**

Sektor	Sub-sektor	PDRB Harga Belaku indikatif Tahun 2022 (Rp Triliun)	Keterangan
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Perikanan	56,24	Data diperoleh dari publikasi BPS mengenai PDRB Tahunan Menurut Lapangan Usaha.
Industri Pengolahan	Industri makanan dan minuman input perikanan	6,72	Estimasi di peroleh dari data input-output Sulawesi Selatan tahun 2016
	Industri bioteknologi perairan/ Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,55	Estimasi di peroleh dari data input-output Sulawesi Selatan tahun 2016
	Industri alat angkutan	0,09	Data diperoleh dari publikasi BPS mengenai PDRB Tahunan Menurut Lapangan Usaha. Alat angkutan ini mencakup pembuatan kapal dan perahu, lori/gerbong kereta api dan lokomotif, pesawat udara dan pesawat angkasa beserta suku cadangnya. Diasumsikan bahwa sebagian besar PDRB industri alat angkutan disumbang oleh industri pembuatan kapal dan perahu Pinisi di Kabupaten Bulukumba dan PT Industri Kapal Indonesia (Persero) di Kota Makassar
Pengadaan Listrik dan Gas	Penyediaan tenaga listrik (Hidrolistrik)	2,08	Total tenaga listrik yang dibangkitkan di Sulawesi Selatan tahun 2022 sebesar 8.253,97 GWh dengan 1.942,09 disumbang oleh PLTA dan PLTMH 16,72 GWh. Nilai total energi listrik yang didistribusikan sebesar Rp8.76 Triliun. Sekitar 23,7 persen dikontribusikan oleh PLTA dan PLTMH.

<b>Sektor</b>	<b>Sub-sektor</b>	<b>PDRB Harga Belaku indikatif Tahun 2022 (Rp Triliun)</b>	<b>Keterangan</b>
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah Laut	NA	Data tidak tersedia untuk pembayaran pengadaan air yang bersumber dari sungai, danau dll. Begitu juga untuk pengelolaan sampah laut.
Perdagangan	Perdagangan Besar dan Eceran	17,8	Data untuk perdagangan besar hasil perikanan di proksi dari nilai ekspor hasil perikanan tahun 2023 sebesar USD416,75 juta, lalu nilai perdagangan eceran hasil perikanan di proksi dari besarnya konsumsi RT dari sektor perikanan yakni 11,63 T (sumber: IO Sulawesi Selatan 2016)
Transportasi dan Pergudangan	Angkutan laut	1,24	Data diperoleh dari publikasi BPS mengenai PDRB Tahunan Menurut Lapangan Usaha.
	Angkutan sungai	0,61	Data diperoleh dari publikasi BPS mengenai PDRB Tahunan Menurut Lapangan Usaha.
	Pelabuhan	0,65	Subholding Pelindo Jasa Maritim (SPJM), bagian dari Pelindo Group, berhasil membukukan laba sebesar Rp647 Miliar ( <i>audited</i> ) sepanjang 2023.
Jasa Pendidikan	Jasa Pendidikan serta penelitian dan pengembangan	NA	Data tidak tersedia untuk nilai PDRB jasa pendidikan menegah kejuruan perikanan, jasa pendidikan tinggi kelautan dan perikanan, penelitian dan pengembangan bioteknologi, serta penelitian dan pengembangan ilmu perikanan dan kelautan.
Jasa lainnya	Jasa Wisata Tirta	3,51	Nilai PDRB jasa wisata tirta diperoleh dari perkalian jumlah wisatawan tirta (Wisnus dan Wisman) dengan rata-rata

Sektor	Sub-sektor	PDRB Harga Belaku indikatif Tahun 2022 (Rp Triliun)	Keterangan
			pengeluaran per kunjungan yang diperoleh dari Passenger Exit Survey 2016 dan Statistik Wisatawan Nusantara
Karbon Biru	Serapan Karbon Mangrove	0,44	Perkiraan nilai jasa ekosistem ini bersifat <i>non-market economic benefit</i> . Diasumsikan nilai mangrove per hektar sebesar USD2.798 (Bank Dunia, 2022) dan luas lahan mangrove di Sulawesi Selatan sekitar 12.256,90 Ha. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang digunakan sebesar Rp14.800 (mengacu dari APBN)
	Serapan Karbon Padang Lamun	0,004	Luas padang lamun sebesar 18.865 hektar. Berdasarkan estimasi yang diberikan oleh Duarte et al (2013), rata-rata tingkat sekuestrasi karbon oleh ekosistem padang lamun global adalah sebesar 2,78 Ton karbon per hektar setiap tahunnya. Diasumsikan harga karbon USD5 per tCO <sub>2</sub> e
<b>Total</b>		<b>89,93</b>	<b>Nilai Indikatif PDRB Sektor Ekonomi Biru Sulawesi Selatan</b>

### **3.2 Potensi Pengembangan Wilayah Ekonomi Biru Sulawesi Selatan**

Desain pengembangan ekonomi biru di Sulawesi Selatan didasarkan secara spasial dan antar waktu.

Pengembangan ekonomi biru di Sulawesi Selatan secara spasial kewilayahan, dibagi menjadi empat wilayah kesatuan ekosistem dan kultural: Region 1 (Wilayah Teluk Bone), Region 2 (Wilayah Selat Makassar), Region 3 (Wilayah Laut Flores), dan Region 4 (Wilayah Kawasan Non-Pesisir). Pengelompokan ini melihat potensi keterkaitan ekonomis dan akses pada sumber daya perairan, bukan berdasarkan administrasi wilayah, untuk memperkuat kerjasama dan pertumbuhan ekonomi.

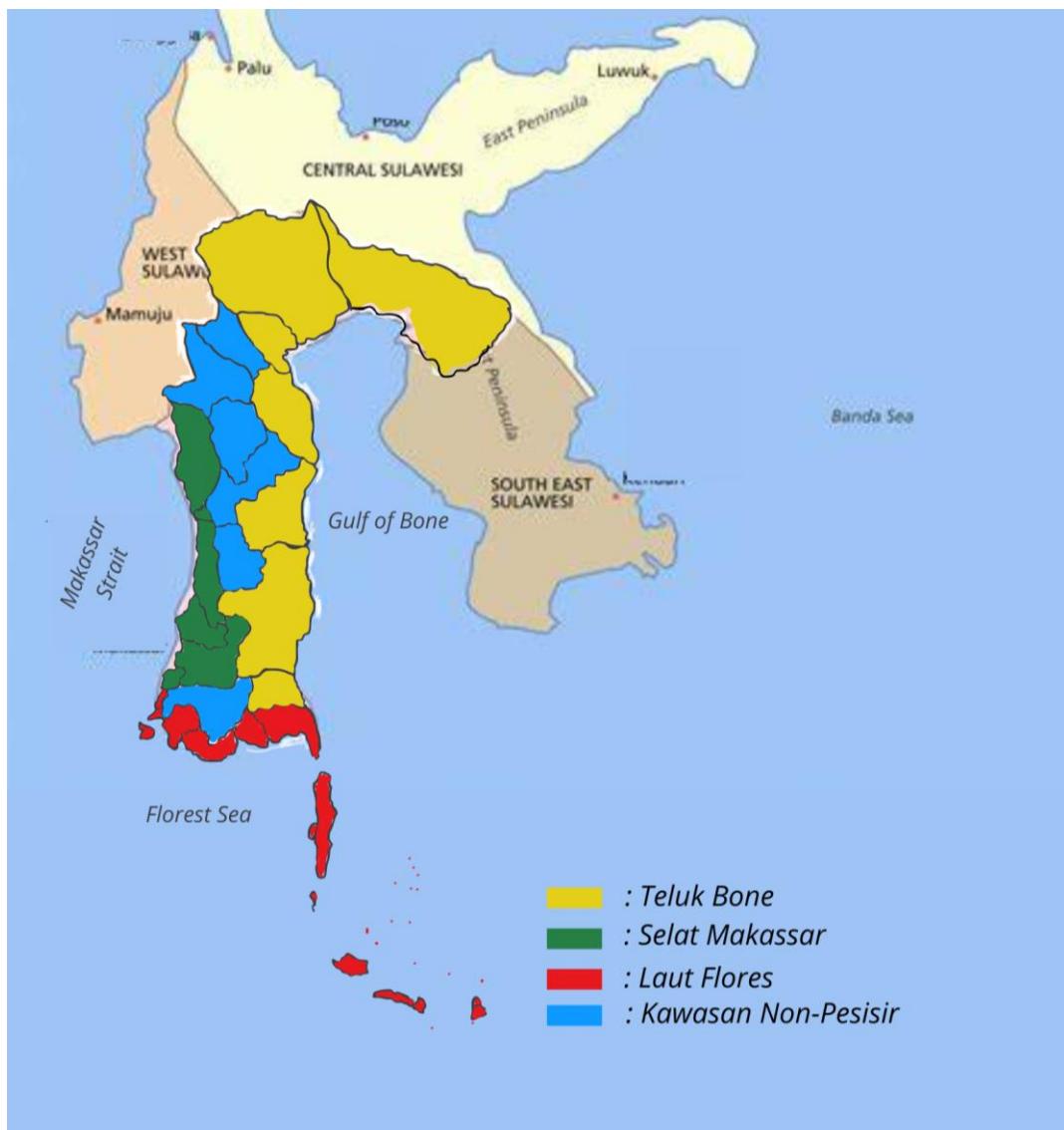
Pengelompokan wilayah tersebut dilakukan dengan melihat potensi keterkaitan ekonomis dan akses pada sumberdaya perairan bukan pada basis administrasi wilayah, sehingga memperkuat kerjasama dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Aglomerasi wilayah tersebut juga dilakukan untuk mempermudah tata kelola ekonomi biru di Sulawesi Selatan. Kabupaten dan Kota dalam masing-masing dapat dilihat dalam Tabel 3.4 dan Gambar 3.6.

**Tabel 3. 4**  
**Kabupaten dan Kota dalam Wilayah Pembangunan Ekonomi Biru**

<b>Teluk Bone</b>	<b>Selat Makassar</b>	<b>Laut Flores</b>	<b>Kawasan Non-Pesisir</b>
Sinjai	Makassar	Takalar	Sidrap
Bone	Maros	Jeneponto	Enrekang
Wajo	Pangkep	Bantaeng	Tana Toraja
Luwu	Barru	Bulukumba	Toraja Utara
Luwu Utara	Parepare	Kepulauan Selayar	Soppeng
Luwu Timur	Pinrang		Gowa
Palopo			

Sedangkan secara temporal, pengembangan ekonomi biru direncanakan untuk jangka waktu 20 tahun, dari 2025 hingga 2045 dengan memastikan peningkatan nilai melalui pengembangan industri nilai tambah dan keberlanjutan sumber daya hulu. Optimalisasi ekonomi biru Sulawesi Selatan dilakukan dengan meningkatkan kapasitas produksi dan sektor industri pengolahan berbasis perikanan agar menghasilkan produk-produk bernilai tambah tinggi. Industri perikanan tangkap dan budidaya diperluas dengan riset dan teknologi pengolahan modern untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk. Manufaktur berbasis kelautan, seperti pengolahan hasil laut menjadi produk siap konsumsi atau bahan baku industri lainnya, serta pengembangan pariwisata berbasis kelautan yang berkelanjutan dan eksklusif, menjadi kunci dari strategi ini.

**Gambar 3.6**  
**Peta Kabupaten dan Kota dalam Region Pembangunan Ekonomi Biru**



Sumber: Tim Penyusun Ekonomi Biru Sulawesi Selatan

Kepatuhan terhadap daya dukung lingkungan juga menjadi prinsip penting. Pengembangan ekonomi biru harus menjaga keseimbangan ekosistem laut dan pesisir melalui regulasi ketat penangkapan ikan, pelestarian ekosistem laut, dan pengelolaan limbah yang baik. Upaya konservasi harus memadukan pengelolaan kawasan konservasi laut secara efektif setelah penetapan, dengan pemanfaatan sumber daya yang bijaksana dan penerapan praktik ramah lingkungan serta teknologi bersih, termasuk penggunaan energi terbarukan.

Selain itu, inovasi memainkan peran krusial dengan tidak hanya mengandalkan teknologi tetapi juga pendekatan baru dalam pengelolaan dan

pengembangan sumber daya. Ini mencakup penggunaan teknologi informasi untuk memantau kesehatan ekosistem laut, mengoptimalkan distribusi, serta meningkatkan efisiensi produksi dan pemasaran. Pendekatan inovatif termasuk kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal untuk menciptakan model bisnis yang inklusif dan berkelanjutan. Program pendidikan dan penelitian (R&D) menjadi pondasi dalam mengembangkan solusi inovatif yang sesuai dengan kondisi lokal.

Dengan pendekatan ini, pengembangan ekonomi biru di Sulawesi Selatan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat, memastikan sumber daya laut dinikmati oleh generasi mendatang serta mendorong inovasi dan industri bernilai tambah tinggi untuk meningkatkan daya saing regional secara global. Selain itu transformasi ekonomi biru menjadi bagian dari strategi mengurangi ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah yang didasarkan pada karakteristik sumber daya wilayah masing-masing.

### **3.2.1 Wilayah Pengembangan Ekonomi Biru Teluk Bone**

Teluk Bone terletak di bagian tengah Pulau Sulawesi, yang membentang antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Teluk ini memiliki luas sekitar 12.500 km<sup>2</sup> dengan panjang sekitar 220 km dan lebar rata-rata 60 km. Teluk Bone dikelilingi oleh sejumlah kabupaten yang tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Terdapat 7 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dan 8 kabupaten di Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi Selatan, daerah tersebut mencakup kabupaten-kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, , Bone, Wajo, dan Sinjai, serta Kota Palopo

Secara umum, kawasan ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, di antaranya adalah potensi perikanan tangkap dan budidaya, mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Di samping itu, daerah-daerah yang berada di sekitar Teluk Bone juga merupakan penghasil komoditas pertanian dan perkebunan yang menjadi unggulan di Provinsi Sulawesi Selatan, seperti padi, kakao, dan jagung. Komoditas lain yang juga potensial di kawasan ini adalah komoditas pertambangan, terutama nikel, yang terletak di Kabupaten Luwu Timur. Bahkan Kabupaten Luwu Timur dengan Kawasan Strategis Nasional Sorowako berperan sebagai kawasan strategis pertambangan nasional. Untuk mendukung kegiatan peningkatan nilai tambah, beberapa kawasan industri juga telah beroperasi dan bisa dikembangkan untuk mendukung aktivitas hilirisasi produk perikanan dan kelautan. Dengan potensi sumber daya perairan tersebut, peran Kawasan Teluk Bone sangat penting dalam mendukung pengembangan ekonomi biru di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan potensi alamnya, kawasan di Teluk Bone juga sangat potensial untuk pengembangan pariwisata yang berbasis sumberdaya perairan. Dengan garis pantai yang panjang dan membentang di sepanjang bagian timur Provinsi Sulawesi Selatan, menawarkan banyak potensi destinasi wisata pantai. Di samping itu, keberadaan sejumlah danau memberikan peluang pengembangan kegiatan wisata yang khas. Secara detail, potensi dan karakteristik masing-masing kabupaten/kota di Teluk Bone, diuraikan sebagai berikut:

1. **Kabupaten Luwu Timur** memiliki potensi ekonomi biru yang luar biasa, didukung oleh garis pantai yang panjang serta Danau Matano yang memukau. Danau Matano merupakan danau tektonik terdalam di Asia Tenggara dengan kedalaman 590 meter. Perairan lautnya yang kaya akan sumber daya seperti ikan, udang, dan rumput laut memberikan peluang besar di sektor perikanan dan budidaya laut, yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Selain itu, Danau Matano menawarkan potensi besar untuk pariwisata air dan ekowisata, yang dapat menarik wisatawan dengan keindahan alamnya dan aktivitas seperti menyelam dan berperahu.
2. **Kabupaten Luwu Utara** juga memiliki potensi ekonomi yang berasal dari sumber daya perikanan dan kelautan, serta sungai. Dengan garis pantai yang panjang, perairan Luwu Utara kaya akan ikan, udang, dan rumput laut, membuka peluang besar di sektor perikanan tangkap dan budidaya laut yang dapat menggerakkan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Selain itu, keindahan alam pesisir dan sungai-sungainya menawarkan potensi besar untuk pengembangan pariwisata bahari dan ekowisata, yang menarik bagi wisatawan dengan kegiatan seperti menyelam, snorkeling, dan ekowisata. Sumber daya perairan yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu Utara dengan kekayaan hayatinya berpotensi untuk memberikan nilai tambah tinggi bagi perekonomian daerah.
3. **Kabupaten Luwu** memiliki potensi ekonomi biru yang besar berkat kekayaan sumber daya laut dan pesisirnya. Garis pantai yang panjang menyediakan hasil laut melimpah seperti ikan, udang, dan rumput laut, mendukung sektor perikanan tangkap dan budidaya laut yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal serta menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Keindahan alam pesisirnya menawarkan peluang besar untuk pengembangan pariwisata bahari, menarik wisatawan dengan aktivitas seperti menyelam dan snorkeling. Selain itu, potensi untuk mengembangkan industri pengolahan hasil laut dan logistik maritim

semakin memperkuat posisi Luwu sebagai salah satu pusat pengembangan ekonomi biru di Provinsi Sulawesi Selatan.

4. **Kota Palopo** diapit oleh Kabupaten Luwu, dan merupakan pusat jasa yang terkait dengan pengembangan ekonomi biru, khususnya di wilayah Luwu Raya. Meskipun luas wilayah pesisir dan laut yang dimiliki wilayah ini relatif kecil, tetapi peranan daerah ini sangat strategis sebagai pusat perdagangan dan industri. Di Kota Palopo terdapat beberapa industri pengolahan perikanan dan industri pengolahan rumput laut. Di samping itu, Kota Palopo juga menjadi sentra perdagangan produk-produk yang berbasis perairan, khususnya di Luwu Raya.
5. **Kabupaten Wajo** juga memiliki potensi perairan yang tidak hanya bersumber dari perairan laut, tapi juga perairan umum daratan. Dengan pesisir pantai yang panjang, Kabupaten Wajo memiliki banyak potensi untuk pengembangan komoditas rumput laut. Sementara itu, keberadaan Danau Tempe, yang sebagian besar wilayahnya masuk dalam Kabupaten Wajo, juga sangat potensial untuk pengembangan komoditas perikanan.
6. **Kabupaten Bone** merupakan kabupaten terluas di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah. Kabupaten ini memiliki garis pantai yang panjang dengan perairan yang kaya akan sumber daya laut, seperti ikan, rumput laut, dan udang. Keanekaragaman hayati juga dimiliki oleh Kabupaten Bone, yang terlihat dari terumbu karang, mangrove, dan beragam biota laut, yang mendukung ekosistem perairan dan sekaligus menyediakan potensi wisata bahari. Masyarakat Bone juga memiliki budaya dan tradisi kelautan yang kuat, dengan pengetahuan lokal yang luas tentang penangkapan ikan dan budidaya laut. Hal ini menegaskan posisi Kabupaten Bone sebagai salah satu episentrum dalam pengembangan ekonomi biru di Provinsi Sulawesi Selatan.
7. **Kabupaten Sinjai** merupakan kabupaten dengan garis pantai yang panjang serta sejumlah pulau kecil yang kaya akan sumber daya laut. Perairan Kabupaten Sinjai memiliki potensi berbagai jenis ikan, udang, dan rumput laut, yang tidak hanya mendukung industri perikanan, tapi juga menyediakan bahan baku yang melimpah untuk industri pengolahan hasil laut. Seperti halnya masyarakat Kabupaten Bone, masyarakat Kabupaten Sinjai juga memiliki tradisi kelautan yang kuat. Di samping itu, dukungan infrastruktur seperti pelabuhan, pasar ikan, dan fasilitas pengolahan yang ada di Kabupaten Sinjai memberikan dasar yang baik untuk pengembangan nilai tambah sumber daya sumberdaya ekonomi biru.

Uraian mengenai potensi ekonomi biru di setiap kabupaten yang berada di Kawasan Teluk Bone menegaskan besarnya potensi sumber daya perairan

yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan ini.

### **3.2.2 Wilayah Pengembangan Ekonomi Biru Selat Makassar**

Selat Makassar, sebuah kawasan strategis yang membentang di antara Pulau Sulawesi dan Kalimantan, memiliki potensi besar untuk pengembangan ekonomi biru. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari keanekaragaman hayati laut hingga potensi pariwisata bahari, kawasan ini menjadi salah satu fokus utama dalam upaya pengembangan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Selat Makassar, dengan luas perairannya yang mencapai ribuan kilometer persegi, memiliki ekosistem laut yang kaya dan beragam, termasuk terumbu karang, mangrove, dan berbagai spesies ikan yang bernilai ekonomis tinggi. Potensi ini memberikan peluang besar bagi berbagai sektor, seperti perikanan, pariwisata, dan energi terbarukan. Selat Makassar memiliki letak yang sangat strategis dalam jalur maritim dan akan berperan sebagai daerah penyangga Ibukota Nusantara (IKN). Sejumlah rencana pembangunan di Selat Makassar mencakup pembangunan infrastruktur fisik maupun pengembangan kebijakan dalam hal pengelolaan.

Kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang termasuk dalam Kawasan Selat Makassar yaitu: Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Kabupaten Barru, Kota Pare-Pare, dan Kabupaten Pinrang.

**Kota Makassar** adalah ibu kota provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan pusat ekonomi, budaya, dan pendidikan di wilayah ini. Sebagai kota pelabuhan utama, Makassar memiliki pelabuhan besar (Pelabuhan Soekarno-Hatta) yang menjadi *hub* perdagangan maritim. Potensi lainnya termasuk pariwisata bahari dengan objek wisata seperti Pantai Losari dan Pulau Samalona.

**Kabupaten Maros** berbatasan langsung dengan Kota Makassar di sebelah utara. Terkenal dengan potensi wisata alam dan bahari, serta kegiatan perikanan di pesisir pantainya. Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung yang terkenal juga berada di wilayah ini, meskipun lebih dikenal dengan karst dan air terjunnya.

**Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep)** terdiri dari daratan dan kepulauan yang tersebar di Selat Makassar. Pangkep memiliki potensi besar dalam bidang perikanan dan budidaya laut, termasuk budidaya rumput laut dan perikanan tangkap. Juga memiliki sejumlah pulau kecil yang potensial untuk pengembangan pariwisata bahari.

**Kabupaten Barru** terletak di sebelah utara Kabupaten Pangkep dan memiliki garis pantai yang panjang di sepanjang Selat Makassar. Barru dikenal dengan industri perikanan, terutama budidaya ikan dan udang. Selain itu,

daerah pesisir Barru menawarkan potensi untuk pengembangan pariwisata bahari.

**Kota Pare-pare** terletak di pesisir barat Sulawesi Selatan, merupakan salah satu kota yang memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi biru. Sebagai kota pelabuhan yang strategis di Selat Makassar, Parepare menawarkan berbagai peluang untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

**Kabupaten Pinrang** memiliki berbagai potensi untuk pengembangan ekonomi biru. Dengan kekayaan sumber daya laut dan pesisir, Pinrang dapat mengembangkan sektor-sektor seperti perikanan, budidaya laut, pariwisata bahari, dan energi terbarukan secara berkelanjutan.

Keenam kabupaten dan kota yang ada di Kawasan Selat Makassar memiliki potensi ekonomi biru yang besar yang dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan dan pembangunan ekonomi biru di Sulawesi Selatan. Potensi besar yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota di Kawasan Selat Makassar ini menumbuhkan harapan yang besar pula terhadap peningkatan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir, perbaikan tata kelola perikanan, kawasan konservasi terjaga, lingkungan lestari serta pembangunan yang berkelanjutan. Selain harapan yang dimiliki oleh kabupaten/kota di Kawasan Selat Makassar, terdapat pula kekhawatiran yang berhubungan dengan pengembangan ekonomi biru di Kawasan ini, di antaranya adalah: kerusakan dan degradasi ekosistem laut, eksplorasi berlebihan dan *overfishing*, masalah sampah laut dan ketidakpastian harga komoditi dan kurangnya akses terhadap permodalan. Kekhawatiran ini harus menjadi perhatian pemerintah dalam pengembangan ekonomi biru di Kawasan Selat Makassar, sehingga diperlukan strategi yang komprehensif yang tidak hanya dapat mengidentifikasi peluang-peluang tetapi juga dapat mengidentifikasi alternatif solusi terhadap masalah-masalah yang mungkin terjadi pada pembangunan ekonomi biru.

Adapun program yang sedang dilaksanakan di kawasan Selat Makassar antara lain:

### 1. **Selat Makassar Summit**

Pengelolaan Selat Makassar memerlukan keterlibatan sejumlah pemerintah provinsi dari daerah yang dilaluinya. Kelima provinsi yang perlu terlibat dalam pembangunan Selat Makassar adalah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Untuk mewujudkan kolaborasi tersebut, di tahun 2024, sebuah pertemuan yang ditujukan sebagai wadah koordinasi bersama antar kelima provinsi tersebut digelar dan diberi nama *Road to Selat Makassar Summit*.

Penyelenggaraan *Selat Makassar Summit* diharapkan dapat menjadi wadah yang menciptakan kerjasama strategis antar pemerintah provinsi yang berbatasan dengan Selat Makassar. Sejumlah potensi kerjasama tersebut meliputi kerjasama untuk pengelolaan energi fosil dan energi terbarukan, serta pengelolaan biota laut. Pelaksanaan Selat Makassar Summit mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2020 tentang Zona Kawasan Antar Wilayah (RZKAW) Selat Makassar

## **2. Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)**

Selat Makassar merupakan daerah laut yang termasuk dalam jalur ALKI II. Selain Selat Makassar, ALKI II meliputi perairan Laut Sulawesi Selat Lombok, dan juga Laut Lombok. ALKI merupakan jalur utama perlintasan kapal (kapal laut maupun kapal selam) dan juga pesawat yang dapat dilalui oleh asing. Hal ini akan menjadikan Selat Makassar sebagai salah satu jalur ekonomi dan perlintasan kapal besar, dan membawa potensi investasi yang cukup besar bagi Provinsi Sulawesi Selatan. Penetapan Selat Makassar di jalur ALKI II semestinya dapat menjadi pintu bagi Sulawesi Selatan untuk melakukan perdagangan ekspor impor secara langsung dengan negara-negara tujuan.

## **3. Pengembangan Makassar New Port (MNP)**

*Makassar New Port* merupakan pelabuhan terbesar kedua di Indonesia, dan merupakan pelabuhan hub terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Pengembangan MNP merupakan salah satu proyek strategis nasional dan pembangunan dermaganya dilakukan dalam tiga tahap (1A, 1B, dan 1C) dengan panjang total mencapai 1.280 meter serta dibangun di atas lahan seluas 52 hektar. Kehadiran MNP ditujukan untuk menjadi pintu masuk atau gerbang dunia untuk Kawasan Timur Indonesia, dan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum. Pembangunan MNP akan terintegrasi dengan sejumlah fasilitas penunjang industri, termasuk kawasan industri berskala besar, jalur tol, dan juga rel kereta api yang nantinya akan menghubungkan kota-kota di Pulau Sulawesi.

Pelabuhan baru ini memiliki kapasitas toa 2,5 juta TEUs (*Twenty-Foot Equivalent Unit*) per tahun dengan kedalaman 16-meter LWS (*Low Water Springs*), sehingga dapat digunakan oleh kapal-kapal peti kemas yang berukuran besar. Hal ini memungkinkan untuk penyelenggaraan pelayaran langsung ke luar negeri. Adapun fasilitas yang dimiliki oleh MNP adalah 6 unit *container crane (CC)*, 16 unit *rubber tyred gantry (RTG)*, 2 unit *Reach Stacker (RS)*, 15 unit *Terminal Tractor*, 1 unit *forklift* 2 ton, dan 392 unit *reefer plug*. Selain itu, MNP juga dilengkapi dengan sistem *Integrated Planning and Control Room* untuk memantau dan mengontrol penyelenggaraan pelayanan kapal, terminal, peti kemas, dan logistik secara terpusat.

### **3.2.3 Wilayah Pengembangan Ekonomi Biru Laut Flores**

Laut Flores, yang membentang di bagian selatan Sulawesi Selatan, mencakup lima kabupaten pesisir, yakni Kabupaten Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, dan Kepulauan Selayar, masing-masing dengan keunikan dan potensi ekonomi biru yang signifikan. Sebagai sebuah kesatuan wilayah, Laut Flores menawarkan berbagai sumber daya maritim yang mampu mendorong pembangunan ekonomi yang bersinergi untuk mendukung visi pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan.

Di **Kabupaten Takalar**, potensi besar terletak pada budidaya rumput laut dan industri perikanan, yang mendukung tidak hanya perekonomian lokal tetapi juga pasar nasional dan internasional. Fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Takalar memfasilitasi distribusi hasil tangkapan ke berbagai pasar. Selain itu, Takalar juga mengembangkan pariwisata yang mengutamakan keindahan pantai, kuliner laut yang khas, dan kaya akan nilai budaya (*Maudu Lompoa*) yang menarik bagi wisatawan lokal.

**Kabupaten Jeneponto**, dengan potensi energi terbarukan dari PLTU dan PLTB, mendukung kegiatan ekonomi lain seperti perikanan dan pariwisata di wilayah ini dan sekitarnya. Kepulauan Libukang di Jeneponto tidak hanya menjadi surga bagi pecinta alam untuk melakukan wisata *kite surfing* tetapi juga menawarkan keindahan bawah laut yang ideal untuk kegiatan wisata seperti snorkeling.

**Kabupaten Selayar** menonjol dengan Taman Nasional Takabonerate, salah satu kawasan konservasi laut terbesar di Indonesia dengan luas 530 ribu ha, yang mengandung potensi besar untuk pengembangan ekowisata dan pelestarian biodiversitas laut. Industri perikanan terpadu di Kabupaten Selayar mendukung pengolahan dan pemasaran produk perikanan, sementara wisata kuliner di wilayah ini menawarkan pengalaman asli dari hasil laut yang berlimpah.

**Kabupaten Bantaeng**, meskipun lebih kecil, memperlihatkan kekuatan dalam budidaya rumput laut dan pariwisata pantai. Kawasan industri yang sedang berkembang di Bantaeng berpotensi menjadi pusat kegiatan ekonomi yang mendorong pertumbuhan lapangan kerja dan peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal.

**Kabupaten Bulukumba** dikenal dengan tradisi pembuatan perahu Pinisi yang telah mendunia, menambahkan nilai unik pada identitas maritim Sulawesi Selatan. Selain itu, keindahan pesisir dan kekayaan budaya lokal seperti *Ammatoa Kajang* menawarkan potensi yang belum sepenuhnya tergali untuk pariwisata budaya dan alam. Mangrove dan pelabuhan di Bulukumba mendukung kegiatan konservasi serta logistik dan distribusi produk laut.

Secara keseluruhan, kelima kabupaten ini sebagai bagian dari Laut Flores menggambarkan sebuah tapestri yang kaya akan potensi ekonomi biru.

Melalui sinergi antar kabupaten dan pemanfaatan sumber daya yang optimal, potensi Laut Flores tidak hanya dapat memperkuat ekonomi lokal tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap visi pembangunan ekonomi biru di Sulawesi Selatan. Salah satu potensi yang signifikan di kawasan ini yakni budidaya rumput laut. Total volume produksi rumput laut di wilayah ini mencapai 1.052.449 ton, dengan nilai sebesar Rp 6,2 triliun. Di antara kabupaten-kabupaten ini, Takalar memberikan kontribusi terbesar, memproduksi 528.504 ton. Jeneponto menyusul dengan produksi 245.430 ton.

Jika dibandingkan dengan total produksi rumput laut di Sulawesi Selatan, wilayah Laut Flores memberikan kontribusi yang cukup besar. Total volume produksi rumput laut Sulawesi Selatan adalah 2.672.408 ton, dengan nilai sebesar 13,9 triliun rupiah. Wilayah Laut Flores sendiri menyumbang sekitar 39% dari total volume rumput laut dan sekitar 45% dari total nilai produksi di Sulawesi Selatan. Ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari nilai produksi rumput laut Sulawesi Selatan berasal dari wilayah Laut Flores.

Selain rumput laut, Kawasan Laut Flores adalah kontributor utama untuk produksi garam di Sulawesi Selatan, meskipun mengalami penurunan produksi dalam beberapa tahun terakhir (KKP, 2022). Pada tahun 2019, produksi garam mencapai 94.468,3 ton dengan nilai produksi Rp 44,5 Miliar Namun, produksi mengalami penurunan signifikan pada tahun-tahun berikutnya, menjadi 34.900 ton pada tahun 2020, 5.452,39 ton pada tahun 2021, dan 4.834,44 ton pada tahun 2022. Nilai produksi juga menurun dari Rp 21,4 Miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 6,8 Miliar pada tahun 2021 dan sedikit meningkat menjadi Rp 9,6 Miliar pada tahun 2022. Kabupaten penopang produksi garam di kawasan ini adalah Kabupaten Jeneponto dan Kepulauan Selayar.

Potensi pengembangan pariwisata cukup besar di kawasan ini dengan potensi ekosistem terumbu karang yang kaya dan beranekaragam, khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar. Hanya saja, infrastruktur, khususnya akomodasi belum optimal. Tercatat total akomodasi di wilayah ini hanya 12, dengan jumlah kamar sebanyak 326 dan jumlah tempat tidur sebanyak 527. Kabupaten Bulukumba mengikuti dengan 3 akomodasi, 89 kamar, dan 169 tempat tidur. Dua kabupaten ini memang terkenal untuk pariwisata bahari dengan keberadaan pasir putih Pantai Bira dan wisata bawah air di Takabonerate. Khusus di Takabonerate, tercatat terdapat 3.096 wisatawan lokal dan 146 wisatawan asing yang berkunjung di tahun 2022.

Jika dibandingkan dengan total akomodasi pariwisata di Sulawesi Selatan, wilayah Laut Flores memberikan kontribusi yang relatif kecil. Total akomodasi di Sulawesi Selatan mencapai 195, dengan jumlah kamar sebanyak 14.570 dan jumlah tempat tidur sebanyak 21.436. Dengan demikian, wilayah Laut Flores hanya menyumbang sekitar 6% dari total akomodasi, 2% dari total

kamar, dan sekitar 2.5% dari total tempat tidur di Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa fasilitas akomodasi di Laut Flores, kontribusinya terhadap total kapasitas pariwisata di Sulawesi Selatan masih sangat terbatas. Pembangunan yang terintegrasi di wilayah di Laut Flores harus diarahkan untuk memaksimalkan potensi sambil memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

### **3.2.4 Wilayah Pengembangan Ekonomi Biru Non-Pesisir**

Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah perikanan terbesar di Indonesia dengan luas perairan laut kurang lebih 48.000 km<sup>2</sup> dan terbentang sepanjang 1.979,97 km<sup>2</sup> dari garis pantai (Mosriula, 2019). Sulawesi Selatan memiliki 314 pulau dan wilayah perairan laut mencakup Selat Makassar, Laut Flores, dan Teluk Bone. Posisi alami ini memungkinkan wilayah Sulawesi Selatan berkelimpahan dengan sumber daya alam hayati dan nirhayati baik di darat dan perairannya maupun di laut. Perairan darat di Sulawesi Selatan ini sangat luas, yang terdiri atas sungai, rawa, paparan banjir, danau, situ, ranu, dan bendungan. Ekosistem perairan darat mempunyai fungsi yang sangat penting secara ekologis, ekonomis, dan sosial. Habitat perairan darat merupakan tempat hidup dan berkembang biak berbagai jenis biota akuatik mulai dari yang berukuran kecil seperti bakteri, plankton, benthos hingga yang berukuran besar seperti ikan, udang, kepiting. Fungsi ekonomis mencakup dukungan terhadap sektor air minum dan sanitasi, perikanan perairan darat, pertanian, kehutanan, energi, industri, transportasi, dan pariwisata. Sementara itu, sektor pendidikan, olahraga, rekreasi, budaya, dan keagamaan merupakan beberapa contoh kontribusi dari fungsi sosial perairan darat.

Kabupaten-kabupaten yang masuk dalam Wilayah Ekonomi Biru Non-Pesisir adalah Gowa, Sidenreng-Rappang (Sidrap), Soppeng, Enrekang, Tana Toraja, dan Toraja Utara

Besarnya potensi yang dapat disumbangkan kepada perekonomian Sulawesi Selatan dari sumber daya perairan darat, menuntut perhatian yang semakin tinggi dari semua pemangku kepentingan untuk mengelolanya dengan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan. Perlu diketahui bahwa posisi geografis di jalur khatulistiwa menjadikan wilayah Sulawesi Selatan sangat peka terhadap perubahan yang terjadi dan cenderung menyebabkan penurunan kondisi atau degradasi lingkungan dari aspek kualitas ataupun kuantitasnya.

### **3.3 Kondisi dan Potensi Sumber Daya Alam Pendukung Ekonomi Biru Sulawesi Selatan**

#### **3.4.1 Sektor-sektor Prioritas Kelautan dan Perikanan**

##### **3.4.1.1 Konservasi**

Total luasan wilayah konservasi perairan di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 1,79 juta hektar di tahun 2024. Wilayah tersebut terdiri dari empat kawasan konservasi perairan, yang meliputi: 1) Taman Nasional Laut Takabonerate (terbesar dengan luas 531.000 hektar); 2) Liukang Tangaya (506.000 hektar); 3) Liukang Tupabbiring (63.000 hektar), dan 4) Kepulauan Kapoposang dan Laut sekitarnya (50.000 hektar). Keempat kawasan konservasi laut ini menjadi kawasan penyangga produktivitas perikanan tangkap di laut yang mengelilingi Provinsi Sulawesi Selatan, dan destinasi utama pariwisata laut.

Takabonerate merupakan taman laut dengan kekayaan terumbu karang, atau luas kawasan atol terbesar ketiga di dunia setelah Kwajifein di Kepulauan Marshal dan Sudadiva di Kepulauan Maldives. Total luas dari ekosistem terumbu karang di Takabonerate mencapai 220 ribu Ha, dengan sebaran terumbu karang mencapai 500-kilometer persegi. Taman Nasional Takabonerate terdiri dari lima belas pulau, dan telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia sejak tahun 2005. Takabonerate berada di Laut Flores, perairan yang dikenal sebagai bagian dari segitiga terumbu karang (*coral triangle*) dengan kepadatan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia yang membentang dari Kepulauan Solomon di bagian timur, Filipina di bagian utara, hingga ke Bali, Lombok, Komodo, dan Flores yang berada di daerah selatan. Dengan kekayaan dan keindahan alam ini, Takabonerate memiliki potensi yang besar sebagai salah satu destinasi wisata laut utama di Indonesia.

Selain kekayaan ekosistem laut yang berada dalam Kawasan konservasi di atas, Sulawesi Selatan memiliki kekayaan ekosistem laut yang tersebar di kawasan Selat Makassar, Laut Flores, dan Teluk Bone. Secara keseluruhan, ketiga kawasan ini memiliki kekayaan ekosistem yang terdiri dari ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan mangrove. Komposisi luasan wilayah ekosistem ini disajikan pada Gambar 3.7.

**Gambar 3.7  
Distribusi Luas Ekosistem Laut di Tiga Kawasan Pesisir  
Sulawesi Selatan (dalam hektar dan persentasi)**



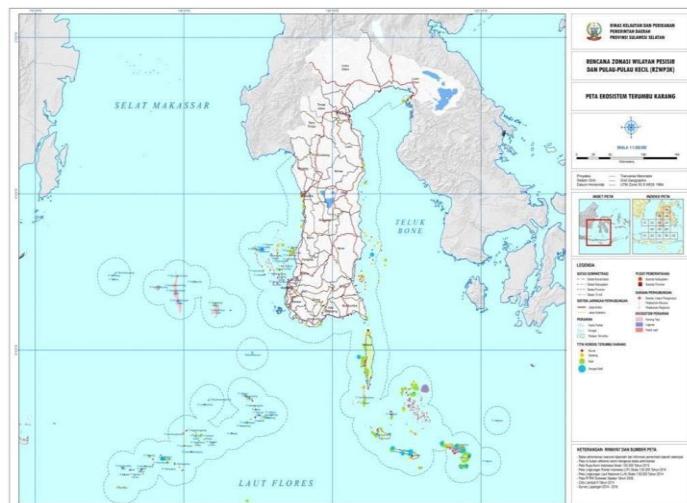
*Sumber: Laporan Statistik Perikanan Sulawesi Selatan Tahun 2019*

## ***Ekosistem Terumbu Karang***

Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di pusat wilayah geografis Indonesia merupakan bagian dari wilayah *Coral Triangle* yang dikenal karena memiliki keanekaragaman hayati laut yang paling tinggi di dunia (Marwayana et al., 2022). Di Sulawesi Selatan, ekosistem terumbu karang menyebar di sepanjang pesisir dan khususnya di gugusan pulau-pulau kecil. Ekosistem ini memainkan peran penting dalam kehidupan laut, bersama dengan ekosistem lamun dan mangrove. Fungsi ekosistem ini mencakup penyediaan habitat, area berkembang biak biota laut, dan pertumbuhan bagi ribuan spesies ikan (Burke et al., 2011). Terumbu karang juga memberikan perlindungan terhadap garis pantai dari dampak badai dan erosi, serta berkontribusi pada ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja yang berkaitan dengan kegiatan perikanan dan pariwisata.

Luas total ekosistem terumbu karang di Sulawesi Selatan mencapai sekitar 117.908 hektar yang tersebar di 15 kabupaten/kota (Gambar 3.7) dan Tabel 3.5. Di antaranya terdapat tiga kawasan yang memiliki luasan ekosistem terumbu karang yang cukup besar yakni di Kawasan Taka Bonerate Kabupaten Selayar, Kepulauan Spermonde Kabupaten Pangkep dan Kawasan Kepulauan Sembilan di Kabupaten Sinjai. Namun, ekosistem terumbu karang di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami tekanan yang sangat berat baik akibat sedimentasi, perubahan iklim maupun berbagai dari dampak antropogenik. Tingginya tingkat aktivitas penangkapan ikan karang juga turut berpengaruh, apalagi jika praktik-praktik penangkapan yang dilakukan tidak ramah lingkungan (*destructive fishing*). Terumbu karang yang berbentuk lereng (*sloped reef*) umumnya memiliki asosiasi ikan dengan kelimpahan yang lebih tinggi dan berukuran besar sering menjadi sasaran pengeboman. Sebagian besar terumbu karang *slope* sudah mengalami kerusakan dan bahkan kehancuran. Terumbu karang dangkal (*flat reef* dan *reef top*) umumnya masih berada dalam kondisi sedang sampai sangat baik (DKP Sulawesi Selatan, 2019).

**Gambar 3.8**  
**Sebaran dan Kondisi Ekosistem Terumbu Karang**



Sumber: Laporan RTZWP Sulawesi Selatan 2019

**Tabel 3. 5**  
**Luas Terumbu Karang per Kabupaten di Sulawesi Selatan**

Kabupaten	Luas Terumbu Karang (Ha)	Kondisi (Ha)		
		Baik	Sedang	Rusak
Selayar	55.493,4	19.803,8	20.186,2	15.503,4
Bulukumba	1.660,4	504,9	1.065,9	89,6
Bantaeng	361,4	108,42	-	252,98
Jeneponto	329,4	320,40	-	9,00
Takalar	-	-	-	-
Pangkep	37.400,0	7.480,0	11.220,0	18.700,0
Barru	894,4	861,1	-	33,4
Bone	133,8	63,2	30,3	40,3
Wajo	257,0	183,0	19,0	55,0
Pinrang	14,2	10,6	0,3	3,3
Luwu	17.310,0	1.731,0	4.327,0	11.252,0
Luwu Utara	47,0	7,1	-	6,0
Palopo	16,0	10,0	-	6,0
Sinjai	3.819,9	1.739,3	1.259,5	821,1
Maros	-	-	-	-
Luwu Timur	136,4	15,9	28,1	92,4
Makassar	-	-	-	-
Pare-Pare	35,3	21,3	-	14,0
Jumlah	117.908,59	32.859,96	38.136,34	46.912,29

*Sumber: BPS, diolah (2026)*

Di Kawasan Taka Bonerate, Kabupaten Selayar, luas ekosistem terumbu karang relatif baik. Luasan karang paling besar yakni 55.493,4 hektar dengan kondisi yang bervariasi: 19.803,8 hektar dalam kondisi baik, 20.186,2 hektar dalam kondisi sedang, dan 15.503,4 hektar yang rusak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar terumbu karang di Selayar masih dalam kondisi yang relatif baik atau sedang, namun meningkatnya angka kerusakan karang menandakan adanya tekanan serius terhadap ekosistem di wilayah ini. Di Kepulauan Spermonde, Kabupaten Pangkep, juga memiliki luasan terumbu karang yang sangat besar yaitu 37.400 hektar, dengan 7.480 hektar dalam

kondisi baik dan 18.700 hektar yang rusak. Nurdin *et. all* (2020) menemukan penurunan luasan tutupan karang hidup yang dikarenakan tingginya aktivitas penangkapan ikan karang di lima pulau di kawasan ini dari tahun 1972 hingga 2016.

### ***Ekosistem Mangrove***

Di Sulawesi Selatan, setidaknya terdapat 19 spesies mangrove dari 41 jenis yang ada di Indonesia (ADB, 2014). Luas lahan mangrove di Sulawesi Selatan merupakan yang terluas di wilayah Sulawesi, mencakup area seluas sekitar 11.067 hektar dan tersebar di 16 kabupaten pesisir (Gambar 3.8). Keberadaan ekosistem mangrove memainkan peran penting tidak hanya dalam keseimbangan ekologi tetapi juga dalam menyediakan banyak jasa penting bagi keberlanjutan masyarakat pesisir.

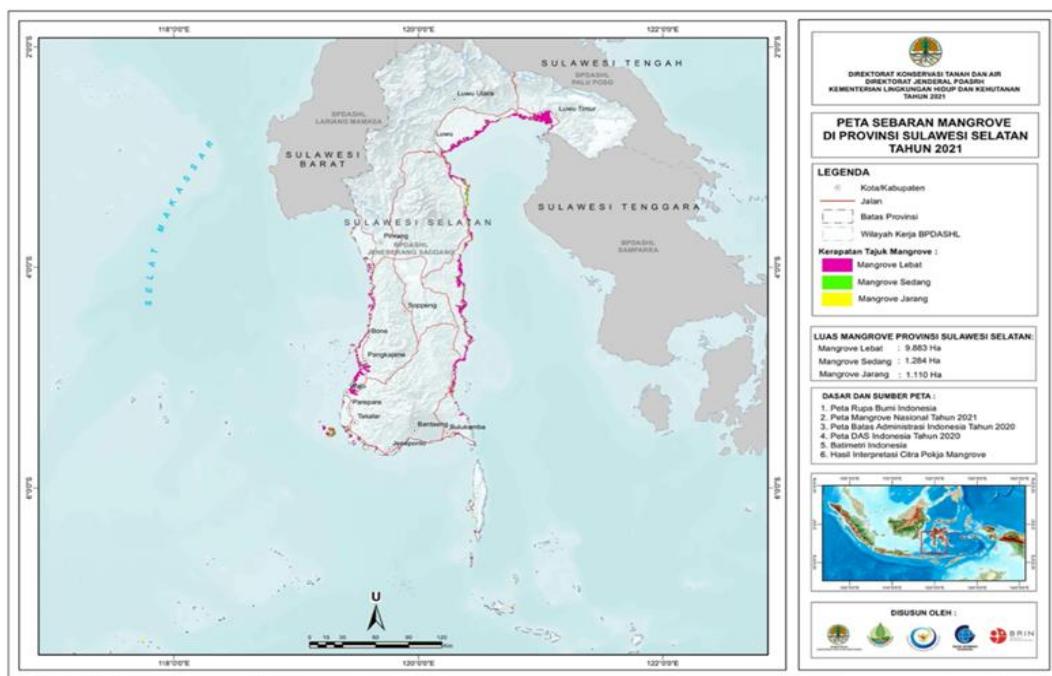
Mangrove merupakan salah satu ekosistem pesisir penting di Provinsi Sulawesi Selatan, yang berperan penting dalam menopang pengembangan ekonomi di wilayah ini dan penyediaan berbagai jasa ekosistem. Nilai ekonomi dari hutan mangrove termasuk dalam menyediakan sumber daya penting bagi masyarakat lokal seperti kayu, makanan, dan bahan mentah lainnya. Selain penyediaan sumber daya, hutan mangrove merupakan bagian integral dari perlindungan pantai, mengurangi dampak bencana alam seperti gelombang badai dan erosi pantai.

Mangrove juga berperan penting dalam menyediakan jasa ekologi yang mendukung keanekaragaman hayati. Selain itu, mangrove juga berperan dalam penyerapan karbon, yang diperkirakan berkisar antara 122 – 245 ton/ha untuk mangrove di Sulawesi Selatan. Jenis mangrove yang paling banyak ditemukan antara lain adalah *Avicennia* dan *Sonneratia*. Lebih jauh ke daratan, spesies seperti *Bruguiera* dan *Rhizophora* mendominasi, sedangkan wilayah pinggiran yang bertransisi ke daratan menjadi habitat bagi berbagai spesies lain seperti pandan laut dan *Ficus*. Ekosistem ini berfungsi sebagai habitat penting bagi ikan dan kepiting, menjadi basis penting bagi jaring makanan, dan berkontribusi terhadap ketahanan sistem ekologi.

Meskipun penting, ekosistem mangrove di Sulawesi Selatan menghadapi ancaman besar akibat aktivitas antropogenik, termasuk pengembangan lahan untuk budidaya perikanan dan pemanfaatan kayu bakau untuk digunakan sebagai bahan bakar. Data tahun 2023 menggarisbawahi pentingnya penerapan strategi konservasi yang efektif untuk menghentikan dan membalikkan degradasi ekosistem. Dengan perkiraan luas 124.604 hektar yang teridentifikasi sebagai kawasan mangrove potensial, terdapat peluang besar untuk upaya restorasi dan konservasi. Strategi-strategi ini harus memprioritaskan restorasi ekologi dan juga menggabungkan praktik-praktik pemanfaatan berkelanjutan untuk memastikan bahwa hutan mangrove dapat

terus memberikan manfaat ekologis dan ekonomi yang penting dalam jangka panjang.

**Gambar 3. 9**  
**Peta Sebaran Mangrove Sulawesi Selatan Tahun 2021**



Sumber: Peta Mangrove Nasional 2021

Kabupaten Luwu memiliki luas hutan mangrove terluas, namun menghadapi tantangan besar dengan lahan yang rusak akibat alih fungsi lahan menjadi tambak. Sebaliknya, Selayar dan Barru menunjukkan kondisi mangrove yang relatif lebih sehat, masing-masing seluas 528 dan 860 hektar, dalam kondisi baik dari total luas mangrove yang ada. Hal ini menunjukkan adanya tindakan konservasi yang efektif di kawasan ini. Permasalahan kritis kondisi hutan mangrove ditemukan di beberapa kabupaten seperti Luwu Timur dan Bantaeng yang mengalami degradasi. Berbagai kondisi tersebut yang menawarkan potensi rehabilitasi habitat mangrove. Data tahun 2023 menunjukkan adanya 1.021 hektar lahan terbuka, 284 hektar yang telah terabrsi, 26.093 hektar sudah dikonversi menjadi tambak dan 294 hektar tertutup tanah timbul.

### ***Ekosistem Lamun Sulawesi Selatan***

Padang lamun merupakan ekosistem utama lainnya yang mendukung keanekaragaman hayati di perairan Sulawesi Selatan. Ekosistem lamun di Sulawesi Selatan menyebar dengan luasan 18.865 hektar di 13 kabupaten/kota. Padang lamun berperan vital dalam produktivitas biologis dan ekologis perairan karena hubungannya yang erat dengan ekosistem

terumbu karang dan mangrove. Keterkaitan ini memungkinkan pertukaran unsur hara dan migrasi ikan antara ekosistem, menjadikan padang lamun sebagai area kunci untuk berbagai proses ekologis. Berikut merupakan data luasan padang lamun per kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

**Tabel 3.6**  
**Luas Padang Lamun per Kabupaten di Sulawesi Selatan**

Kabupaten	Luas Padang Lamun (Ha)	Kondisi (Ha)		
		Baik	Sedang	Rusak
Selayar	8.971,60	8.971,60	-	-
Bulukumba	275,9	219,30	34,12	22,51
Bantaeng	-	-	-	-
Jeneponto	590,1	590,1	-	-
Takalar	-	-	-	-
Pangkep	3.857,0	1.721,0	323,0	1.813,0
Barru	190,9	190,9	-	-
Bone	-	-	-	-
Wajo	32,0	32,0	-	-
Pinrang	69,1	14,5	-	54,6
Luwu	3.668,0	3.668,0	-	-
Luwu Utara	-	-	-	-
Palopo	1,0	0,5	-	0,5
Sinjai	1.042,0	811,00	157,00	74,00
Maros	-	-	-	-
Luwu Timur	167,3	55,6	46,8	64,9
Makassar	-	-	-	-
Pare-Pare	0,04	0,040	-	-
Jumlah	18.865,0	16.274,5	560,9	2.029,5

*Sumber: Laporan Statistik Perikanan Sulawesi Selatan Tahun 2019*

Di Sulawesi Selatan, ekosistem lamun diketahui memiliki tujuh genera utama, yaitu *Enhalus*, *Thalassia*, *Halophila*, *Halodule*, *Cymodocea*, *Syringodium*, dan *Thallassodendrum*. Dominasi spesies *Enhalus acoroides* di perairan ini menandai karakteristik khusus dari flora lamun di wilayah ini. Spesies lain

yang sering berasosiasi dengan *E. acoroides* mencakup *Thalassia hemprichii*, *Halophila ovalis*, *Cymodocea rotundata*, dan *Halodule sp.* Keanekaragaman ini memperkaya fungsi ekologis padang lamun dan meningkatkan kapasitasnya.

Padang lamun dikenal tidak hanya sebagai penyerap sedimen tetapi juga sebagai pengatur nutrien di perairan pantai. Fungsinya yang vital ini membantu menjaga keseimbangan nutrien di lingkungan laut, yang pada gilirannya mendukung keberadaan organisme renik plankton. Plankton ini menarik berbagai spesies ikan yang datang untuk meletakkan telurnya, dan akhirnya membantu dalam proses pemijahan dan perkembangan larva.

Selain itu, padang lamun juga menjadi tempat penting bagi biota lain seperti dugong (duyung), berbagai jenis moluska, dan teripang. Kehadiran mereka dalam padang lamun tidak hanya menunjukkan kesehatan ekosistem ini tetapi juga penting dalam menjaga keanekaragaman biologis perairan. Duyung, yang merupakan spesies herbivora besar, bergantung pada padang lamun sebagai sumber makanan utama mereka dan memainkan peran dalam penyebaran biji lamun.

### **3.4.1.2 Perikanan Tangkap**

#### ***Perikanan Laut***

Sulawesi Selatan memiliki potensi yang besar dalam sumber daya perikanan dan kelautan, yang memberikan peluang penting untuk pembangunan ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan. Sulawesi Selatan memiliki garis pantai yang memanjang lebih dari 1.979 km dan luas laut yang diperkirakan mencapai 48.000 km<sup>2</sup>. Sektor perikanan darat seperti danau, sungai, dan waduk berpotensi signifikan dalam peningkatan kontribusi substantif terhadap ekonomi regional (Adhawati, 2022).

Provinsi Sulawesi Selatan termasuk dalam WPP 713 untuk perikanan tangkap laut dan WPP NRI PD 421 untuk perikanan tangkap darat. Keseluruhan wilayah laut Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, dan Laut Flores, menjadi bagian dari WPP 713 sebagaimana ditetapkan dalam Kepmen KKP No. 80 Tahun 2016. WPP 713 dan WPP PD NRI 421 memainkan peran penting dalam kontribusi terhadap produksi perikanan tangkap nasional, menggambarkan potensi besar yang dimiliki oleh Sulawesi Selatan dalam sektor perikanan. Pada usaha perikanan tangkap di laut komoditi hasil tangkapan yang sangat menonjol dan bernilai ekonomis tinggi meliputi ikan tuna, cakalang, kerapu dan kakap, udang dan cumi-cumi. Usaha perikanan tangkap di perairan darat, komoditi hasil tangkapannya yang menonjol meliputi ikan nila, gabus, sepat siam, mujair, betok, mas, nila dan tawes. Komoditi tersebut umumnya dijual di pasar lokal.

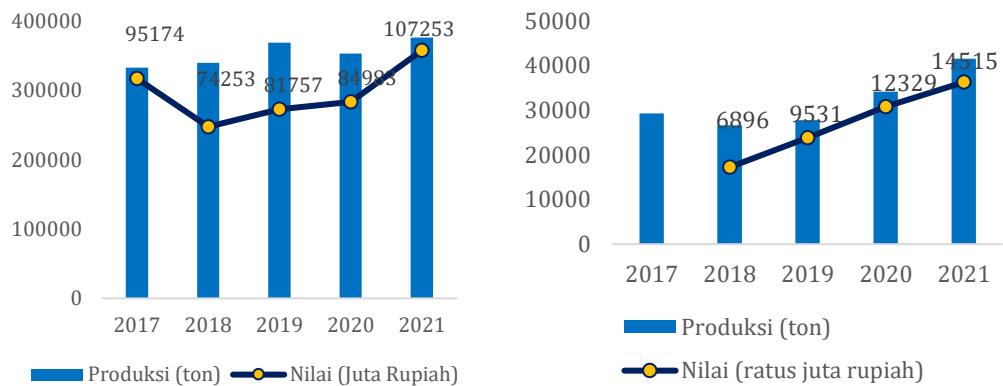
Dalam program revitalisasi perikanan, komoditas yang ditetapkan sebagai acuan adalah tuna/cakalang, sedangkan komoditi lainnya yang juga memiliki prospek pasar ekspor tetap dipertahankan dan dikendalikan baik volume maupun kualitasnya. Pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan peningkatan produksi tidak berubah menjadi ancaman bagi ekosistem laut dan perairan darat. Oleh karena itu, perlu adanya kehati-hatian dalam eksploitasi sumber daya perikanan, dengan memperhatikan kondisi stok di perairan untuk memastikan upaya penangkapan tidak melebihi kapasitas daya dukung ekosistem.

Potensi perikanan tangkap Sulawesi Selatan berdasarkan WPP 13 sebesar 1.177.857 ton/tahun, meliputi wilayah penangkapan Selat Makassar, Laut Flores dan Teluk Bone (Buku Kelautan dan Perikanan dalam angka tahun 2020, Pusdatin KKP 2021). Data produksi perikanan tangkap laut di Sulawesi Selatan menunjukkan pertumbuhan dari 95.174 ton pada tahun 2017 menjadi 107.253 ton pada tahun 2021 (Gambar 3.10). Sementara itu, nilai ekonomi dari produksi perikanan tangkap menunjukkan tren positif, meningkat dari 74,253 miliar Rupiah pada tahun 2018 menjadi 107,253 miliar Rupiah pada tahun 2021. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan permintaan terhadap produk perikanan dari Sulawesi Selatan dan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pasar secara efektif.

Untuk produksi perikanan tangkap darat, data menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, dengan produksi meningkat dari 29.268 ton pada tahun 2017 menjadi 41.578 ton pada tahun 2021. Nilai ekonomi dari perikanan darat juga mengalami peningkatan, dari 6.896 miliar Rupiah pada tahun 2018 menjadi 14.515 miliar Rupiah pada tahun 2021. Perkembangan ini menegaskan pentingnya sektor ini bagi perekonomian daerah. Pada tahun 2020, produksi perikanan darat di Sulawesi Selatan menghasilkan 34.187 ton ikan, yang setara dengan 7% dari total tangkapan perikanan darat nasional.

Analisis tren beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam sektor perikanan tangkap laut dan darat, mencerminkan peningkatan produktivitas tangkapan dan nilai ekonomi dari sumber daya kelautan dan perikanan darat di Sulawesi Selatan. Komoditas utama seperti ikan cakalang, ikan tenggiri (tongkol), tuna, dan udang, memegang peranan krusial tidak hanya untuk konsumsi lokal namun juga untuk pasar eksport, memberikan kontribusi penting terhadap perekonomian kawasan. Gambar 3.11. Menunjukkan pergeseran kontribusi antara wilayah ekonomi biru dalam volume dan nilai produk perikanan.

**Gambar 3. 10**  
**Produksi dan Nilai Perikanan Tangkap Laut dan Perairan Darat**  
**Provinsi Sulawesi Selatan**



**a. Perikanan tangkap laut**

Sumber: BPS, diolah

**b. Perikanan tangkap perairan darat**

**Gambar 3. 11**  
**Tren Kontribusi Volume Produksi Perikanan Tangkap Laut di Empat Kawasan Ekonomi Biru Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022**



**a. Tren kontribusi volume**

Sumber: BPS, diolah

**b. Tren kontribusi nilai**

Dari segi volume produksi, kontribusi tertinggi disumbangkan oleh Wilayah Teluk Bone, namun dalam nilai produksi hampir sama dengan kawasan yang lain. Hal ini menunjukkan harga ikan di Teluk Bone lebih rendah dibandingkan dengan kawasan lain.

Selat Makassar menunjukkan fluktuasi dalam kontribusinya terhadap total produksi dan nilai ekonomi produksi perikanan tangkap laut di Sulawesi Selatan. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2020, kontribusinya kembali meningkat dari 97.311 ton (26,70%) pada tahun 2019 menjadi 102.242 ton (26,26%) pada tahun 2022. Kabupaten Pangkep dan Barru memiliki peran signifikan untuk mendorong produksi di kawasan ini. Dalam hal nilai produksi, kawasan ini mengalami perubahan dari Rp 2.460,92 triliun

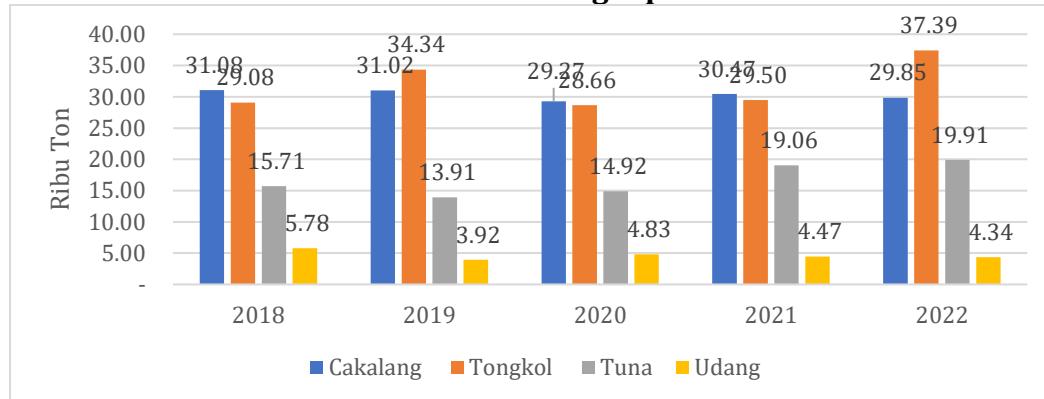
(30,49%) pada tahun 2019 menjadi Rp 2.893,06 triliun (26,17%) pada tahun 2022.

Laut Flores, meskipun kontribusinya sedikit menurun selama beberapa tahun terakhir, tetap memberikan sumbangan signifikan dengan volume produksi 117.691 ton (32,29%) pada tahun 2019 dan 114.187 ton (29,33%) pada tahun 2022. Kabupaten dengan kontribusi signifikan di kawasan ini yakni Kabupaten Bulukumba dan Kepulauan Selayar. Nilai produksi kawasan ini juga menunjukkan kontribusi besar, yaitu Rp 2.914,29 triliun (36,11%) pada tahun 2019 dan Rp 3.647,21 triliun (33,00%) pada tahun 2022.

Komoditas perikanan tangkap laut yang dominan yakni: udang, tuna, cakalang, dan tongkol (Gambar 3.12). Teluk Bone merupakan kontributor terbesar dengan tangkapan udang sebesar 2.269,76 ton (52,36%), tuna 9.092 ton (45,66%), cakalang 12.732,42 ton (42,65%), dan tongkol 11.704,69 ton (31,31%). Selat Makassar juga memberikan kontribusi penting dengan produksi udang 1.645,8 ton (37,96%), tuna 1.814,3 ton (9,11%), cakalang 8.303,94 ton (27,81%), dan tongkol 8.179,3 ton (21,88%).

Udang, Tuna, Cakalang, Tongkol merupakan komoditas penting perikanan tangkap laut di Sulawesi Selatan. Perkembangan produksi komoditas tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah.

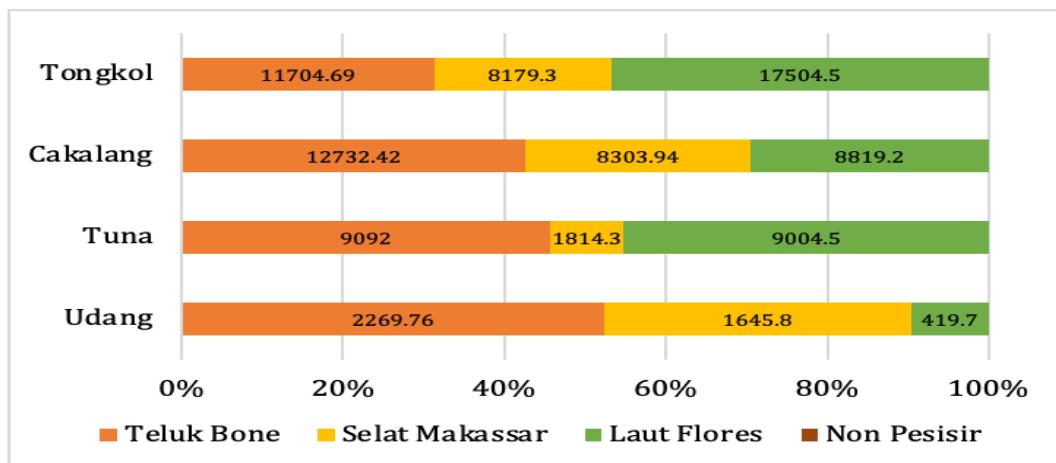
**Gambar 3. 12**  
**Volume Produksi Perikanan Tangkap di Sulawesi Selatan**



*Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan*

Teluk Bone merupakan region yang memiliki kontribusi terhadap perikanan tangkap laut paling besar jika dibandingkan dengan region lain di Sulawesi Selatan. Kontribusi perikanan tangkap laut Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Gambar 3.13.

**Gambar 3.13**  
**Kontribusi Perikanan Tangkap laut Sulawesi Selatan Tahun 2022**



*Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan*

Namun, di balik peningkatan produksi tersebut, terdapat kekhawatiran serius mengenai tingkat eksploitasi perikanan tangkap (Table 3.7), khususnya perikanan tangkap laut yang tidak berkelanjutan. Berdasarkan data potensi lestari, beberapa komoditas utama di WPP 713 membutuhkan penyesuaian strategi pengelolaan.

Laut Flores, meskipun lebih rendah dalam produksi udang dengan 419,7 ton (9,68%), menunjukkan produksi tuna sebesar 9.004,5 ton (45,22%) dan tongkol 17.504,5 ton (46,82%), menjadikan kawasan ini penting untuk dua jenis komoditas tersebut. Secara keseluruhan, Teluk Bone, Selat Makassar, dan Laut Flores memiliki peran penting dalam mendukung sektor perikanan tangkap laut di Sulawesi Selatan. Teluk Bone berkontribusi untuk hampir semua komoditas utama, sementara Laut Flores memiliki keunggulan dalam produksi tuna dan tongkol. Selat Makassar, meskipun berada di posisi tengah dalam hal volume, tetap menjadi kontributor signifikan terutama dalam produksi udang dan cakalang. Hal ini menunjukkan adanya diversifikasi kekuatan di antara kawasan-kawasan ini dalam mendukung industri perikanan tangkap laut di Sulawesi Selatan.

**Tabel 3. 7**  
**Tingkat Pemanfaatan Perikanan Tangkap di WPP 713**

Jenis Ikan	Tingkat Eksplorasi (E)
Ikan demersal	0,30
Ikan pelagis besar	0,80
Udang penaeid	0,80
Ikan pelagis kecil	1,00
Ikan karang	1,00
Lobster	1,00
Cumi-cumi	1,00
Rajungan	1,50

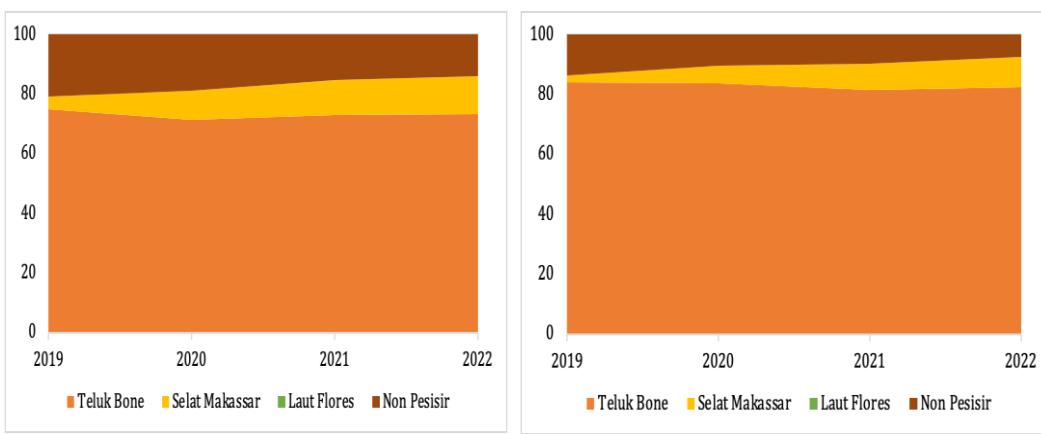
Sumber: KKP 2022

Tingkat pemanfaatan yang tinggi pada ikan pelagis kecil, ikan karang, lobster, dan cumi-cumi, dan rajungan membutuhkan pemantauan ketat untuk memastikan penangkapan tidak melebihi kapasitas regenerasi mereka dan tindakan pengelolaan yang signifikan untuk mencegah eksplorasi yang lebih parah. Dengan tantangan ini di sektor perikanan tangkap, diperlukan pengembangan produksi dari sektor perikanan budidaya sebagai solusi alternatif yang menawarkan potensi sumber daya yang lebih berkelanjutan. Pengembangan sektor ini tidak hanya berpotensi mengurangi beban pada stok ikan di alam tetapi juga dapat menguatkan ekonomi lokal melalui diversifikasi produksi perikanan.

### ***Perikanan Tangkap Perairan Darat***

Kontribusi perikanan tangkap darat dari empat kawasan utama di Sulawesi Selatan, yaitu Teluk Bone, Selat Makassar, Laut Flores, dan Non Pesisir, menunjukkan peran yang berbeda dalam mendukung sektor perikanan darat di daerah ini (Gambar 3.14). Data menunjukkan bahwa Teluk Bone merupakan kontributor terbesar baik dalam volume produksi maupun nilai ekonominya, diikuti oleh Selat Makassar dan Non Pesisir. Laut Flores tidak memiliki data yang tercatat, menunjukkan bahwa aktivitas perikanan darat di kawasan ini nilainya kecil atau tidak dilaporkan.

**Gambar 3. 14**  
**Tren Kontribusi Volume dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Darat di Empat Kawasan Ekonomi Biru Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022**



*Sumber: BPS, diolah*

Kontribusi perikanan tangkap darat dari empat kawasan utama di Sulawesi Selatan, yaitu Teluk Bone, Selat Makassar, Laut Flores, dan Non Pesisir, menunjukkan peran yang berbeda dalam mendukung sektor perikanan darat (Gambar 3.14). Data menunjukkan bahwa Teluk Bone merupakan kontributor terbesar baik dalam volume produksi maupun nilai ekonominya. Hal ini dikarenakan Danau Tempe yang berada di Kabupaten Wajo termasuk dalam kawasan Teluk Bone. Selanjutnya diikuti oleh Selat Makassar dan Non Pesisir. Laut Flores tidak memiliki data yang tercatat, menunjukkan bahwa aktivitas perikanan darat di kawasan ini nilainya kecil atau tidak dilaporkan.

Teluk Bone secara konsisten menjadi kawasan dengan kontribusi terbesar dalam produksi perikanan tangkap darat di Sulawesi Selatan. Pada tahun 2019, Teluk Bone menyumbang 20.810 ton (74,90% dari total produksi), dan kontribusinya terus meningkat hingga mencapai 33.302 ton (73,31%) pada tahun 2022. Nilai ekonomi dari produksi ini juga mengalami peningkatan signifikan dari Rp 787,849 miliar (84,03%) pada tahun 2019 menjadi Rp 1.430,84 triliun (82,31%) pada tahun 2022. Tingginya produksi di Teluk Bone ditopang oleh aktivitas perikanan di beberapa danau besar di wilayah ini seperti Danau Tempe di Wajo, Danau Mahalona, Matano dan Towuti di Luwu Timur.

Selat Makassar menunjukkan peningkatan kontribusi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, Selat Makassar hanya menyumbang 1.209 ton (4,35%) dari total produksi, namun kontribusinya meningkat menjadi 5.806 ton (12,78%) pada tahun 2022. Nilai produksi dari kawasan ini juga meningkat dari Rp 21,193 miliar (2,26%) pada tahun 2019 menjadi Rp 176,426 miliar (10,15%) pada tahun 2022. Peningkatan ini

menunjukkan adanya pertumbuhan yang pesat dalam sektor perikanan darat di Selat Makassar.

Wilayah Non Pesisir (Enrekang, Gowa, Sidrap, Soppeng, Tana Toraja dan Toraja Utara) juga memberikan kontribusi yang signifikan, meskipun kontribusinya menunjukkan tren menurun dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, kawasan ini menyumbang 5.764 ton (20,75%) dari total produksi, tetapi kontribusinya menurun menjadi 6.317 ton (13,91%) pada tahun 2022. Nilai ekonomi dari produksi ini juga mengalami penurunan dari Rp 128,53 miliar (13,71%) pada tahun 2019 menjadi Rp 131,139 miliar (7,54%) pada tahun 2022. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor termasuk perubahan lingkungan atau kebijakan yang mempengaruhi aktivitas perikanan darat di kawasan ini.

Secara keseluruhan, Teluk Bone, Selat Makassar, dan Non Pesisir merupakan pilar utama dalam mendukung sektor perikanan tangkap darat di Sulawesi Selatan, dengan Teluk Bone sebagai kontributor utama yang terus mengalami peningkatan baik dalam volume produksi maupun nilai ekonomi. Perbedaan dalam kontribusi masing-masing kawasan ini menunjukkan dinamika yang kompleks dalam sektor perikanan darat di Sulawesi Selatan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan dan ekonomi.

#### **3.4.1.3 Budidaya Kelautan dan Perikanan**

Sektor perikanan budidaya di Sulawesi Selatan saat ini memainkan peran krusial dalam mendukung ekonomi regional dan nasional, dengan kontribusi yang mencapai 27,87% dari total produksi perikanan budidaya nasional yang disumbang dari 282.514 RTP (Rumah Tangga Produksi) dengan dominasi perikanan tambak. Jika satu keluarga terdiri dari empat orang, artinya lebih dari satu juta orang di Sulawesi Selatan memperoleh seluruh atau sebagian pendapatannya dari sektor perikanan budidaya.

Komoditas unggulan dalam budidaya perairan laut dan darat di Sulawesi Selatan meliputi rumput laut, udang, bandeng, dan nila. Dari semua komoditas tersebut, rumput laut menjadi kontributor utama, menyumbang sekitar 18,45% terhadap produksi perikanan budidaya nasional. Potensi produksi *E. Cottoni* mencapai 7.748.000 ton rumput laut basah dan *Gracilaria* sp mampu menghasilkan 1.280.000 ton rumput laut basah per tahun.

Selain rumput laut, Sulawesi Selatan juga memiliki sejumlah komoditas budidaya perikanan andalan lainnya. Berdasarkan statistik hasil produksi perikanan budidaya yang dirilis oleh KKP, Sulawesi Selatan juga mampu menghasilkan volume produksi yang signifikan pada komoditas udang, bandeng, ikan mas, dan nila. Untuk ikan bandeng, volume produksi Sulawesi Selatan dalam kurun 2018-2022 berada di kisaran 180-210 ribu ton. Volume produksi udang tambak secara konsisten menunjukkan peningkatan sejak Tahun 2018 hingga 2022. Di Tahun 2018, jumlah produksi udang tambak mencapai 43 ribu ton, dan telah meningkat hamper sebesar 40% jika dibandingkan dengan kapasitas produksi di Tahun 2022.

Sektor budidaya mencatat pertumbuhan signifikan dalam produksi komoditas lain (Tabel 3.8). Produksi bandeng adalah salah satu komoditas utama yang menunjukkan permintaan yang kuat dan peningkatan kapasitas produksi. Untuk produksi udang juga menunjukkan pertumbuhan yang stabil, Selain itu, produksi ikan lele dan nila memiliki kontribusi yang cukup besar pada sektor perikanan budidaya.

**Tabel 3.8**  
**Produksi Komoditas Budidaya Provinsi Sulawesi Selatan 2017-2020**

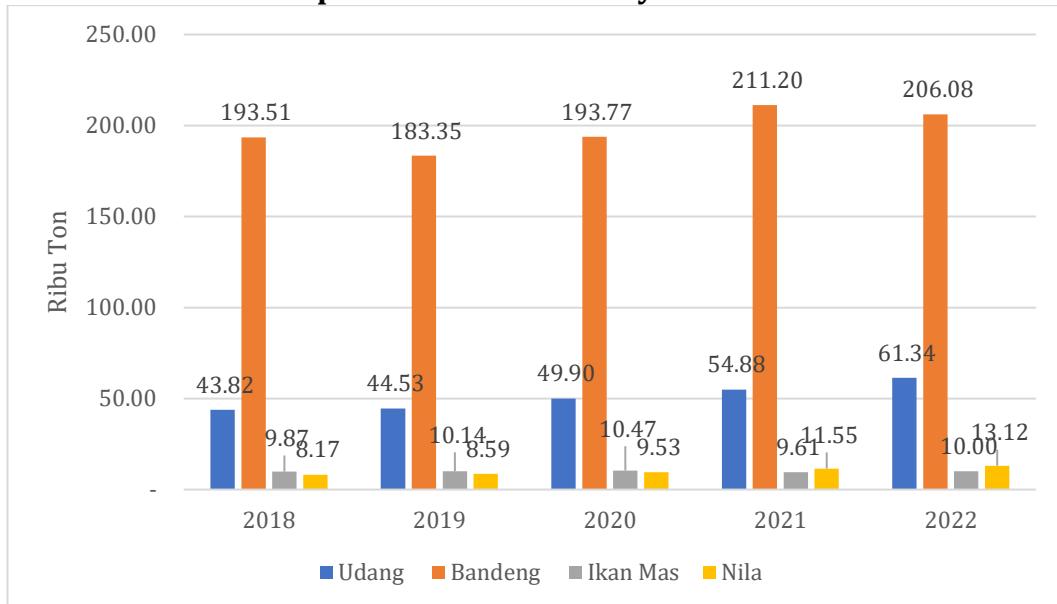
Komoditas	Produksi budidaya (ton)			
	2017	2018	2019	2020
Gurame	15	16	n/a	n/a
Patin	41	32	21	20
Lele	2.409	2.516	2.808	2.726
Nila	7.039	8.170	8.594	9.530
Ikan Mas	9.707	9.867	10.140	10.469
Kakap	3	50	1	22
Bandeng	169.688	193.511	183.354	193.766
Rumput Laut	3.660.340	3.287.894	3.405.848	3.442.076
Kerapu	14	3	55	85
Udang	47.792	43.820	44.528	49.903

*Sumber: BPS, diolah*

Pertumbuhan ini menegaskan pentingnya sektor perikanan budidaya dalam mendukung ekonomi regional, menyediakan alternatif berkelanjutan untuk perikanan tangkap, membantu mengurangi tekanan pada stok ikan di alam dengan memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Perikanan budidaya di Sulawesi Selatan tidak hanya memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan pasar lokal dan ekspor tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap produksi nasional, khususnya dalam sektor budidaya rumput laut. Sebagai salah satu produsen rumput laut terbesar di Indonesia, Sulawesi Selatan memiliki potensi serta ruang yang luas untuk pengembangan lebih lanjut dalam bidang ini. Namun, untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dari sektor ini, diperlukan upaya yang lebih besar dalam menambah nilai ekonomi produk budidaya. Hal ini bisa mencakup

peningkatan teknologi pengolahan, peningkatan industry nilai tambah dan diversifikasi produk turunan rumput laut, dan peningkatan akses ke pasar internasional. Melalui inovasi dan investasi dalam teknologi pengolahan, Sulawesi Selatan dapat menghasilkan produk turunan rumput laut dengan nilai jual yang lebih tinggi, membuka peluang ekonomi baru dan memperkuat posisi daerah ini sebagai pemimpin dalam industri perikanan budidaya global.

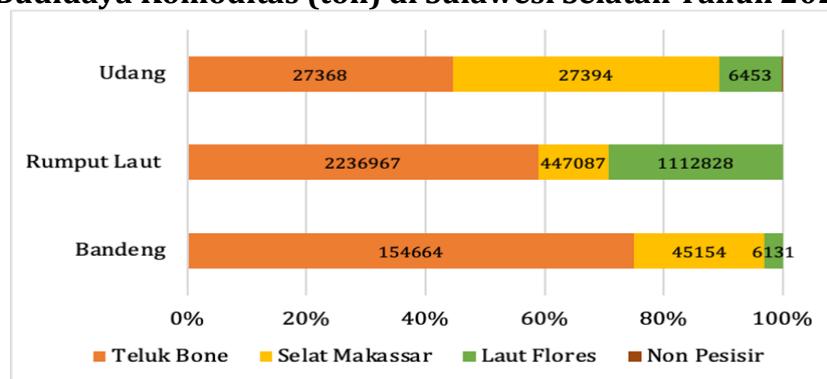
**Gambar 3. 15**  
**Volume Produksi Empat Perikanan Budidaya Utama di Sulawesi Selatan**



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sebagai provinsi dengan produksi budidaya terbesar di Indonesia, pengembangan budidaya di empat kawasan untuk tiga jenis komoditas unggulan disajikan pada Gambar 3.15. Teluk Bone merupakan kontributor terbesar untuk produksi budidaya tiga komoditas unggulan di Sulawesi Selatan: bandeng, rumput laut, dan udang.

**Gambar 3. 16**  
**Kontribusi Empat Kawasan Ekonomi Biru Pada Produksi Perikanan Budidaya Komoditas (ton) di Sulawesi Selatan Tahun 2022**

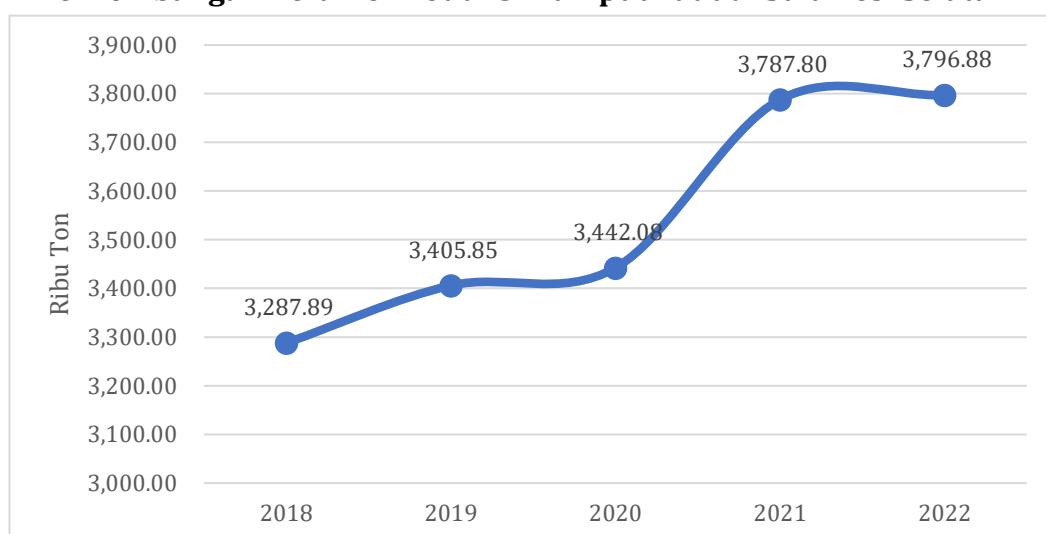


Sumber: DKP Sulawesi Selatan, 2024; diolah

Teluk Bone merupakan kontributor utama dalam perikanan budidaya di Sulawesi Selatan, diikuti oleh Selat Makassar dan Laut Flores. Teluk Bone mendominasi dalam semua komoditas utama, dengan kontribusi terbesar baik dalam volume produksi maupun nilai ekonominya. Selat Makassar menunjukkan kontribusi signifikan dalam produksi udang dan bandeng, namun lebih rendah dalam produksi rumput laut. Laut Flores unggul dalam produksi rumput laut, memberikan kontribusi besar dalam nilai ekonomi komoditas ini. Kawasan Non Pesisir, sebaliknya, memberikan kontribusi yang minimal, menunjukkan perlunya perhatian lebih untuk pengembangan perikanan budidaya di wilayah ini.

Komoditas rumput laut menjadi komoditas budidaya dengan volume produksi terbesar di tingkat nasional. Dalam kurun tahun 2018-2022, volume produksi rumput laut di Sulawesi Selatan secara konsisten mengalami peningkatan yang cukup progresif. Volume produksi di Tahun 2022 mencapai 3,79 juta ton. Jumlah produksi tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebanyak 3,78 juta ton. Volume produksi rumput laut di tahun 2021-2022 tercatat mengalami lonjakan signifikan dibandingkan dengan volume produksi tahunan di tiga tahun sebelumnya (2018-2020). Jika dibandingkan dengan volume produksi di tahun 2018, volume produksi di tahun 2022 telah mengalami peningkatan sebesar 15% lebih.

**Gambar 3. 17**  
**Perkembangan Volume Produksi Rumput Laut di Sulawesi Selatan**



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan

#### 3.4.1.4 Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau terkecil di Sulawesi Selatan mengacu pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil (RZWP3K) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041. Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah

No. 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041. Dalam RZWP3K, pulau-pulau kecil Provinsi Sulawesi Selatan berjumlah 332 yang tersebar pada kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan (Tabel 3.10).

**Tabel 3.9**  
**Jumlah Pulau Kecil di Provinsi Sulawesi Selatan**

Kabupaten	Jumlah Pulau
Kabupaten Kepulauan Selayar	131
Kabupaten Bulukumba	5
Kabupaten Jeneponto	1
Kabupaten Takalar	9
Kabupaten Sinjai	10
Kabupaten Bone	2
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	140
Kabupaten Barru	9
Kabupaten Pinrang	4
Kabupaten Luwu Timur	4
Kabupaten Luwu Utara	1
Kota Makassar	14
Kota Palopo	1
Sulawesi Selatan	1

*Sumber: RZWP3K*

Strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP-3-K) provinsi dalam rangka mewujudkan peningkatan konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil dan lahan kritis meliputi: 1) Peningkatan rehabilitasi kawasan yang terdegradasi berat/kritis, 2) Peningkatan sistem pemantauan, pengendalian dan pengawasan (*monitoring, controlling and surveillance*) berbasis masyarakat, 3) Peningkatan status kawasan konservasi ekosistem WP-3-K, serta 4) Peningkatan dan pengembangan model konservasi berbasis masyarakat.

### **3.4.1.5 Pengelolaan Sampah Plastik**

Di Indonesia, masalah sampah merupakan isu kritis yang mendapatkan perhatian khusus, terutama dengan pertumbuhan penduduk yang cepat. Pada tahun 2016, jumlah sampah di Indonesia mencapai 65,2 juta ton. Pencemaran oleh sampah laut di Sulawesi Selatan merefleksikan skala masalah ini dalam konteks lokal yang membutuhkan penanganan serius.

Wilayah pesisir Sulawesi Selatan yang membentang dari wilayah Selat Makassar ke perairan Teluk Bone melewati hampir sebagian besar wilayah kabupaten/kota sepanjang 1.979,97 km membuatnya sangat rentan terhadap pencemaran oleh sampah laut yang berasal dari kegiatan antropogenik. Pertambahan penduduk, yang jumlahnya di tahun 2024 ini mencapai sekitar 9.463.385 jiwa, berkontribusi pada peningkatan volume sampah, terutama di area pesisir yang padat penduduk. Dengan pertumbuhan penduduk yang cepat, volume sampah di wilayah ini sebanding dengan peningkatannya. Sebagai konsekuensi dari peningkatan ini, lautan sering menjadi tempat pembuangan sampah. Sebuah riset di kepulauan Spermonde menyatakan bahwa 56% responden mengaku secara langsung membuang sampah ke laut (Adriani, 2023). Perkembangan industri, urbanisasi, dan modernisasi di Sulawesi Selatan juga ikut andil dalam meningkatkan jumlah sampah.

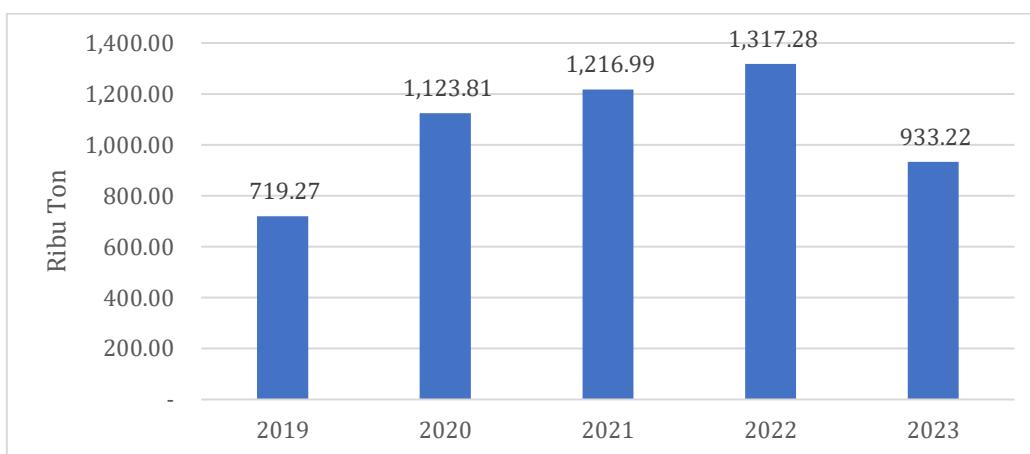
Sampah laut, atau marine debris, adalah semua material berbentuk padatan yang tidak dijumpai secara alami di wilayah perairan dan merupakan produk dari aktivitas manusia. Material ini dapat mengancam kondisi dan produktivitas wilayah perairan serta memerlukan aksi spesifik untuk mencegah dan meminimalisir dampak negatifnya. Sampah laut dapat berpindah tempat melalui arus laut dan angin, kadang-kadang menempuh jarak jauh dari sumber asalnya. Pengelompokan sampah laut di perairan bisa dibedakan berdasarkan ukuran, dari *mega-debris* yang lebih besar dari 100 cm, *macro-debris* yang berukuran antara 100 cm hingga 2,6 cm, hingga *meso-debris* yang berukuran antara 2,5 cm hingga 5 mm. Masing-masing memiliki dampak yang berbeda pada ekosistem laut dan cara pengelolaannya juga berbeda.

Di Sulawesi Selatan, sampah laut yang terdegradasi menjadi mikroplastik telah banyak ditemukan dalam berbagai rantai makanan laut dan berdampak negatif pada biota laut seperti ikan (YKL, 2022). Mikroplastik ini sulit terurai dan dapat mengakumulasi di dalam organisme laut, yang pada akhirnya bisa masuk ke dalam rantai makanan manusia. Lebih lanjut, dampak dari sampah laut ini sangat luas, mulai dari menurunkan produktivitas ikan yang ditangkap, mengganggu keindahan wilayah pesisir, hingga menyebabkan berbagai macam penyakit pada biota laut. Kondisi ini juga berdampak pada manusia, terutama pada penurunan pasokan hasil laut yang berkonsekuensi pada penurunan perekonomian lokal.

Gangguan terhadap jalur pelayaran dan kesehatan masyarakat pesisir juga merupakan beberapa dari banyak masalah yang ditimbulkan oleh sampah laut. Hal ini menuntut strategi pengelolaan sampah yang lebih efektif dan tindakan pencegahan untuk mengurangi sampah yang masuk ke laut. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta penerapan kebijakan yang lebih ketat oleh pemerintah, menjadi kunci untuk mengatasi masalah sampah laut di Sulawesi Selatan. Diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk memastikan implementasi solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan sampah laut sehingga tidak mengganggu produktivitas sumber daya kelautan dan perikanan yang mampu mendorong ekonomi biru di wilayah ini.

Persoalan sampah plastik masih menjadi salah satu tantangan besar bagi pengelolaan sampah di Sulawesi Selatan. Sebagai provinsi dengan penghasil rumput laut terbesar di Indonesia, diperkirakan bahwa 16.000 ton sampah plastik dihasilkan setiap tahunnya dari aktivitas budidaya rumput laut tersebut. Data dari Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa total timbunan sampah di Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2023 mencapai 933.224 Ton, dan di Tahun 2022 mencapai 1.317.276 Ton.

**Gambar 3. 18**  
**Volume Timbunan Sampah di Sulawesi Selatan**



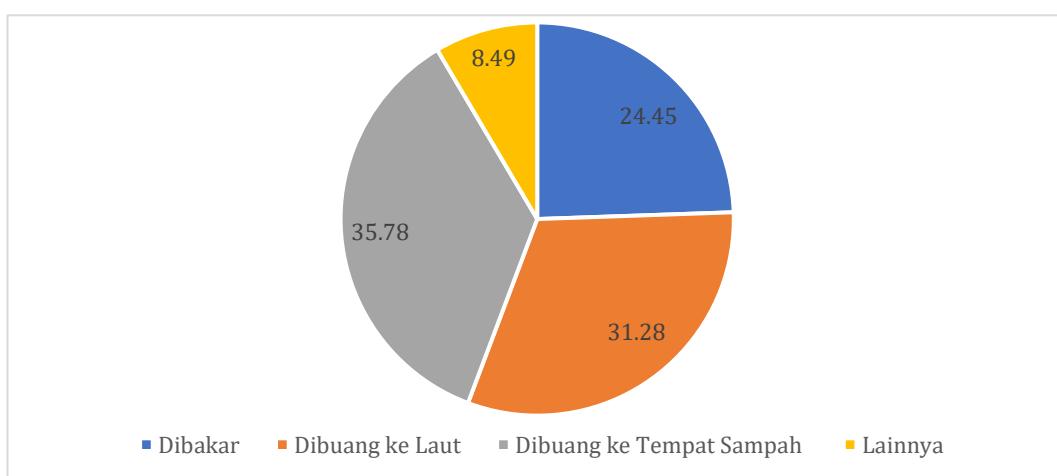
Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, Kemen-LHK

Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi persoalan sampah adalah pendirian bank sampah. Namun demikian, efektivitas bank sampah yang kemudian menjadi tumpuan untuk mengurangi sampah plastik melalui program R3 (*Reuse/gunakan kembali, Reduce/kurangi penggunaan, dan Recycle/daur ulang*) belum berfungsi cukup optimal. Di Sulawesi Selatan sendiri, baru terdapat sebelas kabupaten/kota yang telah memiliki bank

sampah induk, sedangkan kabupaten/kota lainnya masih baru memiliki bank-bank sampah unit (BSU) yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Keberadaan bank sampah induk di setiap kabupaten/kota sangat diperlukan untuk menjalankan fungsi penyaluran sampah yang telah dipilah di Bank Sampah Unit ke industri daur ulang atau tahap pemrosesan lebih lanjut. Tanpa keberadaan fasilitas bank sampah induk, sampah yang telah dipilah masih sangat berpotensi untuk tidak mendapatkan treatment lanjutan atau tidak terproses sama sekali. Jika dikaji secara kelembagaan, sejauh ini, baru terdapat dua kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang telah memiliki UPTD untuk pengelolaan sampah.

Khusus untuk sampah yang dihasilkan oleh aktivitas perikanan sendiri, budidaya rumput laut menjadi salah satu kontributor utama sampah plastik selain sisa jaring rusak yang dibuang di laut. Hal ini disebabkan karena praktik budidaya rumput laut mayoritas menggunakan botol plastik bekas, jerigen bekas, dan juga tali untuk mengapungkan rumput laut. Akibatnya, botol plastik bekas dan tali yang sudah tidak digunakan kemudian sebagian besar dibuang ke laut atau dibiarkan menumpuk di dekat pantai, dan menjadi ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Hasil survei BPS di tahun 2020 menunjukkan bahwa sebanyak 31,28% limbah yang dihasilkan dari budidaya rumput laut yang berakhir dengan cara dibuang langsung ke laut. Untuk sampah sisa jaring laut (dikenal dengan istilah *ghost gear* dalam khasanah perikanan) belum terdapat statistik yang memadai meskipun diduga jumlahnya cukup signifikan.

**Gambar 3. 19  
Proporsi Sampah Botol Plastik Bekas Budidaya Rumput Laut  
Berdasarkan Perlakuan Akhir**



Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan

Selain terkait dengan pertumbuhan penduduk, tingkat kesadaran masyarakat yang belum memadai, dan masalah penanganan sampah plastik bekas alat bantu produksi rumput laut, Provinsi Sulawesi Selatan masih mengalami masalah dalam integrasi perencanaan dan pengelolaan ruang. Kebijakan ini terkait dengan: (i) Tindak lanjut dari integrasi RTRWP dengan RZWP3K yang sudah dijadikan peraturan daerah; (ii) Integrasi pengelolaan DAS dan aliran sungai, dan (iii) Integrasi pengelolaan sampah hulu-hilir.

### 3.4.2 Sektor Non Kelautan dan Perikanan

#### 3.4.2.1 Transportasi dan Logistik

##### *Armada Penangkapan dan Pelabuhan Perikanan*

Kapal untuk aktivitas melaut yang digunakan oleh nelayan, di tahun 2022 terdapat sebanyak 56.250 kapal perikanan laut. Jumlah ini lebih rendah dari jumlah kapal perikanan laut yang tercatat di tahun 2021 sebanyak 59.458. Bahkan, jika dibandingkan dalam empat tahun terakhir, jumlah kapal perikanan laut pada tahun 2022 menjadi yang terendah dalam kurun 2019-2022. Menurunnya jumlah kapal perikanan dalam kurun empat tahun tersebut dapat mengindikasikan semakin sedikitnya jumlah SDM atau pekerja yang berada di sektor perikanan laut. Penurunan ini diperkirakan sebagianya terkait erat dengan pandemi COVID19.

Dari sisi perairan umum darat (PUD), jumlah kapal perikanan yang dioperasikan pada tahun 2022 tercatat sebanyak 6.341. Angka kapal perikanan PUD tercatat konsisten mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022, dimana di tahun 2020 angka kapal perikanan PUD hanya berjumlah 6.072, dan kemudian mengalami peningkatan sebanyak 224 unit menjadi 6.296. Meningkatnya angka kapal perikanan PUD mengindikasikan peningkatan aktivitas penangkapan ikan di kawasan perairan darat di wilayah Sulawesi Selatan.

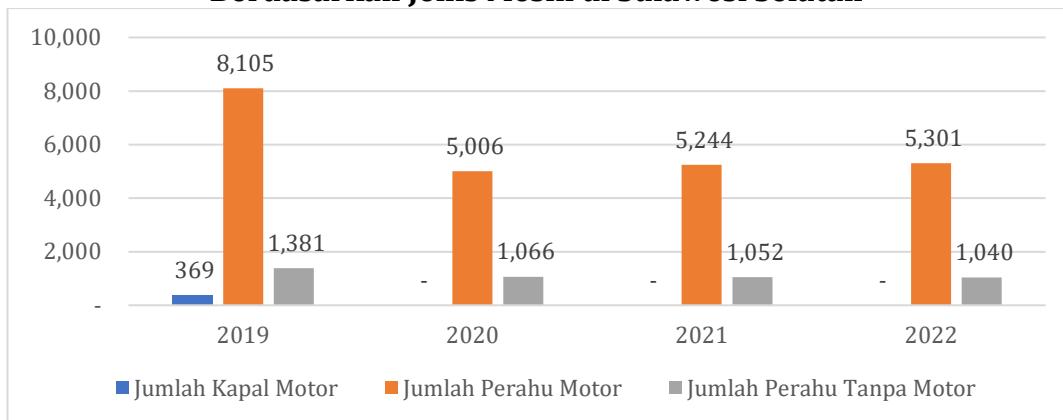
**Gambar 3.20**  
**Perkembangan Jumlah Kapal Perikanan di Sulawesi Selatan**



*Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan*

Sementara itu, jika ditinjau dari jenis kapal perikanan laut yang digunakan, mayoritas nelayan di Sulawesi Selatan menggunakan perahu motor tempel. Di tahun 2022, tercatat sebanyak 30 ribu perahu motor tempel yang dioperasika. Kapal motor menjadi moda terbanyak berikutnya, dengan jumlah yang mencapai 24,9 ribu di tahun 2022, meningkat sebanyak kurang lebih 2.400 kapal dari tahun 2021. Dalam kurun tahun 2019-2022, penggunaan kapal motor di untuk perikanan tangkap mengalami trend peningkatan meskipun tidak secara progresif. Di saat yang sama, penggunaan perahu tanpa motor tercatat mengalami penurunan setiap tahunnya di rentang 2019-2022. Di tahun 2022, jumlah penggunaan perahu tanpa motor tercatat masih berada di kisaran 1.200.

**Gambar 3.21**  
**Perkembangan Jumlah Kapal Perairan Umum Darat**  
**Berdasarkan Jenis Mesin di Sulawesi Selatan**



*Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan*

Potensi dari sektor transportasi laut dapat dilihat dari beberapa aspek yang berkaitan dengan aktivitas transportasi laut dan juga jumlah infrastruktur pelabuhan yang tersedia pada suatu region. Sejumlah indikator utama dalam pengukuran potensi transportasi laut adalah: 1) Tingkat Kunjungan Kapal, 2) Arus Barang, dan 3) Jumlah Pelabuhan.

Khusus untuk pelabuhan perikanan, Sulawesi Selatan baru memiliki satu pelabuhan yang diklasifikasikan sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara, dan selebihnya merupakan Pangkalan Pendaratan Ikan (*fish landing sites*). Pelabuhan perikanan satu-satunya di Sulawesi Selatan adalah Pelabuhan Perikanan Untia yang berlokasi di Kota Makassar. Total jumlah *fish landing sites* di Sulawesi Selatan sebanyak 26. Jika dilihat dari sebaran jumlah pelabuhan di masing-masing kawasan, jumlah pelabuhan di Sulawesi Selatan terdistribusi secara merata di ketiga region. Per tahun 2024, masing-masing region tercatat memiliki total sebanyak 11 pelabuhan yang terdaftar secara resmi dalam sistem kepelabuhanan nasional oleh Departemen Perhubungan.

## **Jumlah dan Aktifitas Pelabuhan**

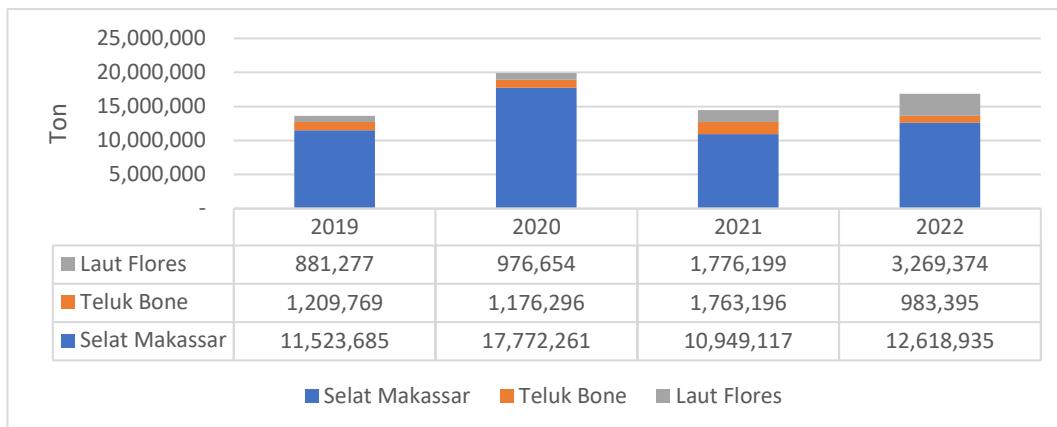
Sulawesi Selatan berperan sebagai pintu gerbang dan pusat roda perputaran (*hub*) perekonomian untuk Kawasan Timur Indonesia. Hal ini membuat Pelabuhan Soekarno Hatta yang berlokasi di Kota Makassar memberikan kontribusi yang signifikan bagi arus lalu lintas barang via laut yang akan memasuki wilayah Indonesia bagian timur. Jika dilihat dari volume bongkar-muat barang di Pelabuhan Makassar di tahun 2021-2022, terjadi peningkatan yang cukup besar, baik pada aktivitas bongkar maupun muat. Volume bongkar barang mengalami peningkatan sebesar 1,2 juta ton, dari yang sebelumnya sebesar 6,19 juta ton di tahun 2021 menjadi 7,39 juta ton di tahun 2022. Sementara itu, aktivitas muat barang di Pelabuhan Makassar juga mengalami lonjakan sebesar 570 ribu ton, dari yang sebelumnya sebanya 3,47 juta ton di tahun 2021 menjadi 4,04 juta ton di tahun 2022. Meningkatnya volume bongkar muat barang di Pelabuhan Makassar mengindikasikan terjadinya peningkatan volume transaksi perdagangan atau aktivitas perekonomian, baik di Sulawesi Selatan, maupun di sejumlah wilayah lainnya di Kawasan Timur Indonesia.

Berdasarkan institusi pengelolanya, BPS memberikan klasifikasi pelabuhan di Indonesia ke dalam dua kelompok: 1) Pelabuhan yang diusahakan, dan 2) Pelabuhan yang tidak diusahakan. Pelabuhan yang diusahakan adalah pelabuhan yang berada dibawah pengelolaan PT.Pelabuhan Indonesia (Pelindo), sedangkan pelabuhan yang tidak diusahakan adalah pelabuhan yang dikelola langsung oleh unit pelaksana teknis Kanwil Departemen Perhubungan (Dephub).

Dari data BPS, per tahun 2022, ada 2 buah pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo di Sulawesi Selatan, yaitu Pelabuhan Makassar, dan Pelabuhan Parepare. Adapun pelabuhan-pelabuhan lainnya adalah pelabuhan dengan status tidak diusahakan. Berdasarkan data informasi pelabuhan nasional yang dirilis oleh Departemen Perhubungan, setidaknya terdapat 31 pelabuhan yang dikelola oleh UPT Dephub di Sulawesi Selatan per tahun 2024.

Dari aktivitas volume bongkar barang, mayoritas aktivitas pembongkaran petikemas di Sulawesi Selatan dilakukan di area Selat Makassar. Gambar 3.22 menunjukkan total volume bongkar barang yang dilakukan di Pelabuhan-pelabuhan di Selat Makassar mencapai 12,61 juta ton pada Tahun 2022. Selanjutnya, pelabuhan-pelabuhan yang berada di Kawasan Laut Flores menempati urutan kedua dengan total volume bongkar petikemas mencapai 3,26 juta ton di tahun yang sama, dan Teluk Bone sebesar 983 ribu ton.

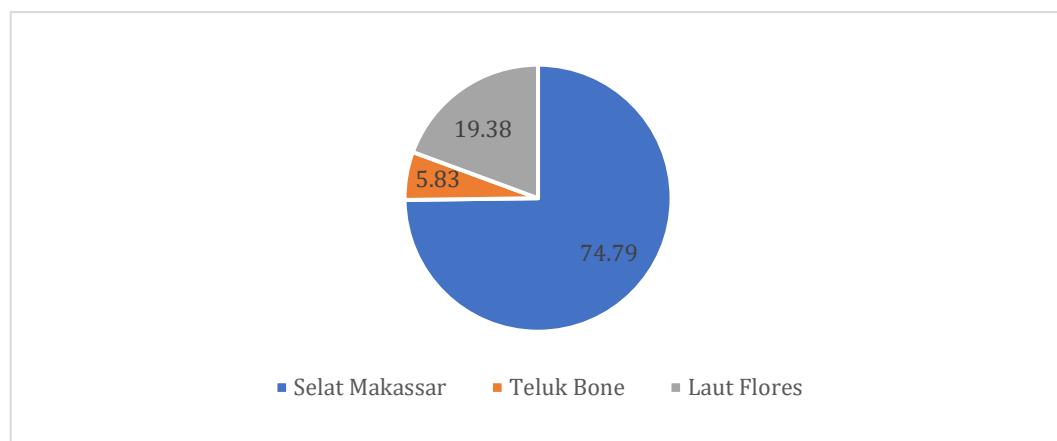
**Gambar 3. 22**  
**Distribusi Volume Bongkar Barang di Sulawesi Selatan (Ton)**



*Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan*

Dari sebaran tersebut, sebesar 74,79% volume pembongkaran petikemas direalisasikan di Selat Makassar, sedangkan Laut Flores dan Teluk Bone masing-masing 19,38% dan 5,83%. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas barang yang dikirimkan ke Sulawesi Selatan melalui Selat Makassar (Gambar 3.23).

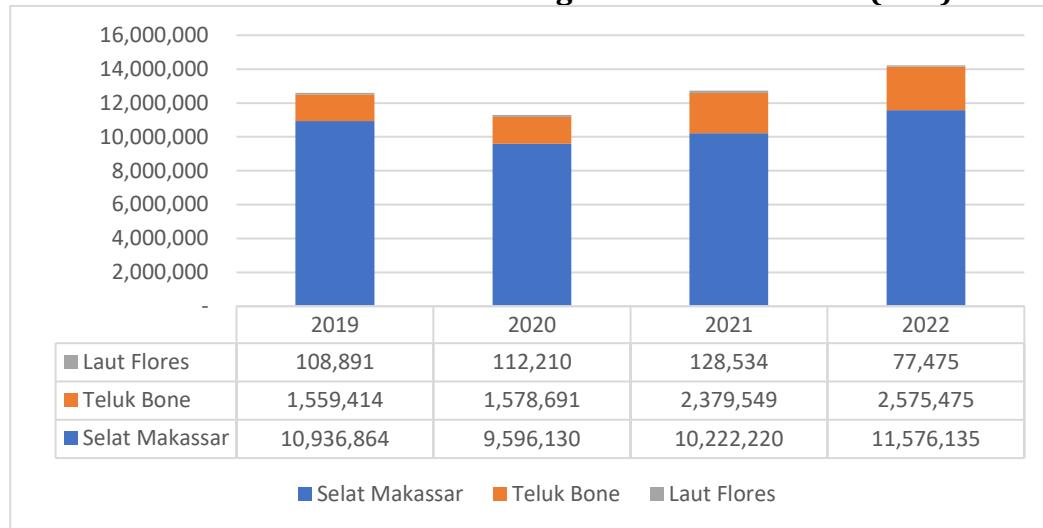
**Gambar 3. 23**  
**Persentase Volume Bongkar Petikemas di Masing-Masing Region**



*Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan*

Sementara itu, dari aktivitas muat petikemas, kontribusi oleh Selat Makassar semakin dominan. Total realisasi muat barang di pelabuhan-pelabuhan yang berada di Kawasan Selat Makassar berada di kisaran 9,59-11,50 juta ton dalam kurun empat tahun terakhir. Angka ini relative sangat besar jika dibandingkan dengan realisasi muat petikemas yang dilakukan di dua region lainnya, dimana Laut Flores berada di kisaran 100 ribu ton, dan Teluk Bone sebesar 1,5-2,5 Juta ton (Gambar 3.24)

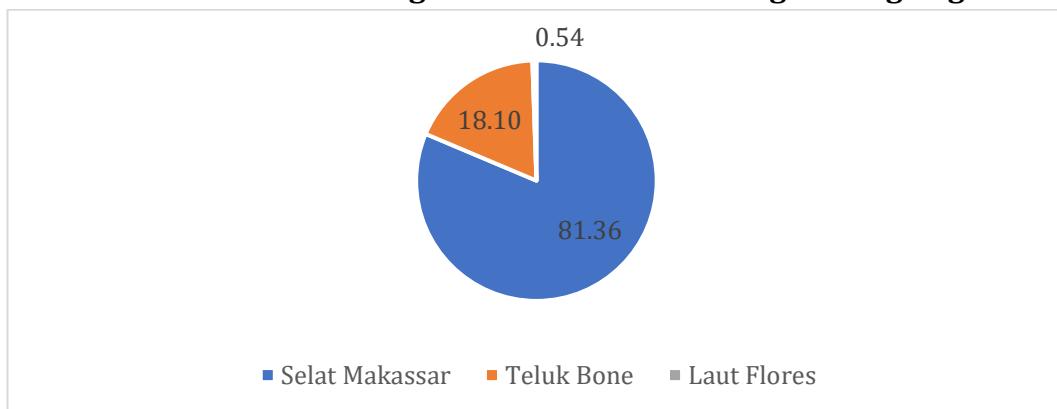
**Gambar 3. 24**  
**Distribusi Volume Muat Barang di Sulawesi Selatan (Ton)**



*Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan*

Secara proporsional, total realisasi muat barang di Pelabuhan Selat Makassar mencapai 81% dari total volume pemuatan petikemas yang direalisasikan di Sulawesi Selatan. Teluk Bone mencakup 18,10%, sedangkan Laut Flores sebesar 0,54%. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas pengiriman barang melalui petikemas, baik via pelayaran dalam negeri maupun luar negeri, dikirim melalui Selat Makassar.

**Gambar 3. 25**  
**Persentase Volume Bongkar Petikemas di Masing-Masing Region**



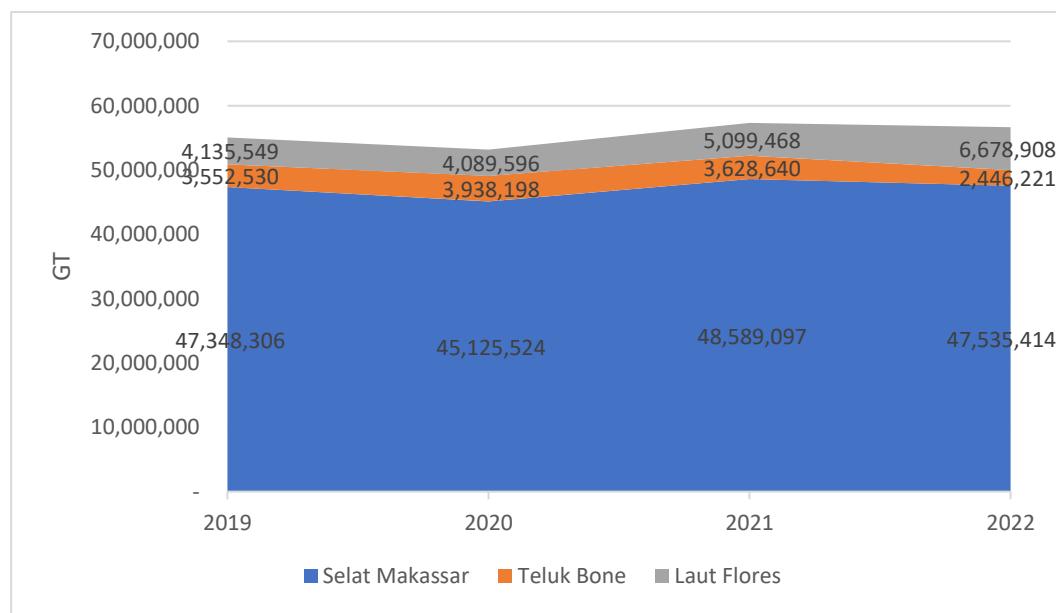
*Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan*

Perbandingan antara Laut Flores dan Teluk Bone memperlihatkan bahwa terjadi perubahan proporsi yang cukup signifikan antara keduanya jika dilihat dari kedua perspektif berbeda (bongkar dan muat). Dari sisi aktivitas bongkar barang, Laut Flores memiliki intensitas yang lebih tinggi dibanding Teluk Bone, namun dari aspek muat barang, Teluk Bone memiliki kontribusi yang lebih besar.

## **Jumlah Kunjungan Kapal (Ship Call)**

Aktivitas transportasi laut di suatu daerah dapat diukur dari seberapa banyak dan seberapa besar kapasitas kapal yang mendatangi pelabuhan di suatu region tersebut. Semakin besar kapasitas kapal, sebagaimana yang dinyatakan dalam satuan *Gross Tonnage* (GT), maka cenderung semakin banyak dan besar pula muatan yang melalui pelabuhan tersebut. Semakin banyak kapal yang mengunjungi suatu pelabuhan mengindikasikan tingkat kesibukan yang terjadi pada suatu wilayah.

**Gambar 3.26  
Perbandingan Kunjungan Kapal Pelayaran Menurut Jumlah Tonase**



*Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan*

Jika ditinjau dari ukuran kapal yang mengunjungi pelabuhan yang ada di Sulawesi Selatan, pelabuhan-pelabuhan yang ada di Kawasan Selat Makassar mencatatkan kunjungan kapal pelayaran dengan total ukuran GT terbesar dibandingkan dengan Laut Flores dan Teluk Bone. Total GT kapal pelayaran yang mengunjungi Pelabuhan di Selat Makassar dalam kurun empat tahun terakhir berada di kisaran 45-47 Juta GT. Sementara itu, Teluk Bone dan Laut Flores mencatatkan total GT masing-masing di kisaran 2,4 Juta dan 6,6 Juta GT di Tahun 2022. Hal ini sekali lagi mengindikasikan bahwa Selat Makassar masih menjadi destinasi utama untuk jalur pelayaran yang dilakukan oleh kapal-kapal berukuran besar.

### **3.4.2.2 Energi**

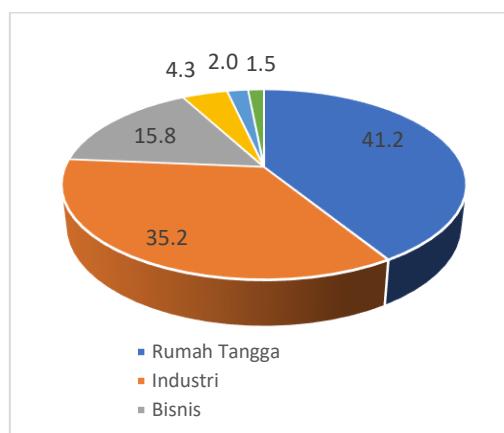
Konsumsi energi, terutama listrik terus meningkat di Sulawesi Selatan. Pada tahun 2018, konsumsi energi listrik mencatatkan angka 5,472.48 GWh, naik 56,38 persen menjadi 8.558,03 GWh di tahun 2023. Konsumen energi

terbesar dari kegiatan rumah tangga sekitar 41,2 persen, lalu diikuti oleh sektor industri dan bisnis masing-masing 35,2 persen dan 15,8 persen.

Rasio elektrifikasi di Sulawesi Selatan mencapai 99,8% pada tahun 2022. Sementara itu, Sulawesi Selatan mencatatkan capaian untuk bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) pada sistem kelistrikan di level 33 persen, dan surplus listrik secara keseluruhan mencapai 560 mega-watt. Meskipun demikian, isu mengenai ketersediaan dan akses energi listrik sangat perlu menjadi perhatian serius. Gangguan distribusi listrik masih relatif tinggi di Sulawesi Selatan yakni sebanyak 22,15 kali per 100 kms, sedangkan nasional dan Jawa masing-masing hanya 5,47 per 100 kms dan 1,18 kali per 100 kms.

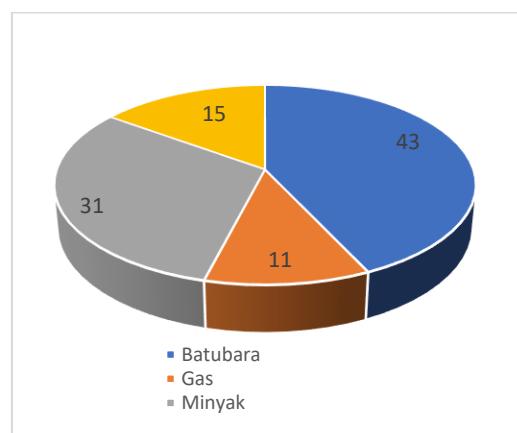
Dari aspek bauran energi primer di Sulawesi Selatan, sebagian besar masih menggunakan bahan bakar dari batubara dan minyak yang menjadi penyumbang emisi karbon. Capaian bauran EBT Sulawesi Selatan sempat menjadi yang tertinggi di tingkat nasional ketika pada tahun 2022, dan telah melampaui target yang diberikan oleh pemerintah pusat, yakni 23 persen di Tahun 2025.

**Gambar 3.27  
Porsi Konsumsi Energi  
Berdasarkan Jenis Pelanggan  
Tahun 2023**



Sumber: Stastistik PLN, diolah

**Gambar 3.28  
Porsi Bauran Energi Primer  
Sulawesi Selatan**



Sumber: Rencana Umum Energi Daerah (RUED), diolah

Inovasi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan energi dan peningkatan pemanfaatan energi hijau direalisasikan dengan pendirian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terbesar di Sulawesi Selatan, yakni PLTS Hybrid Selayar yang terletak di Desa Parak Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Selayar. PLTS ini memiliki kapasitas hingga 1,3 megawatt peak (MWp). Dengan total nilai investasi sebesar Rp.39,5 Miliar

Pengoperasian PLTS ini diestimasikan dapat memberikan nilai tambah, baik dari segi ekonomi maupun peningkatan kualitas ekosistem. Melalui PLTS tersebut, total emisi karbon yang dapat direduksi mencapai 1.400 ton per tahun, dan penghematan biaya operasional yang dapat dibukukan mencapai Rp 16,5 Miliar per tahun.

Potensi sumber daya perairan yang melimpah baik laut maupun daratan dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan. Dalam dokumen RUED, potensi energi terbarukan di Sulawesi Selatan sangat tinggi. Misalnya energi air sebesar 2947 MW, energi minihidro dan mikrohidro 762 MW, energi surya 7588 MWp, energi angin atau bayu sekitar 4.193 MWe dan panas bumi sebesar 455 MWe. Dalam upaya memenuhi kebutuhan energi ke depan serta pencapaian target pengurangan emisi, Sulawesi Selatan akan meningkatkan eksplorasi potensi energi baru terbarukan dengan melakukan survei dan updating data potensi energi air, surya, angin, gelombang, arus laut, geothermal dan panas laut.

**Tabel 3. 10  
Potensi Energi Sulawesi Selatan**

No	Jenis Energi	Satuan	Potensi
1	Air	MW	2947
2	Mini/Mikro Hidro	MW	762
3	Biomasa	MW	959
4	Surya	MWp	7588
5	Angin	MWe	4193
6	Panas Bumi	MWe	455
7	Minyak Bumi	Juta Barel	13,2
8	Gas Bumi	BCF	800
9	Batubara	Juta Ton	231

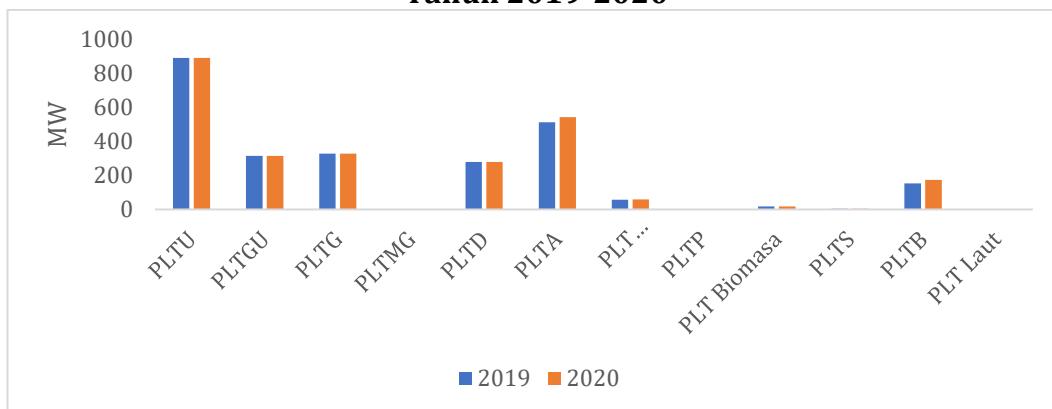
*Sumber: Rencana Umum Energi Daerah (RUED), diolah*

Sebagai daerah dengan kapasitas perairan besar, Sulawesi Selatan masih kurang memanfaatkan sumber daya lautnya yang luas untuk pemanfaatan energi terbarukan. Pengembangan energi terbarukan dari ekosistem perairan laut masih belum mendapat perhatian dalam perencanaan daerah. Energi laut yang berpotensi untuk dikembangkan berupa lepas pantai, arus laut, gelombang laut, dan suhu laut. Potensi energi laut ini belum terukur, sehingga ke depannya diperlukan riset dan pengembangan untuk pemanfaatan energi berbasis perairan laut.

Saat ini, produksi energi terutama listrik masih banyak menggunakan sumber energi air sungai seperti PLTA dan PLTM/PLTMH, meskipun belum optimal penggunaannya. Pada tahun 2020, produksi energi dari PLTA mencapai 543 MW, sementara PLTM/PLTMH sebesar 59,6. Padahal potensi sumber energi air yang mengandalkan perairan darat cukup besar karena

memiliki luas aliran DAS yang juga besar. Dalam dokumen RUED, total potensi kapasitas energi tenaga air di Sulawesi Selatan mencapai 3709 MW yang terdiri dari PLTA 2947 MW, dan PLTM+PLTMH sebesar 762 MW (Tabel 3.10).

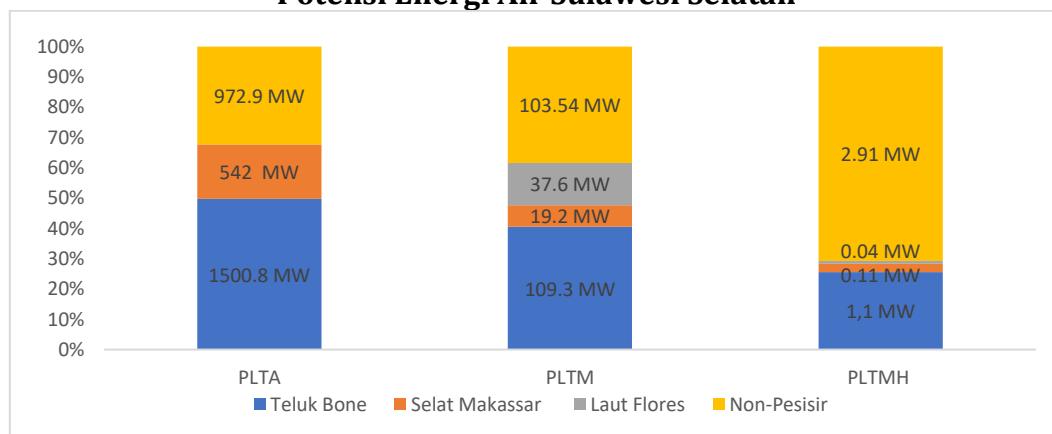
**Gambar 3.29**  
**Produksi Listrik Berdasarkan Jenis Pembangkit di Sulawesi Selatan**  
**Tahun 2019-2020**



Sumber: Rencana Umum Energi Daerah (RUED), diolah

Dari total 3709 MW potensi kapasitas energi tenaga air di Sulawesi Selatan, lebih dari 49 persen potensi disumbang oleh kawasan Teluk Bone seperti Luwu Utara dan Luwu Timur. Posisi kawasan Teluk Bone yang dialiri DAS Larona mendukung potensi sumber energi air tersebut. Potensi kapasitas energi air terbesar kedua yakni Kawasan Non Pesisir yang dialiri DAS Jeneberang, DAS Saddang dan DAS Walannae. Kawasan ini menyumbang 33 persen dari total potensi kapasitas energi air yang ada.

**Gambar 3.30**  
**Potensi Energi Air Sulawesi Selatan**



Sumber: Rencana Umum Energi Daerah (RUED), diolah

Saat ini, salah satu PLTA yang menyumbang untuk pemenuhan konsumsi listrik terbesar yakni PLTA Malea Energy yang terletak di aliran Sungai

Saddang. PLTA ini memiliki kapasitas pembangkit mencapai 90 MW dengan produksi 70 hingga 80 MW setiap harinya. Listrik yang dihasilkan PLTA Malea setiap harinya langsung dibeli oleh PLN dengan harga Rp 1.398,53 per kilowatt hour (kWh). PLTA ini bisa menyumbang 30 hingga 35 persen konsumsi listrik di Sulawesi Selatan.

### **3.4.2.3 Industri Manufaktur Terkait Ekonomi Biru**

Peran sentra Industri Kecil Menengah (IKM) Pengolahan Ikan memegang peranan yang sangat penting dalam proses hilirisasi hasil perikanan, dan peningkatan nilai tambah bagi daerah. Sulawesi Selatan memiliki sejumlah sentra IKM pengolahan ikan yang terdapat di beberapa kabupaten/kota, dan salah satu yang paling besar adalah sentra pengolahan ikan yang berlokasi di Kelurahan Lappa Kabupaten Sinjai yang didirikan sejak tahun 2017. Volume produksi yang dihasilkan dari aktivitas pengolahan ikan di sentra tersebut diperkirakan mencapai 5,5 ton produk olahan setiap bulannya, dengan total nilai produksi mencapai lebih Rp 100 Juta. Sentra pengolahan ikan tersebut juga telah dilengkapi dengan fasilitas *cold storage* berkapasitas 60 ton yang dapat digunakan untuk menyimpan dan menopang persediaan bahan baku ikan jika sewaktu-waktu terjadi penurunan pada pasokan ikan.

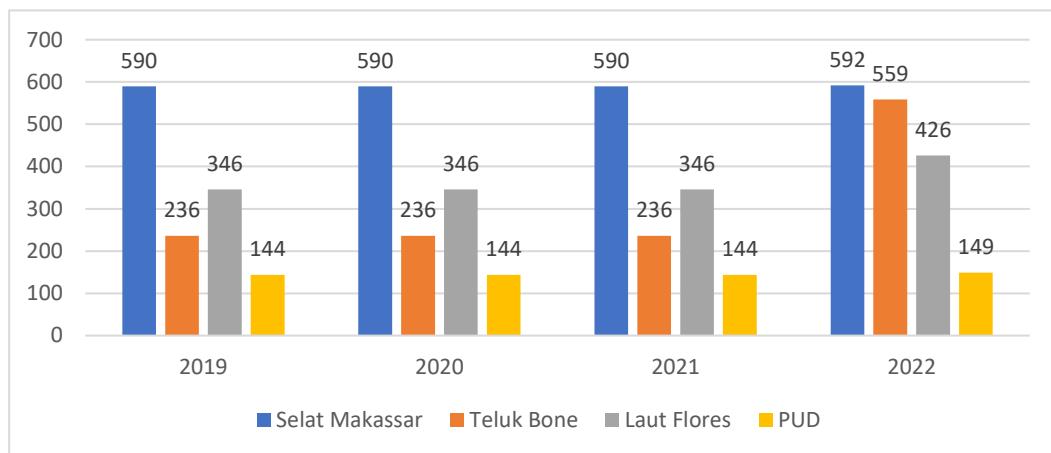
Hingga saat ini, Sentra IKM Pengolahan Ikan di Kabupaten Sinjai telah memiliki 10 mitra IKM yang memproduksi sejumlah produk olahan berbahan baku ikan. Produk turunan tersebut mencakup bakso ikan, abon ikan, kerupuk dan amplang, siomay, nugget, dan pakan ternak, dengan jumlah keterlibatan tenaga kerja mencapai 50 orang.

Penilaian potensi sektor manufaktur pada ekonomi biru Sulawesi Selatan didasarkan pada sejumlah aspek yang berkaitan dengan aktivitas industri pengolahan dan juga manufaktur untuk perkapanan. Aspek tersebut mencakup: 1) Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI), 2) Jumlah Pabrik Rumput Laut, dan 3) Jumlah Industri Perkapalan. Jumlah pabrik rumput laut disajikan secara terpisah mengingat komoditas rumput laut menjadi komoditas perairan utama yang dimiliki oleh Sulawesi Selatan.

#### ***Industri Pengolahan Ikan***

Unit pengolahan ikan (UPI) adalah unit usaha yang melakukan aktivitas pengolahan ikan segar untuk menjadi produk selanjutnya. Keberadaan unit pengolahan ikan sangat penting untuk mendorong industri pengolahan produk perikanan. Di Sulawesi Selatan, kawasan dengan jumlah UPI terbesar adalah Selat Makassar. Hal ini disebabkan oleh keberadaan UPI dalam jumlah yang cukup besar di Kabupaten Barru dan Kota Makassar. Khusus untuk Kabupaten Barru sendiri, jumlah UPI di Kabupaten Barru menjadi yang terbanyak di Sulawesi Selatan dalam kurun empat tahun terakhir.

**Gambar 3. 31**  
**Jumlah Unit Pengolahan Ikan per Region**  
**Tahun 2019-2022**



*Sumber: BPS (2023), diolah*

Jumlah UPI di Selat Makassar tercatat berada di kisaran angka 590 selama tahun 2019-2022, sedangkan jumlah UPI di Laut Flores tercatat mengalami peningkatan dari yang sebelumnya berjumlah 346 dalam kurun 2019-2021, menjadi 426 di tahun 2022. Tidak hanya Laut Flores, kabupaten yang berada di Kawasan Teluk Bone juga mencatatkan peningkatan yang cukup signifikan untuk jumlah UPI di tahun 2022. Sebelumnya, yakni di tahun 2019-2021, jumlah UPI di Teluk Bone masih berada di angka 236, namun memasuki tahun 2022, jumlah tersebut meningkat menjadi 559. Pertambahan signifikan tersebut dikontribusikan oleh penambahan jumlah UPI yang cukup besar di Kota Palopo.

### ***Industri Pengolahan Rumput Laut***

Rumput laut menjadi komoditas budi daya kelautan andalan Sulawesi Selatan. Keberadaan pabrik pengolah rumput laut akan dapat mendorong peningkatan nilai dan daya saing dari produk rumput laut itu sendiri. Berdasarkan survei yang dilakukan di tahun 2022, jumlah perusahaan yang bergerak di industri pengolahan rumput laut di Sulawesi Selatan ada sebanyak 29. Kawasan Teluk Bone sebanyak 20 industri. Selanjutnya, Selat Makassar memiliki sebanyak 8 industri rumput laut, dan satu pabrik lainnya terletak di Kabupaten Gowa yang termasuk dalam kawasan non-pesisir.

### ***Industri Perkapalan***

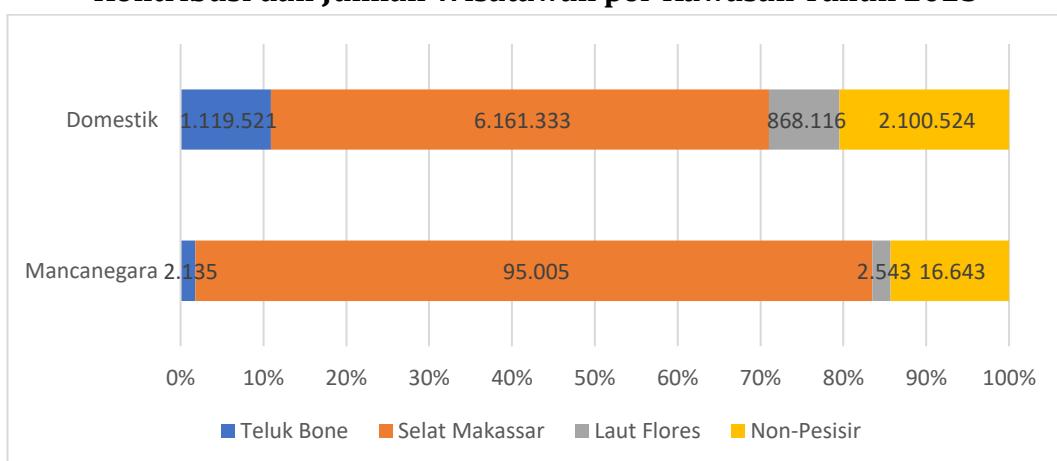
Industri perkapanan di Sulawesi Selatan saat ini hanya berada di dua lokasi, yakni Kota Makassar dan Bulukumba. Industri kapal modern saat ini dikelola oleh PT Industri Kapal Indonesia (IKI) di Kota Makassar, sedangkan Kabupaten Bulukumba memiliki sentra produksi untuk kapal tradisional

phinisi. Belum tersedia data tentang produksi dan nilai yang dihasilkan industri ini.

#### 3.4.2.4 Pariwisata

Sektor pariwisata memegang peran penting dalam perekonomian Sulawesi Selatan, dengan didukung oleh destinasi wisata yang beragam, seperti alam, budaya, dan buatan. Kegiatan ekonomi yang terkait dengan pariwisata akan tumbuh seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, baik dari domestik maupun mancanegara. Data menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 116.326 wisatawan di tahun 2023, naik dibandingkan tahun 2022 yang hanya berjumlah 84.563 wisatawan. Sementara itu, jumlah kunjungan wisatawan domestik juga meningkat dari 9.637.827 wisatawan di tahun 2022 menjadi 10.249.494 wisatawan di tahun 2023. Jumlah kunjungan per kawasan dapat dilihat pada Gambar 3.32. Kontribusi yang dominan di Selat Makassar terutama ditopang oleh Kota Makassar, yang merupakan daerah dengan jumlah destinasi wisata beragam dan tempat transit bagi wisatawan mancanegara sebelum berkunjung ke daerah lainnya. Berbeda dengan wisatawan mancanegara, jumlah kunjungan wisatawan domestik lebih tersebar ke setiap kawasan, meskipun tetap didominasi oleh kabupaten/kota di Selat Makassar.

**Gambar 3. 32  
Kontribusi dan Jumlah Wisatawan per Kawasan Tahun 2023**

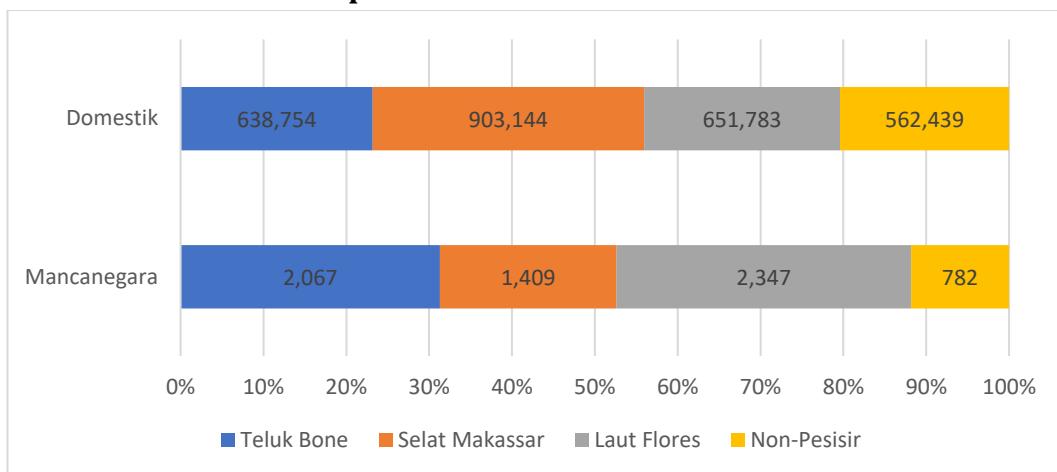


*Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan, diolah*

Khusus yang terkait dengan pengembangan ekonomi biru, jumlah kunjungan tersebut dapat dilihat secara khusus pada wisatawan yang mengunjungi objek wisata berbasis sumberdaya perairan, khususnya wisata tirta. Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, wisata

tirta diartikan kegiatan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

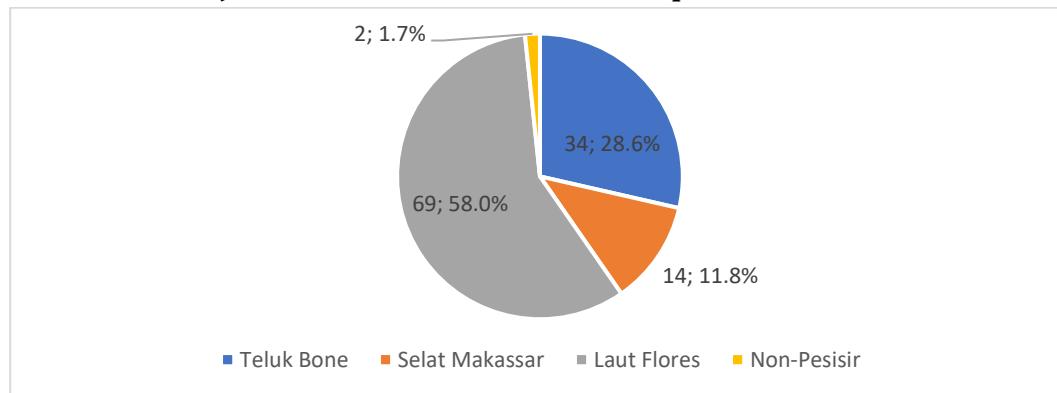
**Gambar 3.33**  
**Kontribusi dan Jumlah Wisatawan di Destinasi Wisata Tirta per Kawasan Tahun 2023**



*Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan, diolah*

Jumlah kunjungan wisatawan ke setiap kawasan terkait erat dengan jumlah destinasi wisata yang terdapat di kawasan. Secara umum, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki keunggulan dari segi destinasi wisata alam dan budaya yang tersebar di beberapa kabupaten/kota, khususnya wisata tirta. Data menunjukkan, jumlah destinasi wisata tirta di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 119 lokasi. Sebagian besar objek wisata bahari atau 58,4 persen berada di Laut Flores, terutama di Kabupaten Kepulauan Selayar. Posisi kedua ditempati oleh kawasan Teluk Bone (28,6%), yang terutama ditopang oleh Kabupaten Luwu.

**Gambar 3.34**  
**Distribusi Objek Wisata Tirta 119 Destinasi per Kawasan Tahun 2023**



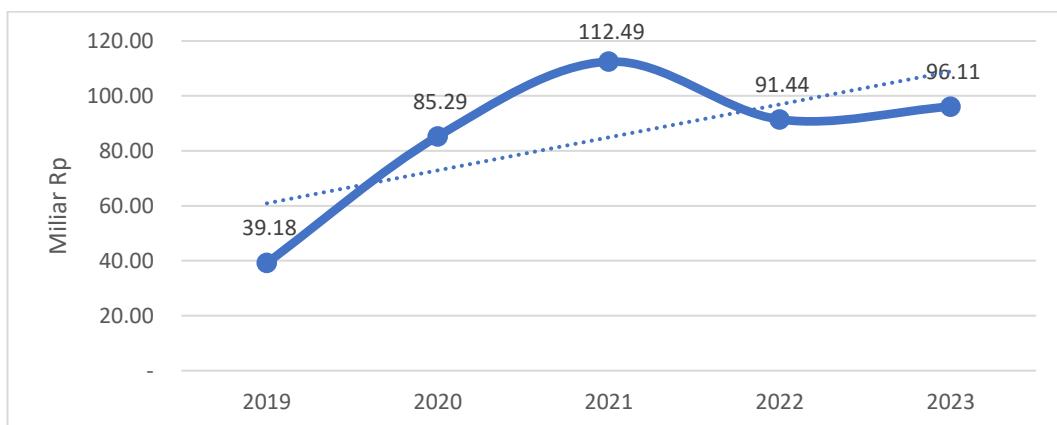
*Sumber: Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2023*

### 3.4.3 Sektor-sektor Potensial dan Baru Tumbuh

#### 3.4.3.1 Bioteknologi

Potensi pengembangan produk bioteknologi yang memanfaatkan hasil laut di Sulawesi Selatan memiliki prospek yang cukup menjanjikan. Hal ini salah satunya dapat direfleksikan dari tren kinerja perekonomian yang diperlihatkan oleh industri pengolahan di bidang industri kimia, farmasi, dan obat tradisional di Sulawesi Selatan, setidaknya dalam kurun lima tahun terakhir. Secara umum, tren industri farmasi dan obat-obatan di Sulawesi Selatan menunjukkan pertumbuhan yang cukup progresif. Pertumbuhan geliat industri farmasi dan obat-obatan dapat membuka peluang bagi pemanfaatan hasil laut untuk dijadikan input dalam produksi obat-obatan.

**Gambar 3. 35  
Perkembangan Nilai PDRB Subsektor Industri Pengolahan di Bidang Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional di Sulawesi Selatan**



Sumber: Badan Pusat Statistik, Sulawesi Selatan

Selain potensi dari sub sektor farmasi, Sulawesi Selatan juga memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan produk rumput laut olahan berupa agar-agar dan karaginan. Hal ini disebabkan Sulawesi Selatan memiliki kapasitas produksi rumput laut terbesar di tingkat nasional, dan memiliki garis pantai yang panjang. Berdasarkan sebuah riset yang dirilis oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan, pengolahan rumput laut sebagai bahan mentah menjadi produk hasil olahan lebih lanjut berupa *Alkali Treated Cottoni* (ATC), *Semi Refined Carrageenan* (SRC) dan *Refined Carrageenan* (RC) akan memberikan nilai tambah bagi ekspor rumput laut dan mengkontribusikan dampak positif bagi perekonomian berupa peningkatan penerimaan negara dalam bentuk PPH dan PPN sebesar Rp 2,12 Miliar per tahun, penyerapan tenaga kerja, peningkatan jumlah pembudidaya yang akan mensuplai kebutuhan dari industri pengolahan rumput laut tersebut.

Lebih lanjut, berdasarkan data yang dirilis oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulawesi Selatan, saat ini Sulawesi Selatan telah memiliki empat pabrik pengolahan rumput laut yang telah beroperasi, dimana dua diantaranya terletak di Kota Makassar, dan dua lainnya masing-masing di Takalar dan Maros. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga membangun dua pabrik pengolahan rumput laut lainnya yang berada di Bone dan juga Luwu. Kapasitas pengolahan rumput laut di kedua pabrik yang baru tersebut diestimasikan sekitar 2-3 ton per hari.

Selain itu, inovasi makanan berbahan dasar rumput laut di Sulawesi Selatan oleh CEDUS UNHAS meliputi beberapa produk: mie rumput laut (40% rumput laut basah), cendol rumput laut (70% rumput laut basah), stik rumput laut (30% rumput laut basah), pastel rumput laut (40% rumput laut basah untuk kulit dan isi), nastar rumput laut (40% rumput laut basah), brownies rumput laut (30% rumput laut basah), dan nori-like dari *Ulva* sp. Pusat Unggulan IPTEKS Pengembangan dan Pemanfaatan Rumput Laut Universitas Hasanuddin (PUI-P2RL-UNHAS) berfokus pada enam bidang kajian: produksi bibit unggul, teknologi pembesaran, penanggulangan hama, manajemen lingkungan, pemanfaatan produk, dan pasca panen. PUI-P2RL-UNHAS juga bekerja sama dengan berbagai mitra seperti Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan UNHAS, Fakultas Farmasi UNHAS, Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Politeknik Pertanian Pangkep, Politeknik Negeri Ujungpandang, Asosiasi Petani dan Pengelola Rumput Laut Indonesia, LP3K UNHAS, serta balai riset perikanan untuk mendukung inovasi dan pengembangan rumput laut yang berkelanjutan serta meningkatkan ekonomi lokal.

Semua kelompok industri di atas adalah kegiatan produksi yang menciptakan nilai tambah dari bahan baku berbasis sumber daya kelautan. Pengembangan industri seperti ini seyogyanya menjadi prioritas dan motor penggerak hilirisasi produk ekonomi biru sehingga menjadi sumber pertumbuhan baru secara berarti.

### **3.4.3.2 Blue carbon**

Mangrove, lamun, rumput laut dan lahan basah memiliki potensi yang cukup menjanjikan untuk berperan sebagai agen penyerap karbon (*blue carbon agent*). Hal ini disebabkan karena mangrove, lamun, rumput laut, beserta lahan gambut memiliki kapasitas sekuestrasi karbon yang besar. Hal ini tentunya dapat dimanfaatkan oleh Sulawesi Selatan, mengingat Sulawesi Selatan memiliki sebaran lahan yang cukup luas, khususnya untuk rumput laut.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Kementerian Lingkungan Hidup, Sulawesi Selatan memiliki hutan mangrove seluas 12.256,90 Ha. Kapasitas sekuestrasi karbon tahunan

yang dimiliki oleh mangrove diestimasi sebesar 6 - 8 Mt CO<sub>2</sub> equivalent per hektar. Dari estimasi tingkat sekuestrasi tersebut, Sulawesi Selatan memiliki potensi total penyerapan karbon mangrove sebesar 73.541 – 98.055 metric ton setara karbon dioksida. Dengan penetapan harga minimum carbon sebesar Rp 30.000 per ton CO<sub>2</sub>e, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi nilai pemanfaatan jasa lingkungan oleh hutan mangrove sebagai carbon agent hingga sebesar Rp 2,94 Miliar per tahun. Namun demikian, potensi nilai ekonomi dari jasa ekosistem ini mengalami tantangan untuk direalisasikan karena kondisi hutan mangrove di Sulawesi Selatan yang banyak mengalami kerusakan. Di tahun 2022, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan mengungkapkan bahwa sekitar 90% dari kawasan hutan mangrove di Sulawesi Selatan dalam keadaan rusak. Diperlukan upaya restorasi kawasan hutan mangrove secara serius agar potensi manfaat sekuestrasi karbon ini dapat direalisasikan.

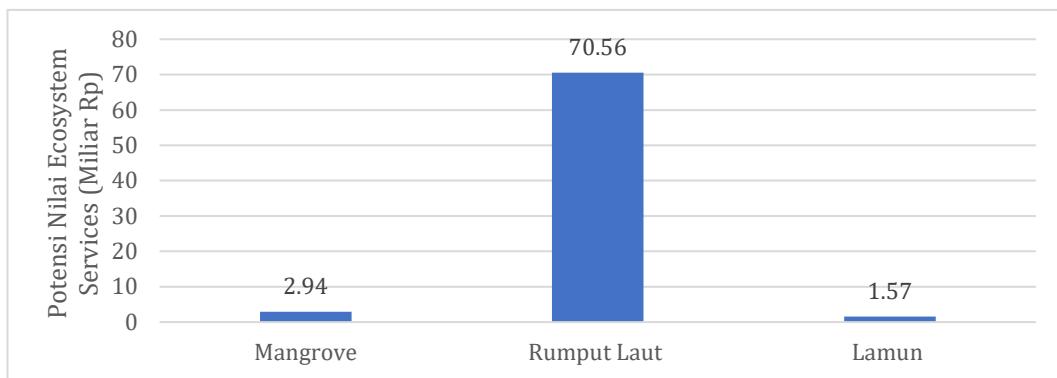
Dari sektor rumput laut, Sulawesi Selatan memiliki total luas lahan budidaya rumput laut sebesar 408 juta m<sup>2</sup>, atau sekitar 40.805 hektar di tahun 2022 berdasarkan rilis Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penelitian yang dilakukan oleh S.Mashoreng (2019) mengungkapkan bahwa kapasitas sekuestrasi karbon dari rumput laut diestimasi berada rata-rata di kisaran 57,64 ton CO<sub>2</sub>/Ha/Tahun dari rumput laut yang dikembangkan pada perairan laut. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka potensi total sekuestrasi karbon Sulawesi Selatan dari aktivitas budidaya rumput laut adalah sebesar 2,35 juta ton setiap tahunnya. Dengan asumsi pemanfaatan rumput laut sebagai agen penyerap karbon secara optimal, total nilai ekonomi dari jasa ekosistem yang dihasilkan dari budidaya rumput laut di Sulawesi Selatan dapat mencapai sebesar Rp 70,56 Miliar setiap tahunnya.

Dari ekosistem lamun, Sulawesi Selatan memiliki total luas padang lamun sebesar 18.865 hektar. Total luasan tersebut tersebar di 13 kabupaten/kota. Berdasarkan estimasi yang diberikan oleh Duarte et al (2013), rata-rata tingkat sekuestrasi karbon oleh ekosistem padang lamun global adalah sebesar 2,78 ton karbon per hektar setiap tahunnya. Dengan dasar itu, padang lamun di Sulawesi Selatan diestimasi memberikan total serapan karbon sebesar 52.444,7 ton setiap tahunnya, dengan nilai Rp 1,57 Miliar.

Gambar 3.36 menunjukkan perbandingan potensi nilai karbon biru di Sulawesi Selatan. Saat ini, baru karbon biru dari mangrove yang metodologi pengukurannya sudah diakui dan karena itu dapat dikembangkan pengelolaan kawasannya untuk memperoleh *certified carbon credit* yang dapat dijual. Metodologi untuk pengukuran karbon biru untuk rumput laut dan padang lamun masih dalam tahap penelitian dan persetujuan dari komisi ilmiah IPCC

(*Inter-governmental Panel on Climate Change*) yang berada di bawah kordinasi UNFCCC.

**Gambar 3.36**  
**Estimasi Nilai Ekonomi dari Ecosystem Services Mangrove, Rumput Laut, dan Lamun di Sulawesi Selatan**



Sumber: Hasil estimasi penulis

#### 3.4.3.3 Blue Energy

Pemanfaatan sumber daya energi baru dan terbarukan di Sulawesi Selatan meliputi beberapa inisiatif penting untuk mencapai keberlanjutan energi. Salah satunya adalah pengolahan limbah *Euchema cottonii* menjadi bioetanol, yang dapat menghasilkan sekitar 5.126.197 barel bioetanol dari limbah yang ada. Selain itu, potensi energi terbarukan juga terlihat dari rencana pembangkit listrik tenaga arus laut di Jeneponto dengan kapasitas 537,69 watt per turbin, serta potensi Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut di Bulukumba dengan energi mencapai 28.676,62 joule/m<sup>2</sup>. Inisiatif ini menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan memiliki berbagai sumber daya terbarukan yang dapat dikembangkan untuk mendukung ketahanan energi dan keberlanjutan di wilayah tersebut.

Sulawesi Selatan memiliki potensi yang cukup menjanjikan pada penggunaan sumber air sebagai sumber energi terbarukan. Saat ini, Sulawesi Selatan memiliki lima Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang tersebar di tiga kabupaten, yakni: Pinrang, Luwu Utara, dan Tana Toraja. Kelima PLTA tersebut adalah: 1) PLTA Malea, 2) PLTA Bakaru, 3) PLTA Larona, 4) PLTA Balambano, dan 5) PLTA Karelbe. Tiga dari kelima PLTA tersebut (PLTA Larona, PLTA Balambano, dan PLTA Karelbe) adalah PLTA yang dioperasikan oleh PT Vale Indonesia. Kapasitas terpasang yang dihasilkan dari PLTA menjadi sumber listrik terbesar kedua di Sulawesi Selatan setelah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Dalam kurun lima tahun terakhir, persentase pasokan listrik Sulawesi Selatan yang dihasilkan oleh PLTA konsisten berada di kisaran 22-23%. Hal ini mengindikasikan bahwa pasokan listrik provinsi memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap volume debit air. Dengan menggunakan tarif listrik regular per kWh untuk keperluan rumah tangga kecil sebesar Rp.1.440,70, diperkirakan bahwa nilai ekonomi yang dihasilkan dari

pemanfaatan ekosistem perairan untuk penyediaan energi bagi rumah tangga di Sulawesi Selatan adalah minimal Rp.869 Milyar per tahun.

**Gambar 3.37**  
**Total Kapasitas Terpasang dari PLTA (MW)**



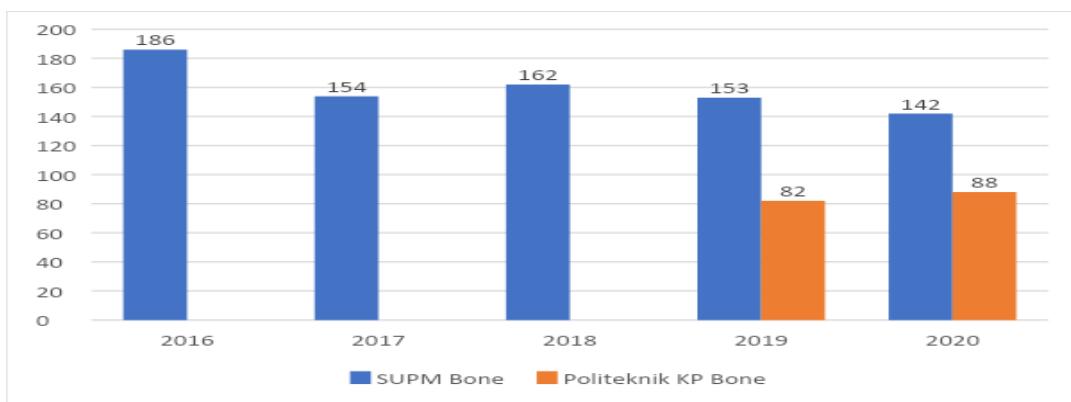
Sumber: Statistik Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM

#### 3.4.3.4 Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan

Per Tahun 2023, terdapat sebanyak 25 institusi pendidikan vokasi di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), yang memiliki jurusan kelautan/perikanan di Sulawesi Selatan. Dari total sebanyak 25 sekolah tersebut, 12 di antaranya adalah SMK yang memiliki jurusan agribisnis perikanan air tawar dan 13 lainnya memiliki jurusan agribisnis air payau dan laut.

Selain institusi pendidikan yang berada di bawah naungan Kemendikbud, Sulawesi Selatan juga memiliki 2 satuan pendidikan formal yang dikelola langsung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kedua satuan pendidikan formal tersebut adalah 1) Politeknik Kelautan dan Perikanan (KP) Bone, dan 2) Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Bone. Berdasarkan data Kelautan dan Perikanan dalam Angka Tahun 2022, Politeknik KP Bone tercatat telah menghasilkan lulusan sebanyak 170 orang dari kurun 2019-2020, sedangkan SUPM Bone sebanyak 797 orang dari Tahun 2016-2020.

**Gambar 3.38**  
**Tren Jumlah Lulusan Sekolah Perikanan di Sulawesi Selatan**



*Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022*

Lulusan dari Politeknik KP Bone di Tahun 2020 yang berjumlah 80 orang secara mayoritas bekerja pada sektor dunia usaha dan dunia industri yang berada di dalam negeri (62 orang), sedangkan, lulusan dari SUPM Bone yang berjumlah 142 orang secara mayoritas bekerja pada dunia usaha dan industri yang berada di luar negeri (38 orang), dan sebagian besar lainnya memilih untuk melanjutkan berkuliahan (37 orang).

### 3.5 Potensi Sosial Budaya Maritim dan Perairan Darat dalam mendukung Ekonomi Biru Sulawesi Selatan

#### 3.5.1 Inklusi sosial

Inklusi sosial dalam pemanfaatan sumber daya yang mendukung ekonomi biru di Sulawesi Selatan melibatkan berbagai upaya untuk memastikan partisipasi aktif dan manfaat yang adil bagi semua lapisan masyarakat, terutama komunitas pesisir dan nelayan lokal. Salah satu langkah penting adalah pemberdayaan nelayan melalui pelatihan teknologi dan pengelolaan perikanan berkelanjutan. Misalnya, nelayan lokal diberikan akses ke teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan pelatihan tentang praktik perikanan berkelanjutan untuk meningkatkan hasil tangkapan tanpa merusak ekosistem laut. Selain itu, nelayan juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya laut, memastikan bahwa mereka memiliki suara dalam kebijakan yang memengaruhi mata pencarian mereka. Upaya inklusi sosial ini juga mencakup pengakuan dan penghormatan terhadap keragaman ras dan agama, dengan melibatkan semua kelompok etnis dan komunitas agama dalam berbagai inisiatif ekonomi biru. Dukungan untuk usaha kecil dan menengah di sektor kelautan juga diperkuat untuk memberikan peluang yang setara bagi semua skala usaha, memastikan bahwa manfaat ekonomi biru dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Pelatihan dan pendidikan disediakan untuk meningkatkan keterampilan dalam budidaya laut, pengolahan hasil laut, dan manajemen sumber daya laut. Misalnya, program pelatihan untuk pengolahan ikan menjadi produk-produk

seperti kerupuk ikan dan abon ikan, dan pengolahan rumput laut menjadi produk bernilai tambah untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan memberdayakan perempuan dalam komunitas.

Pengembangan pariwisata bahari juga menjadi fokus dalam inklusi sosial. Masyarakat lokal dilibatkan dalam operasionalisasi destinasi pariwisata, menyediakan peluang kerja sebagai pemandu wisata, operator perahu, dan pekerja di sektor perhotelan. Seperti yang dilakukan di Desa Bira di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, dimana pemanfaatan sumber daya dilakukan terutama melalui pengembangan pariwisata. Desa ini terkenal dengan keindahan pantainya dan sebagai pusat pembuatan kapal tradisional Phinisi. Melalui program-program dari pemerintah, masyarakat setempat telah diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Akses ke pasar produk dan modal juga diperluas bagi usaha kecil di sektor kelautan dan perikanan, dengan perhatian khusus pada pemberdayaan perempuan dan usaha kecil yang mereka jalankan. Dukungan untuk usaha kecil dan menengah (UKM) yang dikelola masyarakat juga merupakan langkah kunci. Banyak masyarakat di Sulawesi Selatan menjalankan UKM yang terkait dengan ekonomi biru, seperti usaha budidaya rumput laut dan pengolahan hasil laut. Menyediakan akses ke modal, pelatihan kewirausahaan, dan dukungan pemasaran bagi UKM yang dimiliki atau dikelola oleh masyarakat dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah sangat penting untuk mendukung usaha di sektor ekonomi biru.

Perlindungan hak adat dan pengetahuan serta teknologi tradisional juga menjadi fokus penting dalam praktik-praktik pengembangan ekonomi biru. Misalnya pembuatan kapal phinisi dilestarikan dan dipromosikan sebagai bagian dari warisan budaya yang menarik wisatawan. Selain itu, upacara adat yang berkaitan dengan laut tetap dipertahankan, menunjukkan penghormatan terhadap tradisi, lingkungan hidup dan ajaran agama yang benar. Kebijakan konservasi laut dirancang dengan mempertimbangkan hak dan kepentingan masyarakat pesisir, termasuk komunitas adat. Misalnya, di beberapa desa pesisir, masyarakat adat dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan konservasi laut, memastikan bahwa praktik-praktik tradisional mereka dihormati dan dilestarikan. Dengan pendekatan ini, pemanfaatan sumber daya dalam ekonomi biru di Sulawesi Selatan diharapkan lebih adil dan berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi yang luas dan meningkatkan kesejahteraan semua anggota masyarakat.

### **3.5.2 Kesetaraan Gender**

Istilah *gender* merujuk pada perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan yang sering menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan di masyarakat patriarki. Untuk mengatasi hal ini, berbagai kebijakan telah diterapkan seperti GBHN 1999, UU Nomor 25 Tahun 2000, dan UU Nomor 23 Tahun 2004, serta RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender.

Indeks Pembangunan Gender (IPG, 2022) di Sulawesi Selatan mencapai 93,14 tahun 2022, meningkat dari 92,85 di tahun 2021, dengan IPM laki-laki (76,72) lebih tinggi dibandingkan IPM perempuan (71,46). Sejak 2010, IPM laki-laki telah berstatus ‘tinggi’, sementara IPM perempuan mencapainya sejak 2019. Meskipun IPG belum mencapai angka 100, ada tren positif dengan pertumbuhan IPM perempuan (0,92%) yang lebih cepat dibanding laki-laki (0,77%) antara 2010-2022, dengan IPG mengalami penurunan pada 2016 karena pertumbuhan IPM perempuan yang lebih lambat, tetapi meningkat kembali pada 2017-2018.

Kesetaraan gender berkaitan erat dengan isu pendidikan dan ekonomi. Di Sulawesi Selatan Harapan Lama Sekolah (HLS) pada 2022 mencapai 13,53 tahun, dengan perempuan sedikit lebih tinggi (13,82 tahun) dibanding laki-laki (13,40 tahun), karena kondisi ekonomi yang memaksa anak laki-laki bekerja dan putus sekolah. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) pada 2022 adalah 8,77 tahun untuk laki-laki dan 8,48 tahun untuk perempuan, dengan pertumbuhan RLS perempuan lebih cepat dibanding laki-laki. Di sisi ekonomi, pengeluaran perkapita disesuaikan di Sulawesi Selatan tumbuh rata-rata 1,71% per tahun menjadi 11,43 juta rupiah pada 2022, tetapi terdapat kesenjangan signifikan antara laki-laki (16,64 juta rupiah) dan perempuan (10,13 juta rupiah) yang disebabkan oleh faktor kultural, diskriminasi pekerjaan, dan kurangnya pendidikan, serta Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang lebih tinggi untuk laki-laki (80%) dibandingkan perempuan (50%).

Pembangunan manusia berbasis gender di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan tren peningkatan setiap tahun, meski capaian IPG belum merata di seluruh kabupaten/kota. Nilai IPG berkisar antara 87,66 hingga 98,13, dengan Sinjai sebagai kabupaten dengan IPG tertinggi selama 2018-2022 dan Toraja Utara yang terendah. Dari segi elemen pembentuk IPG, perempuan di Toraja Utara memiliki umur harapan hidup (UHH) tertinggi (75,54 tahun), sementara perempuan di Jeneponto memiliki UHH terendah (68,76 tahun). Kesenjangan ekonomi terbesar ada di Kabupaten Wajo dengan perbedaan pengeluaran perkapita disesuaikan sebesar 10,899 juta rupiah, dan pengeluaran perkapita perempuan terendah di Kabupaten Tana Toraja (5,446 juta rupiah) serta tertinggi di Kota Makassar (lebih dari 13 juta rupiah). Dalam hal pendidikan, tiga kota di Sulsel memiliki indikator HLS dan RLS tertinggi.

Secara umum, kabupaten/kota dengan IPM tinggi umumnya memiliki IPG yang juga tinggi, dengan 10 kabupaten/kota mencapai IPG di atas rata-rata Sulawesi Selatan. Namun, beberapa kabupaten/kota masih berada di bawah rata-rata IPG provinsi.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), atau *Gender Empowerment Measure* (GEM) dari UNDP, mengukur peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik, serta ketimpangan gender dalam ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan. IDG dihitung dari rata-rata aritmatik tiga komponen: keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangsih pendapatan perempuan. IDG berbeda dari IPG yang menilai kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dalam penghitungan IDG, setiap komponen diukur berdasarkan distribusi penduduk yang merata dengan nilai 50 sebagai kontribusi ideal. Meskipun IDG tidak mencakup semua aspek kehidupan, seperti ketimpangan gender dalam ranah non-ekonomi atau pengambilan keputusan rumah tangga, IDG tetap menunjukkan capaian pemberdayaan gender di masyarakat.

Perkembangan IDG Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meski sempat menurun pada 2018 dan 2021. Pada 2022, IDG Sulselebih naik menjadi 76,59, meski masih di bawah angka nasional. Kenaikan IDG disebabkan oleh penurunan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di semua komponen IDG. IDG dibangun dari tiga dimensi: keterwakilan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangsih pendapatan perempuan. Meskipun politik di Indonesia didominasi laki-laki, keterwakilan perempuan di parlemen Sulawesi Selatan meningkat dari 27,71% pada 2019 menjadi 27,06% pada 2022, menunjukkan kemajuan dalam pemberdayaan gender di bidang politik.

Di Sulawesi Selatan, keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional berfluktuasi namun cenderung positif. Sejak 2011 hingga 2022, persentase perempuan dalam sektor profesional telah berada di atas 50%, mencapai 52,99% pada 2022. Meskipun ini menunjukkan kemajuan, ketidaksetaraan gender tetap ada, dengan semakin menurunnya persentase laki-laki di sektor publik. Pada PNS Sulawesi Selatan, proporsi PNS perempuan meningkat dari 60% pada 2021 menjadi 62% pada 2022. Hampir 56% pegawai golongan III adalah perempuan, dan komposisi perempuan di golongan IV mendekati laki-laki dengan persentase 51%. Perempuan mendominasi di beberapa jabatan PNS, sementara pendidikan tinggi di PNS hampir setara antara laki-laki dan perempuan. Secara umum, perempuan menunjukkan superioritas di ranah pemerintahan di Sulawesi Selatan.

Kemampuan perempuan dalam penciptaan pendapatan di Sulawesi Selatan terus meningkat dari tahun 2010 hingga 2020, meski capaian ekonomi dan partisipasi tenaga kerja perempuan masih lebih rendah dibanding laki-

laki. Pada tahun 2022, sumbangan pendapatan perempuan turun 0,08 poin menjadi 32,43%, yang berkontribusi pada penurunan angka IDG secara umum di Sulawesi Selatan. Kondisi ini terkait dengan fakta bahwa banyak perempuan bekerja dalam pekerjaan yang tidak dibayar. Meskipun ada peningkatan dalam kualitas pendidikan perempuan, dengan angka partisipasi sekolah perempuan usia 16-18 tahun (73%) lebih tinggi dibanding laki-laki (70%), kontribusi pendapatan perempuan tetap rendah dibanding laki-laki, yang mempengaruhi penurunan IDG.

Pemberdayaan gender di 24 kabupaten/kota Sulawesi Selatan menunjukkan variasi yang signifikan, dengan Bantaeng sebagai kabupaten dengan IDG tertinggi (80,71) dan Luwu Utara terendah (43,96). Keterlibatan perempuan dalam parlemen sangat berpengaruh terhadap IDG, dengan Bantaeng mencatat keterlibatan tertinggi (>30%) dan Luwu Utara terendah (<3%). Dalam hal tenaga profesional, Pinrang memiliki partisipasi perempuan tertinggi (66,27), sedangkan Makassar terendah (45,76). Sumbangan pendapatan perempuan juga bervariasi, dengan Tana Toraja di posisi tertinggi (>40%) dan Luwu Utara di posisi terendah (20,56). Secara umum, 14 kabupaten/kota menunjukkan partisipasi perempuan di sektor profesional dan distribusi pendapatan di atas rata-rata Sulawesi Selatan.

Konsep ekonomi biru, dapat menjadi alat yang kuat untuk mengatasi isu-isu gender di Sulawesi Selatan. Ekonomi biru yang berfokus pada pengelolaan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan, menawarkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan yang sering kali terpinggirkan dalam sektor ini. Dengan memberikan akses yang lebih besar kepada perempuan dalam pelatihan dan teknologi di sektor perikanan dan kelautan, mereka dapat berkontribusi lebih signifikan terhadap ekonomi lokal. Ini tidak hanya meningkatkan pendapatan rumah tangga tetapi juga memperkecil kesenjangan ekonomi gender yang ada.

Pemerintah Sulawesi Selatan telah menginisiasi berbagai program untuk mendukung ekonomi biru, seperti pembangunan infrastruktur perikanan, pelatihan bagi nelayan untuk praktik penangkapan yang ramah lingkungan, dan pengembangan ekowisata bahari. Kebijakan ini, jika dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan gender, dapat memberdayakan perempuan dengan memberikan mereka peran yang lebih besar dalam ekonomi biru. Misalnya, akses permodalan dan teknologi bagi usaha kecil dan menengah di sektor perikanan dan kelautan bisa diarahkan untuk memberdayakan perempuan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal diharapkan dapat memperkuat implementasi ekonomi biru, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Dengan demikian, konsep ekonomi biru tidak

hanya menjaga keberlanjutan lingkungan tetapi juga berkontribusi terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Sulawesi Selatan.

### **3.5.3 Aspek Kelembagaan dan Nilai Kearifan Lokal**

Pengembangan ekonomi biru di Sulawesi Selatan memerlukan pendekatan yang holistik, yang mengintegrasikan aspek kelembagaan dan nilai kearifan lokal. Keduanya berperan penting dalam memastikan bahwa pengembangan ini berkelanjutan dan inklusif, serta sesuai dengan konteks sosial dan budaya lokal. Selain itu, harus dibangun di atas sistem nilai yang mencakup aspek kelembagaan dan nilai kearifan lokal. Sistem nilai ini berfungsi sebagai landasan untuk membangun praktik yang berkelanjutan dan inklusif, serta memastikan bahwa perkembangan ekonomi tidak mengorbankan lingkungan dan komunitas lokal.

Ada beberapa adat dan budaya di Sulawesi Selatan yang berpotensi dalam peningkatan ekonomi masyarakat di sektor ekonomi. Di antaranya adat dan budaya tersebut adalah sebagai berikut:

#### **3.5.3.1 Maccera'Tasi**

Acara Maccera Tasi atau "Pesta Laut" adalah salah satu manifest budaya Luwu mengenai hubungan antara umat manusia dengan "Yang Maha Pencipta" maupun dengan seluruh makhluk hidup dan lingkungan hidupnya di alam ini. Acara ini dilakukan di tepi pantai tepat pada garis pantai ketika pasang surut yang terjauh dan merupakan batas pertemuan antara dua lingkungan hidup atau ekosistem, yaitu pertemuan antara habitat daratan dengan habitat lautan.

Kepercayaan masyarakat Luwu pada upacara Maccera Tasi merupakan bentuk syukuran atas hasil laut yang didapatkan oleh masyarakat nelayan, sebagai perasaan suka cita karena limpahan rezeki yang telah pergi akan kembali diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada masyarakat Nelayan. Pelaksanaan Maccera Tasi secara filosofis diyakini masyarakat adat berfungsi untuk mengembalikan dan menguatkan semangat pada tubuh kasar nelayan, sehingga semangat yang telah pergi akan kembali ke tubuh. Upacara ini mendorong kesadaran masyarakat untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut melalui praktik perikanan yang bertanggung jawab. Selain itu, Maccera Tasi menarik wisatawan yang tertarik pada budaya lokal, meningkatkan sektor pariwisata berbasis lingkungan di Sulawesi Selatan. Wisata budaya ini mendatangkan pendapatan tambahan bagi komunitas nelayan dan memperkuat ekonomi lokal. Upacara ini juga mempererat hubungan sosial dan kerjasama antar nelayan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas perikanan.

### **3.5.3.2 Anjala Ombong**

Anjala Ombong adalah tradisi yang masih dipelihara oleh masyarakat Desa Harapan di Kabupaten Selayar hingga saat ini. Tradisi ini merupakan bentuk interaksi antara manusia dan lingkungan hidup, di mana budaya lokal memainkan peran penting dalam pembentukan dan pemeliharaan lingkungan. Dalam etika lingkungan, Anjala Ombong mencerminkan bagaimana manusia diajarkan untuk berperilaku terhadap lingkungan melalui pengelolaan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan.

Tradisi ini pertama kali dilaksanakan pada masa pemerintahan Opu Balla Bulo sebagai bentuk pesta rakyat yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan menjaring ikan secara melingkar. Kini, Anjala Ombong dilaksanakan setahun sekali sebagai kegiatan komunitas yang menggabungkan manajemen, konservasi, dan eksploitasi sumber daya alam dengan nilai-nilai budaya lokal. Selain sebagai aktivitas sosial, Anjala Ombong juga berfungsi sebagai cara masyarakat untuk menjaga keseimbangan ekologis dan menghormati tradisi mereka.

Tradisi Anjala Ombong menggambarkan interaksi manusia dengan lingkungan melalui penangkapan ikan yang berkelanjutan dan berbasis komunitas. Tradisi ini mengajarkan etika lingkungan dan pelestarian sumber daya alam, serta menggunakan teknologi dan pengetahuan tradisional untuk pengelolaan yang bijaksana tanpa mengabaikan nilai budaya. Pelaksanaan rutin Anjala Ombong membantu menjaga stok ikan dan ekosistem laut, menarik wisatawan yang tertarik pada budaya lokal dan praktik perikanan tradisional, serta meningkatkan sektor pariwisata berbasis lingkungan. Pesta rakyat yang menyertainya memperkuat hubungan sosial dan kerjasama masyarakat, meningkatkan efisiensi dan produktivitas perikanan. Dengan demikian, Anjala Ombong mendukung pelestarian lingkungan, memperkuat ekonomi lokal, dan mendorong pengembangan ekonomi biru di Sulawesi Selatan.

### **3.5.3.3 Annyorong Lopi**

Tradisi Annyorong Lopi adalah sebuah ritual di Bulukumba di mana ratusan orang mendorong perahu di bibir pantai untuk meringankan beban pemilik perahu dengan menariknya menggunakan tali. Ritual ini melibatkan beberapa prosesi, seperti Ammoci, di mana guru spiritual melubangi lunas perahu dan memasukkan emas ke dalam mulutnya, serta Songkabala, di mana sesajen berupa daging sapi atau kambing, songkolo', onde-onde, baje', dan kue-kue tradisional diletakkan di atas kapal. Tradisi ini tidak hanya memperkuat persatuan dan semangat kebersamaan masyarakat, tetapi juga mendukung pariwisata berbasis budaya dan melestarikan kearifan lokal, sambil berkontribusi pada revitalisasi Jalur Rempah Nusantara dan pengembangan ekonomi biru di Sulawesi Selatan.

Untuk memicu semangat para penarik kapal, seorang pemandu akan memberikan aba-aba sehingga terjadi keselarasan dalam menghentakkan tali yang ditarik, biasa disebut Appatara Taju. Appatara Taju ini merupakan nyanyian-nyanyian orang dulu yang berisi cerita-cerita lucu yang membuat gelak tawa.

Tradisi ini menjadi wujud kearifan lokal masyarakat Bulukumba, terutama di daerah pesisir. Tradisi ini memberi bukti nyata persatuan, kesatuan, semangat kebersamaan, gotong royong, dan etos kerja masyarakat Bulukumba. Tradisi Annyorong Lopi mendukung pariwisata berbasis budaya, dan mempromosikan nilai-nilai ekonomi biru seperti gotong royong dan keberlanjutan sumber daya laut. Ritual ini juga berperan dalam revitalisasi Jalur Rempah Nusantara dan memperkuat kerjasama sosial di masyarakat.

### **3.5.3.4 Maudu Lompoa di Takalar**

Maudu Lompoa adalah tradisi di Cikoang, Takalar, Sulawesi Selatan, yang sudah ada sejak tahun 1621 ketika ulama Aceh, Sayyid Jalaludin, menyebarkan Islam di wilayah tersebut. Perayaan ini memerlukan persiapan 40 hari, dimulai dengan ritual je'ne-je'ne Sappara dan melibatkan penyediaan ayam, beras, minyak kelapa, telur, serta pembuatan bakul beras dari daun lontar dan persiapan padi dan kelapa.

Maudu Lompoa bukan hanya sekadar perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW, tetapi juga merupakan ritual yang sarat dengan makna mendalam tentang falsafah hidup dan paham makrifat yang diyakini masyarakat Cikoang, seperti Kaniakkang, Kalassukang, dan Pakaramula. Ritual ini dianggap wajib sebagai bentuk kecintaan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW, yang memotivasi umat Islam untuk mengikuti sunnah dan teladan Nabi.

Keunikan dari Maudu Lompoa terletak pada julung-julung, kapal kayu yang dihias dengan kain warna-warni sebagai simbolisasi masuknya Islam ke Talakar. Di dalam julung-julung terdapat bahan pokok, hasil bumi, dan perlengkapan sehari-hari yang dibagikan kepada semua yang hadir dalam acara tersebut. Baku Maudu, bakul dari daun lontar yang diisi nasi setengah matang dan lauk ayam, juga merupakan bagian dari tradisi ini.

Tiga nilai utama yang terkandung dalam Maudu Lompoa adalah: nilai sosial yang terlihat dalam kegotongroyongan masyarakat selama persiapan dan pelaksanaan acara; nilai religius yang mencerminkan paham keagamaan mengenai proses masuknya Islam yang dibawa oleh Sayyid Jalaludin; serta nilai seni yang tercermin dalam kreativitas menghias julung-julung dan penataan hasil bumi. Prosesi utama dari Maudu Lompoa adalah Zikkiri' dan Sura' Rate', pembacaan kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW dan sejarah masuknya Islam di Cikoang, serta pembacaan sholawat sebagai bentuk

penghormatan kepada Rasulullah. Maudu Lompoa tidak hanya sebuah ritual tahunan tetapi juga merupakan sarana untuk memperkuat keterikatan sosial dan merawat alam demi kesejahteraan warga.

Perayaan Maudu Lompoa di Cikoang berkontribusi pada ekonomi biru di Sulawesi Selatan dengan melestarikan budaya lokal, mengembangkan sektor pariwisata, meningkatkan kesadaran lingkungan melalui pelestarian sumber daya laut, memperkuat kerjasama komunitas, dan mendukung revitalisasi Jalur Rempah Nusantara. Tradisi ini tidak hanya memperkaya identitas budaya tetapi juga berpotensi untuk meningkatkan perekonomian lokal dan mempromosikan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

### **3.5.3.5 Rambu Solo**

Rambu Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja di Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk memberikan penghormatan terakhir dan mengantarkan arwah orang yang telah meninggal ke alam roh. Prosesi ini dianggap lengkap hanya jika semua ritual upacara dipenuhi, termasuk penyembelihan kerbau dan babi dalam jumlah besar sesuai dengan status almarhum. Upacara ini dapat memakan waktu beberapa bulan hingga bertahun-tahun, dan berlangsung dalam dua bagian utama: Rante (prosesi pemakaman) dan Pertunjukkan Kesenian. Selama upacara, jenazah dibungkus dalam kain kafan, dihias dengan benang emas dan perak, serta dibawa ke tempat pemakaman melalui serangkaian ritual yang menggambarkan perjalanan spiritual menuju nirwana.

Rambu Solo memiliki beberapa tingkatan upacara berdasarkan status sosial almarhum, mulai dari Dasili' untuk anak atau strata rendah, hingga Rampasan untuk bangsawan tinggi dengan jumlah kerbau dan babi yang sangat banyak. Upacara ini juga memiliki makna sosial dan religius yang mendalam, termasuk belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan dan pengembalian jasa atas pemberian di masa lalu. Puncak acara biasanya berlangsung pada Juli dan Agustus, dengan durasi upacara sekitar tiga hingga tujuh hari, mencerminkan harmonisasi antara tradisi, kesenian, dan keagamaan dalam kehidupan masyarakat Toraja.

Dalam konteks ekonomi biru Sulawesi Selatan, Rambu Solo berperan dengan mengembangkan sektor pariwisata berbasis budaya, meningkatkan pendapatan lokal dari perdagangan barang-barang upacara, dan menjaga kelestarian budaya serta lingkungan. Upacara ini juga mempererat kerjasama sosial di kalangan komunitas dan mendukung praktik pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, sambil meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelestarian tradisi dan ritual.

### **3.5.3.6 Punggawa-Sawi**

Di masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil Sulawesi Selatan, terdapat sistem hubungan sosial ekonomi yang dikenal sebagai hubungan punggawa-sawi. Dalam sistem ini, punggawa adalah individu yang menyediakan modal dan sumber daya untuk usaha penangkapan ikan, sementara sawi adalah para pekerja yang melaksanakan kegiatan penangkapan ikan berdasarkan norma sosial dan perjanjian kerja. Hubungan ini menggabungkan aspek hirarki sosial dan kekerabatan, dengan punggawa berfungsi sebagai pemimpin yang mengatur operasional penangkapan ikan dan pappalele, yang bertanggung jawab untuk memasarkan hasil tangkapan ikan. Sampai tingkat tertentu, punggawa berperan sebagai penyedia layanan jaring sosial (*social safety net*) yang cenderung selalu siap memenuhi kebutuhan darurat keluarga nelayan kecil.

Secara historis, punggawa dibagi menjadi dua jenis: punggawa posasi yang memimpin kegiatan di laut, dan punggawa pottana atau pappalele yang mengelola aspek darat seperti pemasaran hasil tangkapan. Punggawa pottana bertugas sebagai pemilik modal dan memberikan pinjaman kepada sawi, sedangkan punggawa posasi fokus pada operasional penangkapan ikan. Selain itu, sawi memiliki berbagai peran spesifik, mulai dari tugas operasional hingga pemeliharaan alat tangkap. Hubungan punggawa-sawi tidak hanya mencakup aspek pekerjaan tetapi juga interaksi sosial yang mendalam, melibatkan seluruh keluarga dalam kehidupan sehari-hari, serta memainkan peran sebagai lembaga sosial yang mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi hasil tangkapan ikan serta menyediakan dukungan sosial-ekonomi bagi anggotanya.

Namun, dalam perkembangan modern, hubungan ini telah mengalami perubahan dari sistem kekerabatan tradisional menjadi hubungan kontraktual komersil yang lebih formal, menggeser fokus dari ikatan sosial kekerabatan menuju hubungan berbasis kontrak kerja. Meskipun demikian, interaksi sosial dan gotong-royong tetap menjadi bagian integral dari kehidupan komunitas nelayan, membentuk suatu sistem sosial yang mendukung keberlangsungan kehidupan dan kerja sama dalam masyarakat pesisir.

Secara keseluruhan, hubungan punggawa-sawi memiliki dampak positif yang luas dalam ekonomi biru Sulawesi Selatan dengan mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan, mendukung ekonomi lokal melalui pemasaran hasil tangkapan, memperkuat struktur sosial komunitas, membangun kapasitas lokal, dan melestarikan kearifan lokal. Sistem ini menciptakan sinergi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang mendukung tujuan ekonomi biru untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan pesisir Sulawesi Selatan.

### **3.5.3.7 Macoa Tappareng**

Macoa Tappareng adalah orang yang dipilih oleh komunitas nelayan untuk mengatur penggunaan danau berdasarkan kearifan lokal. Dia adalah yang menentukan kapan boleh menangkap ikan, kapan tidak diizinkan. Dia juga yang akan menjalankan hukuman bagi para nelayan yang melanggar aturan. Selain itu, dia juga memimpin ritual danau yang diadakan setiap tahun.

Peran Macoa Tappareng sangat dihormati oleh masyarakat sekitar danau. Dia dianggap sebagai penjaga harmoni antara manusia dan alam, memastikan bahwa sumber daya ikan tetap lestari untuk generasi mendatang. Selain mengatur waktu dan cara penangkapan ikan, Macoa Tappareng juga terlibat dalam penyusunan aturan adat yang melindungi lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem danau. Upacara-upacara yang dipimpinnya tidak hanya memiliki makna spiritual tetapi juga berfungsi sebagai pengingat bagi komunitas untuk selalu menjaga danau dengan baik. Dalam menjalankan tugasnya, Macoa Tappareng sering berkoordinasi dengan tetua adat dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa semua keputusan yang diambil mendukung kesejahteraan bersama.

Peran Macoa Tappareng memiliki implikasi signifikan terhadap ekonomi biru di Sulawesi Selatan. Dengan mengatur penangkapan ikan secara berkelanjutan, Macoa Tappareng memastikan kelestarian stok ikan dan kualitas lingkungan perairan, yang esensial untuk ekonomi biru. Aturan dan sanksi yang diterapkan meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan masyarakat terhadap tata kelola sumber daya, serta mendorong praktik perikanan yang berkelanjutan. Selain itu, ritual tahunan dan kearifan lokal yang dipimpin oleh Macoa Tappareng tidak hanya memperkaya budaya tetapi juga dapat menarik wisatawan, sehingga meningkatkan pendapatan komunitas lokal. Secara keseluruhan, peran ini sejalan dengan kebijakan nasional yang mendorong pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, memperkuat ekonomi lokal dan identitas budaya masyarakat.

## **BAB IV ISU-ISU STRATEGIS EKONOMI BIRU SULAWESI SELATAN**

### **4.1 Urgensi Akselerasi Pembangunan Ekonomi Biru**

Konsekuensi dari target pertumbuhan PDRB/kapita dari Rp 69 juta di tahun 2025 menjadi Rp 432 juta di tahun 2045 (pada harga constant 2023) adalah perekonomian Sulawesi Selatan secara rata-rata harus tumbuh 8.7% per tahun dalam harga constant 2023, atau sekitar 10% per tahun jika pertumbuhan penduduk sebesar 1.3% per tahun. Ini merupakan alasan utama yang menunjukkan urgensi melakukan akselerasi pertumbuhan sektor-sektor ekonomi biru yang sekarang dilihat sebagai sumber pertumbuhan baru. Dalam ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi biru, skore IBEI Provinsi Sulawesi Selatan ditargetkan oleh pemerintah pusat untuk naik dari 80,66 di tahun 2023 menjadi 275,29<sup>5</sup> di tahun 2045.

Berdasarkan pilar pembentuknya, capaian IBEI Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 80,86 tahun 2023 dihasilkan dari Pilar Ekonomi sebesar 52,0, Pilar Sosial sebesar 85,5 dan Pilar Lingkungan sebesar 50,2. Selain menunjukkan ketimpangan antar pilar, kondisi ini juga menandakan relatif belum optimalnya pemanfaatan sumber daya perairan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Kinerja aspek lingkungan yang relatif rendah juga menunjukkan bahwa masih rendahnya integritas ekosistem perairan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Belajar dari pengalaman Provinsi Jawa Timur yang memiliki skor Pilar Ekonomi tertinggi di Indonesia, yaitu 74,3 yang dicapai melalui industri manufaktur pengolahan hasil-hal perikanan, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki peluang besar dengan segala sumber daya kemaritiman yg dimiliki. Jawa Timur maju karena mengolah hasil laut dari Kawasan Timur Indonesia. Sulawesi Selatan secara strategis dapat melakukan hilirisasi dari bahan baku yang dihasilkan sendiri, dan/atau mengembangkan industri inovatif bernilai tambah tinggi seperti industri farmasi dan pangan biru olahan.

Dalam RPJPN 2025 – 2045, ekonomi biru dianggap sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru karena potensinya sangat besar, tetapi pemanfaatannya belum optimal. Potensi ini tercermin pada luasnya wilayah perairan laut yang mencapai 6,4 juta km<sup>2</sup>. Di dalamnya terkandung sumber daya hayati, mineral, dan energi yang melimpah, serta jasa lingkungan yang bernilai ekonomis tinggi dalam bentuk keindahan alam, jasa penyerapan karbon, keunikan dan daya tarik lainnya. Sektor-sektor utama dari ekonomi biru, seperti perikanan, angkutan perairan, energi, dan pariwisata merupakan faktor pendorong baru dalam perekonomian nasional dan regional. Kondisi

---

<sup>5</sup> Perhitungan Tim Ahli Gabungan BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan, Universitas Hassanuddin, dan Konsorsium YSKI memperkirakan target IBEI Provinsi Sulawesi Selatan yang wajar untuk 2045 adalah 279,81.

sekarang menunjukkan peran ekonomi biru dalam perekonomian memang masih relatif kecil, tetapi cenderung naik, seperti terlihat dari kontribusi PDRB Maritim yang mengalami kenaikan dari 6,04 persen di tahun 2016 menjadi 7,60 persen di tahun 2021. Kontribusi ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pengarusutamaan ekonomi biru sebagai salah satu strategi pertumbuhan baru.

Saat ini pemanfaatan sumber daya perairan masih relative rendah termasuk belum berkembangnya pemanfaatan *Sea Lines of Communication* (SLoC) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Lebih lanjut, pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) baik di laut maupun perairan darat, dan pengembangan budidaya perikanan masih belum optimal karena kewenangan kelembagaan LPP-WPP yang belum memadai. Hilirisasi sumber daya yang bersumber dari perairan laut maupun darat masih jauh dibawah optimal.

Hilirisasi SDA di Sulawesi Selatan menjadi penting, khususnya Sulawesi Selatan sebagai pendukung pengembangan Ibu Kota Negara (IKN). Meskipun hilirisasi di Pulau Sulawesi lebih difokuskan pada sumber daya mineral, tetapi sumber daya berbasis perairan juga sangat relevan untuk hilirisasi agar terjadi peningkatan nilai tambah. Sulawesi Selatan, dengan beragam potensi ekonomi biru, dapat memanfaatkan arahan kebijakan nasional ini untuk mengoptimalkan potensi daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan.

#### **4.2 Kontribusi PDRB Sektor Maritim Melalui Hilirisasi Industri**

Sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi perikanan dan maritim yang melimpah, pesisir dan perairannya membentang lebih dari 1.979,97 km garis pantai, dengan perkiraan luas laut tidak kurang dari 48.000 km<sup>2</sup> termasuk di dalamnya perairan Teluk Bone dan Laut Flores, serta pulau-pulau kecil di kepulauan Spermonde serta Takabonerate (Mosriula, 2019). Data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan (2023), menyebutkan bahwa total produksi perikanan di daerah ini tercatat sebesar 4.620.232,10 ton, selanjutnya pada tahun 2022, sebesar 4.498.891,2 ton, dan sebesar 4.102.319,5 ton, pada tahun 2021, atau terjadi peningkatan produksi sebesar 396.571,7 ton atau 9,6 % dari tahun sebelumnya. Produksi ini didukung oleh adanya potensi perikanan tangkap yang diperkirakan mencapai 1.074.147 ton/tahun, yang didominasi oleh ikan pelagis kecil, lobster, rajungan, udang, dan cumi-cumi yang semuanya memiliki nilai ekonomis tinggi. Untuk usaha budidaya, daerah ini memiliki potensi lahan budidaya laut seluas 193.700 ha, lahan budidaya payau seluas 120.738 ha dan lahan budidaya air tawar seluas 100.803 ha, namun baru sebagian kecil yang dimanfaatkan, padahal jika potensi ini dimanfaatkan dengan baik, maka akan

memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian daerah. Belum optimalnya pencapaian tersebut memberikan dampak pada kegiatan pembangunan dan pengembangan sektor perikanan secara keseluruhan.

Selain itu secara umum kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan maupun terhadap perekonomian nasional masih belum optimal di tengah tantangan perubahan iklim. Oleh karena itu guna meningkatkan produksi perikanan baik budidaya maupun penangkapan, dapat dilakukan dengan 1) meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemberian pelatihan baik bagi pelaku usaha budidaya maupun penangkapan; 2) pemanfaatan sumber daya alam melalui optimalisasi pemanfaatan lahan budidaya; dan 3) meningkatkan investasi di sektor perikanan melalui penyediaan sarana dan prasarana budidaya, dan penyediaan alat penangkapan ikan modern yang ramah lingkungan.

Untuk meningkatkan kontribusi ekonomi biru secara efektif, diperlukan identifikasi dan penetapan sektor unggulan yang berbasis daerah, yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan pembangunan usaha kelautan dan perikanan Sulawesi Selatan, yang mana diharapkan dapat menjadi usaha perikanan yang berproduktivitas serta memiliki daya saing yang tinggi, baik pasar dalam negeri maupun ekspor, sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian daerah. Hal ini telah dibuktikan akan kontribusi nilai PDRB sektor perikanan menunjukkan perannya yang signifikan terhadap pendapatan daerah.

#### **4.3 Sektor-Sektor Potensial dan yang Sedang Berkembang**

Provinsi Sulawesi Selatan, dengan posisinya di wilayah *Coral Triangle* yang kaya dengan keanekaragaman hayati, memiliki potensi besar untuk pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan yang saat ini belum dikembangkan. Pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah ini menawarkan lahan yang ideal untuk budidaya darat maupun laut untuk berbagai jenis komoditas ikan dan rumput laut. Saat ini, hanya sepuluh jenis komoditas utama untuk budidaya termasuk tiga jenis rumput laut yang umum dibudidayakan, menunjukkan adanya peluang luas untuk diversifikasi budidaya komoditas ikan maupun rumput laut lain yang belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini mencakup pengembangan kembali udang windu yang berjaya di Sulawesi Selatan medio 1990-an.

Di samping komoditas budidaya, Sulawesi Selatan ini juga kaya akan biota endemik, langka, dan dilindungi yang mencakup cetacean, crustacean, bivalvia, dan berbagai jenis penyu. Keanekaragaman ini tidak hanya penting dari segi ekologis tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang besar jika dikelola dengan cara yang berkelanjutan. Misalnya, ikan Paus dan Lumba-

Lumba yang sering ditemukan sepanjang jalur Selat Makassar dan di perairan Spermonde dan Kepulauan Selayar dapat menjadi tarik ekoturisme.

Selain itu, keberadaan dugong yang sering ditemukan oleh masyarakat di Bulukumba, Selayar, dan Pangkep, serta penyu yang sering ditemukan di perairan Kabupaten Pangkep dan Selayar, menawarkan peluang untuk pengembangan inisiatif konservasi yang dapat dikombinasikan dengan pariwisata berkelanjutan. Ini tidak hanya membantu pelestarian spesies tetapi juga mendukung perekonomian lokal. Biota lainnya seperti ikan Malaja, yang merupakan salah satu jenis ikan Baronang yang banyak ditemukan di perairan Luwu, Selayar, dan Takalar, menunjukkan adanya potensi untuk pengembangan perikanan skala lokal yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir. Demikian pula, keberadaan biota laut seperti Bambu Laut *Isis* sp di Teluk Bone menunjukkan keanekaragaman sumber daya yang bisa dimanfaatkan.

Dalam konteks ini, terdapat juga peluang signifikan untuk memanfaatkan potensi "*blue carbon*" dari ekosistem pesisir dan laut di wilayah ini, yang meliputi hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Penyimpanan karbon ini tidak hanya membantu mengurangi dampak perubahan iklim tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan dan keanekaragaman hayati. Mangrove dan padang lamun, dengan kapasitas penyerapan CO<sub>2</sub> yang tinggi, menawarkan kesempatan untuk berbagai kegiatan termasuk konservasi yang dapat menghasilkan kredit karbon, sementara terumbu karang mendukung keanekaragaman hayati dan proteksi garis pantai. Integrasi proyek *blue carbon* dalam strategi pengelolaan pesisir dan laut di Sulawesi Selatan menawarkan pendekatan holistik yang menguntungkan baik dari segi lingkungan maupun ekonomi, menjadikan wilayah ini sebagai model pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Diperlukan ketegasan status '*clean and clear*' untuk lokasi pengembangan karbon biru dan keberadaan lembaga pengelola kawasan agar manfaat ekonomi karbon biru dapat diwujudkan.

#### **4.4 Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pengembangan Ekonomi Biru**

Digitalisasi bisa membawa perubahan bagi berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam pemanfaatan sumber daya perairan. Penggunaan teknologi digital dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efektif, transparan, efisien, dan berkelanjutan. Teknologi digital dapat digunakan untuk pemantauan dan pengelolaan sumber daya kelautan, optimalisasi perikanan budidaya, transparansi dan keterlacakkan, serta pemasaran dan distribusi produk.

Beberapa pemanfaatan teknologi digital dalam pemantauan dan pengelolaan sumber daya, seperti Sistem Informasi Geografis (SIG/GIS) untuk memetakan dan memantau kegiatan perikanan, ekosistem laut, stok ikan, dan habitat kritis. Sementara dalam optimalisasi perikanan budidaya, teknologi digital bisa dimanfaatkan untuk mengintegrasikan data dari berbagai aspek budidaya, termasuk kualitas air, kesehatan ikan, dan pemberian pakan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Penggunaan teknologi *blockchain* juga dapat dilakukan untuk memastikan keterlacakkan produk perikanan dari penangkapan hingga konsumen akhir, sehingga bisa meningkatkan transparansi rantai pasok dan memastikan keaslian dan keberlanjutan sumber daya bahan baku produk. Dalam hal pemasaran, penggunaan *platform e-commerce* khusus produk perikanan dapat memperluas pasar bagi nelayan dan pembudidaya, memotong rantai distribusi, meningkatkan margin keuntungan bagi nelayan, dan mendukung keberlanjutan sumber daya kelautan melalui teknologi verifikasi ketertelusuran (*traceability*) standardisasi ukuran produk perikanan (terutama perikanan tangkap) yang dapat diterima pasar. Yang tidak kalah penting adalah penggunaan aplikasi mobile untuk nelayan dapat menyediakan informasi pasar, cuaca, dan rute pelayaran terbaik sehingga bisa membantu nelayan dalam pengambilan keputusan di lapangan.

#### **4.5 Ketersediaan Energi Listrik Sebagai Kekuatan Pendorong Ekonomi Biru**

Salah satu faktor yang dapat mendukung hilirisasi industri berbasis sumber daya perairan adalah energi listrik. Ketersediaan energi listrik yang memadai dan handal menjadi prasyarat bagi pengembangan industri perikanan karena berbasis sistem rantai dingin (*cold storage chain*), pengembangan akuakultur, dukungan terhadap transportasi laut dan pelabuhan, dan pengembangan pariwisata bahari. Ketersediaan listrik sangat berperan terhadap fasilitas pendinginan dan penyimpanan ikan agar kualitas produk tetap terjaga, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan nilai jual ikan. Listrik juga berperan dalam proses pengolahan hasil laut, seperti pengalengan, pengeringan, dan pengolahan makanan laut lainnya. Lebih lanjut, listrik juga berperan penting dalam mendukung operasional pelabuhan, sebab energi listrik digunakan untuk berbagai kegiatan di pelabuhan, seperti derek listrik, pencahayaan, dan sistem keamanan. Sementara itu, kegiatan pariwisata bahari juga membutuhkan ketersediaan energi listrik yang memadai. Resort, hotel, dan fasilitas pariwisata lainnya di daerah pesisir dan pulau membutuhkan listrik untuk operasional harian, penerangan, pendingin udara. Energi listrik yang stabil dan berkelanjutan

sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi biru sehingga dapat berdampak positif bagi perekonomian masyarakat.

Sektor ketenaga-listrikan di Sulawesi Selatan berperan penting dalam meningkatkan output sektor-sektor ekonomi biru lainnya dengan angka pengganda 2,88822 (Yusuf, 2022). Hasil simulasi juga menunjukkan bahwa keberadaan listrik bisa meningkatkan nilai tambah perikanan sebesar 19,20 persen, yakni dari Rp11,86 triliun menjadi Rp14,14 triliun. Sementara itu, harga ikan juga cenderung lebih tinggi dan stabil dengan adanya dukungan dari sektor ketenagalistrikan untuk fasilitas pendinginan. Hasil studi ini merekomendasikan pentingnya memanfaatkan output dari sektor ketenagalistrikan untuk mendorong pertumbuhan sektor perikanan, melalui pembangunan *cold storage*, pabrik es, dan industri makanan dan minuman.

#### **4.6 Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**

Pertumbuhan ekonomi tidak hanya diarahkan untuk menciptakan manfaat bagi segelintir kelompok atau golongan masyarakat tertentu, tetapi harus memberikan manfaat bagi masyarakat seluas-luasnya. Pengalaman menunjukkan bahwa strategi pertumbuhan yang terlalu fokus pada pertumbuhan ekonomi akan cenderung memperlebar ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kemiskinan, serta mengakibatkan degradasi kualitas lingkungan. Pemilik sumberdaya maritim mayoritas adalah masyarakat pesisir yang merupakan 70% dari populasi dan penghidupannya bergantung pada sumber daya alam laut. Karena itulah pertumbuhan ekonomi biru harus bersifat inklusif dan berkelanjutan.

Pertumbuhan inklusif ditandai oleh ciri-ciri bahwa setiap kelompok masyarakat: (i) memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan; (ii) mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh hasil dari pembangunan; (iii) mendapatkan akses yang sama terhadap sumber-sumber daya pembangunan termasuk akses terhadap pendanaan, teknologi, pendidikan dan pelatihan; (iv) penggunaan sumber daya untuk mendorong pertumbuhan saat ini tidak mengurangi manfaat yang bisa diperoleh oleh generasi mendatang dalam pemanfaatannya.

Ekonomi biru menyediakan kesempatan diversifikasi sektor pekerjaan pada berbagai sektor yang sudah ada dan potensial, seperti perikanan, pariwisata, energi terbarukan, dan transportasi sungai dan laut. Hal ini terutama bisa memberikan kesempatan luas bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau terpencil untuk berpartisipasi dalam penciptaan nilai ekonomi. Bahkan, masyarakat yang tidak terkait langsung dengan sumber daya perairan, tetapi menggunakan input dari sumber daya perairan dan/atau memberikan input bagi masyarakat di wilayah perairan, akan menerima manfaat dari pengembangan ekonomi biru. Mengoptimalkan

keterkaitan dalam menciptakan nilai tambah dan lapangan pekerjaan (*forward and backward linkage effects in value added and employment*) seyogyanya menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi biru.

Pengelolaan sumber daya perairan yang berkelanjutan bisa memberikan akses yang lebih baik dan stabil terhadap sumber daya perairan dalam jangka panjang. Inisiatif global untuk pemanfaatan *blue carbon*, seperti *carbon trading*, bisa mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah jika dikelola secara optimal. Potensi energi biru merupakan energi terbarukan dari laut. Energi ini diolah dengan menggunakan teknologi dengan memanfaatkan potensi energi dari air laut seperti gelombang, pasang surut, arus, gradasi salinitas dan suhu laut. Keberadaan energi biru ini bisa menjadi energi alternatif selain dari energi fosil yang cenderung tidak ramah lingkungan.

#### **4.7 Peran Pangan Biru Sebagai Sumber Pangan Utama Masyarakat**

Pangan biru (*blue foods/aquatic foods*) didefinisikan sebagai seluruh jenis dan tipe bahan/materi pangan yang berasal dari ekosistem perairan, baik perairan tawar, payau maupun laut. Komoditas pangan biru berupa ikan, alga, tumbuhan lain, dan bahan baku pangan yang dihasilkan dari perikanan tangkap ataupun budidaya di perairan darat dan laut dipandang sebagai alternatif sumber pangan yang berkelanjutan di masa depan dan menjadi bagian dari solusi permasalahan global terkait ketahanan pangan. Kebutuhan pangan dunia terus meningkat seiring pertambahan populasi penduduk. Selain kaya protein dan nutrisi lain, pangan biru juga berperan membantu mitigasi perubahan iklim.

Penguatan peran pangan biru merupakan upaya untuk meningkatkan spektrum ekonomi biru di Sulawesi Selatan. Pangan biru merupakan ekspresi ekonomi yang dapat menjadi sumber mata pencaharian dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pangan biru menjadi salah satu komoditas penting yang telah berkembang di Sulawesi Selatan baik secara historis dan kultural. Penguatan pangan biru akan menghela ekonomi lokal yang bersumber dari produk kelautan dan perikanan secara inklusif sangat dibutuhkan.

Pangan biru menjadi sumber pangan yang cocok dengan perubahan pola struktur pangan global yang bergeser dari daging merah menjadi daging putih. Secara global, perubahan ini didasarkan pada peningkatan kesadaran untuk mendapatkan sumber protein yang sehat dengan sempurna, serta mengurangi resiko kesehatan masyarakat daging merah. Crona *et al* (2021) menyatakan pangan biru mengurangi kerentanan kelompok masyarakat terhadap kekurangan gizi, karena merupakan sumber protein dengan nutrisi mikro esensial lengkap. Kesadaran ini mempunyai implikasi penting adanya potensi kompetisi pasar domestik Indonesia umumnya dan Provinsi Sulawesi Selatan

khususnya dengan kebutuhan memenuhi pangan global atau pasar ekspor. Orientasi mencukupi kebutuhan domestik menjadi penting dilakukan dengan tidak menghilangkan kepentingan pasar ekspor.

Penguatan rantai pasok untuk penyediaan sumber pangan biru yang cukup sangat dibutuhkan untuk menguatkan pangan biru sebagai bagian dari kultur pangan lokal. Masyarakat Sulawesi Selatan mempunyai kultur diet pangan lokal berbasis ikan baik ikan laut, payau dan air tawar dengan olahan yang khas pada setiap wilayah kabupaten dan kota. Diet pangan lokal ini baik berupa sumber protein (hewan) maupun sumber serat (fiber) seperti beberapa jenis rumput laut. Sehingga penyediaan sumber pangan biru yang mudah diakses dengan tingkat harga yang terjangkau dengan tingkat kesehatan dan keamanan pangan yang memadai sangat diperlukan.

Perlu rumusan kebijakan yang akurat dan kuat untuk menguatkan peran pangan biru. Hal ini dapat dilakukan dengan menempatkan pangan biru dalam jantung sistem pengambilan keputusan kebijakan pangan di wilayah ini dan memberi dukungan penuh atas peran penting pelaku produksi pangan ikani skala kecil (Tigchelaar et al. 2022). Implementasinya adalah dengan penyusunan struktur sistem tata kelola pangan biru, melindungi dan mengembangkan potensi pangan biru dalam setiap sistem kebijakan. Kemudian menyusun hak pangan biru (*blue food right*) dalam kebijakan perdagangan dan pangan domestik, meningkatkan keberagaman dan mengurangi susut dan meningkatkan kualitas distribusi pangan biru. Selanjutnya memasukan pelaku pangan biru kecil dalam sistem kebijakan termasuk untuk meningkatkan kapasitasnya, keanekaragaman intensifikasinya dan menjamin manfaat ekonomis dan gizi pangan biru untuk melindungi pasar domestik.

#### **4.8 Penghidupan dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Lapangan Kerja di Sektor Maritim**

Posisinya Sulawesi Selatan yang dikelilingi lautan, menjadikan potensi kelautan dan perikanan melalui lapangan kerja di sektor maritim sangat melimpah sehingga subsektor ini menjadi salah satu subsektor yang menjanjikan bagi perekonomian Indonesia pada umumnya dan Sulawesi Selatan pada khususnya.

Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan (2023) dalam aspek ketenagakerjaan, dengan pertumbuhan ekonomi 4,51 %, dengan PDRB perkapita Rp. 69,70 juta, penyerapan tenaga kerja pada sektor perikanan dari tahun 2019 terdiri dari nelayan (laut, perikanan umum) sebanyak 199.492 orang dan pembudidaya (petani tambak, petani ikan air tawar, petani ikan sawah, petani budidaya laut, keramba jaring apung dan keramba air tawar) sebanyak 282.514 orang, kemudian di tahun 2020 terus

naik pada tenaga kerja nelayan sebanyak 229.191 orang, namun pada pembudidaya turun menjadi 274.254 orang. Selanjutnya jumlah tenaga kerja di sektor perikanan ini berangsur-ansur turun hingga tahun 2023 jumlah tenaga kerja nelayan sebanyak 206.659 orang dengan rincian nelayan laut sebanyak 191.293 orang dan nelayan perikanan umum daratan sebanyak 15.366 orang sedangkan dari tenaga kerja pembudidaya sebanyak 277.084 orang dengan rincian petani tambak sebanyak 148.455 orang, petani kolam sebanyak 15.587 orang, petani sawah sebanyak 10.845 orang, petani budidaya laut sebanyak 101.216 orang, keramba jaring apung air tawar sebanyak 698 orang dan keramba jaring apung air laut sebanyak 284 orang.

Hal yang menarik dari data ketenagakerjaan di sektor perikanan bahwa rata-rata tingkat pendapatan masyarakat yang bekerja di sektor ini sejak tahun 2019 hingga 2022 terus meningkat baik pada pendapatan tenaga kerja nelayan maupun pada pembudidaya. Tingkat pendapatan pada tahun 2019 dapat mencapai Rp. 19.084.333, tahun 2020 meningkat sebesar Rp. 20.011.531, tahun 2021 terus meningkat sebesar Rp. 27.126.544, tahun 2022 meningkat lagi sebesar Rp. 30.903.928. Namun pada tahun 2023 turun secara signifikan sebesar 15,5% menjadi Rp. 26.121.953

Salah satu faktor penyebab turunnya pendapatan masyarakat di dalam pemanfaatan potensi perikanan di Sulawesi Selatan adalah belum optimalnya pengelolaan potensi perikanan, berkurangnya jumlah kapal, alat tangkap yang belum modern, rendahnya kualitas dan kuantitas produksi yang dihasilkan oleh nelayan yang disebabkan oleh aksesibilitas dan ketersediaan infrastruktur yang belum memadai

Keadaan di atas memberi gambaran betapa besar peluang kerja pada sektor perikanan dan maritim. Dengan kata lain, dengan perubahan *mindset* yang lebih tepat, terbuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak bangsa untuk menciptakan lahan kerja dan bekerja di sektor perikanan dan maritim, baik pada bidang pekerjaan yang secara teknis menangani kegiatan produksi, penanganan, pengolahan, dan pemasaran produksi perikanan maupun pada kegiatan yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dalam proses produksi.

#### **4.9 Kelestarian Sumberdaya Maritim dan Perairan Darat**

Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya maritim dan perairan darat yang sangat besar. Kelestarian sumber daya ini sangat penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem. Kelestarian sumber daya laut dan perairan darat memainkan peran penting dalam mendukung pengembangan ekonomi biru. Sumber daya hayati dengan keanekaragaman tinggi di laut (bagian dari kawasan segitiga karang dunia) maupun perairan darat (bagian

dari kawasan Wallacea) menyediakan potensi besar untuk pengembangan ekonomi biru, namun juga menghadapi tantangan yang signifikan. Potensi ini mencakup perikanan tangkap laut dan darat yang melimpah, serta wilayah ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove yang luas. Pengelolaan yang tepat akan memastikan bahwa sumber daya ini tetap lestari dan dapat mendukung pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi dan ekologis bagi masyarakat.

Pengelolaan sumberdaya dan ekosistem dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti eksplorasi sumberdaya perairan yang berlebihan, ditandai dengan masih tingginya *Illegal Unreported and Unregulated Fishing* (IUUF) dan *overfishing*. Laporan dari Global Initiative tahun 2023 menempatkan Indonesia di posisi ke-6 terburuk dari 152 negara dalam penanganan IUUF. Di samping itu, tata kelola pengelolaan sumberdaya perairan dan ekosistem juga belum sepenuhnya optimal. Hal ini ditandai dengan kelembagaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang belum efektif, serta mekanisme kerja Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komnasjiskan) yang belum punya perwakilan di daerah. Akibatnya, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya perairan tidak berjalan baik. Lebih lanjut, upaya untuk menciptakan tata kelola yang efektif melalui instrumen regulasi, seperti Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang awalnya ingin diterapkan di pada 1 Januari 2024, tetapi ditunda ke 1 Januari 2025 karena instrumen pendukungnya belum siap.

Pengelolaan sumberdaya perairan dan kelautan saat ini dan masa mendatang, mengharuskan perlunya keseimbangan antara kelestarian ekosistem, pemanfaatan dan keadilan ekonomi. Semangat ini tidak hanya diimplementasikan di tingkat nasional, tapi yang lebih penting lagi di tingkat daerah. Penguatan tata kelola menjadi kata kunci untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya dan ekosistem perairan yang berkelanjutan dan inklusif.

Pencemaran laut merupakan tantangan lain yang signifikan, baik yang berasal dari aktivitas di darat maupun di laut. Limbah industri, pertanian, dan rumah tangga yang bermuara ke laut menyebabkan degradasi kualitas perairan dan kerusakan habitat. Selain itu, tumpahan minyak dan sisa bahan bakar kimia dari kapal juga berkontribusi pada pencemaran laut, mengganggu kesehatan ekosistem laut dan membahayakan spesies laut. Pencemaran ini termasuk pencemaran sampah plastik. Jambeck (2015) menyebutkan bahwa Indonesia sebagai negara penghasil sampah laut terbesar kedua di dunia dan terdapat potensi peningkatan sampah plastik di laut dengan pertambahan jumlah penduduk. Limbah plastik yang terfragmentasi dalam ukuran lebih kecil, mengontaminasi biota dalam bentuk mikro dan nano plastik dan akan terbawa ke tingkat rantai makanan yang lebih tinggi, termasuk jika

dikonsumsi oleh manusia. Beberapa tantangan ini membutuhkan jawaban dalam hal pelestarian sumber daya laut.

Selain perairan laut, pelestarian sumber daya perairan darat di Sulawesi Selatan juga menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah pencemaran air yang berasal dari limbah industri, pertanian, dan domestik. Pencemaran fisik, kimia, dan biologi oleh limbah industri seringkali awalnya bermuara pada perairan darat seperti sungai, waduk, dan danau, terakumulasi dalam jangka waktu lama dan mengontaminasi tumbuhan air serta ikan. Limbah pertanian yang mengandung pestisida dan pupuk kimia juga turut mencemari sumber air. Pencemaran ini tidak hanya merusak ekosistem air tawar tetapi juga mengancam kesehatan manusia yang mengandalkan air dari sumber tersebut. Selain itu, limbah domestik seperti deterjen dan sampah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik menambah beban pencemaran perairan darat, mengakibatkan tingginya kadar nutrien pada perairan dan menyebabkan eutrofikasi. Eutrofikasi dapat menyebabkan *alga bloom* yang merusak lingkungan perairan karena penurunan kadar oksigen terlarut dalam air, yang mengakibatkan kematian massal ikan.

Alih fungsi lahan merupakan tantangan besar lainnya bagi kelestarian sumber daya perairan darat. Konversi kawasan sempadan (*riparian area*) sungai dan danau untuk aktivitas seperti lahan pertanian, pertambangan atau pemukiman mengancam fungsi ekosistem air tawar yang penting. Wilayah sempadan berfungsi sebagai penyaring alami yang membantu menjaga kualitas air dan menyediakan habitat bagi berbagai spesies perairan. Ketika wilayah ini diubah menjadi lahan pertanian atau aktivitas lainnya, kemampuan alami untuk menyaring air berkurang, sehingga meningkatkan risiko pencemaran dan menurunkan kualitas air.

Seperti halnya di lautan, *overfishing* atau penangkapan ikan yang tidak terkendali di perairan darat juga menjadi ancaman serius bagi kelestarian sumber daya perairan darat. Penangkapan ikan yang berlebihan dapat mengurangi populasi ikan. Penurunan populasi ikan ini tidak hanya mengancam kelestarian spesies tetapi juga mempengaruhi mata pencarian masyarakat yang bergantung pada perikanan air tawar. Tanpa pengelolaan yang baik, *overfishing* dapat mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem yang pada akhirnya merugikan manusia dan lingkungan. Ditambah dengan kehadiran spesies invasif yang mengakibatkan kompetisi ruang dan makanan, akan berakibat pada menurunnya sumber daya ikan endemik di sungai dan danau. Hal ini dijumpai di beberapa perairan darat di Sulawesi Selatan, seperti terancamnya ikan-ikan endemik butini, opudi, dan ikan padi oleh ikan invasif seperti ikan louhan, ikan sapu-sapu dan ikan lainnya pada kawasan perairan kompleks Danau Malili dan di Danau Tempe. Pemerintah provinsi dan

kabupaten yang memiliki danau dan sungai perlu mengantisipasi dan mengatur dengan ketat perluasan perikanan budidaya dengan keramba agar beban ekologis yang ditimbulkannya (eutifikasi, konflik ruang) tidak melampaui daya dukung ekosistem fisiknya.

Sedimentasi yang tinggi merupakan tantangan lain yang signifikan bagi kelestarian sumber daya perairan darat, khususnya di Danau Tempe. Tingginya sedimentasi biasanya disebabkan oleh erosi tanah dari kegiatan pertanian, deforestasi, dan konstruksi yang tidak terkendali di wilayah sempadan danau. Sedimentasi yang masuk ke sungai dan danau akan mengendap dan mengurangi kedalaman perairan, yang pada gilirannya mengganggu habitat ikan dan organisme air lainnya. Selain itu, sedimentasi yang berlebihan juga dapat menyebabkan perubahan aliran air dan meningkatkan risiko banjir pada musim penghujan.

Untuk mengatasi tantangan ini, berbagai upaya pelestarian sumber daya laut dan perairan darat perlu dilakukan. Salah satunya adalah pengembangan wilayah konservasi laut, dengan target 30% wilayah laut terlindungi pada tahun 2045 oleh KKP. Pengelolaan berbasis ekosistem juga sangat penting, di mana pengelolaan sumber daya laut dilakukan dengan mempertimbangkan semua komponen ekosistem dan interaksinya. Di darat, pengendalian dan penegakan hukum tata ruang secara tegas dan konsisten, termasuk pada kawasan sempadan sungai, danau dan pantai, menjadi kunci untuk mengatasi pencemaran. Hal ini akan memastikan bahwa semua aspek dari ekosistem laut dikelola dengan cara yang berkelanjutan.

Regulasi dan penegakan hukum yang ketat juga diperlukan untuk mencegah praktik-praktik penangkapan ikan yang merusak, baik dari segi input maupun output penangkapan. Penerapan kuota tangkapan, ukuran minimum tangkapan, dan jenis alat tangkap yang diperbolehkan harus ditegakkan secara konsisten. Pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran dapat memastikan perlindungan sumber daya maritim dari eksloitasi yang tidak bertanggung jawab.

Rehabilitasi dan restorasi ekosistem juga menjadi bagian dari upaya pelestarian. Program rehabilitasi dan transplantasi terumbu karang yang rusak, padang lamun, serta penanaman kembali mangrove di area yang mengalami degradasi, dapat membantu memulihkan ekosistem yang telah rusak. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kesehatan ekosistem tetapi juga mendukung keberlanjutan perikanan dan pariwisata. Restorasi ekosistem dan keanekaragaman hayati pada konteks Sulawesi Selatan hanya akan efektif dengan menggabung tiga komponen kunci berikut ke dalam berbagai kebijakan di bawahnya: (i) Implementasi pengelolaan tata ruang terintegrasi landscape-seascape setelah integrasi RTRWP dengan RZWP3K melalui peraturan daerah provinsi beberapa tahun lalu; (ii) Integrasi

pengelolaan DAS antar wilayah administrative terkait; (iii) Integrasi pengelolaan sampah antar jurisdiksi yang dilalui oleh aliran air.

Pendidikan dan kesadaran masyarakat adalah kunci untuk memastikan keberhasilan upaya pelestarian. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kelestarian laut melalui kampanye publik dan edukasi adalah langkah penting. Melibatkan masyarakat lokal dalam praktik-praktik berkelanjutan dan memberdayakan mereka untuk ikut serta dalam pengelolaan sumber daya laut akan memastikan bahwa upaya pelestarian memiliki dukungan dan partisipasi yang luas. Pemerintah provinsi perlu secara khusus membangun kurikulum dan materi pembelajaran *maritime literacy* untuk semua jenjang pendidikan formal dan informal

Keseluruhan upaya ini memerlukan kolaborasi multipihak dengan memainkan peran dalam mendukung inisiatif berkelanjutan melalui praktik yang bertanggung jawab. Dengan mengelola potensi dan mengatasi tantangan yang ada, Sulawesi Selatan dapat mengembangkan ekonomi biru yang berkelanjutan. Pengembangan ekonomi biru yang baik akan mendukung kesejahteraan masyarakat setempat, menjaga kelestarian ekosistem, dan memastikan bahwa sumber daya laut dan perairan darat dapat terus memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Upaya pelestarian yang efektif akan memastikan bahwa Sulawesi Selatan tetap menjadi pusat keanekaragaman hayati laut yang kaya dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

#### **4.10 Kontribusi dalam Mitigasi Perubahan Iklim**

Pengelolaan ekonomi biru sangat dipengaruhi oleh kondisi alam. Perubahan iklim yang ditandai dengan peningkatan rata-rata suhu bumi yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat di wilayah pesisir. Data dari *Copernicus Climate Change Service Uni Eropa* menunjukkan peningkatan suhu bumi sudah melebihi dari  $1,5^{\circ}\text{C}$  pada tahun 2023 menurut data *Copernicus Climate Change Service Uni Eropa*. Kenaikan permukaan laut, pemanasan laut, perubahan pola iklim, dan pengasaman laut, akibat peningkatan konsentrasi CO<sub>2</sub> mulai berdampak negatif pada masyarakat pesisir dan sektor ekonomi seperti pariwisata, perikanan, dan infrastruktur pesisir. Dampak-dampak ini meliputi ancaman terhadap kehidupan sosial ekonomi di kawasan pesisir, pemutihan terumbu karang, perubahan pola curah hujan dan badai yang lebih intens, serta penurunan produktifitas perikanan dan kerusakan pada organisme laut penting.

Ekonomi biru yang berkelanjutan juga dapat memainkan peran penting dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, seperti perikanan berkelanjutan, restorasi ekosistem pesisir (mangrove, padang lamun, dan terumbu karang), dan energi terbarukan laut (misalnya, energi angin lepas

pantai dan gelombang laut). Ekonomi biru dapat berkontribusi untuk mitigasi perubahan iklim melalui penyerapan karbon oleh ekosistem laut, pengurangan emisi melalui transportasi laut rendah karbon, pengelolaan limbah laut yang lebih baik, dan penerapan ekonomi sirkular di laut. Ekosistem laut, terutama pesisir seperti mangrove, lamun, dan rawa-rawa payau memiliki potensi signifikan dalam penyerapan karbon. Ekosistem ini juga dikenal sebagai ekosistem *blue carbon* karena kemampuannya menyimpan karbon dalam jumlah besar.

#### **4.11 Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)**

Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan perhitungan terhadap IBEI provinsi dan rata-rata nasional, dimana rata-rata IBEI di tingkat nasional sebesar 43,98 pada tahun 2023, naik dari posisi tahun 2022 sebesar 41,28. Nilai IBEI distandardisasi antara 1 hingga 100, dimana semakin tinggi skor menunjukkan kinerja yang semakin baik. Jika dilihat per pilar, nilai rata-rata untuk pilar sosial adalah 53,21, pilar lingkungan sebesar 28,94, dan pilar ekonomi sebesar 20,15. Hal ini menunjukkan masih terjadinya ketimpangan skor yang cukup signifikan antar pilar IBEI. Lebih lanjut, rendahnya skor pada pilar ekonomi mengindikasikan belum optimalnya penciptaan nilai tambah dari pengelolaan sumber daya perairan. Begitupun dengan rendahnya skor pada pilar lingkungan menunjukkan pengelolaan ekonomi biru yang belum ramah terhadap keberlanjutan lingkungan dan ekosistem perairan. Adapun kontribusi tinggi dari pilar sosial berasal dari tingginya kinerja sub-pilar kesehatan, terutama konsumsi protein dan ikan.

Secara regional, Provinsi Sulawesi Selatan berada di posisi tertinggi dengan nilai IBEI sebesar 80,86 pada tahun 2023, disusul oleh Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan skor IBEI masing-masing sebesar 71,63 dan 68,50. Berdasarkan pilar, capaian IBEI Provinsi Sulawesi Selatan signifikan lebih tinggi pada pilar sosial, yaitu sebesar 85,5, sedangkan pilar ekonomi dan lingkungan masing-masing hanya sebesar 52,0 dan 50,2. Selain menunjukkan ketimpangan antar pilar, kondisi ini juga menandakan relatif belum optimalnya pemanfaatan sumber daya perairan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Sementara itu, kinerja aspek lingkungan yang relatif rendah juga menunjukkan bahwa masih rendahnya integritas lingkungan dan ekosistem perairan di Provinsi Sulawesi Selatan. Jika dibandingkan dengan Jawa Timur, skor pilar ekonomi mencapai 74,3 atau yang tertinggi di Indonesia, terutama karena ditopang oleh sub-pilar manufaktur berbasis kelautan. Artinya, hilirisasi produk perikanan dan kelautan di Provinsi Sulawesi Selatan masih relatif tertinggal dibanding Provinsi Jawa Timur, dan memiliki peluang yang sangat besar untuk ditingkatkan dan diperluas.

#### **4.11.1 Perhitungan IBEI Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan**

Kementerian PPN/Bappenas melakukan perhitungan IBEI hanya di level provinsi, sedangkan indikator di level kabupaten/kota belum tersedia. Dengan menggunakan pendekatan dan metode yang diterapkan di level provinsi dan nasional, laporan ini juga menyajikan perhitungan IBEI level kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil perhitungan menunjukkan Kabupaten Sinjai menempati skor paling tinggi, yaitu sebesar 86,0 di tahun 2023. Di urutan kedua dan ketiga terdapat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Kepulauan Selayar dengan skor IBEI masing-masing sebesar 85,3 dan 83,6. Adapun daerah dengan skor IBEI terendah ditempati oleh Kabupaten Soppeng (53,2), Tana Toraja (53,9), dan Gowa (54,1).

Kinerja IBEI Kabupaten Sinjai terutama ditopang oleh Pilar Lingkungan, terutama yang terkait dengan pengembangan energi baru dan terbarukan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di wilayah kepulauan. Sementara itu, kinerja IBEI Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terutama ditopang oleh Pilar Sosial, di antaranya adalah jumlah nelayan dan rumah tangga perikanan tangkap yang menempati kategori tinggi di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada aspek lingkungan, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan juga relatif tinggi pada indikator jumlah desa pesisir dengan tempat pembuangan sampah dan indikator jumlah desa pesisir dengan tempat buang air besar dan saluran air limbah.

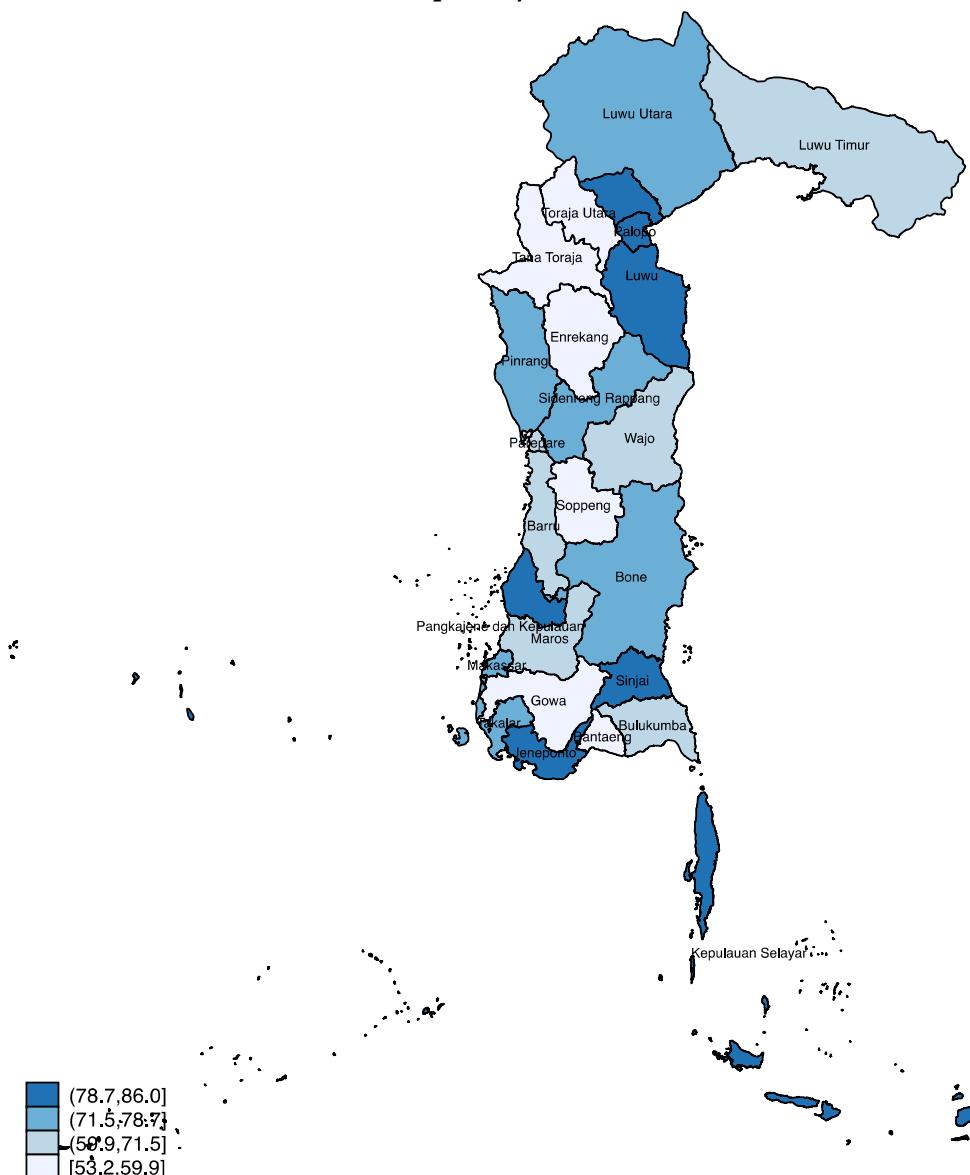
Tabel 4.1 menyajikan skor IBEI kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Gambar 4.1 menyajikan skor IBEI kabupaten/kota dalam 4 pengelompokan skor IBEI dengan kategori tinggi, agak tinggi, sedang, dan rendah

**Tabel 4. 1**  
**Skor IBEI Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023**

No	Kabupaten/Kota	Pilar 1: Ekonomi	Pilar 2: Lingkungan	Pilar 3: Sosial	IBEI
1	Sinjai	64,7	95,0	61,2	86,0
2	Pangkajene dan Kepulauan	68,2	72,8	73,9	85,3
3	Kepulauan Selayar	77,3	56,6	73,7	83,6
4	Jeneponto	67,1	48,9	81,6	79,9
5	Palopo	54,6	65,4	80,2	79,6
6	Luwu	69,7	51,6	75,8	79,5
7	Makassar	57,3	55,8	81,5	78,0
8	Luwu Utara	64,8	67,1	62,5	77,1
9	Bone	65,2	45,9	79,2	77,1
10	Pinrang	57,5	54,5	77,1	75,8
11	Takalar	66,8	53,2	68,3	75,6
12	Sindereng Rappang	49,9	73,0	65,9	74,1
13	Luwu Timur	59,7	51,7	60,5	68,8
14	Bulukumba	55,9	51,6	58,1	66,1
15	Maros	49,5	46,6	67,3	65,6
16	Wajo	62,2	48,1	48,4	63,6
17	Parepare	56,1	49,9	51,3	62,7
18	Barru	57,3	51,4	46,3	61,7
19	Enrekang	46,8	44,6	54,0	58,1
20	Toraja Utara	46,8	44,6	53,6	57,9
21	Bantaeng	49,9	44,8	45,5	55,9
22	Gowa	47,9	44,6	43,3	54,1
23	Tana Toraja	46,8	44,6	44,1	53,9
24	Soppeng	47,6	44,6	41,5	53,2

*Sumber: Perhitungan Tim Penyusun Ekonomi Biru Sulsel*

**Gambar 4.1**  
**Peta Sebaran Skor IBEI Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan 2023**



Sumber: Perhitungan Tim Penyusun Ekonomi Biru Sulse

#### 4.12 Ketimpangan antar Wilayah Pengembangan Ekonomi Biru

Pembangunan pada dasarnya ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah secara merata. Sampai saat ini di Sulawesi Selatan pembangunan antar kawasan masih menunjukkan kesenjangan antar kawasan yang ditandai dengan nilai indeks Williamson Sulawesi Selatan. Pembangunan dalam kurun waktu satu dekade terakhir masih menunjukkan Sulawesi Selatan berada dalam kategori ketimpangan “tinggi” dengan nilai Indeks Williamson pada tahun 2023 sebesar 0,067. Selain itu ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan

juga ditandai dengan ketimpangan capaian kinerja makro pembangunan dan ketersediaan infrastruktur wilayah yang aksesibel dan berkualitas yang ditandai dengan kesenjangan infrastruktur wilayah, diantaranya tingkat kemantapan jalan. Tingkat Kemantapan Jalan nasional di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 sebesar 94,14 persen, sedangkan tingkat kemantapan jalan provinsi hanya sebesar 70,01 persen dan tingkat kemantapan jalan kabupaten hanya sebesar 61,07 persen.

Indeks Williamson dan Tingkat Kemantapan Jalan menunjukkan belum meratanya akses terhadap infrastruktur jalan sebagai pendukung konektifitas utama. Hal ini juga merupakan signal tidak merata akses terhadap sarana lain (permodalan, teknologi, ketrampilan, hubungan ke pasar/market linkage) yang dapat mendorong diversifikasi dan hilirisasi industry berbasis sumber daya kelautan.

#### **4.12.1 Wilayah Ekonomi Biru Teluk Bone**

Kawasan Telok Bone atau dalam pengembangan wilayah disebut Kawasan Watampone berkontribusi sebesar 13,21 persen terhadap perekonomian Sulawesi Selatan pada tahun 2023, dan memperlihatkan bahwa kontribusi PDRB kawasan ini terus menurun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, khususnya pada Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo. Kontribusi terhadap lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan cukup besar yaitu sebesar 24,33 persen mengingat peran kawasan ini sebagai lumbung pangan Sulawesi Selatan.

Capaian kinerja makro pembangunan kabupaten menunjukkan bahwa semua kabupaten pada indikator tingkat kemiskinan dan laju pertumbuhan ekonomi serta Gini Ratio masih perlu dioptimalkan di semua wilayah. Dan pada ketercapaian indikator Indeks Pembangunan Manusia, semua kabupaten memiliki ketercapaian yang baik.

Kualitas infrastruktur jalan di kawasan ini menunjukkan kinerja kemantapan jalan yang kondisinya lebih bagus yaitu sebesar 73,63 persen daripada rata rata kemantapan jalan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 70,01 persen. Sedangkan pada konektivitas wilayah berupa pelabuhan laut, kawasan ini memiliki 1 (satu) pelabuhan pengumpul di Kabupaten Bone, 3 (tiga) pelabuhan pengumpulan, dan 6 (enam) pangkalan pendaratan ikan serta 1 (satu) bandar udara pengumpulan di Kabupaten Bone.

Kawasan Andalan Laut Teluk Bone mempunyai kondisi infrastruktur yang lebih rendah daripada rata-rata kondisi infrastruktur Sulawesi Selatan yang ditunjukkan dengan kemantapan jalan yang kondisinya sebesar 60,49 persen. Selain itu pada kawasan ini masih terdapat beberapa ruas jalan provinsi yang belum tembus sebesar 5,84 persen. Sedangkan pada konektivitas wilayah berupa pelabuhan laut, kawasan ini hanya memiliki 2

(dua) pelabuhan pengumpul di Kota Palopo dan Kabupaten Luwu Timur; 2 (dua) pelabuhan pengumpulan di Kabupaten Luwu Timur dan di Kabupaten Luwu Utara, 5 (lima) pangkalan pendaratan ikan, dan 7 (tujuh) bandar udara pengumpulan.

#### **4.12.2 Wilayah Ekonomi Biru Selat Makassar**

Pembangunan Kawasan Selat Makassar memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dengan kontribusi rata-rata 49,63 persen per tahun, yang didominasi oleh lapangan usaha perdagangan dan jasa dengan kontribusi sebesar 17,51 persen, lapangan usaha konstruksi dengan kontribusi sebesar 17,17 persen dan lapangan usaha industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 16,23 persen. Peran Kawasan Selat Makassar sebagai pusat perdagangan dan jasa regional di Kawasan Timur Indonesia memacu tumbuhnya investasi rata-rata sebesar 7,15 persen per tahun atau rata rata investasi sebesar Rp 97,36 triliun.

PDRB Kawasan Makassar pada Tahun 2023, berkontribusi terbesar dan semakin meningkat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terhadap PDRB Provinsi Selawesi Selatan yang ditandai dengan meningkatnya kontribusi PDRB dari 49,74 persen pada tahun 2021 menjadi sebesar 50,01 persen pada tahun 2023 yang dikontribusikan oleh Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa.

Memperhatikan capaian kinerja makro pembangunan kabupaten/kota di Kawasan Makassar, maka semua kabupaten/kota di Kawasan Makassar memiliki ketercapaian yang baik untuk indikator Indeks Pembangunan Manusia. Ketercapaian target pada indikator tingkat kemiskinan dan Gini Ratio pada Kawasan Makassar masih perlu dioptimalkan di semua wilayah, sedangkan untuk indikator tingkat pengangguran terbuka hanya Kabupaten Pangkajene Kepulauan yang memiliki kinerja yang masih kurang optimal dan pada indikator pertumbuhan ekonomi hanya Kabupaten Takalar yang menunjukkan penurunan laju pertumbuhan dan penurunan kontribusi terhadap PDRB Sulawesi Selatan.

Sedangkan berdasarkan ketersediaan infrastruktur maka Kawasan Makassar merupakan kawasan yang memiliki infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel ditandai dengan kemantapan jalan provinsi sebesar 87,80 persen yang kondisinya lebih bagus daripada rata rata kemantapan jalan provinsi di Sulawesi Selatan yang hanya sebesar 70,01 persen. Selain itu kawasan ini juga ditunjang oleh ketersediaan pelabuhan yaitu Pelabuhan Makassar sebagai pelabuhan utama, 29 (dua puluh sembilan) pelabuhan pengumpulan yang terbanyak di Kabupaten Pangkajene Kepulauan walaupun dengan sarana dan prasarana yang terbatas, 1 (satu) pelabuhan perikanan nusantara, 13 (tiga belas) pangkalan pendaratan ikan, serta 1 (satu) bandar udara internasional yaitu Bandar Udara Sultan Hasanuddin di Makassar.

#### **4.12.3 Wilayah Ekonomi Biru Laut Flores**

Kawasan Laut Flores sebagai bagian dari Kawasan Andalan Bulukumba-Watampone dan Kawasan Andalan Laut Singkarrang-Takabonerate serta Kawasan Andalan Laut Teluk Bone merupakan pusat pertumbuhan ekonomi local yang berperan sebagai kawasan penyangga pusat pertumbuhan dengan sector unggulan pariwisata, industri, pertanian, perikanan, perdagangan, dan pertambangan serta agro dan mina industri. PDRB kabupaten di Kawasan ini merupakan PDRB kawasan yang paling sedikit berkontribusi terhadap PDRB provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 yang hanya sebesar 10,17 persen, yang dipengaruhi oleh menurunnya kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Jeneponto.

Memperhatikan capaian kinerja makro pembangunan kabupaten di Kawasan laut flores, maka semua kabupaten di Kawasan Bulukumba memiliki ketercapaian yang baik untuk indikator Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Pada target indikator tingkat kemiskinan, semua kabupaten pada kawasan Laut Flores masih perlu dioptimalkan pencapaiannya, dan pada indikator Gini Ratio, semua kabupaten juga masih perlu dioptimalkan pencapaiannya.

Infrastruktur Kawasan Laut Flores berupa kemantapan jalan provinsi sebesar 82,45 persen, menunjukkan bahwa kondisinya lebih bagus daripada rata-rata kemantapan jalan Provinsi Sulawesi Selatan yang hanya sebesar 70,01 persen. Selain itu kawasan ini juga ditunjang oleh ketersediaan pelabuhan berupa 4 (empat) pelabuhan pengumpul di Kawasan Bulukumba yaitu di 2 (dua) pelabuhan di kabupaten Bulukumba, 1 (satu) pelabuhan di Kabupaten Sinjai dan 1 (satu) pelabuhan Kabupaten Bantaeng; 31 (tiga puluh satu) pelabuhan pengumpul yang terbanyak di Kabupaten Kepulauan Selayar namun dengan sarana dan prasarana yang sangat terbatas, dan 15 (lima belas) pangkalan pendaratan ikan.

#### **4.12.4 Wilayah Ekonomi Biru Non-Pesisir**

Memperhatikan capaian kinerja makro pembangunan kabupaten/kota di Kawasan Non-Pesisir, maka semua kabupaten/kota di kawasan ini memiliki ketercapaian yang baik untuk indikator Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan untuk indikator tingkat pengangguran terbuka hanya Kabupaten Soppeng yang memiliki kinerja yang masih kurang optimal. Ketercapaian target pada indikator tingkat kemiskinan masih perlu dioptimalkan di semua wilayah, demikian halnya dengan ketercapaian indikator Gini Ratio masih perlu dioptimalkan di semua wilayah.

Kawasan Pembangunan Non-Pesisir yang terhubung dengan Kawasan Andalan Laut Selat pada infrastruktur jalan menunjukkan kinerja kemantapan jalan yang kondisinya lebih rendah yaitu sebesar 18,45 persen yang lebih rendah daripada rata rata kemantapan jalan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar

70,01 persen. Sedangkan pada koneksi wilayah berupa pelabuhan laut, kawasan ini memiliki 2 (dua) pelabuhan pengumpul di Kota Parepare dan Kabupaten Barru, 2 (dua) pelabuhan pengumpulan di Kabupaten Barru dan di Kabupaten Pinrang, dan 6 (enam) pangkalan pendaratan ikan.

Peran kawasan Non-Pesisir terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mencapai rata-rata 15,22 persen per tahun. Kontribusi tertinggi disumbang oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 44,03 persen, kemudian lapangan usaha pertanian sebesar 22,34 persen dan pengadaan listrik dan gas dengan kontribusi sebesar 16,93 persen.

Memperhatikan capaian kinerja makro pembangunan kabupaten/kota di kawasan ini, maka semua kabupaten/kota memiliki ketercapaian yang baik untuk indikator Indeks Pembangunan Manusia. Ketercapaian target pada indicator tingkat kemiskinan masih perlu dioptimalkan di semua wilayah, sedangkan untuk indikator tingkat pengangguran terbuka hanya Kabupaten Tana Toraja yang memiliki kinerja yang masih kurang optimal, sedangkan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dan Gini Ratio, hanya Kabupaten Toraja Utara yang berkinerja baik.

#### **4.13 Sumber Daya Manusia**

Beberapa isu strategis Sulawesi Selatan terkait sumber daya manusia dapat diidentifikasi sebagai berikut:

##### **4.13.1 Pemanfaatan Bonus Demografi**

Proporsi demografi yang mengarah pada bertambahnya kelompok penduduk usia tua (*aging population*) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan berimplikasi pada tantangan untuk mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam kewajiban perlindungan sosial, akselerasi pemenuhan hak anak, pembukaan lapangan kerja, pemberdayaan dan pelindungan lansia, tanpa mengabaikan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Transisi demografi sangat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat, mulai dari meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi yang bermuara pada aglomerasi penduduk di perkotaan, transisi epidemiologi, pergeseran nilai yang berpotensi menurunkan kualitas ketahanan keluarga, rentannya perlindungan terhadap anak. Dibutuhkan intervensi dari hulu sampai hilir untuk mengoptimalkan bonus demografi agar dapat mencetak generasi digital dengan talenta dan daya saing global, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat yang positif.

Sulawesi Selatan ke depan akan mengalami perubahan demografi yang cepat, jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) terus meningkat dan mencapai puncak pada sekitar tahun 2050. Dalam periode tersebut, Sulawesi Selatan menjadi salah satu wilayah dengan angkatan kerja yang

banyak. Namun pada saat yang sama, angka ketergantungan mengalami peningkatan karena jumlah penduduk usia tua (usia 65+ tahun) meningkat. Kondisi demografi tersebut memberi kesempatan yang terbuka untuk mengoptimalkan penduduk usia produktif sebagai pendorong utama pembangunan dan memanfaatkan usia produktif secara efektif. Bonus demografi akan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan apabila kualitas, produktivitas, dan inovasi usia produktif terus ditingkatkan mulai periode awal pembangunan jangka panjang ke depan.

#### **4.13.2 Kualitas Kesehatan Penduduk**

Kualitas kesehatan penduduk yang belum optimal diindikasikan oleh rendahnya Usia Harapan Hidup, tingginya Angka Kematian Ibu di Sulawesi Selatan (119/100.000), prevalensi stunting yang lebih tinggi dari angka rata-rata nasional, dan meningkatnya kasus *tuberculosis* dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2022 mencapai jumlah tertinggi sepanjang 10 tahun terakhir. Kondisi ini diduga lebih parah pada komunitas nelayan kecil di desa-desa nelayan.

Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain upaya kuratif yang masih mendominasi dibandingkan upaya promotif dan preventif, belum semua fasilitas kesehatan baik Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut mempunyai sarana dan prasarana sesuai kebutuhan, khususnya untuk pelayanan kesehatan bergerak di wilayah kepulauan. Selain itu, sumber daya manusia kesehatan yang terlatih untuk penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal juga belum mencukupi kebutuhan secara merata, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional yang belum menjangkau seluruh keluarga di Sulawesi Selatan secara merata, khususnya dukungan jaminan kesehatan bagi keluarga nelayan kecil, dan penerapan pola hidup sehat belum melembaga di masyarakat, serta penerapan Standar Pelayanan Minimum yang belum semua dipenuhi di seluruh layanan kesehatan.

#### **4.13.3 Kualitas dan Pemerataan Akses Pendidikan**

Peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan akses pendidikan yang belum optimal diindikasikan oleh: capaian RLS yang masih di bawah nasional, APM SMP/sederajat dan SMA/sederajat yang masih di bawah rata-rata nasional, rerata kompetensi Literasi dan Numerasi berdasarkan Asesmen Nasional masih berada pada peringkat menengah di angka antara 41 hingga 60, Rendahnya Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi yang hanya mencapai 18,28 persen; dan belum optimalnya perluasan kesempatan kerja yang diiringi

peningkatan kualitas serta kuantitas Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan kebutuhan/bidang lapangan kerja yang ada.

Kondisi ini disebabkan antara lain meningkatnya persentase anak putus sekolah, belum meratanya akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak mulai usia 5 tahun keatas agar tetap bisa bersekolah hingga jenjang pendidikan tinggi, belum meratanya kualitas sarana prasarana dan distribusi tenaga pendidik dan pendidikan berkualitas dan memenuhi standard kompetensi antara pedesaan dan perkotaan, serta antara daratan dan kepulauan. Selain itu pemanfaatan teknologi pembelajaran juga belum menjadi prioritas kebijakan pembangunan pendidikan, sehingga perangkat lunak dan perangkat keras proses pembelajaran juga mengalami ketimpangan yang tajam antara masyarakat perkotaan dengan perdesaan, antara daratan dengan daerah kepulauan, serta antara golongan kaya dengan masyarakat miskin dan kurang mampu, dan kualitas lulusan masih rendah, sehingga produktivitas dan daya saingnya masih rendah.

#### **4.13.4 Perlambatan Penurunan Tingkat Kemiskinan**

Penurunan tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan belum optimal diindikasikan oleh berfluktuasinya tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun, dan disparitas tingkat kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan masih tinggi. Kondisi ini disebabkan antara lain belum optimalnya penanganan kemiskinan berdasarkan skala prioritas pada kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi dan memerlukan perhatian khusus, peningkatan beban tanggungan bagi usia produktif akibat meningkatnya rasio ketergantungan, belum optimalnya integrasi layanan dan sistem data kependudukan sebagai basis perencanaan penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial yang inklusif. Selain itu, lapangan kerja di perdesaan masih bertumpu pada sektor primer, pengembangan sektor jasa dan industry masih bertumpu di perkotaan, masih terdapatnya ketidaksetaraan dalam akses pembiayaan dan sumberdaya antara perdesaan dan perkotaan, rendahnya kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja formal dan informal, serta terbatasnya akses bagi penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya di sektor ekonomi formal dan informal, kesempatan peningkatan kapasitas dan kesempatan peluang kerja yang layak.

Upaya mengentaskan kemiskinan di kalangan masyarakat nelayan kecil terkait erat dengan komitmen politik pemerintah dan kemampuannya dalam menjalankan kebijakan afirmasi. Pada kelompok masyarakat miskin, faktor pengungkit utama dalam upaya menerobos keluar dari lingkaran kemiskinan adalah pendidikan dan kesehatan. Karena itu diperlukan upaya khusus dari pihak eksekutif dan legislative untuk membangun pembiayaan program-program afirmasi sosial seperti sekolah dan pelayanan kesehatan gratis.

#### **4.14 Pendanaan Pengembangan Ekonomi Biru**

Untuk mendukung berbagai inisiatif pengembangan ekonomi biru di atas, pendanaan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan implementasi agenda pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Secara nasional, estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk pengelolaan ekonomi biru sebesar USD 1,64 triliun. Dana ini akan dialokasikan untuk sejumlah agenda pembangunan, di antaranya seperti perlindungan terhadap eksosistem perairan, optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perairan dan ekosistem, pemanfaatan energi biru, pengendalian sampah, pengolahan sampah, dan kegiatan lainnya.

Sebagai salah satu *leading sector*, Pemerintah Indonesia hanya mampu berkontribusi sebesar 20 - 25 persen terhadap total kebutuhan pembiayaan biru, yang dialokasikan dari APBN. Untuk itu, inisiatif pembiayaan biru dikembangkan melalui mitra pembangunan seperti organisasi multi nasional, pihak swasta, donor pembangunan dan pemangku kepentingan lain. *Blended finance, impact investment facilities, blue bond* dan *blue loan* diharapkan dapat melibatkan pihak swasta dan pemangku kepentingan lainnya untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan biru yang mendukung pemeliharaan kualitas ekosistem, baik di tingkat nasional maupun daerah. Sesuai mandat SDG 17, berbagai mekanisme kemitraan untuk ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan komunitas (*PPCP/Public, Private and Community Partnership*) perlu dikembangkan.

Khusus untuk pendanaan pengembangan biru di Sulawesi Selatan, direkomendasikan agar perencanaan pendanaan dilakukan dalam kerangka pembuatan RUPM (Rencana Umum Penanaman Modal) untuk periode RPJPD 2025-2045 dan lebih spesifiknya untuk RPJMD 2025-2029 yang akan datang sehingga terintegrasi dengan rencana pembiayaan pembangunan provinsi secara keseluruhan. Setelah itu, berbagai mekanisme pendanaan dapat dikembangkan sesuai karakter kegiatan ekonomi biru yang diprioritaskan dan opsi-opsi pendanaan yang tersedia. Untuk memobilisasi dan membangun opsi-opsi pendanaan investasi biru, pimpinan daerah dan para pimpinan OPD terkait perlu melakukan penjangkauan (*out reach*) secara pro-active dan membangun program-program kemitraan dengan lembaga-lembaga keuangan terkait seperti perbankan, *venture capital, impact investment facilities*, maupun lembaga-lembaga bilateral dan multilateral serta organisasi pilantropis.

## BAB V RENCANA INDUK PEMBANGUNAN EKONOMI BIRU SULAWESI SELATAN

### 5.1 Visi Pembangunan Ekonomi Biru Sulawesi Selatan 2025-2045

Visi Pembangunan Ekonomi Biru Propinsi Sulawesi Selatan 2025-2045 adalah:

*“Berdaya Saing, Menyejahterakan, Berkeadilan dan Berkelanjutan Yang Didukung oleh Integritas Tata Kelola dan Ekosistem Alami”*

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut.

1. **Berdaya saing** adalah mewujudkan ekonomi biru yang meningkatkan daya saing perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan.
2. **Menyejahterakan** adalah mewujudkan ekonomi biru yang memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, baik yang mempunyai akses pada perairan laut dan payau maupun pada perairan daratan.
3. **Berkeadilan** adalah mewujudkan ekonomi biru yang menyejahterakan seluruh masyarakat melalui transformasi yang berkeadilan dan inklusif.
4. **Berkelanjutan** adalah mewujudkan ekonomi biru yang bisa dinikmati oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang dengan kualitas ekosistem perairan laut dan daratan yang makin membaik.
5. **Integritas tata kelola** adalah mewujudkan tata kelola pemanfaatan sumberdaya perairan laut dan perairan daratan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkeadilan.

### 5.2 Misi Pembangunan Ekonomi Biru Sulawesi Selatan 2025-2045

Untuk mencapai visi pembangunan ekonomi biru Sulawesi Selatan 2025-2045, maka dirumuskan 5 misi pembangunan ekonomi biru sebagai berikut.

1. **Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berbudaya** untuk mendukung ekonomi biru
2. **Mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat** melalui transformasi ekonomi biru yang berkeadilan
3. **Mewujudkan ekosistem ekonomi biru** yang berkelanjutan
4. **Mewujudkan tata kelola pemanfaatan sumberdaya perairan** yang transparan, terintegrasi, berintegritas dan adaptif untuk menjamin keberlanjutan ekosistem perairan.

### **5.3 Moto Pembangunan Ekonomi Biru 2025-2045**

Moto kerja pembangunan ekonomi biru Sulawesi Selatan 2025-2045 dinyatakan sebagai **Menjunjung Sipakatuo untuk mengayomi pinisi berlayar, menjaga Somba Opu tegak, dan riak mamiri memberi kesejukan.** Moto kerja ini secara filosofis menggambarkan nilai-nilai kultural dari empat Wilayah Pembangunan Ekonomi Biru Sulawesi Selatan. Penjelasan terhadap kredo tersebut adalah sebagai berikut.

- 1. Menjunjung Sipakatuo** adalah menjunjung nilai-nilai luhur kultural lokal yang saling menghidupi dalam adab dan adat Sulawesi Selatan yang luhur.
- 2. Mengayomi Pinisi Berlayar** menggambarkan ekonomi biru dapat menjaga kehidupan dan mengantarkan masyarakat Sulawesi Selatan berbudaya maritim pada tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi.
- 3. Menjaga Somba Opu Tegak** menggambarkan bagaimana pembangunan ekonomi biru mampu menegakkan harkat dan martabat masyarakat Sulawesi Selatan.
- 4. Riak Mamiri Memberi Kesejukan** adalah bagaimana ekonomi biru mendukung dinamika kehidupan sosial-budaya masyarakat Sulawesi Selatan berbasis sumberdaya perairan darat.

### **5.4 Isu-isu Penting Pembangunan Ekonomi Biru Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan 2025-2045**

Kelompok isu penting yang dihadapi sektor ekonomi biru di Sulawesi Selatan sekarang mencakup kelompok ekosistem, ekonomi, sosial dan tata kelola. Sebagian isu tersebut mempunyai relasi yang bersifat hirarkial, saling terkait, dan kausalitas logis dalam satu kelompok isu maupun antar kelompok isu, dan sebagian lagi bersifat bebas. Isu tersebut juga merupakan isu umum yang menjadi isu keseluruhan Sulawesi Selatan, tetapi sebagian isu tersebut merupakan isu spesifik per wilayah yang khas.

Isu-isu penting pembangunan ekonomi biru di Sulawesi Selatan dalam pengelompokan di atas dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 5. 1**  
**Kelompok Isu Pembangunan Ekonomi Biru**

<b>Kelompok Ekologi/Ekosistem</b>	<b>Kelompok Ekonomi</b>	<b>Kelompok Sosial</b>	<b>Kelompok Tata Kelola</b>
1. Degradasi habitat	1. Kesejahteraan	1. Kemiskinan, Pendidikan dan Kesehatan	1. Political will dan keberpihakan
2. Perubahan tata guna lahan	2. Ekonomi Kreatif	2. Kualitas dan kesesuaian ketrampilan SDM	2. Hubungan kerja antar lembaga pemerintah
3. Kerusakan lahan	3. Hilirisasi	3. Ketimpangan kesejahteraan	3. Pemetaan peran, kewenangan, dan tanggungjawab para pihak
4. Pendangkalan danau dan kerusakan DAS	4. Produktifitas	4. Pemanfaatan bonus demografi	4. Sinkronisasi kebijakan/regulasi
5. Pencemaran perairan	5. Daya saing	5. Keadilan menanggung beban eksternalitas pembangunan	5. Ukuran kinerja lembaga dan aparat
6. Perubahan Iklim (mitigasi dan adaptasi)	6. Investasi	6. Ketimpangan akses terhadap sumberdaya produktif: modal, pelatihan ketrampilan, dan layanan publik	6. Kepercayaan pada lembaga pemerintah
7. Keanekaragaman hayati perairan	7. Budi-daya	7. Keamanan bekerja dan berinvestasi	7. Implementasi dan penegakan hukum
8. Implementasi integrasi aturan dan praktek kelola ruang darat-laut	8. Pangan biru		8. Koordinasi, komunikasi dan kolaborasi antar pihak dan wilayah
9. Sampah	9. Ketimpangan wilayah		9. Pengorganisasian stakeholders
10. Overfishing	10. Pariwisata		10. Konflik kewenangan pemanfaatan ruang
11. Saprodi ramah lingkungan	11. Inovasi pengembangan produk baru		11. Keberadaan dan efektifitas LPP-WPP
12. Pemulihan ekosistem			

Sumber: Hasil FGD Perencanaan Skenario Ekonomi Biru Sulawesi Selatan, 2024

**Fokus kepedulian pembangunan ekonomi biru di Sulawesi Selatan adalah bagaimana mewujudkan ekonomi biru yang berdaya saing, mensejahterakan, berkeadilan, dan berkelanjutan, yang didukung oleh integritas tata kelola dan ekosistem alami berdasarkan pada kondisi faktual isu-isu yang dihadapi sekarang ini.** Fokus kepedulian ini merupakan perubahan kondisi yang ingin diwujudkan selama proses pembangunan ekonomi biru sampai dengan 2045. Perubahan-perubahan ini yang akan mengantarkan Sulawesi Selatan pada situasi tahun 2045, yaitu Ekonomi Biru memberikan kesejahteraan kepada masyarakat secara berkeberlanjutan dengan nilai IBEI 275,29.

### **5.5 Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan**

Berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan pengembangan ekonomi biru Sulawesi Selatan teridentifikasi kekuatan yang bersumber dari karakteristik ekologi, sosial, ekonomi dan budaya. Kekuatan pembangunan ekonomi biru Sulawesi Selatan didasarkan pada karakteristik dan sistem sosial masyarakat dan sumberdaya yang mendorong tingginya keinginan pemerintah membangun ekonomi biru. Tetapi proses-proses formal yang membentuk sumberdaya manusia dan tata kelola menjadi sumber kelemahan yang penting.

Sedangkan tantangan terutama bersumber pada proses formalitas penyelenggaraan kegiatan ekonomi biru, akses terhadap teknologi dan pendanaan, dan tata kelola yang diterapkan sekarang ini. Namun demikian peluang dan tantangan muncul baik karena dinamika kewilayahan secara umum di Sulawesi, nasional maupun global seperti terlihat dalam Tabel 5.2 di bawah ini.

Dinamika kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan bervariasi antar wilayah (region) karena karakteristik sumberdaya alam, sistem sosial dan tata kelola sektor-sektor ekonomi biru.

**Tabel 5. 2**  
**Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan Pembangunan Ekonomi Biru Sulawesi Selatan.**

Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)	Peluang (Opportunity)	Tantangan (Threat)
S1. Kultur dan Sejarah tentang keterikatan masyarakat dengan sumberdaya perairan	W1. Kualitas pelaku usaha yang perlu ditingkatkan	01. Komitmen pemerintah pusat dan provinsi dalam implementasi ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan secara sistemik	T1. Tingginya biaya pendidikan dan kesehatan
S2. SDM yang sudah beradaptasi dengan potensi sumberdaya perairan	W2. Angka putus sekolah tinggi	02. Selat Makassar sebagai jalur lalu lintas utama perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Selatan, Afrika, Eropa dan Australia	T2. Pontensi konflik kepentingan dan kewangan baik secara vertikal maupun horizontal.
S3. Tingginya potensi sumberdaya perairan untuk mendukung sektor ekonomi	W3. Keterampilan dan Pendidikan rendah	03. Berkembangnya industri pariwisata Bahari lokal maupun internasional	T3. Potensi bencana dan perubahan iklim
S4. Jumlah penduduk yang tinggi sebagai pasar produk	W4. Meningkatnya gaya hidup konsumtif	04. Berkembangnya digitalisasi data dan informasi	T4. Ancaman penyebaran spesies invasieve di perairan daratan

<b>Kekuatan (Strength)</b>	<b>Kelemahan (Weakness)</b>	<b>Peluang (Opportunity)</b>	<b>Tantangan (Threat)</b>
S4. Tingginya political will pemerintah daerah Sul-Sel untuk pengembangan BE	W5. Pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan masih rendah	05. Berkembangan pasar karbon	T5. Pencemaran laut (padat maupun cair) lintas batas antar wilayah
S5. Perkembangan KSN (Kawasan Strategis Nasional) Soroako	W6. Terbatasnya infrastruktur pendidikan, kesehatan, transportasi-logistik	06. Penghargaan bagi tata kelola	T6. Pengembangan infrastruktur penunjang hilirisasi sektor Kelautan dan Perikanan
S6. Keberadaan beberapa Sekolah Tinggi, Politeknik dan SMK yang berorientasi pada Pendidikan keilmuan dan ketrampilan dalam bidang Perikanan, Kelautan, Pariwisata	W7. Proses hilirisasi belum optimal	07. Peningkatan kesadaran pentingnya linkungan dan ekosistem	T7. Pemerataan akses/konektifitas transportasi
	W8. Koordinasi antar sectoral masih kurang efektif	08. Berkembangnya pasar karbon	T8. Penyediaaan dukungan pengembangan inovasi produk-produk berbasis sumber daya kelautan untuk hilirisasi

<b>Kekuatan (Strength)</b>	<b>Kelemahan (Weakness)</b>	<b>Peluang (Opportunity)</b>	<b>Tantangan (Threat)</b>
	W9. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya perairan belum optimal	09. Potensi penyangga pangan dan ekonomi IKN	
	W10. Keterbatasan sumber dan akses permodalan		
	W11. Keterbatasan teknologi		
	W12. Keterbatasan anggaran		
	W13. Konsistensi tata ruang		
	W14. Regulasi kontradiktif		
	W15. Integritas aparatur		
	W16. Konsistensi penegakan hukum		

## **5.6 Desain Rencana Pembangunan Ekonomi Biru**

### **5.6.1 Prioritas Kebijakan Pembangunan Ekonomi Biru Sulawesi Selatan 2025-2045**

Prioritas kebijakan pembangunan ekonomi biru di Sulawesi Selatan diturunkan dari misi untuk mencapai visi pembangunan ekonomi biru Sulawesi Selatan 2025-2045 yang ingin diwujudkan. Prioritas kebijakan dapat dikelompokkan menjadi program yang mendukung setiap misi pembangunan ekonomi biru Sulawesi Selatan. Prioritas kebijakan akan bervariasi sesuai dengan tantangan dan kondisi setiap wilayah pembangunan ekonomi biru Sulawesi Selatan. Prioritas kebijakan tersebut adalah sebagai berikut.

#### **Misi 1: Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berbudaya untuk mendukung ekonomi biru**

Prioritas kebijakannya adalah penguatan SDM dengan merubah pola pikir melalui proses pendidikan dan pelatihan, akses informasi digital; akses pelayanan kesehatan; perlindungan sosial; pemberdayaan masyarakat; penurunan kemiskinan ekstrim dan penanganan *stunting*, putus sekolah dan proses seleksi aparatur pemerintah yang transparan dan kompetitif.

#### **Misi 2: Mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui transformasi ekonomi biru yang berkeadilan**

Prioritas kebijakannya adalah pengembangan ekonomi biru kreatif, pengembangan kawasan ekonomi, peningkatan infrastruktur dan teknologi informasi dan komunikasi (*ICT/Information and Communication Technology*) yang mendukung *konektivitas*, pengembangan insentif untuk energi terbarukan dan penguatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, menyiapkan penyangga IKN untuk pasokan kebutuhan pangan.

Prioritas kebijakannya adalah meningkatkan nilai tambah jasa dan produk ekonomi biru, pengembangan sistem usaha ekonomi biru cerdas (*smart blue economic activities*), peningkatan kinerja rantai pasok berkelanjutan dan logistik biru (*blue logistic*), pengembangan ekonomi sirkular yang dikaitkan dengan prioritas nasional penanganan sampah laut terutama plastik, peningkatan daya saing sektor tradisional untuk pertumbuhan berkelanjutan pada sektor perikanan budidaya, wisata bahari, dan industri pengolahan.

#### **Misi 3: Mewujudkan ekosistem ekonomi biru yang berkelanjutan**

Prioritas kebijakannya adalah perencanaan tata ruang perairan (zonasi) yang terpadu, pengarusutamaan daya dukung dan daya tampung ekosistem daratan dan perairan dalam perencanaan dan implementasi investasi, penerapan pengelolaan terpadu *landscape-seascape*, integrasi pengelolaan

DAS (Daerah Aliran Sungai) dan sampah, pengendalian dan pengawasan sumber daya perairan, pengembangan praktik budidaya perikanan yang rendah karbon, cerdas iklim dan ramah lingkungan, penguatan kelembagaan dan masyarakat untuk praktek perikanan berkelanjutan, peningkatan kapasitas pengelolaan sampah.

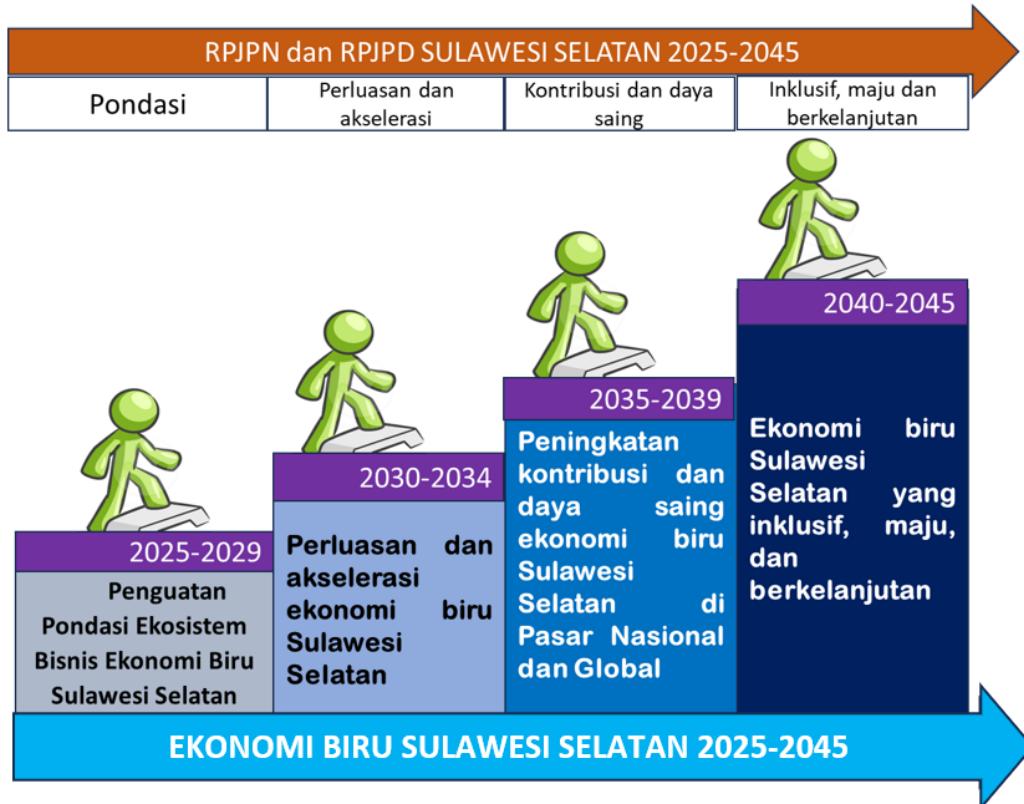
**Misi 4: Mewujudkan tata kelola pemanfaatan sumberdaya perairan yang transparan, terintegasi, berintegritas dan adaptif untuk mejamin ekosistem perairan berkelanjutan**

Prioritas kebijakannya adalah penegakan hukum dan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, transparansi proses perencanaan, konsistensi perencanaan dan penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; transparansi layanan perizinan berbasis digital, revisi dan adaptasi kewenangan pengelolaan wilayah laut, penyusunan dokumen rencana pengelola dan zonasi perairan, penyusunan renstra, pemetaan di wilayah laut, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut, penguatan lembaga LPP-WPP untuk tata kelola perikanan yang berbasis prinsip keberlanjutan, penguatan kordinasi pengamanan dan penegakan hukum di laut antara PSDKP, PolAir, TNI-AL, dan BAKAMLA di tingkat provinsi, perumusan pengelolaan danau dan cekungan perairan terintegrasi (ILBM), pengembangan kelembagaan kerjasama pemanfaatan ruang perairan (laut dan danau) dan revitalisasi kearifan lokal untuk pengelolaan ekosistem perairan dan ekosistem daratan yang berpengaruh pada ekosistem perairan.

**5.6.2 Tahapan Implementasi Ekonomi Biru Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan**

Kerangka waktu pengembangan ekonomi biru di Sulawesi Selatan dibagi dalam empat tahap lima tahunan selama periode 2025-2045. Tahapan itu adalah Tahap I 2025-2029 sebagai proses Penguatan Pondasi Ekosistem Ekonomi Biru Sulawesi Selatan, Tahap II 2030-2034 yang merupakan perluasan dan akselerasi ekonomi biru Sulawesi Selatan, Tahap III 2035-2039 sebagai upaya peningkatan kontribusi dan daya saing ekonomi biru Sulawesi Selatan di Pasar Nasional dan Global dan Tahap IV 2040-2045 adalah status ekonomi biru Sulawesi Selatan yang inklusif, maju, dan berkelanjutan (Gambar 5.2). Setiap tahap merupakan fondasi tahap berikutnya, sehingga kinerja tahap sebelumnya akan sangat menentukan kinerja tahapan pembangunan ekonomi berikutnya. Kondisi setiap tahapan dari awal sampai akhir adalah akumulatif dan pertambahan.

**Gambar 5.1**  
**Tahapan Pengembangan Ekonomi Biru Sulawesi Selatan 2025-2045**



Sumber: Tim Penyusun Ekonomi Biru Silsil

#### **Tahap I: Tahap penguatan pondasi ekosistem ekonomi biru Sulawesi Selatan (2025-2029)**

Tahapan ini adalah tahapan konsolidasi menyusun ekosistem sebagai tahapan yang kokoh untuk mendukung implementasi ekonomi biru. Penyusunan dokumen pengarah kebijakan, kerangka regulasi dan mekanisme kerja antar satuan kerja pemerintah dalam propinsi maupun antar pemerintah propinsi dan kabupaten-kota. Aksi implementasi difokuskan pada program dan aksi dasar sebagai pondasi tahapan berikut. Secara spasial, program dan aksi dilakukan pada empat region wilayah pembangunan ekonomi biru di Sulawesi Selatan, sehingga tahap ini secara berjenjang juga diikuti pada wilayah administrasi kabupaten dan kota di setiap region wilayah pembangunan ekonomi biru. Tahapan penguatan berorientasi pada penguatan kegiatan ekonomi yang sudah berkembang, dengan meningkatkan kinerja sektor tersebut.

## **Tahap II: Tahap perluasan dan akselerasi ekonomi biru Sulawesi Selatan (2030-2035)**

Tahapan ini adalah akumulasi dan pertambahan dari Tahap 1, sehingga bukan hanya konsolidasi penyusunan landasan memperluas program dan aksi untuk melakukan akselerasi pembangunan ekonomi biru di Sulawesi Selatan. Program dan aksi sudah memperluas dari tahap 1, sehingga sudah lebih luas jangkauan dan lebih tinggi intensitasnya. Secara spasial program dan aksi dilakukan pada empat region wilayah pembangunan ekonomi biru di Sulawesi Selatan, sehingga tahap ini secara berjenjang juga diikuti pada wilayah administrasi kabupaten dan kota di setiap region wilayah pembangunan ekonomi biru di Sulawesi Selatan. Tahapan perluasan dan akselerasi dilakukan dengan penguatan yang sudah berkembang dan mempersiapkan yang berpotensi berkembang.

## **Tahap III: Peningkatan kontribusi dan daya saing ekonomi biru Sulawesi Selatan di Pasar Nasional dan Global (2035-2039)**

Tahapan ini adalah akumulasi dan tambahan dari Tahap 1 dan Tahap 2, sehingga sudah terjadi peningkatan kontribusi ekonomi biru Sulawesi Selatan pada pasar domestik maupun global. Program dan aksi pembangunan diarahkan untuk mendorong besaran, efisiensi dan distribusi ekonomi biru sehingga menjadi hub bagi kawasan timur dan memberikan kontribusi penting pada ekonomi biru nasional dan kontribusi pada ekonomi global. Secara spasial program dan aksi dilakukan pada empat region wilayah pembangunan ekonomi biru di Sulawesi Selatan, sehingga tahap ini secara berjenjang juga diikuti pada wilayah administrasi kabupaten dan kota di setiap region wilayah pembangunan ekonomi biru di Sulawesi Selatan.

## **Tahap IV: Ekonomi biru Sulawesi Selatan yang inklusif, maju, dan berkelanjutan (2040-2045)**

Tahapan ini adalah akumulasi dan pertambahan dari Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3. Ekonomi biru sudah mampu menghela ekonomi Sulawesi Selatan, baik yang berbasis pada ekosistem perairan laut maupun ekosistem perairan daratan, dengan karakteristik inklusif terhadap skala ekonomi usaha, sektor maupun pelaku. Ekonomi biru dicirikan pada pola ekonomi yang efisien dan maju, sehingga mempunyai dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat pesisir maupun daratan. Pada sisi lain pola tata kelola sudah terlaksana dengan baik, sehingga ekonomi berkelanjutan karena didukung oleh sumberdaya perairan yang sehat dan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi biru pada tahapan ini bertumpu baik pada inovasi pengembangan produk maupun perluasan kegiatan ekonomi yang potensial.

### **5.6.3 Arah dan Pentahapan Pembangunan Ekonomi Biru di Tingkat Wilayah Sub-Provinsi Sulawesi Selatan**

Tahapan pengembangan ekonomi biru di Sulawesi Selatan juga dirumuskan untuk setiap wilayah (region), yang tahapannya berbeda-beda sesuai dengan kondisi faktualnya. Pengembangan ini didasarkan pada harapan yang mengarahkan proses pembangunan ekonomi biru di wilayah tersebut, sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Arah pengembangan masing-masing wilayah pada setiap tahapan pembangunan ekonomi biru dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut.

#### **Tahap I 2025-2029: Penguatan Pondasi Ekosistem Bisnis Ekonomi Biru Sulawesi Selatan**

Sesuai dengan tahapan, penguatan pondasi ekosistem ekonomi biru di masing-masing region bersifat khas sesuai dengan dinamika sosial masyarakat dan sumberdaya yang ada di wilayah tersebut. Arah pengembangan setiap region dapat dilihat dalam Tabel 5.3 berikut.

**Tabel 5. 3**  
**Arah Pengembangan Pembangunan Ekonomi Biru Sulawesi Selatan di Setiap Region Pada Tahap I (2025-2029).**

Region	Tahap I: Penguatan Pondasi Ekosistem Bisnis Ekonomi Biru Sulawesi Selatan(2025-2029)	Area
Teluk Bone	Penguatan Infrastruktur yang memperkuat sumberdaya manusia, sektor ekonomi, konservasi dan tata kelola yang efisien.  Prioritas pengembangan pada ekonomi perikanan (tangkap dan budidaya) dan penyiapan industri pengolahan, transportasi laut dan wisata berbasis perairan.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Kabupaten Sinjai</li><li>● Kabupaten Wajo</li><li>● Kabupaten Luwu Timur</li><li>● Kabupaten Luwu Utara</li><li>● Kabupaten Luwu</li></ul>
Selat Makasar	Penguatan pondasi pendidikan terkait dengan lingkungan, ekonomi berbasis sumberdaya perikanan, perencanaan sertifikasi budidaya, perencanaan tata ruang digital mendukung konservasi dan penguatan kelembagaan Masyarakat.  Prioritas pengembangan ekonomi adalah produksi perikanan budidaya.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Makassar</li><li>● Maros</li><li>● Pangkep</li><li>● Barru</li><li>● Pare-pare</li><li>● Pinrang</li></ul>
Laut Flores	Penyiapan regulasi, pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sosialisasi; pendampingan kegiatan usaha masyarakat,  Prioritas pengembangan ekonomi adalah perikanan.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Kabupaten Takalar</li><li>● Kabupaten Kepulauan Selayar</li><li>● Kabupaten Bulukumba</li><li>● Kabupaten Bantaeng</li><li>● Kabupaten Jeneponto</li></ul>

Region	Tahap I: Penguatan Pondasi Ekosistem Bisnis Ekonomi Biru Sulawesi Selatan(2025-2029)	Area
Kawasan Non-Pesisir	<p>Penyiapan infrastruktur; peningkatan literasi dan kesadaran jasa ekosistem perairan darat; perancangan sistem perlindungan sosial, penguatan ketahanan, keberlanjutan produksi dan wisata berbasis perairan darat, sistem rantai pasok input produksi, air dan energi; perencanaan zonasi dan penguatan data, mekanisme partisipasi integrasi pengelolaan perikanan dan konservasi berbasis masyarakat, dan penguatan relasi antar pemerintahan untuk pengelolaan perairan daratan.</p> <p>Prioritas pengembangan ekonomi adalah pengembangan perikanan perairan darat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gowa</li> <li>• Sidenreng Rappang</li> <li>• Soppeng</li> <li>• Enrekang</li> <li>• Tana Toraja</li> <li>• Toraja Utara</li> </ul>

### **Tahap II 2030-2034: Perluasan dan Akselerasi Ekonomi Biru Sulawesi Selatan**

Pada tahap II arah pembangunan pembangunan ekonomi di Sulawesi Selatan adalah akselerasi transformasi ekonomi biru di Sulawesi Selatan.

**Tabel 5. 4  
Arah Pengembangan Pembangunan Ekonomi Biru Sulawesi Selatan di Setiap Region Pada Tahap II (2030-2034).**

Region	Tahap 2 Akselerasi Transformasi Ekonomi Biru Sulawesi Selatan (2030-2034)	Area
Teluk Bone	<p>Pemantapan infrastruktur dan regulasi, pemerataan peningkatan kualitas SDM, pemanfaatan nilai dan budaya lokal, peningkatan aktivitas ekonomi dan konservasi berbasis sumberdaya perairan, pemantapan tata kelola .</p> <p>Prioritas pengembangan ekonomi adalah penguatan produksi dan pengolahan hasil perikanan, persiapan pengembangan transportasi laut dan persiapan pengembangan wisata Bahari.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten Bone</li> <li>• Kabupaten Sinjai</li> <li>• Kabupaten Luwu Timur</li> <li>• Kabupaten Luwu Utara</li> <li>• Kabupaten Luwu</li> <li>• Kota Palopo</li> <li>• Kabupaten Wajo</li> </ul>

Region	Tahap 2 Akselerasi Transformasi Ekonomi Biru Sulawesi Selatan (2030-2034)	Area
Selat Makasar	<p>Sosialisasi program lingkungan, pelaksanaan tata ruang laut digital, perencanaan kawasan wisata Bahari, kegiatan rehabilitasi ekosistem,</p> <p>Prioritas pengembangan ekonomi adalah penguatan produksi dan pengolahan hasil perikanan dan persiapan pengembangan wisata Bahari.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makassar</li> <li>• Maros</li> <li>• Pangkep</li> <li>• Barru</li> <li>• Pare-pare</li> <li>• Pinrang</li> </ul>
Laut Flores	<p>Koordinasi dan aksi sinergi stakeholder mendukung konservasi dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut , pelatihan dan pendampingan pengembangan usaha berbasis sumberdaya perairan, peningkatan partisipasi pemangku kepentingan untuk pengelolaan pesisir dan laut,</p> <p>Prioritas pengembangan ekonomi adalah penguatan produksi dan pengolahan hasil perikanan dan persiapan pengembangan transportasi dan logistik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten Takalar</li> <li>• Kabupaten Kepulauan Selayar</li> <li>• Kabupaten Jeneponto</li> <li>• Kabupaten Bantaeng</li> <li>• Kabupaten Bulukumba</li> </ul>
Kawasan Non-Pesisir	<p>Pemetaan talenta di sektor ekonomi biru, Peningkatan sistem pendidikan yang inklusif berbasis sains dan teknologi perairan daratan, pengembangan sistem layanan kesehatan yang prima dan inklusif, peningkatan produktivitas dan mutu ekonomi biru, penguatan realisasi NDC energi, sampah, kawasan konservasi, karbon dan energi biru, pengembangan sistem insentif dan disinsentif, penguatan hukum untuk menjamin ekosistem perairan darat yang berkelanjutan</p> <p>Prioritas pengembangan ekonomi adalah penguatan produksi dan pengolahan hasil perikanan perairan darat dan persiapan pengembangan listrik tenaga air dan pariwisata.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gowa</li> <li>• Sidenreng Rappang</li> <li>• Soppeng</li> <li>• Enrekang</li> <li>• Tana Toraja</li> <li>• Toraja Utara</li> </ul>

**Tahap III 2035-2039: Peningkatan Kontribusi dan Daya Saing Ekonomi Biru Sulawesi Selatan di Pasar Nasional Dan Global**

**Tabel 5. 5  
Arah Pengembangan Pembangunan Ekonomi Biru Sulawesi Selatan di Setiap Region Pada Tahap III (2035-2039).**

Region	Tahap 3 : Ekspansi Global Ekonomi Biru Sulawesi Selatan (2035-2039)	Area
Teluk Bone	<p>Peningkatan infrastruktur dan percepatan aksi peningkatan kualitas SDM pengembangan nilai dan budaya lokal untuk mendukung transformasi ekonomi, peningkatan nilai tambah sektor ekonomi biru.</p> <p>Prioritas pengembangan ekonomi adalah penguatan produksi dan pengolahan hasil perikanan, transportasi laut dan wisata Bahari.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten Luwu Timur</li> <li>• Kabupaten Sinjai</li> <li>• Kabupaten Bone</li> <li>• Kabupaten Wajo</li> <li>• Kabupaten Luwu Utara</li> <li>• Kabupaten Luwu</li> </ul>
Selat Makasar	<p>Penguatan tata ruang berbasis digital, implementasi program kawasan wisata Bahari, implementasi sertifikasi produk industri berbasis sumberdaya perairan, penguatan rehabilitas sumberdaya.</p> <p>Prioritas pengembangan ekonomi adalah penguatan produksi dan pengolahan hasil perikanan, dan wisata Bahari.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makassar</li> <li>• Maros</li> <li>• Pangkep</li> <li>• Barru</li> <li>• Pare-pare</li> <li>• Pinrang</li> </ul>
Laut Flores	<p>Penguatan aksi sinergi konservasi dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, Pengembangan kerjasama regional untuk pengelolaan lintas batas propinsi dan pemberantaan IUU fishing, pelatihan teknis untuk implementasi co-management dan konservasi, perluasan pendampingan sosial dan usaha berbasis sumberdaya perairan, implementasi.</p> <p>Prioritas pengembangan ekonomi adalah penguatan produksi dan pengolahan hasil perikanan dan transportasi dan logistik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten Takalar</li> <li>• Kabupaten Jeneponto</li> <li>• Kabupaten Bantaeng</li> <li>• Kabupaten Bulukumba</li> <li>• Kabupaten Kepulauan Selayar</li> </ul>

Region	Tahap 3 : Ekspansi Global Ekonomi Biru Sulawesi Selatan (2035-2039)	Area
Kawasan Non-Pesisir	Peningkatan kemampuan penelitian, Pengembangan standar dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia di sektor ekonomi biru, Penguatan promosi dan kemitraan untuk akses pasar domestik maupun internasional, Penguatan ketahanan bencana dan kapasitas mitigasi perubahan iklim, penguatan instrumen hukum dan upaya global dalam menerapkan pengelolaan sumber daya perairan darat yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gowa</li> <li>• Sidenreng Rappang</li> <li>• Soppeng</li> <li>• Enrekang</li> <li>• Tana Toraja</li> <li>• Toraja Utara</li> </ul>

**Tahap IV 2040-2045: Ekonomi biru Sulawesi Selatan yang Inklusif, Maju, dan Berkelanjutan**

**Tabel 5.6  
Arah Pengembangan Pembangunan Ekonomi Biru Sulawesi Selatan di Setiap Region Pada Tahap IV (2040-2045).**

Region	Tahap 4 : Ekonomi Biru Selat Makassar Emas (2040-2045)	Area
Teluk Bone	<p>Penguatan kegiatan peningkatan kualitas SDM melalui sistem insentif, melembagakan budaya lokal untuk mendukung transformasi ekonomi, fasilitasi dan digitalisasi proses produksi berbasis sumberdaya perairan, peningkatan kapasitas pengelolaan dan perluasan jenis dan kawasan konservasi,</p> <p>Prioritas pengembangan ekonomi adalah produksi perikanan, pengolahan, transportasi laut dan wisata perairan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten Bone</li> <li>• Kabupaten Sinjai</li> <li>• Kabupaten Wajo</li> <li>• Kabupaten Luwu Timur</li> <li>• Kabupaten Luwu Utara</li> <li>• Kabupaten Luwu</li> </ul>
Selat Makasar	<p>Pelembagaan pengetahuan lingkungan pesisir dalam sistem masyarakat secara formal dan non-formal, pengembangan budidaya ramah lingkungan, review kewenangan pengelolaan perairan laut, penguatan dan pembinaan partisipasi masyarakat dalam konservasi dan produksi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maros</li> <li>• Pangkep</li> <li>• Pinrang</li> <li>• Makassar</li> </ul>

<b>Region</b>	<b>Tahap 4 : Ekonomi Biru Selat Makassar Emas (2040-2045)</b>	<b>Area</b>
	Prioritas pengembangan ekonomi adalah produksi dan pengolahan hasil perikanan, transportasi dan logistik.	
Laut Flores	<p>Perwujudan regulasi dan implementasi konservasi dan penawasan sumberdaya yang kuat, perwujudan perlindungan sosial, peningkatan daya saing usaha berbasis sumberdaya perairan perwujudan tata kelola sumberdaya perikanan (tangkap dan budidaya) dan konservasi yang holistic dan berkelanjutan,</p> <p>Prioritas pengembangan ekonomi adalah produksi dan pengolahan hasil perikanan, dan wisata bahari.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten Takalar</li> <li>• Kabupaten Kepulauan Selayar</li> <li>• Kabupaten Jeneponto</li> <li>• Kabupaten Bantaeng</li> <li>• Kabupaten Bulukumba</li> </ul>
Kawasan Non-Pesisir	<p>Perwujudan SDM yang sadar akan pengelolaan sumber daya perairan darat yang berkeadilan dan berkelanjutan, Perwujudan pendapatan masyarakat yang tinggi setara dengan negara maju, Terwujudnya ekosistem perairan darat di wilayah non pesisir yang Lestari, Terwujudnya tata kelola perairan darat yang menjamin keberlanjutan ekosistem</p> <p>Prioritas pengembangan ekonomi adalah produksi dan pengolahan hasil perikanan darat, wisata dan pembangkit listrik tenaga air.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gowa</li> <li>• Sidenreng Rappang</li> <li>• Soppeng</li> <li>• Enrekang</li> <li>• Tana Toraja</li> <li>• Toraja Utara</li> </ul>

## **BAB VI PETA JALAN PEMBANGUNAN EKONOMI BIRU SULAWESI SELATAN**

Berdasarkan potensi dan isu strategis dalam pengembangan ekonomi biru di Sulawesi Selatan, terdapat isu-isu strategis dan potensi pengembangan pada masing-masing Wilayah Ekonomi Biru yang dijelaskan dalam Bab III bagian 3.1. Wilayah Ekonomi Biru memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi maritim, namun menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan berkelanjutan, pengembangan infrastruktur, dan penguatan kapasitas lokal. Melalui pendekatan yang tepat dan kolaboratif, Sulawesi Selatan dapat memainkan peran penting dalam ekonomi biru nasional, mengubah kekayaan lautnya menjadi keuntungan ekonomi yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Berikut ini uraian tentang isu-isu strategis pada masing-masing wilayah ekonomi.

Rumusan visi dan misi pengembangan ekonomi biru di tingkat provinsi diturunkan dalam tahapan pembangunan untuk setiap wilayah/Kawasan ekonomi biru di Provinsi Sulawesi Selatan

### **6.1 Peta Jalan Pembangunan Ekonomi Biru Wilayah Teluk Bone**

#### **6.1.1 Isu-isu Strategis Wilayah Ekonomi Biru Teluk Bone**

Meskipun Kawasan Teluk Bone memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan ekonomi biru, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama oleh segenap *stakeholder*. Dalam Lokakarya Pengembangan Ekonomi Biru Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, telah dirumuskan sejumlah tantangan dalam pengembangan ekonomi biru di Teluk Bone, yaitu:

1. Kapasitas nelayan yang masih rendah. Hal ini terlihat dari tingkat pendidikan formal pekerja di sektor perikanan yang relatif rendah, dimana sebanyak 20,7 persen tidak memiliki ijazah SD dan 39,3 persen memiliki ijazah SD. Ini berarti, hampir 60 persen pekerja di sektor perikanan di Teluk Bone berpendidikan formal maksimal hingga SD sederajat.
2. Masyarakat pesisir tidak adaptif terhadap perkembangan teknologi modern, sehingga semakin terpinggirkan. Teknologi sangat penting bagi kegiatan ekonomi nelayan. Namun akses teknologi masih sangat terbatas karena rendahnya ketersediaan infrastruktur di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, terutama di Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Luwu Timur. Data Susenas 2023 menunjukkan persentase pekerja di sektor perikanan yang menggunakan internet di Teluk Bone baru sebesar 61,2 persen. Ini

berarti masih lebih dari sepertiga pekerja di sektor perikanan belum mengakses internet.

3. Eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan. Eksplorasi ini terutama pada sumberdaya perairan laut, seperti ikan. Hal ini tercermin dari masih seringnya terjadi praktik *illegal fishing*, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti bom dan rumpon, yang semuanya berpotensi menimbulkan eksplorasi yang berlebihan dan merusak.
4. Rendahnya tingkat implementasi peraturan terkait pengelolaan perikanan. Meskipun telah terdapat regulasi dan aparat penegak hukum, implementasi aturan masih relatif rendah karena keterbatasan jangkauan pengawasan.
5. Tingginya pencemaran laut, terutama dari sampah plastik.
6. Tingginya kerusakan ekosistem perairan, seperti mangrove dan terumbu karang. Data menunjukkan proporsi kondisi mangrove di Teluk Bone yang berstatus rusak atau rusak berat sebanyak 74,8 persen dan terumbu karang sebanyak 56,5 persen. Hanya padang lamun yang masih terjaga kelestariannya, yaitu sebanyak 93,0 persen masih berstatus baik.
7. Terjadinya penurunan keanekaragaman hayati laut karena aktivitas yang tidak bertanggung jawab. Masih maraknya terjadi penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, seperti bom dan rumpon, dan rendahnya tingkat kesadaran wisatawan yang berpotensi merusak ekosistem perairan.
8. Masih tingginya ketimpangan pendapatan. Data Susenas 2023 menunjukkan Rasio Gini di Teluk Bone sebesar 0,372 atau berstatus ketimpangan sedang.
9. Belum optimalnya hilirisasi produk dan jasa sumber daya perairan, khususnya perikanan.

Meskipun dihadapkan dengan sejumlah tantangan, harapan untuk ke arah yang lebih baik perlu ditumbuhkan. Ke depan, kontribusi pengembangan ekonomi biru dari Teluk Bone diharapkan bisa lebih optimal dalam mendukung peran Sulawesi Selatan sebagai hub ekonomi biru di Kawasan Timur Indonesia. Pemanfaatan sumber daya perairan secara optimal di Kawasan Teluk Bone tentunya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di kawasan dan Provinsi Sulawesi Selatan secara umum. Pemanfaatan yang optimal tersebut terutama ditempuh dengan peningkatan nilai tambah produk dan jasa dari perairan melalui hilirisasi industri. Hal ini tentunya bisa berdampak pada peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Namun, optimalisasi pemanfaatan sumber daya perairan juga perlu memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan ekosistem. Untuk itu, harapan agar laut bebas rumpon, tidak adanya IUU

fishing, laut bebas sampah plastik, serta peningkatan luas mangrove, padang lamun, dan terumbu karang perlu tetap menjadi perhatian bersama oleh segenap *stakeholder* di Kawasan Teluk Bone.

Mencermati hal di atas, **fokus kepedulian pengembangan ekonomi biru di Kawasan Teluk Bone menekankan pada tiga kata kunci, yaitu berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan.** Daya saing berkaitan dengan upaya mengoptimalkan sumber daya perairan di Kawasan Teluk Bone melalui hilirisasi. Sejahtera menekankan pada aspek pemanfaatan sumber daya oleh masyarakat dan untuk masyarakat di Kawasan Teluk Bone. Terakhir, berkelanjutan erat kaitannya dengan menjaga ekosistem perairan tetap lestari dan bisa dimanfaatkan oleh generasi mendatang secara optimal pula.

Lebih lanjut, optimalisasi pemanfaatan sumber daya perairan di Kawasan Teluk Bone tergantung oleh sejumlah faktor pendorong, seperti ketersediaan sumberdaya memadai, implementasi hilirisasi industri, keberadaan investasi dari pemerintah dan swasta, sumberdaya manusia yang adaptif dan inovatif, akses permodalan, pariwisata yang terintegrasi, dan ekosistem yang sehat dan seimbang. Namun, terdapat potensi hambatan yang diidentifikasi berasal dari beberapa faktor, seperti konflik lahan, lemahnya koordinasi, ego sektoral, dan infrastruktur yang belum memadai. Faktor-faktor ini terjadi karena peran dari sejumlah aktor, yaitu masyarakat umum, pemerintah, swasta, organisasi non-pemerintah (NGO), aparat penegak hukum, kelompok masyarakat, akademisi, nelayan dan pembudidaya, dan lembaga pembiayaan.

Dari sejumlah faktor-faktor tersebut di atas, teridentifikasi bahwa pengembangan ekonomi biru di Kawasan Teluk Bone sangat ditentukan oleh dua kelompok faktor utama, yaitu terimplementasikannya hilirisasi dan terpeliharanya ekosistem sumber daya alam yang berkelanjutan. Dua faktor inilah yang dinilai menjadi kontributor utama dalam pencapaian skenario pengembangan ekonomi biru kawasan Teluk Bone yang berdaya saing.

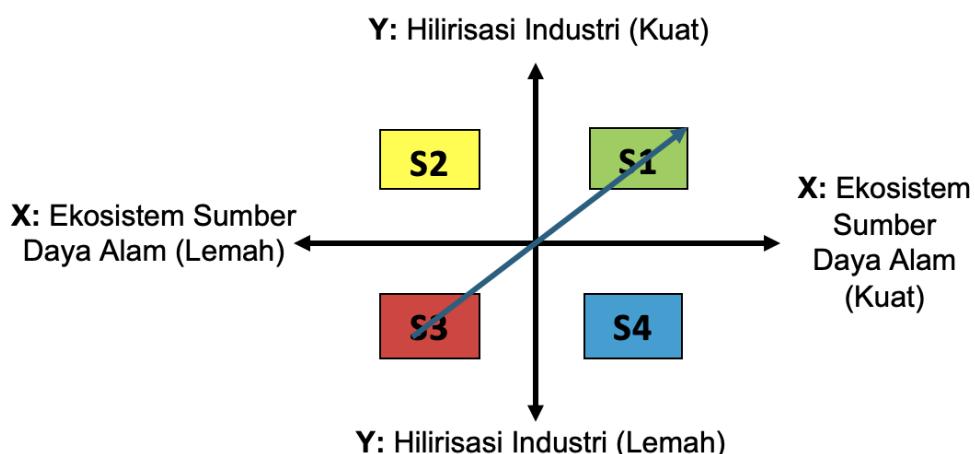
### **6.1.2 Pembangunan Ekonomi Biru Teluk Bone**

Berdasarkan hasil lokakarya pengembangan ekonomi biru Provinsi Sulawesi Selatan, pengembangan ekonomi biru di Teluk Bone ditopang oleh dua faktor utama, yaitu peningkatan hilirisasi industri dan penguatan ekosistem sumberdaya perairan yang berkelanjutan. Untuk itu, arah pembangunan dapat dibagi ke dalam empat kuadran yang masing-masing menunjukkan posisi hilirisasi industri dan kondisi ekosistem sumberdaya perairan di Kawasan Teluk Bone.

Kuadran S1 menggambarkan posisi hilirisasi industri yang kuat dan ekosistem sumber daya alam berkelanjutan. Kuadran S2 menggambarkan

posisi hilirisasi industri yang kuat, tetapi ekosistem sumber daya alam kurang berkelanjutan. Kuadran S3 menggambarkan posisi hilirisasi industri yang lemah dan ekosistem sumber daya alam yang kurang berkelanjutan. Terakhir kuadran S4 menggambarkan posisi hilirisasi industry yang lemah, tetapi sumber daya alam tetap berkelanjutan.

**Gambar 6.1**  
**Ilustrasi Arah Jalan Pembangunan Ekonomi Biru Menuju Skenario Kawasan Teluk Bone yang Diharapkan di Tahun 2045**



Sumber: Hasil Lokakarya Perencanaan Skenario Ekonomi Biru Sulawesi Selatan, 2024

Dengan memperhatikan ke empat kuadran di atas, dapat digambarkan posisi Kawasan Teluk Bone saat ini dan kondisi yang diharapkan di masa yang akan datang. Secara faktual, kondisi Kawasan Teluk Bone berada di Kuadran S3 yang ditandai oleh hilirisasi industri yang lemah dan ekosistem yang kurang berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan masih relatif rendahnya kegiatan industri pengolahan yang berbasis sumber daya perairan, serta ekosistem sumber daya perairan yang cenderung terdegradasi, salah satunya karena eksploitasi yang berlebihan. Ke depan, pengembangan kawasan Teluk Bone diharapkan bisa mencapai kuadran S1 yang ditandai dengan proses hilirisasi yang berjalan secara optimal dengan tetap menjaga keberlanjutan ekosistem perairan. Oleh karena itu, arah pembangunan Teluk Bone sebagai **pusat hilirisasi industri perikanan dan pengembangan pariwisata berbasis ekosistem perairan laut dan danau**.

Untuk mencapai arah pembangunan kawasan tersebut, juga telah diidentifikasi sejumlah faktor-faktor yang bisa menjadi pengungkit perubahan. Identifikasi pengungkit ini dirumuskan berdasarkan misi di tingkat provinsi. Adapun faktor pengungkit perubahan yang dapat dilakukan di Kawasan Teluk Bone sebagai berikut:

1. **Misi 1**, mencakup dua faktor, yaitu perubahan pola pikir (mindset) dan akses pendidikan dan kesehatan
2. **Misi 2**, mencakup tiga faktor, yaitu hilirisasi produk dan jasa berbasis perairan, pengembangan pariwisata berbasis perairan, dan pengembangan infrastruktur konektivitas dan teknologi informasi
3. **Misi 3**, mencakup dua faktor, yaitu perubahan pola pikir (mindset) dan regulasi dan penegakan aturan
4. **Misi 4**, mencakup dua faktor, yaitu perubahan kewenangan pengelolaan wilayah laut dan penegakan aturan

Perwujudan pengembangan ekonomi biru di Kawasan Teluk Bone hingga tahun 2045 merupakan proses yang berjalan secara bertahap dengan periode waktu lima tahunan. Tahap pertama (2025 – 2045) merupakan tahapan penguatan pondasi transformasi ekonomi biru di Kawasan Teluk Bone, lalu dilanjutkan dengan akselerasi transformasi di tahap kedua (2030 – 2034). Pada tahap ketiga, fokus kebijakan adalah ekspansi global, dan diharapkan pada tahap keempat (2040 – 2045) dapat dicapai ekonomi biru Teluk Bone emas. Arah kebijakan ini selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah di tingkat provinsi dan nasional. Selain itu, setiap arah kebijakan dan indikasi program dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor ekonomi biru yang merupakan arahan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu konservasi, perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan pengelolaan sampah laut/plastik. Selain itu, pengelompokan juga dilakukan berdasarkan serta sektor-sektor pendukung, seperti pendidikan, kesehatan, kebudayaan, infrastruktur konektivitas. Adapun uraian mengenai arah kebijakan dan detail indikasi program tahap I (2025 – 2029) sebagai berikut:

**Tabel 6.1**  
**Arah Kebijakan per Tahapan dan Rekomendasi Program Tahap I Pengembangan Kawasan Teluk Bone**

Kelompok Sektor Ekonomi Biru	Arah Kebijakan				Indikasi Program Tahap 1 (2025 – 2029)	Lokasi Kabupaten/Kota Prioritas
	Tahap 1 (2025 - 2029)	Tahap 2 (2030 – 2034)	Tahap 3 (2035 – 2039)	Tahap 4 (2040 – 2045)		
	Penguatan Pondasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Teluk Bone	Akselerasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Teluk Bone	Ekspansi Global Ekonomi Biru Kawasan Teluk Bone	Ekonomi Biru Teluk Bone Emas		
<b>Misi 1: Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berbudaya untuk mendukung ekonomi biru</b>						
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percepatan wajib belajar 13 tahun</li> <li>• Penguatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif</li> <li>• Penguatan literasi kemaritiman</li> </ul>	<p>Pemerataan kualitas antar satuan pendidikan dan antar daerah</p>	<p>Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi</p>	<p>Mewujudkan keberlanjutan harapan lama sekolah yang tinggi dan masyarakat yang cerdas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian beasiswa sekolah gratis untuk anak dari rumah tangga nelayan/pembudidaya yang miskin</li> <li>• Insentif bagi tenaga pendidik</li> <li>• Pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik</li> <li>• Pengembangan kurikulum literasi kemaritiman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten Bone</li> <li>• Kabupaten Sinjai</li> <li>• Kabupaten Wajo</li> <li>• Kabupaten Luwu Timur</li> <li>• Kabupaten Luwu Utara</li> <li>• Kabupaten Luwu</li> </ul>

Kelompok Sektor Ekonomi Biru	Arah Kebijakan				Indikasi Program Tahap 1 (2025 – 2029)	Lokasi Kabupaten/Kota Prioritas
	Tahap 1 (2025 - 2029)	Tahap 2 (2030 - 2034)	Tahap 3 (2035 - 2039)	Tahap 4 (2040 - 2045)		
	Penguatan Pondasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Teluk Bone	Akselerasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Teluk Bone	Ekspansi Global Ekonomi Biru Kawasan Teluk Bone	Ekonomi Biru Teluk Bone Emas		
<b>Kesehatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat pada rumah tangga nelayan/pembudi daya</li> <li>Pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan dengan mengutamakan tenaga kesehatan dari masyarakat lokal</li> </ul>	<p>Pemenuhan sarana prasarana mendukung pola hidup sehat yang merata dan inklusif</p>	<p>Penyediaan pelayanan kesehatan bergerak (<i>mobile health services</i>), khususnya untuk daerah kepulauan</p>	<p>Mewujudkan rumah tangga nelayan/pembudidaya yang sehat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan</li> <li>Sosialisasi terkait pola hidup sehat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Bone</li> <li>Kabupaten Sinjai</li> <li>Kabupaten Wajo</li> <li>Kabupaten Luwu Timur</li> <li>Kabupaten Luwu Utara</li> <li>Kabupaten Luwu</li> </ul>

Kelompok Sektor Ekonomi Biru	Arah Kebijakan				Indikasi Program Tahap 1 (2025 – 2029)	Lokasi Kabupaten/Kota Prioritas
	Tahap 1 (2025 - 2029)	Tahap 2 (2030 - 2034)	Tahap 3 (2035 - 2039)	Tahap 4 (2040 - 2045)		
	Penguatan Pondasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Teluk Bone	Akselerasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Teluk Bone	Ekspansi Global Ekonomi Biru Kawasan Teluk Bone	Ekonomi Biru Teluk Bone Emas		
<b>Kebudayaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan nilai-nilai budaya dalam kurikulum pendidikan</li> <li>• Pemanfaatan nilai-nilai budaya lokal untuk mendorong kegiatan ekonomi</li> </ul>	Optimalisasi pemanfaatan nilai-nilai budaya lokal untuk kegiatan pariwisata budaya	Pengembangan nilai-nilai budaya lokal untuk transformasi ekonomi	Keberlanjutan implementasi nilai budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadopsian kearifan lokal dalam muatan kurikulum pendidikan dasar dan menengah</li> <li>• Festival kebudayaan khas masyarakat Teluk Bone</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten Bone</li> <li>• Kabupaten Sinjai</li> <li>• Kabupaten Wajo</li> <li>• Kabupaten Luwu Timur</li> <li>• Kabupaten Luwu Utara</li> <li>• Kabupaten Luwu</li> </ul>
<b>Misi 2: Mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui transformasi ekonomi biru yang berkeadilan</b>						
<b>Perikanan Tangkap</b>	Penguatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap dalam mendukung pertumbuhan	Perluasan aktivitas pengelolaan perikanan tangkap dengan teknologi modern	Peningkatan nilai tambah dan perluasan pemasaran produk hasil perikanan tangkap	Perwujudan pengelolaan perikanan tangkap di Kawasan Teluk Bone yang berdaya saing dan menciptakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan teknologi penangkapan modern</li> <li>• Penyediaan dan revitalisasi alat penangkapan ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten Bone</li> <li>• Kabupaten Sinjai</li> <li>• Kabupaten Luwu Timur</li> </ul>

Kelompok Sektor Ekonomi Biru	Arah Kebijakan				Indikasi Program Tahap 1 (2025 – 2029)	Lokasi Kabupaten/Kota Prioritas
	Tahap 1 (2025 - 2029)	Tahap 2 (2030 - 2034)	Tahap 3 (2035 - 2039)	Tahap 4 (2040 - 2045)		
	Penguatan Pondasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Teluk Bone	Akselerasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Teluk Bone	Ekspansi Global Ekonomi Biru Kawasan Teluk Bone	Ekonomi Biru Teluk Bone Emas		
	ekonomi yang tinggi			kesejahteraan bagi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan</li> <li>● Penyediaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan</li> <li>● Asuransi nelayan</li> <li>● Penyediaan <i>cold-storage</i></li> <li>● Insentif dan kemudahan untuk pengusaha yang melakukan hilirisasi</li> <li>● Pelatihan UMKM dan koperasi</li> <li>● Penyediaan permodalan (KUR)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kabupaten Luwu Utara</li> <li>● Kabupaten Luwu</li> <li>● Kota Palopo</li> </ul>

Kelompok Sektor Ekonomi Biru	Arah Kebijakan				Indikasi Program Tahap 1 (2025 – 2029)	Lokasi Kabupaten/Kota Prioritas
	Tahap 1 (2025 - 2029)	Tahap 2 (2030 - 2034)	Tahap 3 (2035 - 2039)	Tahap 4 (2040 - 2045)		
	Penguatan Pondasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Teluk Bone	Akselerasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Teluk Bone	Ekspansi Global Ekonomi Biru Kawasan Teluk Bone	Ekonomi Biru Teluk Bone Emas		
Perikanan Budidaya	Penguatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan budidaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi	Perluasan aktivitas pengelolaan perikanan budidaya dengan teknologi modern	Peningkatan nilai tambah dan perluasan pemasaran produk hasil perikanan budidaya	Perwujudan pengelolaan perikanan budidaya di Kawasan Teluk Bone yang berdaya saing dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Penyediaan teknologi perikanan budidaya</li> <li>● Pengadaan sarana dan prasarana produksi</li> <li>● Penyediaan akses pemasaran melalui <i>online marketplace</i></li> <li>● Pengadaan sarana dan prasarana industri pengolahan ikan</li> <li>● Pembangunan industri turunan rumput laut</li> <li>● Pemberian insentif dan kemudahan untuk pengusaha yang melakukan hilirisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kabupaten Bone</li> <li>● Kabupaten Wajo</li> <li>● Kabupaten Luwu Timur</li> <li>● Kabupaten Luwu Utara</li> <li>● Kabupaten Luwu</li> <li>● Kota Palopo</li> </ul>

Kelompok Sektor Ekonomi Biru	Arah Kebijakan				Indikasi Program Tahap 1 (2025 – 2029)	Lokasi Kabupaten/Kota Prioritas
	Tahap 1 (2025 - 2029)	Tahap 2 (2030 - 2034)	Tahap 3 (2035 - 2039)	Tahap 4 (2040 - 2045)		
	Penguatan Pondasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Teluk Bone	Akselerasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Teluk Bone	Ekspansi Global Ekonomi Biru Kawasan Teluk Bone	Ekonomi Biru Teluk Bone Emas		
<b>Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	Penguatan kapasitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki kemampuan dalam pemanfaatan dan mengelola sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal	Percepatan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga mampu memanfaatkan sumberdaya pesisir yang mendukung peningkatan pendapatan masyarakat	Pemantapan pengelolaan wilayah pesisir termasuk pengelolaan wisata bahari perairan yang bertumpuh pada ekosistem penting di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Perwujudan pengelolaan wilayah pesisir di Kawasan Teluk Bone yang dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan peningkatan kapasitas pelaku UMKM</li> <li>• Pengadaan sarana dan prasarana untuk pengembangan wisata bahari</li> <li>• Fasilitasi peningkatan nilai tambah produk yang dihasilkan oleh UMKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten Luwu Utara</li> <li>• Kabupaten Luwu Timur</li> <li>• Kabupaten Sinjai</li> <li>• Kabupaten Bone</li> </ul>
<b>Infrastruktur Konektivitas</b>	Penguatan ketersediaan infrastruktur konektivitas yang mendukung peningkatan nilai	Pemantapan kualitas infrastruktur konektivitas untuk mendukung efisiensi dan	Perluasan jangkauan infrastruktur konektivitas untuk mendukung peningkatan	Perwujudan infrastruktur konektivitas yang handal dan inklusif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan dan pemeliharaan jalan akses dari lokasi sumberdaya ke pusat industri/perkotaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten Luwu Utara</li> <li>• Kabupaten Wajo</li> <li>• Kabupaten Bone</li> </ul>

Kelompok Sektor Ekonomi Biru	Arah Kebijakan				Indikasi Program Tahap 1 (2025 – 2029)	Lokasi Kabupaten/Kota Prioritas
	Tahap 1 (2025 - 2029)	Tahap 2 (2030 - 2034)	Tahap 3 (2035 - 2039)	Tahap 4 (2040 - 2045)		
	Penguatan Pondasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Teluk Bone	Akselerasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Teluk Bone	Ekspansi Global Ekonomi Biru Kawasan Teluk Bone	Ekonomi Biru Teluk Bone Emas		
	tambah sumberdaya perairan	efektivitas produksi dan distribusi	ekonomi masyarakat di wilayah terpencil		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Pelabuhan di Kawasan Teluk Bone</li> <li>Pengembangan alur pelayaran</li> <li>Peningkatan status jalan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Sinjai</li> </ul>
<b>Misi 3: Mewujudkan ekosistem ekonomi biru yang berkelanjutan</b>						
<b>Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	Penguatan kapasitas masyarakat untuk mengelola sumberdaya di pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan	Perlindungan terhadap ekosistem perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Perluasan ekosistem perairan yang berstatus baik	Perwujudan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau yang menjaga kelestarian lingkungan perairan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi perilaku promotif-preventif</li> <li>Reboisasi mangrove</li> <li>Fasilitasi perluasan RTB di wilayah pesisir</li> <li>Revitalisasi terumbu karang</li> <li>Pengendalian abrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Luwu Timur</li> <li>Kabupaten Sinjai</li> <li>Kabupaten Bone</li> </ul>

Kelompok Sektor Ekonomi Biru	Arah Kebijakan				Indikasi Program Tahap 1 (2025 – 2029)	Lokasi Kabupaten/Kota Prioritas
	Tahap 1 (2025 - 2029)	Tahap 2 (2030 - 2034)	Tahap 3 (2035 - 2039)	Tahap 4 (2040 - 2045)		
	Penguatan Pondasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Teluk Bone	Akselerasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Teluk Bone	Ekspansi Global Ekonomi Biru Kawasan Teluk Bone	Ekonomi Biru Teluk Bone Emas		
<b>Pengelolaan Sampah Laut/Plastik</b>	Pengendalian pencemaran laut yang bersifat promotif-preventif	Pemantapan dan penegakan regulasi dalam pengendalian sampah laut	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga laut dari sampah	Perwujudan laut Kawasan Teluk Bone yang bebas dari sampah laut/plastik	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Penyediaan sarana dan prasana persampahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</li> <li>● Penyediaan papan bicara untuk promosi pengendalian pencemaran</li> <li>● Pembentukan satgas pengendalian sampah di setiap kabupaten</li> <li>● Pemberian insentif dan dis-insentif bagi masyarakat/pelaku usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kabupaten Bone</li> <li>● Kabupaten Sinjai</li> <li>● Kabupaten Wajo</li> <li>● Kabupaten Luwu Timur</li> <li>● Kabupaten Luwu Utara</li> <li>● Kabupaten Luwu</li> </ul>

Kelompok Sektor Ekonomi Biru	Arah Kebijakan				Indikasi Program Tahap 1 (2025 – 2029)	Lokasi Kabupaten/Kota Prioritas
	Tahap 1 (2025 - 2029)	Tahap 2 (2030 - 2034)	Tahap 3 (2035 - 2039)	Tahap 4 (2040 - 2045)		
	Penguatan Pondasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Teluk Bone	Akselerasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Teluk Bone	Ekspansi Global Ekonomi Biru Kawasan Teluk Bone	Ekonomi Biru Teluk Bone Emas		
<b>Konservasi</b>	Penetapan kawasan konservasi perairan dan penguatan kelembagaan masyarakat pengelola kawasan	Peningkatan kapasitas kelembagaan stakeholder dalam pengelolaan kawasan konservasi serta penata kelolaan kawasan dengan melibatkan masyarakat secara aktif	Perluasan jumlah kawasan konservasi yang didukung oleh kesiapannya regulasi dan lembaga yang baik melalui keterlibatan segenap stakeholder (Pemerintah, Masyarakat, NGO) secara aktif	Perwujudan kawasan konservasi yang dilindungi dan dikelola melalui sistem zonasi untuk mewujudkan sumberdaya perairan dan ekosistemnya secara berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Konservasi terumbu karang, lamun, dan mangrove</li> <li>● Identifikasi dan pelestarian spesies penting</li> <li>● Perumusan regulasi dan pedoman</li> <li>● Pemberian insentif bagi masyarakat pengelola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kabupaten Bone</li> <li>● Kabupaten Sinjai</li> <li>● Kabupaten Wajo</li> <li>● Kabupaten Luwu Timur</li> <li>● Kabupaten Luwu Utara</li> <li>● Kabupaten Luwu</li> </ul>

Kelompok Sektor Ekonomi Biru	Arah Kebijakan				Indikasi Program Tahap 1 (2025 – 2029)	Lokasi Kabupaten/Kota Prioritas
	Tahap 1 (2025 - 2029)	Tahap 2 (2030 - 2034)	Tahap 3 (2035 - 2039)	Tahap 4 (2040 - 2045)		
	Penguatan Pondasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Teluk Bone	Akselerasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Teluk Bone	Ekspansi Global Ekonomi Biru Kawasan Teluk Bone	Ekonomi Biru Teluk Bone Emas		
<b>Misi 4: Mewujudkan tata kelola pemanfaatan sumberdaya perairan yang transparan, terintegrasi, berintegritas dan adaptif untuk menjamin ekosistem perairan berkelanjutan</b>						
Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas aparat pemerintah dalam perumusan kebijakan ekonomi biru</li> <li>• Penyediaan regulasi dan <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> dalam pemanfaatan sumberdaya perairan di kawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantapan kinerja aparat dan seluruh stakeholder terkait dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya perairan di kawasan</li> <li>• Pengembangan Kawasan Ekonomi Teluk Bone</li> </ul>	<p>Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dengan peningkatan keterlibatan seluruh elemen masyarakat</p>	<p>Perwujudan tata kelola sektor publik terhadap sumberdaya perairan yang profesional dan multi-pihak</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan</li> <li>• Perumusan regulasi</li> <li>• Pengawasan dan pengendalian implementasi regulasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten Bone</li> <li>• Kabupaten Sinjai</li> <li>• Kabupaten Wajo</li> <li>• Kabupaten Luwu Timur</li> <li>• Kabupaten Luwu Utara</li> <li>• Kabupaten Luwu</li> </ul>

## **6.2 Peta Jalan Pembangunan Ekonomi Biru Wilayah Selat Makassar**

### **6.2.1 Isu-isu Strategis Wilayah Ekonomi Biru Selat Makassar**

**Fokus kepedulian pembangunan ekonomi biru kabupaten/kota di Kawasan Selat Makassar adalah peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir dengan tetap terjaganya kualitas ekosistem laut.** Berdasarkan fokus kepedulian ini dibutuhkan kegiatan yang terintegrasi antara kegiatan-kegiatan ekonomi dengan usaha-usaha konservasi ekosistem laut terutama di sektor-sektor yang berpotensi besar seperti perikanan, budidaya maritim, dan pariwisata.

Dalam upaya pengembangan ekonomi biru di Kawasan Selat Makassar, ada beberapa faktor yang dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan dan keberlanjutan program ini, diantaranya sumber daya manusia yang kompeten, ketaatan, penegakan regulasi, keberlanjutan ekosistem alami, penguatan akses pasar untuk komoditas perikanan, investasi pengembangan kawasan khusus, kelembagaan masyarakat pesisir, hilirisasi produk unggulan, inovasi dan teknologi, dan pengembangan produk olahan pesisir. **Dua faktor yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan ekonomi biru di Kawasan Selat Makassar yaitu pengembangan kegiatan ekonomi dan penguatan tata kelola.** Tata kelola yang baik untuk setiap aspek pembangunan (sumberdaya alam, pemerintahan, regulasi, dan masyarakat) akan meningkatkan laju perekonomian masyarakat pesisir Selat Makassar.

Berbagai aktor berperan penting dalam pengembangan ekonomi biru di Kawasan Selat Makassar. Sebagai regulator dan fasilitator, pemerintah memiliki peran penting dalam menentukan arah dan kesuksesan pengembangan ekonomi biru melalui kebijakan dan pengawasan yang efektif. Nelayan dan masyarakat pesisir, yang kehidupannya sangat bergantung pada ekosistem laut, menjadi kunci dalam menerapkan praktik perikanan berkelanjutan. Komitmen industri terhadap keberlanjutan dapat mendukung atau menghalangi kemajuan ekonomi biru, tergantung pada apakah operasi mereka merusak atau mendukung lingkungan. Lembaga akademis dan penelitian menyediakan inovasi dan teknologi yang dapat memperkuat upaya ini. Organisasi non-pemerintah, berdasarkan orientasi dan sumber pendanaan mereka, sering berperan sebagai pengawas dan pelaksana program yang mendukung konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Investor memainkan peran kunci dalam menyediakan dana untuk inisiatif berkelanjutan dan mendukung transformasi ekonomi biru melalui pengembangan bisnis yang inovatif.

## 6.2.2 Pembangunan Ekonomi Biru Selat Makassar

Dalam merumuskan empat skenario hasil pembangunan ekonomi biru di Kawasan Selat Makassar untuk tahun 2045, dengan mempertimbangkan dua faktor kunci yakni ekonomi dan tata kelola. Skenario-skenario berikut memberikan berbagai kemungkinan situasi yang dicapai tergantung pada sejauh mana pengembangan kegiatan ekonomi biru dilakukan dan [enguanan tata kelola yang baik diimplementasikan.

Pada skenario 1, di Tahun 2045, masyarakat Selat Makassar memiliki PDRB per Kapita sebesar kurang lebih Rp 350 Juta. Peningkatan pendapatan per kapita ini terjadi secara berkeadilan seperti yang direfleksikan oleh Rasio Gini yang berada di antara 0,200 – 0,300 poin, yang berarti ketimpangan yang cukup rendah. Dengan dukungan tata Kelola yang baik juga berdampak pada nilai IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) yang tinggi (>90 point), yang merepresentasikan kualitas air, udara, dan tutupan lahan dalam kondisi baik, ini sejalan dengan luasan lahan konservasi yang bertambah. Perpaduan pengembangan ekonomi dan tata kelola yang baik juga menyebabkan IBEI berada di angka 90-100 point.

Untuk skenario 2, pada tahun 2045, kondisi masyarakat Selat Makassar memiliki PDRB perkapita tinggi, dan berada di kisaran Rp.350 Juta. Namun, terjadi ketimpangan pendapatan yang digambarkan oleh Rasio Gini > 0,400 poin, disebabkan oleh tata kelola yang buruk. Selain itu, tata kelola yang buruk juga berimplikasi pada lingkungan, yang ditunjukkan oleh IKLH yang rendah yang berada pada 50-60 poin, serta luasan lahan konservasi yang tidak bertambah. Kondisi ini pada akhirnya berkontribusi pada rendahnya IBEI yang berada di bawah 50 poin.

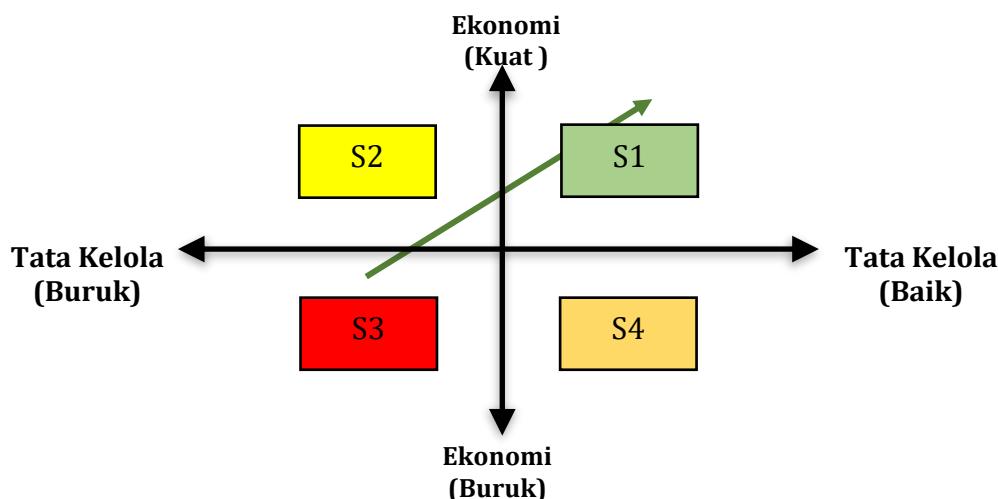
Di skenario 3, pada tahun 2045, kondisi masyarakat Selat Makassar memiliki PDRB perkapita yang rendah dan masih berada di bawah kisaran Rp 350 Juta. Terjadi ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi, yang digambarkan dengan Rasio Gini > 0,400 poin yang disebabkan oleh tata kelola yang buruk. Hal ini juga berimplikasi pada buruknya kualitas lingkungan yang ditandai dengan IKLH yang rendah yang masih berada di level 50-60 poin, serta luasan lahan konservasi yang tidak bertambah. Terakhir, kondisi ini berkontribusi pada rendahnya IBEI yang berada di bawah 50 poin

Pada skenario 4, di tahun 2045, masyarakat Selat Makassar memiliki tingkat PDRB per kapita yang rendah, dan kurang dari Rp 350 Juta. Namun, rendahnya tingkat PDRB per kapita tersebut tidak berkorelasi negative dengan tingkat ketimpangan, yang digambarkan dengan Rasio Gini yang relative cukup rendah, di antara 0,200 – 0,300 poin, akibat dari tata kelola yang baik . Selain itu, ekosistem lingkungan berada pada kondisi yang cukup baik, dimana nilai IKLH berada di level yang tinggi (>90 poin), yang

menggambarkan kualitas air, udara, dan tutupan lahan dalam kondisi yang baik. Hal ini sejalan dengan luasan lahan konservasi yang bertambah. Pada akhirnya, kondisi ini memberikan kontribusi bagi peningkatan IBEI, khususnya dalam hal konservasi ekosistem biru.

Dengan memahami kondisi ideal yang diidamkan tercapai di tahun 2024 yaitu masyarakat Selat Makassar memiliki PDRB per kapita sebesar kurang lebih Rp 350 Juta. Peningkatan pendapatan per kapita ini terjadi secara berkeadilan dengan dukungan tata kelola yang baik, maka penentuan kondisi terkini, yaitu kondisi ekonomi dan tata kelola yang masih buruk, menunjukkan bahwa saat ini kondisi di Selat Makassar berada pada kuadran 3 atau pada skenario 3 seperti ditunjukkan pada Gambar 6.2.

**Gambar 6.2  
Ilustrasi Arah Jalan Pembangunan Ekonomi Biru Wilayah Selat Makassar Menuju Skenario yang Diharapkan di Tahun 2045**



*Sumber: Hasil Lokakarya Perencanaan Skenario Ekonomi Biru Sulawesi Selatan, 2024*

Untuk pencapaian misi pembangunan ekonomi biru di Sulawesi Selatan, Kawasan Selat Makassar memiliki faktor pengungkit utama untuk setiap misi. Adapun rincian faktor pengungkit utama di Kawasan Ekonomi Biru Selat Makassar adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berbudaya melalui kesamaan akses bidang pendidikan, pelatihan dan perubahan pola pikir masyarakat
2. Mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui peningkatan akses ke pembiayaan dan permodalan serta teknologi hilirisasi produk unggulan
3. Mewujudkan ekosistem ekonomi biru yang berkelanjutan melalui peningkatan kesadaran lingkungan dan konservasi dan rehabilitasi ekosistem laut.

4. Mewujudkan tata kelola pemanfaatan sumberdaya perairan yang transparan, terintegrasi, berintegritas dan adaptif untuk menjamin ekosistem perairan melalui peningkatan kerjasama antar pemerintah, sinkronisasi kebijakan, dan peningkatan integritas aparat pemerintah.

**Tabel 6.2**  
**Arah Kebijakan per Tahapan dan Rekomendasi Program Tahap I Pengembangan Kawasan Selat Makassar**

Kelompok Sektor Ekonomi Biru	Arah Kebijakan				Indikasi Program Tahap 1 (2025 - 2029)	Lokasi kabupaten dan kota prioritas
	Tahap 1 (2025 - 2029)	Tahap 2 (2030 - 2034)	Tahap 3 (2035 - 2039)	Tahap 4 (2040 - 2045)		
	Penguatan Pondasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Selat Makassar	Akselerasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Selat Makassar	Ekspansi Global Ekonomi Biru Kawasan Selat Makassar	Ekonomi Biru Selat Makassar Emas		
<b>Misi 1: Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berbudaya untuk mendukung ekonomi biru</b>						
Konservasi	Edukasi lingkungan dengan fokus pengembangan literasi maritim				<ul style="list-style-type: none"> <li>● Penetapan kurikulum/muatan local berbasis ekosistem kelautan dan perairan darat</li> <li>● Pembentukan sekolah lapang untuk anak-anak pesisir</li> <li>● Penguatan aspek lingkungan pada kegiatan keagamaan</li> <li>● Pendekatan budaya religi dan kearifan local yang melibatkan tokoh masyarakat</li> <li>● Penyebaran konten edukasi lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Makassar</li> <li>● Maros</li> <li>● Pangkep</li> <li>● Barru</li> <li>● Pare-pare</li> <li>● Pinrang</li> </ul>

Kelompok Sektor Ekonomi Biru	Arah Kebijakan				Indikasi Program Tahap 1 (2025 - 2029)	Lokasi kabupaten dan kota prioritas
	Tahap 1 (2025 - 2029)	Tahap 2 (2030 - 2034)	Tahap 3 (2035 - 2039)	Tahap 4 (2040 - 2045)		
	Penguatan Pondasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Selat Makassar	Akselerasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Selat Makassar	Ekspansi Global Ekonomi Biru Kawasan Selat Makassar	Ekonomi Biru Selat Makassar Emas		
Budidaya KP	Pelatihan pembudidaya ikan dan nelayan mengenai praktek budidaya berkelanjutan				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan teknologi budidaya yang ramah lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pangkep</li> <li>▪ Barru</li> <li>▪ Pinrang</li> </ul>
Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil	Pelatihan pelapor desa (pengawas zonasi)				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revitalisasi kelompok pengawas</li> <li>• Pelaksanaan Training of Trainers pengawas (Patroli bersama)</li> <li>• Pemberian alat penunjang pengawas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makassar</li> <li>• Pangkep</li> </ul>
Pengelolaan sampah laut/plastik	Bulan cinta laut	Sosialisasi dan perencanaan bulan cita laut	Pengimplementasian bulan cinta laut	Penguatan bulan cinta laut		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Makassar</li> <li>▪ Maros</li> <li>▪ Pangkep</li> <li>▪ Barru</li> <li>▪ Pare-pare</li> <li>▪ Pinrang</li> </ul>

Kelompok Sektor Ekonomi Biru	Arah Kebijakan				Indikasi Program Tahap 1 (2025 - 2029)	Lokasi kabupaten dan kota prioritas
	Tahap 1 (2025 - 2029)	Tahap 2 (2030 - 2034)	Tahap 3 (2035 - 2039)	Tahap 4 (2040 - 2045)		
	Penguatan Pondasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Selat Makassar	Akselerasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Selat Makassar	Ekspansi Global Ekonomi Biru Kawasan Selat Makassar	Ekonomi Biru Selat Makassar Emas		
<b>Misi 2: Mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui transformasi ekonomi biru yang berkeadilan</b>						
<b>Konservasi</b>	Perencanaan digitalisasi zonasi	Pelaksanaan digitalisasi zonasi	Penguatan program digitalisasi zonasi	Evaluasi digitalisasi zonasi		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Makassar</li> <li>▪ Maros</li> <li>▪ Pangkep</li> <li>▪ Barru</li> <li>▪ Pare-pare</li> <li>• Pinrang</li> </ul>
<b>Perikanan tangkap</b>	Pengadaan sarana dan prasarana tangkap ramah LH				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi eksisting sapras</li> <li>• Identifikasi kebutuhan sapras</li> <li>• Pengadaan insfrastruktur dasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pangkep</li> <li>• Barru</li> <li>• Pinrang</li> </ul>
<b>Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil</b>	Wisata bahari ekotourism	Perencanaan Kawasan wisata bahari dan ekotourism	Pengimplementasian Kawasan wisata bahari/ekotourisme	Perluasan Kawasan wisata bahari/ekotourism		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makassar</li> <li>• Maros</li> <li>• Pangkep</li> <li>• Barru</li> <li>• Pare-pare</li> <li>• Pinrang</li> </ul>

Kelompok Sektor Ekonomi Biru	Arah Kebijakan				Indikasi Program Tahap 1 (2025 - 2029)	Lokasi kabupaten dan kota prioritas
	Tahap 1 (2025 - 2029)	Tahap 2 (2030 - 2034)	Tahap 3 (2035 - 2039)	Tahap 4 (2040 - 2045)		
	Penguatan Pondasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Selat Makassar	Akselerasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Selat Makassar	Ekspansi Global Ekonomi Biru Kawasan Selat Makassar	Ekonomi Biru Selat Makassar Emas		
Budidaya KP, dan perikanana penangkapan	Sertifikasi dan diversifikasi produk perikanan		Pelaksanaan sertifikasi dan diversifikasi produk perikanan dan budidaya	Perluasan sertifikasi dan diversifikasi produk perikanan dan budidaya		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pangkep</li> <li>● Barru</li> <li>● Pinrang</li> </ul>
<b>Misi 3: Mewujudkan ekosistem ekonomi biru yang berkelanjutan</b>						
Konservasi	Penetapan wilayah konservasi				<ul style="list-style-type: none"> <li>● Studi kelayalakan/Peninjauan kembali (PK)</li> <li>● Pembentukan kelembagaan Pengelolaan wilayah konservasi</li> <li>● Penguatan Pembinaan Pengelolaan wilayah konservasi</li> <li>● Pengajuan wilayah pencadangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Makassar</li> <li>● Maros</li> <li>● Pangkep</li> <li>● Barru</li> <li>● Pare-pare</li> <li>● Pinrang</li> </ul>

Kelompok Sektor Ekonomi Biru	Arah Kebijakan				Indikasi Program Tahap 1 (2025 - 2029)	Lokasi kabupaten dan kota prioritas
	Tahap 1 (2025 - 2029)	Tahap 2 (2030 - 2034)	Tahap 3 (2035 - 2039)	Tahap 4 (2040 - 2045)		
	Penguatan Pondasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Selat Makassar	Akselerasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Selat Makassar	Ekspansi Global Ekonomi Biru Kawasan Selat Makassar	Ekonomi Biru Selat Makassar Emas		
Konservasi	Penetapan daerah rehabilitasi	Pelaksanaan rehabilitasi dan restorasi ekosistem	Penguatan rehabilitasi dan restorasi ekosistem	Monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi dan restorasi ekosistem		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Makassar</li> <li>● Maros</li> <li>● Pangkep</li> <li>● Barru</li> <li>● Pare-pare</li> <li>● Pinrang</li> </ul>
perikanan penangkapan	Pengawasan dan penangkapan IUU fishing				<ul style="list-style-type: none"> <li>● Inventarisasi data</li> <li>● Fasilitasi administrasi kenelayanan (KUSUKA, Pas Kecil, Pas Besar, Asuransi)</li> <li>● Fasilitasi Pendekatan Pelayanan</li> <li>● Pendampingan ke pengelup</li> <li>● Penyediaan dan perbaikan database hasil tangkapan melalui pengelup pulau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pangkep</li> <li>● Barru</li> <li>● Pinrang</li> </ul>

Kelompok Sektor Ekonomi Biru	Arah Kebijakan				Indikasi Program Tahap 1 (2025 - 2029)	Lokasi kabupaten dan kota prioritas
	Tahap 1 (2025 - 2029)	Tahap 2 (2030 - 2034)	Tahap 3 (2035 - 2039)	Tahap 4 (2040 - 2045)		
	Penguatan Pondasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Selat Makassar	Akselerasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Selat Makassar	Ekspansi Global Ekonomi Biru Kawasan Selat Makassar	Ekonomi Biru Selat Makassar Emas		
<b>Misi 4: Mewujudkan tata kelola pemanfaatan sumberdaya perairan yang transparan, terintegrasi, berintegritas dan adaptif untuk menjamin ekosistem perairan berkelanjutan</b>						
Budidaya KP	Penataan tata kelola wilayah budidaya rumput laut				<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pemetaan kepemilikan berusaha</li> <li>● Pembentukan peraturan desa mengenai hak kepemilikan usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Maros</li> <li>● Pangkep</li> <li>● Pinrang</li> </ul>
Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil	Penguatan kelembagaan masyarakat				<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Legitimasi pengakuan ruang dan hak masyarakat local</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Makassar</li> <li>● Pangkep</li> </ul>

## **6.3 Peta Jalan Pembangunan Ekonomi Biru Wilayah Laut Flores**

### **6.3.1 Isu-isu Strategis Wilayah Ekonomi Biru Laut Flores**

Dengan adanya kesadaran yang tumbuh mengenai pentingnya pembangunan berkelanjutan, harapan terhadap ekonomi biru di Laut Flores cukup tinggi. Harapan ini meliputi peningkatan kawasan konservasi yang dapat melindungi biota laut dan habitatnya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata yang berbasis dan berfokus pada keindahan alam dan keanekaragaman hayati wilayah tersebut. Keinginan untuk mengintegrasikan budaya dan pendidikan dalam pengembangan ekonomi juga menonjol, dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat lokal dalam pelestarian sumber dayanya. Selain itu, integrasi teknologi dan industri yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas lokal dan menghasilkan inovasi yang mendukung industri kreatif.

Namun, terdapat pula kekhawatiran yang mendalam terkait dengan risiko yang mengiringi pembangunan ekonomi biru. Kerusakan ekosistem akibat kegiatan yang tidak terkontrol seperti *overfishing* dan konflik pemanfaatan ruang bisa mengancam keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi fondasi untuk pengembangan ekonomi biru. Isu-isu ini membutuhkan perhatian serius untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek tetapi juga pada keseimbangan ekologis yang akan menunjang kehidupan generasi masa depan. Maka dari itu, dibutuhkan strategi yang komprehensif yang tidak hanya mengidentifikasi peluang, tetapi juga secara proaktif mengatasi potensi masalah yang mungkin timbul selama proses pembangunan berlangsung.

**Keberlanjutan ekosistem laut yang mendorong peningkatan ekonomi biru di Laut Flores menjadi fokus kepedulian utama di kawasan ini.** Pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan menjadi kunci dalam menentukan masa depan ekonomi biru yang berkelanjutan. Fokus ini memperlihatkan kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan praktik-praktik konservasi dengan kegiatan ekonomi, terutama di sektor-sektor yang berpotensi besar seperti pariwisata, perikanan, dan budidaya maritim.

Dalam upaya pengarusutamaan pengembangan ekonomi biru di Laut Flores, berbagai faktor memberikan pengaruh signifikan terhadap keberhasilan dan keberlanjutan dari inisiatif ini. Salah satu faktor utama adalah ketersediaan data yang akurat dan lengkap, yang memungkinkan para pemangku kepentingan membuat keputusan yang tepat dan efektif dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Kekurangan data sering kali menjadi penghambat utama dalam mengidentifikasi dan mengatasi isu lingkungan secara efisien. Selain itu, kebijakan pemerintah memainkan

peranan krusial, karena regulasi dan kebijakan yang mendukung atau menghambat inisiatif ekonomi biru dapat menentukan arah pembangunan wilayah ini. Ketersediaan anggaran yang memadai juga sangat penting, karena tanpa dana yang cukup, program-program yang dirancang untuk mendukung ekonomi biru tidak dapat diimplementasikan atau dipertahankan dengan baik.

Program kegiatan yang ada juga memiliki dampak langsung pada kesadaran lingkungan dan pelestarian keindahan alam. Keduanya vital untuk mendukung pariwisata berkelanjutan dan kegiatan ekonomi biru lainnya. Keindahan alam merupakan aset besar yang dapat digunakan untuk menarik wisatawan serta investor yang tertarik pada ekowisata dan investasi lain seperti budidaya yang ramah lingkungan. Di sisi lain, tingkat kesadaran lingkungan yang tinggi di kalangan masyarakat dapat mendorong partisipasi aktif dalam upaya konservasi dan penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Namun, ada tantangan nyata berupa kurangnya kepercayaan dari masyarakat dan stakeholder terhadap program dan kebijakan yang dijalankan, yang sering kali diakibatkan oleh inefisiensi atau kegagalan program masa lalu. Selain itu, kualitas sumber daya manusia yang bervariasi juga bisa menjadi penghambat, karena SDM yang kurang terampil atau terdidik kurang mampu mengelola atau memanfaatkan sumber daya secara optimal.

Faktor-faktor yang paling signifikan dalam memengaruhi fokus kepedulian ekonomi biru di Laut Flores, adalah regulasi dan kebijakan, serta keberlanjutan sumber daya alam. Kedua aspek ini dianggap paling menentukan. Regulasi dan kebijakan yang jelas dan mendukung dapat langsung memengaruhi keberhasilan praktik-praktik berkelanjutan dan ekonomi biru secara keseluruhan, menetapkan kerangka kerja yang mendukung kegiatan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga berkelanjutan. Sementara itu, ketersediaan dan kelestarian sumber daya alam yang ada, esensial digunakan dengan cara yang menjamin manfaat jangka panjang dan tidak merugikan ekosistem. Kedua faktor ini menjadi kunci dalam mengarahkan dan memfasilitasi inisiatif ekonomi biru yang efektif di Laut Flores.

Berbagai aktor memegang peran penting dalam dinamika pengembangan ekonomi biru di Laut Flores. Pemerintah, sebagai regulator dan fasilitator, memiliki kemampuan yang signifikan untuk mempengaruhi arah dan keberhasilan inisiatif ini melalui kebijakan dan pengawasan yang baik. Nelayan dan komunitas lokal adalah pelaku utama yang kehidupannya sangat terkait dengan kesehatan ekosistem laut; mereka menjadi kunci dalam pelaksanaan praktik perikanan yang berkelanjutan. Industri, tergantung pada komitmennya terhadap keberlanjutan, dapat mendukung atau menghambat kemajuan ekonomi biru melalui kegiatan operasionalnya yang bisa bersifat

merusak atau mendukung lingkungan. Penyuluhan memiliki peran strategis dalam mendidik dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang praktik terbaik dalam pelestarian sumber daya alam. Lembaga akademis dan penelitian menawarkan inovasi dan teknologi yang bisa memperkuat usaha-usaha ini. Organisasi non-pemerintah, tergantung pada orientasi dan sumber dana mereka, seringkali mengambil peran sebagai pengawas dan pelaksana program yang memperjuangkan konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Investor memainkan peran kunci dalam mendanai inisiatif yang berkelanjutan dan memberikan modal yang diperlukan untuk transformasi ekonomi biru.

### **6.3.2 Pembangunan Ekonomi Biru Laut Flores**

Hasil pembangunan ekonomi biru di Laut Flores untuk tahun 2045, ditentukan oleh dua faktor kunci, yakni efektifitas implementasi regulasi dan kondisi sumber daya alam. Skenario-skenario berikut memberikan berbagai kemungkinan hasil yang dicapai bergantung pada sejauh mana aturan diterapkan dan kondisi sumber daya alam yang tersedia.

Dalam skenario 1, pada tahun 2045, keberlanjutan ekosistem laut mampu mendorong ekonomi biru di Laut Flores dengan dukungan implementasi aturan yang kuat dan kondisi sumber daya alam yang baik. Aturan yang diterapkan dalam sistem ini menunjukkan bahwa lebih dari 70% aturan telah terimplementasi dengan penegakan yang tegas. Aturan-aturan ini meningkatkan produktivitas perairan, menjaga kesehatan ekosistem, dan meningkatkan produksi perikanan secara berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

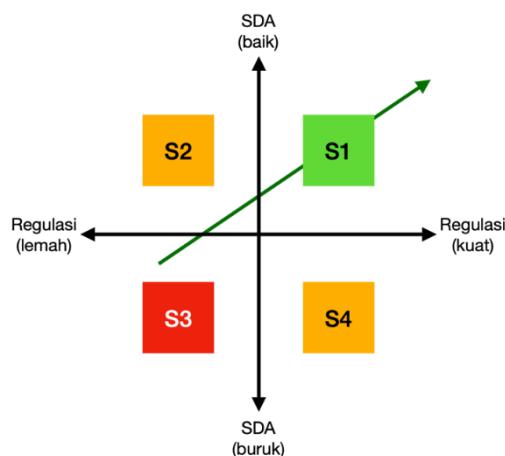
Pada skenario 2, mirip dengan Skenario 1 dalam hal kondisi sumber daya alam yang baik, namun hanya kurang dari 50% aturan yang berhasil diimplementasikan dengan penegakan yang tegas. pada tahun 2045, keberlanjutan ekosistem laut mampu mendorong ekonomi biru di Laut Flores dengan dukungan implementasi aturan yang kuat dan kondisi sumber daya alam yang baik. Aturan-aturan ini meningkatkan produktivitas perairan, menjaga kesehatan ekosistem, dan meningkatkan produksi perikanan secara berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Di skenario 3, pada tahun 2045, ekosistem laut tidak mampu mendorong ekonomi biru di Laut Flores dengan dukungan implementasi aturan yang kuat dan kondisi sumber daya alam yang rusak. Aturan yang diterapkan dalam sistem ini menunjukkan bahwa kurang dari 30% aturan telah terimplementasi dengan penegakan yang tegas. Aturan-aturan ini seharusnya mampu meningkatkan produktivitas perairan, menjaga kesehatan ekosistem, dan meningkatkan produksi perikanan secara berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Di skenario 4, pada tahun 2045, rendahnya keberlanjutan ekosistem laut tidak mampu mendorong pembangunan ekonomi biru di Laut Flores meskipun dengan dukungan implementasi aturan yang kuat. Aturan yang diterapkan dalam sistem ini menunjukkan bahwa lebih dari 70% aturan telah terimplementasi dengan penegakan yang tegas. Aturan-aturan ini akan dapat meningkatkan produktivitas perairan, menjaga kesehatan ekosistem, dan meningkatkan produksi perikanan secara berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Dengan memahami bahwa kondisi ideal dan diidamkan untuk dicapai pada tahun 2045 yakni keberlanjutan ekosistem laut mampu mendorong ekonomi biru di Laut Flores dengan dukungan implementasi aturan yang kuat dan kondisi sumber daya alam yang baik, maka penentuan kondisi terkini yakni kondisi implementasi regulasi dan kebijakan yang masih kurang dengan kondisi sumber daya alam yang semakin rusak menunjukkan bahwa saat ini kondisi di Laut Flores berada pada situasi skenario 3 yang diilustrasikan pada Gambar 6.3 berikut.

**Gambar 6.3  
Ilustrasi Arah Jalan Pembangunan Ekonomi Biru Wilayah Laut Flores  
Menuju Skenario yang Diharapkan di Tahun 2045**



*Sumber: FGD Perencanaan Skenario Ekonomi Biru Sulawesi Selatan 2024*

Untuk mencapai skenario ideal yang diharapkan untuk pembangunan ekonomi biru di Sulawesi Selatan, perlu dilakukan pengelolaan sumber daya perairan yang efektif dan berkelanjutan di Laut Flores. Misi pertama dalam pengembangan ekonomi biru untuk Sulawesi Selatan di Kawasan Laut Flores adalah mewujudkan tata kelola pemanfaatan sumber daya perairan yang transparan, terintegrasi, berintegritas, dan adaptif, guna menjamin keberlanjutan ekosistem perairan. Misi ini didukung oleh beberapa pengungkit utama, seperti penerapan kerangka hukum yang kuat dan regulasi

yang jelas, serta upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendekatan religius dan sosial. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sumber daya laut menjadi faktor penting dalam menciptakan tata kelola yang efektif dan inklusif. Kebijakan yang mendukung misi ini antara lain melibatkan penyusunan dokumen perencanaan pengelolaan sumber daya laut yang komprehensif, seperti rencana zonasi, renstra, dan pemetaan wilayah laut, serta penguatan sistem pengawasan dan pengendalian sumber daya perairan.

Penerapan regulasi yang ketat dan sistem pengawasan yang efektif menjadi kunci untuk mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Program-program yang dijalankan, seperti pengawasan sumber daya laut dan perikanan serta penguatan pendidikan/kesadaran dan kelembagaan, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pesisir dalam menjaga kelestarian lingkungan laut. Program ini juga mencakup pengadaan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat pesisir, guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Selain itu, program pengakuan dan perlindungan hak masyarakat menjadi prioritas, memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mencakup aspek keadilan dan keberlanjutan bagi komunitas lokal.

Misi kedua dalam pengembangan ekonomi biru Sulawesi Selatan di Kawasan Laut Flores adalah mewujudkan ekosistem ekonomi biru yang berkelanjutan. Misi ini berkaitan dengan pengadaan sarana prasarana yang terintegrasi dan sosialisasi pengolahan hasil laut sebagai pengungkit utamanya. Upaya peningkatan sarana dan prasarana meliputi tangkap, budaya, dan pengolahan, yang mendukung implementasi kebijakan perencanaan dan penganggaran serta tata ruang laut yang terpadu. Kebijakan ini diharapkan memperkuat penyediaan sarana dan prasarana untuk pengawasan dan monitoring, yang vital dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

Program yang dikembangkan berdasarkan misi ini berfokus pada pengembangan dan teknologi yang mendukung pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi biru serta penguatan kelembagaan menjadi pilar utama dalam memastikan bahwa pengelolaan SDA dilakukan dengan cara yang mengoptimalkan potensi ekonomi tanpa mengorbankan kesehatan ekosistem. Peningkatan kapasitas penangkapan dan sinkronisasi komunikasi juga diutamakan untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan terlibat secara aktif dan bahwa akses layanan diperluas dan dimodernisasi sesuai dengan kebutuhan masa kini.

Selain itu, program-program yang dicanangkan juga mencakup peningkatan aktivitas lokal ekonomi biru yang melibatkan masyarakat dalam

kegiatan yang berbasis pada sumber daya kelautan dan maritim, seperti festival wisata dan budaya bahari yang berkaitan dengan memancing, menyelam, memancing sebagai rekreasi dan olahraga (*recreational and sport fishing*) dan lainnya. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam ekonomi biru tetapi juga mempromosikan Laut Flores sebagai destinasi wisata yang menarik, menggabungkan keindahan alam dengan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

Misi ketiga dalam pengembangan ekonomi biru Sulawesi Selatan di Kawasan Laut Flores adalah mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui transformasi ekonomi biru yang berkeadilan. Pengungkit utama misi ini meliputi penguatan kapasitas dan keterampilan masyarakat, peningkatan infrastruktur, dan konektivitas yang lebih baik. Faktor-faktor ini memainkan peran penting dalam mendukung berbagai kebijakan yang telah dirancang untuk memperkuat aktivitas lokal ekonomi biru, seperti peningkatan akses penggunaan teknologi berbasis riset dan inovasi serta peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi dan industri berbasis SDA.

Dalam rangka mengimplementasikan misi ini, ditetapkan serangkaian program yang meliputi pengadaan festival wisata dan budaya bahari yang bertujuan untuk meningkatkan pariwisata berkelanjutan yang terintegrasi dengan pelestarian lingkungan laut. Program ini tidak hanya mempromosikan kawasan sebagai destinasi wisata tetapi juga mengedukasi pengunjung mengenai pentingnya konservasi sumber daya laut. Selain itu, pengadaan infrastruktur perikanan dan kelautan mendukung hilirisasi merupakan upaya untuk memperkuat basis produksi lokal dan meningkatkan nilai ekonomi produk laut.

Program peningkatan akses modal untuk inovasi juga menjadi bagian penting dari upaya untuk mengintegrasikan teknologi terkini dalam kegiatan ekonomi biru. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan sumber daya finansial yang memadai bagi inovator dan pengusaha lokal untuk mengembangkan solusi yang dapat memperkuat sektor perikanan dan pariwisata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Peningkatan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus KEK juga direncanakan untuk lebih menarik investasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, dan menyediakan peluang kerja bagi masyarakat lokal.

Misi ini menekankan pada keadilan dalam distribusi manfaat ekonomi, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi biru dapat dinikmati secara luas oleh seluruh masyarakat di Laut Flores.

Untuk mencapai visi Ekonomi Biru Emas berbasis wilayah Laut Flores di Sulawesi Selatan tahun 2045, rencana terstruktur dalam empat tahapan penting telah dirancang meliputi penguatan pondasi transformasi ekonomi

biru, akselerasi transformasi, ekspansi global, dan pencapaian ekonomi biru emas. Berikut adalah detail implementasi program berdasarkan prioritas yang ditetapkan oleh KKP dalam masing-masing tahap (Tabel 6.3).

**Tabel 6.3**  
**Arah Kebijakan per Tahapan dan Rekomendasi Program Tahap I Pengembangan Kawasan Laut Flores**

KELOMPOK PROGRAM PRIORITAS	Arah Kebijakan				Indikasi Program Tahap 1 (2025 – 2029)	Lokasi Kabupaten/Kota Prioritas
	Tahap 1 (2025 - 2029)	Tahap 2 (2030 – 2034)	Tahap 3 (2035 – 2039)	Tahap 4 (2040 – 2045)		
	Penguatan Pondasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores	Akselerasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores	Ekspansi Global Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores	Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores Emas		
<b>Misi 1: Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berbudaya untuk mendukung ekonomi biru</b>						
PERIKANAN TANGKAP	Pelatihan dan pendampingan kelompok nelayan terhadap alat tangkap dan fishing ground yang ramah lingkungan	Pelatihan dan pendampingan kelompok nelayan dengan menggunakan sistem yang lebih terbarukan dan sesuai dengan local wisdom value	Penambahan peserta kelompok nelayan yang akan diberikan pendampingan	Perwujudan pengelolaan perikanan tangkap dengan pendekatan yang holistik dan partisipatif dari masyarakat daerah pesisir	1. Pembuatan Panduan Penggunaan Alat Tangkap Ramah Lingkungan 2. Pelaksanaan Workshop dan Simulasi Lapangan 3. Pelatihan Penggunaan Teknologi Navigasi dan Identifikasi Fishing Ground	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten Takalar</li> <li>• Kabupaten Kepulauan Selayar</li> </ul>
PENGELOLAAN PESISIR & PULAU KECIL	Penguatan peran dan partisipasi kelompok masyarakat	Peningkatan Jumlah Kelompok pemerhati lingkungan kawasan pesisir dan pulau kecil	Interkoneksi antar kelompok pemerhati lingkungan kawasan pesisir dan pulau kecil	Perwujudan peran partisipasi masyarakat pemerhati lingkungan kawasan pesisir dan pulau kecil perwujudan pengelolaan ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	1. Penguatan peran dan partisipasi kelompok masyarakat 2. Penguatan pengetahuan dasar masyarakat pesisir melalui pelatihan keterampilan pengelolaan ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten Takalar</li> <li>• Kabupaten Kepulauan Selayar</li> </ul>

KELOMPOK PROGRAM PRIORITAS	Arah Kebijakan				Indikasi Program Tahap 1 (2025 – 2029)	Lokasi Kabupaten/Kota Prioritas
	Tahap 1 (2025 - 2029)	Tahap 2 (2030 – 2034)	Tahap 3 (2035 – 2039)	Tahap 4 (2040 – 2045)		
	Penguatan Pondasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores	Akselerasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores	Ekspansi Global Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores	Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores Emas	3. Peningkatan kemampuan SDM dalam memahami penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 4. Peningkatan kemampuan SDM dalam memahami Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 5. Pelatihan Berkelanjutan, Mengadakan program pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai dalam berbagai aspek, seperti manajemen, teknologi informasi, dan layanan pelanggan	

KELOMPOK PROGRAM PRIORITAS	Arah Kebijakan				Indikasi Program Tahap 1 (2025 – 2029)	Lokasi Kabupaten/Kota Prioritas
	Tahap 1 (2025 - 2029)	Tahap 2 (2030 – 2034)	Tahap 3 (2035 – 2039)	Tahap 4 (2040 – 2045)		
	Penguatan Pondasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores	Akselerasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores	Ekspansi Global Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores	Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores Emas	6. Program Edukasi Lingkungan untuk Masyarakat Pesisir	
	Penguatan pengetahuan dasar masyarakat pesisir melalui pelatihan keterampilan pengelolaan ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	Peningkatan pengetahuan masyarakat pesisir melalui pelatihan keterampilan pengelolaan ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	Pengembangan pengetahuan masyarakat pesisir melalui penerapan pengelolaan ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil		7. Pelatihan Khusus untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	
	Peningkatan kemampuan SDM dalam memahami penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran berbasis digital	Percepatan akses partisipasi SDM dalam penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran berbasis digital	Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan secara terintegrasi	Perwujudan transformasi digital dalam penyusunan perencanaan dan pendanaan secara terintegrasi	Perwujudan transformasi digital dalam Pelaksanaan	

KELOMPOK PROGRAM PRIORITAS	Arah Kebijakan				Indikasi Program Tahap 1 (2025 – 2029)	Lokasi Kabupaten/Kota Prioritas
	Tahap 1 (2025 - 2029)	Tahap 2 (2030 – 2034)	Tahap 3 (2035 – 2039)	Tahap 4 (2040 – 2045)		
<b>Penguatan Pondasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores</b>	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi	SDM dalam Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berbasis digital	kelola data pembangunan	monitoring dan evaluasi secara terintegrasi		
	Pelatihan Berkelanjutan, Mengadakan program pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai dalam berbagai aspek, seperti manajemen, teknologi informasi, dan layanan pelanggan	Sertifikasi Profesional: Mendorong pegawai untuk mendapatkan sertifikasi profesional yang relevan dengan bidang tugas mereka, misalnya sertifikasi dalam manajemen risiko atau kepatuhan regulasi.	Digitalisasi dan Teknologi Informasi: Mengimplementasikan sistem informasi yang canggih dan terintegrasi untuk mempermudah pengelolaan data dan layanan jaminan sosial.	Perwujudan peningkatan kapasitas pengelola (lembaga)		

KELOMPOK PROGRAM PRIORITAS	Arah Kebijakan				Indikasi Program Tahap 1 (2025 – 2029)	Lokasi Kabupaten/Kota Prioritas
	Tahap 1 (2025 - 2029)	Tahap 2 (2030 – 2034)	Tahap 3 (2035 – 2039)	Tahap 4 (2040 – 2045)		
PENGELOLAAN SAMPAH LAUT/ PLASTIK	Penguatan Pondasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores	Akselerasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores	Ekspansi Global Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores	Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores Emas	<p>1. Kampanye Edukasi Pengelolaan Sampah di Komunitas</p> <p>2. Penyebaran Informasi melalui Media Massa dan Sosial</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten Takalar</li> <li>• Kabupaten Bulukumba</li> <li>• Kabupaten Bantaeng</li> <li>• Kabupaten Jeneponto</li> <li>• Kabupaten Kepulauan Selayar</li> </ul>

KELOMPOK PROGRAM PRIORITAS	Arah Kebijakan				Indikasi Program Tahap 1 (2025 – 2029)	Lokasi Kabupaten/Kota Prioritas
	Tahap 1 (2025 - 2029)	Tahap 2 (2030 – 2034)	Tahap 3 (2035 – 2039)	Tahap 4 (2040 – 2045)		
<b>Misi 2: Mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui transformasi ekonomi biru yang berkeadilan</b>						
KESEHATAN	Membentuk atau memperkuat lembaga pengelola jaminan kesehatan, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Indonesia	Perbaikan sistem manajemen dana dan pengelolaan jaminan kesehatan	Kampanye Kesadaran: Melaksanakan kampanye kesadaran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan cara akses jaminan kesehatan.	Perwujudan jaminan kesehatan bagi masyarakat lokal di sekitar daerah konservasi dan stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan konservasi	1. Peningkatan Infrastruktur dan Teknologi Informasi BPJS Kesehatan  2. Penguatan Kemitraan dan Koordinasi Antar Lembaga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten Takalar</li> <li>• Kabupaten Kepulauan Selayar</li> </ul>
PERIKANAN TANGKAP	Updating data nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap yang membutuhkan jamsos	Alokasi jamsos bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan secara bertahap (dengan penambahan jumlah penerima jamsos)	Penambahan jumlah penerima jamsos sesuai kebutuhan.	Perwujudan jaminan sosial dan jaminan kesehatan ke masyarakat	1. Survei dan Pemetaan Kebutuhan Jaminan Sosial  2. Pembuatan Basis Data Ketenagakerjaan 3. Analisis Data dan Identifikasi Penerima Jaminan Sosial 4. Sosialisasi Program Jaminan Sosial kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten Takalar</li> <li>• Kabupaten Kepulauan Selayar</li> </ul>

KELOMPOK PROGRAM PRIORITAS	Arah Kebijakan				Indikasi Program Tahap 1 (2025 – 2029)	Lokasi Kabupaten/Kota Prioritas
	Tahap 1 (2025 - 2029)	Tahap 2 (2030 – 2034)	Tahap 3 (2035 – 2039)	Tahap 4 (2040 – 2045)		
KELOMPOK PROGRAM PRIORITAS	Penguatan Pondasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores	Akselerasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores	Ekspansi Global Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores	Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores Emas	5. Pembaruan dan Pemeliharaan Data Jaminan Sosial	
BUDIDAYA KP	Pelatihan dan pendampingan kelompok pembudidaya terhadap penerapan CBIB dan CPIB (berkaitan dengan breeding atau pembenihan)	Pelatihan dan pendampingan kelompok nelayan dengan menggunakan sistem yang lebih terbarukan dan sesuai dengan local wisdom value	Penambahan peserta kelompok pembudidaya yang akan diberikan pendampingan	Perwujudan pengelolaan budidaya KP dengan pendekatan yang holistik dan partisipatif dari masyarakat daerah pesisir	1. Pelatihan Teknik Breeding dan Pemberian 2. Workshop Praktek Penerapan CBIB dan CPIB 3. Pengawasan dan Pendampingan Lapangan 4. Penyusunan Modul dan Panduan Praktis 5. Sertifikasi Pembudidaya yang Lulus Pelatihan 6. Pengumpulan Data Terpadu 7. Verifikasi dan Validasi Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten Takalar</li> <li>• Kabupaten Jeneponto</li> <li>• Kabupaten Bantaeng</li> <li>• Kabupaten Kepulauan Selayar</li> </ul>

KELOMPOK PROGRAM PRIORITAS	Arah Kebijakan				Indikasi Program Tahap 1 (2025 – 2029)	Lokasi Kabupaten/Kota Prioritas
	Tahap 1 (2025 - 2029)	Tahap 2 (2030 – 2034)	Tahap 3 (2035 – 2039)	Tahap 4 (2040 – 2045)		
<b>Penguatan Pondasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores</b>	Updating data pembudidaya dan pelaku usaha budidaya yang membutuhkan jamsos	Alokasi jamsos bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan secara bertahap (dengan penambahan jumlah penerima jamsos)	Penambahan jumlah penerima jamsos sesuai kebutuhan.	perwujudan jaminan sosial dan jaminan kesehatan ke masyarakat	8. Pengembangan Sistem Informasi Jamsos	
	Identifikasi kebutuhan budidaya dan tenaga kerja terkait budidaya	Pengadaan akses modal yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sektor perikanan setempat.  Mengalokasikan dana dari anggaran pemerintah, sumber pendanaan eksternal, atau kemitraan	Melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan program serta mengukur dampaknya terhadap peningkatan produksi perikanan,	Peningkatan daya saing dan keberlanjutan sektor perikanan tangkap dan budidaya, serta meningkatkan kesejahteraan pembudidaya dan petani perikanan di Sulawesi Selatan dengan program pengadaan akses modal	9. Pelaporan Berkala dan Monitoring	

KELOMPOK PROGRAM PRIORITAS	Arah Kebijakan				Indikasi Program Tahap 1 (2025 – 2029)	Lokasi Kabupaten/Kota Prioritas
	Tahap 1 (2025 - 2029)	Tahap 2 (2030 – 2034)	Tahap 3 (2035 – 2039)	Tahap 4 (2040 – 2045)		
Penguatan Pondasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores	Akselerasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores	Ekspansi Global Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores	Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores Emas	dengan sektor swasta. pendapatan nelayan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir		

KELOMPOK PROGRAM PRIORITAS	Arah Kebijakan				Indikasi Program Tahap 1 (2025 – 2029)	Lokasi Kabupaten/Kota Prioritas
	Tahap 1 (2025 - 2029)	Tahap 2 (2030 – 2034)	Tahap 3 (2035 – 2039)	Tahap 4 (2040 – 2045)		
PENGELOLAAN PESISIR& PULAU KECIL	Penguatan Pondasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores	Akselerasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores	Ekspansi Global Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores	Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores Emas	<p>1. Survei dan Pemetaan Kebutuhan Jaminan Sosial  2. Pembuatan Basis Data Ketenagakerjaan  3. Analisis Data dan Identifikasi Penerima Jaminan Sosial  4. Sosialisasi Program Jaminan Sosial kepada Masyarakat  5. Pembaruan dan Pemeliharaan Data Jaminan Sosial  6. Survei dan Pemetaan Kebutuhan Jaminan Kesehatan  7. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten Takalar</li> <li>• Kabupaten Bulukumba</li> <li>• Kabupaten Bantaeng</li> <li>• Kabupaten Jeneponto</li> <li>• Kabupaten Kepulauan Selayar</li> </ul>

KELOMPOK PROGRAM PRIORITAS	Arah Kebijakan				Indikasi Program Tahap 1 (2025 – 2029)	Lokasi Kabupaten/Kota Prioritas
	Tahap 1 (2025 - 2029)	Tahap 2 (2030 – 2034)	Tahap 3 (2035 – 2039)	Tahap 4 (2040 – 2045)		
	teridentifikasinya jumlah masyarakat yang memerlukan jaminan kesehatan	Peningkatan penyaluran jaminan sosial dan jaminan kesehatan ke masyarakat	Perluasan penyaluran jaminan sosial dan jaminan kesehatan ke masyarakat	perwujudan jaminan sosial dan jaminan kesehatan ke masyarakat	8. Identifikasi dan Verifikasi Penerima Jaminan Kesehatan	
	Pengembangan acara atau festival budaya bahari, misalnya phinisi di Bulukumba	Menghadirkan alternatif wisata baru atau atraksi Baru, Membangun atau memperbaiki atraksi wisata seperti taman hiburan, museum, dan pusat kebudayaan	Pemasaran di level lokal nasional dan internasional	Terwujudnya wisata bahari dengan menarik pengunjung dari berbagai negara untuk menikmati budaya dan wisata bahari lokal	9. Pengembangan dan Promosi Festival Budaya Bahari Phinisi di Bulukumba	

KELOMPOK PROGRAM PRIORITAS	Arah Kebijakan				Indikasi Program Tahap 1 (2025 – 2029)	Lokasi Kabupaten/Kota Prioritas
	Tahap 1 (2025 - 2029)	Tahap 2 (2030 – 2034)	Tahap 3 (2035 – 2039)	Tahap 4 (2040 – 2045)		
PENGELOLAAN SAMPAH LAUT/ PLASTIK	Penguatan Pondasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores	Akselerasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores	Ekspansi Global Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores	Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores Emas	1. Pengembangan Sistem Identifikasi Kelompok Rentan 2. Pembuatan Program Bantuan Sosial yang Adaptif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten Takalar</li> <li>• Kabupaten Bulukumba</li> <li>• Kabupaten Bantaeng</li> <li>• Kabupaten Jeneponto</li> <li>• Kabupaten Kepulauan Selayar</li> </ul>

KELOMPOK PROGRAM PRIORITAS	Arah Kebijakan				Indikasi Program Tahap 1 (2025 – 2029)	Lokasi Kabupaten/Kota Prioritas
	Tahap 1 (2025 - 2029)	Tahap 2 (2030 – 2034)	Tahap 3 (2035 – 2039)	Tahap 4 (2040 – 2045)		
<b>Misi 3: Mewujudkan ekosistem ekonomi biru yang berkelanjutan</b>						
PERIKANAN TANGKAP	Updating data statistik untuk digunakan dalam identifikasi masalah yang akan dianalisa	Analisa data	Analisa data dan kolaborasi dengan stakeholder		1. Pengumpulan Data Primer dan Sekunder 2. Validasi dan Verifikasi Data  3. Analisis Tren dan Pola Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kabupaten Takalar</li> <li>● Kabupaten Jeneponto</li> </ul>
BUDIDAYA KP	Identifikasi kebutuhan budidaya dan tenaga kerja terkait budidaya	Alokasi sarpras nelayan dan tenaga kerja terkait perikanan	Transportasi: Meningkatkan aksesibilitas dengan memperbaiki jalan, membangun bandara atau terminal bus, dan menyediakan layanan transportasi yang nyaman dan efisien	Perwujudan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan pulau kecil dan daerah pesisir	1. Pengumpulan Data Primer dan Sekunder 2. Validasi dan Verifikasi Data  3. Analisis Trend dan Pola Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kabupaten Bantaeng</li> <li>● Kabupaten Bulukumba</li> <li>● Kabupaten Kepulauan Selayar</li> </ul>

KELOMPOK PROGRAM PRIORITAS	Arah Kebijakan				Indikasi Program Tahap 1 (2025 – 2029)	Lokasi Kabupaten/Kota Prioritas
	Tahap 1 (2025 - 2029)	Tahap 2 (2030 – 2034)	Tahap 3 (2035 – 2039)	Tahap 4 (2040 – 2045)		
PENGELOLAAN PESISIR & PULAU KECIL	Penguatan Pondasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores	Akselerasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores	Ekspansi Global Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores	Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores Emas	1. Teridentifikasi Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan serta Ketersediaan Anggaran 2. Pemetaan Ekosistem Laut 3. Identifikasi Spesies yang Dilindungi 4. Pengembangan Rencana Aksi Konservasi Ekosistem Laut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten Takalar</li> <li>• Kabupaten Kepulauan Selayar</li> <li>• Kabupaten Takalar</li> </ul>
	teridentifikasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan serta ketersediaan anggaran	Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan secara terintegrasi	Transportasi: Meningkatkan aksesibilitas dengan memperbaiki jalan, membangun bandara atau terminal bus, dan menyediakan layanan transportasi yang nyaman dan efisien	Perwujudan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan pulau kecil dan daerah pesisir	5. Penguatan Kapasitas SDM untuk Pengelolaan Ekosistem Laut	

KELOMPOK PROGRAM PRIORITAS	Arah Kebijakan				Indikasi Program Tahap 1 (2025 – 2029)	Lokasi Kabupaten/Kota Prioritas
	Tahap 1 (2025 - 2029)	Tahap 2 (2030 – 2034)	Tahap 3 (2035 – 2039)	Tahap 4 (2040 – 2045)		
	Penguatan Pondasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores	Akselerasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores	Ekspansi Global Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores	Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores Emas		
PENGELOLAAN SAMPAH LAUT/ PLASTIK	identifikasi spesies yang dilindungi.		dan memantau wilayah zonasi.		1. Pengumpulan Data Primer dan Sekunder 2. Validasi dan Verifikasi Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten Jeneponto</li> <li>• Kabupaten Bantaeng</li> <li>• Kabupaten Bulukumba</li> <li>• Kabupaten Kepulauan Selayar</li> </ul>

KELOMPOK PROGRAM PRIORITAS	Arah Kebijakan				Indikasi Program Tahap 1 (2025 – 2029)	Lokasi Kabupaten/Kota Prioritas
	Tahap 1 (2025 - 2029)	Tahap 2 (2030 – 2034)	Tahap 3 (2035 – 2039)	Tahap 4 (2040 – 2045)		
<b>Misi 4: Mewujudkan tata kelola pemanfaatan sumberdaya perairan yang transparan, terintegrasi, berintegritas dan adaptif untuk menjamin ekosistem perairan berkelanjutan</b>						
PERIKANAN TANGKAP	Pelatihan dan bimtek bagi institusi yang terkait, pembentukan kelembagaan yang kuat dan terkoneksi	Perbaikan sarana dan prasarana yg lebih memudahkan dan mewujudkan efisiensi aktivitas tata kelola.	Pengadaan sarpras berbasis wilayah	Perwujudan tata kelola perikanan tangkap yang efektif dan efisien	1. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan dan Bimtek 2. Penyusunan Kurikulum Pelatihan 3. Pengadaan Tenaga Pengajar dan Fasilitator 4. Pelaksanaan Pelatihan dan Bimtek 5. Evaluasi dan Monitoring Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten Takalar</li> <li>• Kabupaten Selayar</li> </ul>
BUDIDAYA KP	Pelatihan dan bimtek bagi institusi yang terkait	Perbaikan sarana dan prasarana yg lebih memudahkan dan	Pengadaan sarpras berbasis wilayah	Perwujudan tata kelola perikanan tangkap yang efektif dan efisien	1. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan dan Bimtek 2. Penyusunan Kurikulum Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten Takalar</li> <li>• Kabupaten Jeneponto</li> </ul>

KELOMPOK PROGRAM PRIORITAS	Arah Kebijakan				Indikasi Program Tahap 1 (2025 – 2029)	Lokasi Kabupaten/Kota Prioritas
	Tahap 1 (2025 - 2029)	Tahap 2 (2030 – 2034)	Tahap 3 (2035 – 2039)	Tahap 4 (2040 – 2045)		
	Penguatan Pondasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores	Akselerasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores	Ekspansi Global Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores	Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores Emas	3. Pengadaan Tenaga Pengajar dan Fasilitator 4. Pelaksanaan Pelatihan dan Bimtek 5. Evaluasi dan Monitoring Pelatihan 6. Pengumpulan Data Primer dan Sekunder 7. Validasi dan Verifikasi Data 8. Pengembangan Sistem Basis Data Terintegrasi 9. Analisis Tren dan Pola Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten Bantaeng</li> <li>• Kabupaten Bulukumba</li> <li>• Kabupaten Kepulauan Selayar</li> </ul>
	Updating data statistik untuk digunakan dalam identifikasi masalah yang akan dianalisa	penyusunan dokumen perencanaan yang mencakup semua elemen yang telah disepakati, seperti visi, misi, tujuan, strategi, dan rencana tindak lanjut	pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi rencana tindak	Perwujudan dokumen perencanaan dengan baik yang akan menjadi panduan yang berguna dalam mengarahkan dan memantau implementasi	10. Publikasi dan Penyebaran Informasi Data	

KELOMPOK PROGRAM PRIORITAS	Arah Kebijakan				Indikasi Program Tahap 1 (2025 – 2029)	Lokasi Kabupaten/Kota Prioritas
	Tahap 1 (2025 - 2029)	Tahap 2 (2030 – 2034)	Tahap 3 (2035 – 2039)	Tahap 4 (2040 – 2045)		
PENGELOLAAN SAMPAH LAUT/ PLASTIK	Penguatan Pondasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores	Akselerasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores	Ekspansi Global Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores	Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores Emas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Jaringan Kerja Sama Antar Lembaga</li> <li>2. Pembentukan Forum Dialog Rutin Antar Pihak</li> <li>3. Peningkatan Kolaborasi dengan Sektor Swasta</li> <li>4. Pengembangan Proyek Bersama untuk Pengelolaan Laut</li> <li>5. Penyusunan Kesepakatan Bersama tentang Tata Kelola Sumber Daya Laut</li> <li>6. Kampanye Edukasi Jaminan Sosial di Komunitas</li> <li>7. Penyebaran Informasi melalui Media Massa dan Sosial</li> <li>8. Program Penyuluhan di Sekolah dan Tempat Umum</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten Takalar</li> <li>• Kabupaten Jeneponto</li> <li>• Kabupaten Bantaeng</li> <li>• Kabupaten Bulukumba</li> <li>• Kabupaten Kepulauan Selayar</li> </ul>

KELOMPOK PROGRAM PRIORITAS	Arah Kebijakan				Indikasi Program Tahap 1 (2025 – 2029)	Lokasi Kabupaten/Kota Prioritas
	Tahap 1 (2025 - 2029)	Tahap 2 (2030 – 2034)	Tahap 3 (2035 – 2039)	Tahap 4 (2040 – 2045)		
	Penguatan Pondasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores	Akselerasi Transformasi Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores	Ekspansi Global Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores	Ekonomi Biru Kawasan Laut Flores Emas	9. Pembentukan Kelompok Diskusi Masyarakat	
	Edukasi dan Sosialisasi: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mencegah pencemaran laut dari plastic melalui kampanye edukasi dan sosialisasi.	Kerjasama Antara Pihak: Membangun kerja sama yang kuat antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan tata kelola sumber daya laut yang berkelanjutan.	Pelatihan Teknis dan Manajerial: Menyelenggarakan pelatihan teknis dan manajerial bagi aparatur pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha tentang pengelolaan sumber daya laut dan ekonomi biru	Peningkatan kapasitas dalam tata kelola ekonomi biru melalui strategi komprehensif	10. Pengembangan Materi Edukasi dan Sosialisasi	

## **6.4 Peta Jalan Pembangunan Ekonomi Biru Wilayah Non-Pesisir**

### **6.4.1 Isu-Isu Strategis Wilayah Ekonomi Biru Non-Pesisir**

Besarnya potensi yang dapat disumbangkan kepada perekonomian Sulawesi Selatan dari sumber daya perairan darat, menuntut perhatian yang semakin tinggi dari semua pemangku kepentingan untuk mengelolanya dengan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan. Posisi geografis di jalur khatulistiwa menjadikan wilayah Sulawesi Selatan sangat peka terhadap perubahan yang terjadi dan cenderung menyebabkan penurunan kondisi atau degradasi lingkungan dari aspek kualitas ataupun kuantitasnya. Sejumlah tantangan dan permasalahan yang dihadapi berbagai daerah dalam pengembangan sumber daya perairan darat, diantaranya adalah:

#### ***Kerusakan Kawasan Hulu***

Alih fungsi lahan dan eksplorasi sumber daya alam yang terus terjadi di wilayah hulu berkontribusi signifikan dalam perubahan ekosistem dan lingkungan perairan darat seperti sungai, danau dan waduk. Kerusakan kawasan hulu diakibatkan oleh penebangan hutan yang tak terkendali, di antaranya penebangan liar dan perambahan hutan, perladangan berpindah, serta aktivitas pertambangan yang tidak bertanggung jawab. Persoalan mendasar dari praktik-praktek tersebut karena cara pikir pembangunan yang mengabaikan kesejahteraan sosial secara lebih luas, dan lebih memilih komoditas yang menghasilkan keuntungan finansial dengan cepat. Misalnya, konversi hutan atau lahan menjadi tambang atau kebun sawit yang lebih menguntungkan tanpa mengakui keuntungan tersebut diperoleh dari terbaikannya nilai-nilai jasa ekosistem serta kearifan lokal yang hilang. Dalam praktiknya nilai-nilai dan jasa ekosistem serta kearifan lokal yang hilang itu tidak dimasukkan sebagai biaya yang dihitung dalam produksi dan pembangunan.

Danau Tempe misalnya sebagai danau prioritas nasional mengalami laju sedimentasi setiap tahunnya sebesar 1-3 cm atau masuk kategori rusak (LIPI, 2011). Bahan sedimen tersebut bersumber dari proses erosi yang terjadi di wilayah hulu aliran sungai Bila dan Walanae. Pendangkalan yang terus terjadi kemudian menyebabkan turunnya kapasitas tumpung danau hingga memicu terjadinya banjir. Sejumlah wilayah di sekitar danau yang semula tak pernah banjir kini jadi langganan banjir. Kerusakan ekosistem Danau Tempe juga ditunjukkan oleh penurunan luas kawasan kritis di daerah tangkapan air (DTA) yang cukup signifikan. Luas kawasan kritis di DTA Danau Tempe saat ini tersisa 128.174,82 ha atau sekitar 45,15 persen dari total luasan DTA 283.899,84 Ha. Dampaknya kawasan daerah resapan danau terus mengalami penurunan dan cadangan air yang dapat disimpan semakin menipis hingga akhirnya mengurangi kapasitas air baku untuk penggunaan rumah tangga dan

aktivitas pertanian. Selain itu, implikasi langsung juga dari rusaknya ekosistem danau terlihat pada produksi perikanan perairan darat, nilai ekowisata, energi pembangkit listrik, pemenuhan kebutuhan industri, hingga konservasi keanekaragaman hayati.

### ***Perubahan iklim dan peningkatan frekuensi bencana***

Selain tekanan pemanfaatan melalui aktivitas antropogenik seperti pencemaran, perubahan fungsi lahan serta eksplorasi sumber daya alam, fenomena perubahan iklim global turut berkontribusi dalam perubahan ekosistem dan lingkungannya. Kondisi tersebut sering diperparah oleh meningkatnya frekuensi bencana yang melanda seperti banjir, longsor, gempa bumi, maupun cuaca yang sangat ekstrim.

Pengembangan sumber daya perairan darat yang maju dan berkelanjutan hanya dapat diwujudkan melalui penguatan tata kelola yang baik, sumber daya manusia yang berkualitas, pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab dan memperhatikan aspek lingkungan, penguatan riset dan inovasi di bidang perairan darat, serta komitmen pemimpin yang kuat terhadap isu keberlanjutan. Sejumlah aktor yang mengambil peran kunci dalam mewujudkan harapan tersebut antara lain, masyarakat sekitar hutan dan sumber daya perairan, nelayan, penyuluh, organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, pemerintah daerah dan pusat, serta pelaku usaha. Namun, berbagai faktor yang mungkin menghambat pencapaian tersebut antara lain, cara berpikir dan cara pandang atas hasil sumber daya alam dan lingkungan yang hanya sekedar kumpulan komoditas ekonomi, layanan publik yang belum prima, lemahnya penegakan hukum, rendahnya investasi untuk peningkatan kualitas manusia serta riset dan inovasi.

#### **6.4.2 Pembangunan Ekonomi Biru Kawasan Non-Pesisir**

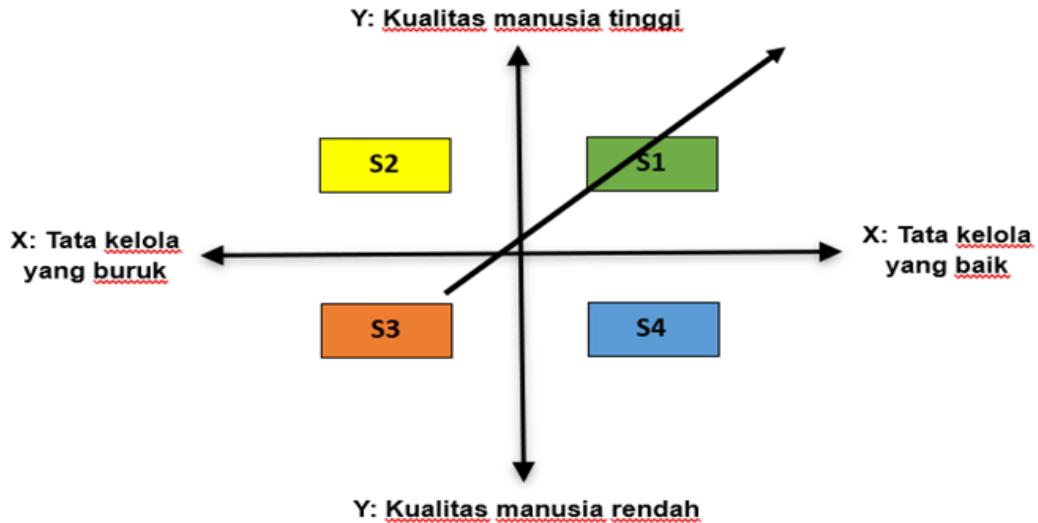
Fokus utama pembangunan ekonomi biru Kawasan Non-Pesisir adalah pemanfaat sumber daya perairan daratan yang maju dan berkelanjutan. Majunya ekonomi masyarakat ditandai dengan adanya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sehingga kue pembangunan ekonomi dapat dinikmati dan dirasakan di seluruh wilayah non pesisir. Hal ini penting karena pemerataan kesejahteraan menjadi benteng pertahanan yang kuat untuk menjaga stabilitas sosial. Pada dasarnya pemanfaatan sumber daya perairan darat harus tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya dan ekosistemnya serta kesinambungan pembangunan daerah. Dengan pemanfaatan yang berkelanjutan berarti sumber daya perairan darat dapat dimanfaatkan baik oleh generasi sekarang maupun untuk memenuhi kepentingan generasi masa depan. Diperlukan keseimbangan antara tindakan pengaturan oleh daerah dan pengguna sumber daya perairan darat dengan

tindakan konservasi ekosistem perairan darat. Dengan adanya keseimbangan dalam pengelolaan dapat memenuhi kepentingan masyarakat untuk saat kini dan saat mendatang.

Pengembangan sumber daya perairan darat yang maju dan berkelanjutan hanya dapat diwujudkan melalui penguatan tata kelola yang baik, sumber daya manusia yang berkualitas, pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab dan memperhatikan aspek lingkungan, penguatan riset dan inovasi di bidang perairan darat, serta komitmen pemimpin yang kuat terhadap isu keberlanjutan. Sejumlah aktor yang mengambil peran kunci dalam mewujudkan harapan tersebut antara lain, masyarakat sekitar hutan dan sumber daya perairan, nelayan, penyuluh, organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, pemerintah daerah dan pusat, serta pelaku usaha. Namun, berbagai faktor yang mungkin menghambat pencapaian tersebut antara lain, cara berpikir dan cara pandang atas hasil sumber daya alam dan lingkungan yang hanya sekedar kumpulan komoditas ekonomi, layanan publik yang belum prima, lemahnya penegakan hukum, rendahnya investasi untuk peningkatan kualitas manusia serta riset dan inovasi.

Dari berbagai faktor yang mampu mendorong pemanfaatan sumber daya perairan darat yang maju dan berkelanjutan, ada **dua faktor utama menjadi penentu yakni sumber daya manusia yang berkualitas dan tata kelola yang baik**. Dua faktor ini dapat digambarkan ke dalam empat kuadran yang menunjukkan skenario kemungkinan hasil pengembangan sumber daya perairan darat di wilayah non pesisir Sulawesi Selatan. Kuadran S1 menunjukkan pemanfaatan sumber daya perairan darat yang maju dan berkelanjutan melalui manusia yang berkualitas dan dukungan tata kelola yang baik. Kuadran S2 menggambarkan posisi pemanfaatan sumber daya perairan darat yang maju dan berkelanjutan belum terwujud karena tata kelola yang masih buruk, meskipun telah didukung oleh manusia berkualitas. Kuadran S3 merupakan kondisi pemanfaatan sumber daya perairan darat yang maju dan berkelanjutan sulit diwujudkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia dan masih lemahnya tata kelola. Terakhir, Kuadran S4 menggambarkan kondisi belum optimalnya pemanfaatan sumber daya perairan darat karena masih rendahnya kualitas manusia, meskipun telah didukung oleh tata kelola yang baik.

**Gambar 6. 4**  
**Ilustrasi Arah Jalan Pembangunan Ekonomi Biru Kawasan Non-Pesisir**  
**Menuju Skenario yang Diharapkan di Tahun 2045**



Sumber: FGD Perencanaan Skenario Ekonomi Biru Sulawesi Selatan 2024

Implikasi dari potensi wilayah dan dinamika interaksi antar factor-faktor dan actor-aktor penentu masa depan ekonomi biru di Kawasan Non-Pesisir dituangkan dalam table kebijakan dan program prioritas dalam Table 6.4 berikut.

**Tabel 6. 4**  
**Arah Kebijakan per Tahapan dan Rekomendasi Program Tahap I Pengembangan Kawasan Non Pesisir**

Sektor Ekonomi Biru	Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Biru Kawasan Non Pesisir				Program Indikatif Tahap I (2025-2029)	Lokasi Kabupaten Prioritas
	Tahap I (2025-2029)  Penguatan pondasi ekosistem ekonomi biru Sulawesi Selatan	Tahap II (2030-2034)  Akselerasi Transformasi Ekonomi Biru Sulsel	Tahap III (2035-2039)  Ekspansi Global Ekonomi Biru Sulsel	Tahap IV (2040-2045)  Perwujudan Ekonomi Biru Sulawesi Selatan Emas		
<b>Misi 1: Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berbudaya untuk mendukung ekonomi biru</b>						
Pendidikan dan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan program pendidikan dan kesadaran untuk meningkatkan literasi di kalangan masyarakat perairan darat mengenai pengelolaan perairan yang berkelanjutan</li> <li>Peningkatan kesadaran akan peran kelompok rentan, komunitas dan masyarakat adat dalam rantai nilai jasa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemetaan talenta di sektor ekonomi biru</li> <li>Peningkatan sistem pendidikan yang inklusif, khususnya yang berkaitan dengan sains dan teknologi dibidang perairan darat, termasuk kurikulum,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan standar dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia di sektor ekonomi biru.</li> <li>Peningkatan keterampilan terkait penelitian dan pengembangan berbasis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perwujudan SDM yang sadar akan pengelolaan sumber daya perairan darat yang berkeadilan dan berkelanjutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program pembangunan sekolah vokasi di bidang ekosistem perairan darat</li> <li>Program pendidikan atau pelatihan informal (bangun kesadaran keberlanjutan)</li> <li>Program pemberdayaan kelompok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gowa</li> <li>Sidenreng Rappang</li> <li>Soppeng</li> <li>Enrekang</li> <li>Tana Toraja</li> <li>Toraja Utara</li> </ul>

Sektor Ekonomi Biru	Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Biru Kawasan Non Pesisir				Program Indikatif Tahap I (2025-2029)	Lokasi Kabupaten Prioritas
	Tahap I (2025-2029)  Penguatan pondasi ekosistem ekonomi biru Sulawesi Selatan	Tahap II (2030-2034)  Akselerasi Transformasi Ekonomi Biru Sulsel	Tahap III (2035-2039)  Ekspansi Global Ekonomi Biru Sulsel	Tahap IV (2040-2045)  Perwujudan Ekonomi Biru Sulawesi Selatan Emas		
	<p>ekosistem perairan darat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pengembangan sarana dan prasarana kesehatan di wilayah non pesisir</li> </ul>	<p>jumlah guru, kompetensi guru, sarana dan prasarana yang didukung kerja sama antar lembaga pendidikan dan industry pengolahan yang berbasis perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pengembangan sistem layanan kesehatan yang prima dan inklusif</li> </ul>	<p>ekosistem perairan darat</p>		<p>rentan, komunitas, Masyarakat adat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Program pembangunan infrastruktur layanan kesehatan</li> </ul>	

Sektor Ekonomi Biru	Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Biru Kawasan Non Pesisir				Program Indikatif Tahap I (2025-2029)	Lokasi Kabupaten Prioritas
	Tahap I (2025-2029)  Penguatan pondasi ekosistem ekonomi biru Sulawesi Selatan	Tahap II (2030-2034)  Akselerasi Transformasi Ekonomi Biru Sulsel	Tahap III (2035-2039)  Ekspansi Global Ekonomi Biru Sulsel	Tahap IV (2040-2045)  Perwujudan Ekonomi Biru Sulawesi Selatan Emas		
<b>Misi 2: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transformasi ekonomi biru yang berkeadilan</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perikanan perairan darat</li> <li>• Industri pengolahan basis perairan darat</li> <li>• Perdagangan</li> <li>• Ekowisata perairan darat</li> <li>• Transportasi dan Pelabuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sistem perlindungan sosial bagi nelayan, dan pekerja rentan di ekosistem perairan darat untuk mendukung peningkatan produktivitas.</li> <li>• Penguatan ketahanan dan keberlanjutan produksi perikanan perairan darat, budaya, rantai pasok manufaktur berbasis perairan darat, rantai pasok pariwisata, pengelolaan destinasi pariwisata, serta sistem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan produktivitas dan ketahanan sektor ekonomi berbasis perairan darat secara keberlanjutan</li> <li>• Pengembangan penjaminan mutu produk dan jasa ekosistem perairan darat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan Promosi atau pengembangan kemitraan untuk mengakses pasar domestik maupun internasional</li> <li>• Penguatan potensi ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perwujudan pendapatan masyarakat yang tinggi setara dengan negara maju</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program pengembangan sistem perlindungan sosial</li> <li>• Program hilirisasi komoditas perairan darat</li> <li>• Program pengelolaan wisata danau, Sungai dan waduk</li> <li>• Program pengembangan transportasi dan Pelabuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gowa</li> <li>• Sidenreng Rappang</li> <li>• Soppeng</li> <li>• Enrekang</li> <li>• Tana Toraja</li> <li>• Toraja Utara</li> </ul>

Sektor Ekonomi Biru	Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Biru Kawasan Non Pesisir				Program Indikatif Tahap I (2025-2029)	Lokasi Kabupaten Prioritas
	Tahap I (2025-2029)  Penguatan pondasi ekosistem ekonomi biru Sulawesi Selatan	Tahap II (2030-2034)  Akselerasi Transformasi Ekonomi Biru Sulsel	Tahap III (2035-2039)  Ekspansi Global Ekonomi Biru Sulsel	Tahap IV (2040-2045)  Perwujudan Ekonomi Biru Sulawesi Selatan Emas		
<p>perairan darat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Energi darat</li> </ul>	transportasi, logistik perairan darat dan energi air darat				<p>di kawasan perairan darat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Program promosi dan pemasaran produk dan jasa ekosistem danau, Sungai, waduk</li> <li>● Program pengembangan energi berbasis perairan darat (PLTM/ PLTMH)</li> </ul>	

Sektor Ekonomi Biru	Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Biru Kawasan Non Pesisir				Program Indikatif Tahap I (2025-2029)	Lokasi Kabupaten Prioritas
	Tahap I (2025-2029)  Penguatan pondasi ekosistem ekonomi biru Sulawesi Selatan	Tahap II (2030-2034)  Akselerasi Transformasi Ekonomi Biru Sulsel	Tahap III (2035-2039)  Ekspansi Global Ekonomi Biru Sulsel	Tahap IV (2040-2045)  Perwujudan Ekonomi Biru Sulawesi Selatan Emas		
<b>Misi 3: Mewujudkan ekosistem ekonomi biru yang berkelanjutan</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan konservasi perairan darat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan koordinasi, harmonisasi dan sinergi pengelolaan sumber daya perairan darat, kawasan perlindungan perairan darat, dan zonasi perikanan tangkap antar tingkat daerah di Kawasan Non pesisir</li> <li>• Penguatan kearifan lokal dan pengelolaan ekosistem perairan darat berbasis masyarakat.</li> <li>• Perluasan kawasan perlindungan perairan darat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan realisasi NDC Indonesia terkait energi terbarukan, pengelolaan sampah, perlindungan wilayah perairan darat, serta konservasi dan restorasi ekosistem perairan darat</li> <li>• Pengembangan karbon biru dan energi biru berbasis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan ketahanan bencana dan kapasitas mitigasi perubahan iklim untuk perairan darat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya ekosistem perairan darat di wilayah non pesisir yang lestari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program koordinasi dan harmonisasi antar stakeholder terkait pengelolaan sumber daya perairan darat, kawasan perlindungan perairan darat, dan zonasi perikanan tangkap antar tingkat daerah di Kawasan Non pesisir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gowa</li> <li>• Sidenreng Rappang</li> <li>• Soppeng</li> <li>• Enrekang</li> <li>• Tana Toraja</li> <li>• Toraja Utara</li> </ul>

Sektor Ekonomi Biru	Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Biru Kawasan Non Pesisir				Program Indikatif Tahap I (2025-2029)	Lokasi Kabupaten Prioritas
	Tahap I (2025-2029)  Penguatan pondasi ekosistem ekonomi biru Sulawesi Selatan	Tahap II (2030-2034)  Akselerasi Transformasi Ekonomi Biru Sulsel	Tahap III (2035-2039)  Ekspansi Global Ekonomi Biru Sulsel	Tahap IV (2040-2045)  Perwujudan Ekonomi Biru Sulawesi Selatan Emas		
		ekosistem perairan darat			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program penguatan dukungan masyarakat adat untuk menjaga ekosistem</li> <li>• Program perluasan kawasan perlindungan kawasan perairan darat</li> <li>• Program penguatan perikanan perairan darat berbasis kuota</li> </ul>	

Sektor Ekonomi Biru	Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Biru Kawasan Non Pesisir				Program Indikatif Tahap I (2025-2029)	Lokasi Kabupaten Prioritas
	Tahap I (2025-2029)  Penguatan pondasi ekosistem ekonomi biru Sulawesi Selatan	Tahap II (2030-2034)  Akselerasi Transformasi Ekonomi Biru Sulsel	Tahap III (2035-2039)  Ekspansi Global Ekonomi Biru Sulsel	Tahap IV (2040-2045)  Perwujudan Ekonomi Biru Sulawesi Selatan Emas		
<b>Misi 4: Mewujudkan tata kelola pemanfaatan sumberdaya perairan yang transparan, terintegrasi, berintegritas dan adaptif untuk menjamin ekosistem perairan berkelanjutan</b>						
Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan mekanisme partisipatif dalam pengambilan keputusan terkait sumber daya perairan darat.</li> <li>Pengembangan kebijakan, perencanaan, program dan kegiatan ekonomi biru yang terintegrasi antar pemerintah pusat dan daerah</li> <li>Pengembangan data, tata kelola serta monitoring yang transparan dan adaptif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan incentif dan disincentif untuk mendorong partisipasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya perairan darat</li> <li>Penguatan penegakan hukum untuk menjamin ekosistem perairan darat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan instrumen hukum dan upaya global dalam menerapkan pengelolaan sumber daya perairan darat yang berkelanjutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terwujudnya tata kelola perairan darat yang menjamin keberlanjutan ekosistem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program perencanaan yang partisipatif</li> <li>Program pengembangan kebijakan, perencanaan yang integrative</li> <li>Program pengelolaan data ekosistem perairan darat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gowa</li> <li>Sidenreng Rappang</li> <li>Soppeng</li> <li>Enrekang</li> <li>Tana Toraja</li> <li>Toraja Utara</li> </ul>

Sektor Ekonomi Biru	Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Biru Kawasan Non Pesisir				Program Indikatif Tahap I (2025-2029)	Lokasi Kabupaten Prioritas
	Tahap I (2025-2029)  Penguatan pondasi ekosistem ekonomi biru Sulawesi Selatan	Tahap II (2030-2034)  Akselerasi Transformasi Ekonomi Biru Sulsel	Tahap III (2035-2039)  Ekspansi Global Ekonomi Biru Sulsel	Tahap IV (2040-2045)  Perwujudan Ekonomi Biru Sulawesi Selatan Emas		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan digitalisasi dalam penerapan tata kelola sumber daya perairan darat</li> </ul>	yang berkelanjutan			<ul style="list-style-type: none"> <li>Program digitalisasi layanan</li> </ul>	

## **BAB VII KAIDAH PENERAPAN EKONOMI BIRU SULAWESI SELATAN**

### **7.1 Aspek regulasi teknis**

Proses perencanaan implementasi pembangunan ekonomi biru di Provinsi Sulawesi Selatan melibatkan beberapa kementerian di tingkat pusat, perangkat daerah di tingkat provinsi, kabupaten kota dan juga pemerintahan desa. Aspek kewenangan dan koordinasi antar pemerintahan tersebut menjadi faktor yang harus dipertimbangkan dalam menyusun desain kerangka regulasi untuk mendukung percepatan proses perencanaan dan implementasi pembangunan ekonomi biru. Selain itu juga, identifikasi aspek regulasi teknis dapat memberikan input terkait *policy gap* dalam mendukung perencanaan dan implementasi ekonomi biru untuk menasarkan kebijakan yang telah ada saat ini maupun yang belum ada terkait dengan sektor-sektor prioritas, sektor-sektor pendukung utama, sektor-sektor potensial dan baru tumbuh.

Berdasarkan hasil dari inventarisasi dan pemetaan hukum terhadap peraturan perundang-undangan di tingkat pusat (undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri) dan peraturan daerah di level provinsi, kabupaten dan desa (peraturan daerah dan peraturan kepala daerah) terkait dengan pembangunan ekonomi biru di Provinsi Sulawesi Selatan di antaranya Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mengamanatkan penggunaan prinsip ekonomi biru dalam pengelolaan kelautan, yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan berkelanjutan serta konservasi laut dan sumber daya pesisir dengan melibatkan masyarakat, efisiensi sumber daya, meminimalkan limbah, dan menciptakan nilai tambah ganda. Pengelolaan ini mencakup penyelenggaraan, penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan sumber daya kelautan serta konservasi laut.

Selain itu, UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009, mengatur perikanan tangkap dan budidaya, termasuk pengembangan data statistik perikanan dan pemberdayaan nelayan kecil. UU No. 27 Tahun 2007 yang diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 mengatur pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi konservasi, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat. Terakhir, UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menetapkan target pengurangan sampah, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan fasilitasi kegiatan daur ulang. Regulasi terkait ekonomi biru tingkat nasional dan daerah lebih detainya disajikan dalam tabel pada (Lampiran 2).

## 7.2 Aspek Ekonomi dan Finansial

Dalam rangka penguatan kualitas belanja untuk mendukung ekonomi biru, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu: (1) Mendorong sinergitas dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah; (2) Mengadopsi konsep investasi programatis untuk mencapai target atau tujuan tertentu untuk memastikan penuntasan investasi yang memerlukan beberapa tahun untuk menuntaskan *output* dan mencapai dampaknya; (3) Mendorong keselarasan perencanaan dan penganggaran dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerja secara konsisten serta menjaga pelaksanaan anggaran berbasis hasil (*result based budget execution*); (4) Mendorong efisiensi belanja operasional dan non prioritas serta fokus dalam mendukung program prioritas untuk penguatan ekonomi biru; (5) Mendorong sinergitas antar K/L untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian *output/outcome*; dan (6) Mendorong percepatan penyerapan dengan menjaga kualitas output/outcome.

Beberapa aspek ekonomi dan finansial yang akan mendorong implementasi Ekonomi Biru di Sulawesi Selatan diuraikan sebagai berikut:

### 7.2.1 Incentif

Dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Selatan 2025 – 2045 bahwa salah satu point penting dalam perencanaan pembangunan Sulawesi Selatan ke depan adalah penguatan insentif untuk kelembagaan sektor ekonomi seperti UMKM dan koperasi perlu dilakukan agar dapat menunjang pertumbuhan bidang usaha sesuai dengan potensi daerah.

Mencermati hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) mendorong akses keuangan di sektor produktif khususnya pertanian dan perikanan. Fasilitasi akses kredit terhadap UMKM terutama di sektor pertanian dan perikanan menjadi salah satu program prioritas TPAKD Sulawesi Selatan. Mengingat sektor pertanian dan perikanan merupakan sektor strategis yang memberikan efek multiplier ekonomi yang tinggi dan kontributor terbesar dalam pembentukan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Selatan, penting bagi pmpinan daerah dan OPD provinsi dan kabupaten untuk mengetahui jumlah, serta memahami dan memastikan berbagai fasilitas pendanaan UMKM betul-betul mencapai target penerima manfaatnya.

Dalam rangka memberantas praktik ijon-rentenir/tengkulak yang marak terjadi di kalangan UMKM, Petani, dan Nelayan, telah diluncurkan Program Hapus Ikatan renteNir di Sulawesi (PHINISI). Program ini bekerjasama dengan BRI, BNI, Bank Mandiri, BSI dan PT. Bank Sulselbar.

Adapun realisasi Program PHINISI tahun 2024 telah mencapai 578.293 rekening dengan akumulasi plafond sebesar Rp18,64 triliun.

Pada sektor perikanan dan kelautan, TPAKD Sulawesi Selatan telah menginisiasi Gerakan Seratus Ribu Rumah Ikan dengan total estimasi anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp 104.48 M. Melalui *Generic Model* Ekosistem Bisnis Klaster sektor perikanan yang berorientasi ekspor dapat difasilitasi oleh perbankan untuk akses pembiayaannya kepada nelayan secara individual, kelompok/koperasi, dan kemitraan atau pola inti plasma antara lain dalam penyediaan sistem alat bantu penangkapan rumpon dan rumah ikan. Dimana hal ini juga menjadi perhatian khusus Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan program Gerakan 100.000 Rumah Ikan dengan menyediakan APBD 2024.

### **7.2.2 Pendanaan Inovatif (APBN, APBD, PPP, Sumber-sumber lain)**

Pelaksanaan pembangunan di Sulawesi Selatan masih tergantung pada pendanaan yang bersumber dari APBN dan APBD. Namun di satu sisi, porsi APBN dan APBD masih relatif rendah untuk mendorong pembangunan khususnya di sektor infrastruktur kelautan. Sejatinya, APBN dan APBD digunakan untuk mendorong inovasi-inovasi guna memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.

Kemampuan keuangan pemerintah yang terbatas, menyebabkan terbatasnya kualitas pelayanan infrastruktur dan tertundanya pembangunan infrastruktur baru. Bahkan, anggaran untuk perbaikan dan perawatan (*maintenance*) infrastruktur juga terbatas.

Berbagai permasalahan penganggaran pembangunan mendorong pemerintah untuk mencari skema-skema pendanaan alternatif seperti skema *Public Private Community Partnership (PPCP)*. Dengan skema PPCP diharapkan dapat menciptakan skema penganggaran yang lebih baik dan dapat meningkatkan kualitas layanan publik. Selain dengan skema PPCP Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat merancang mekanisme pendanaan pembangunan ekonomi biru dengan memanfaatkan berbagai kesempatan yang terbuka dalam *blended finance* (pembiayaan campuran yang bersumber dari dana pemerintah, dana swasta, dana perbankan, dan dana pilantropis), *venture capital* (partisipasi modal), *blue bond* (obligasi biru), dan membangun kemitraan untuk mengusahakan jasa lingkungan seperti *blue carbon* dan sebagainya. Berbagai mekanisme ini seyogyanya direncanakan untuk sepanjang periode RPJPD dengan target-target capaian (*milestones*) yang spesifik untuk setiap periode RPJPM setelah RUPM (Rencana Umum Penanaman Modal) yang integratif dan kuantitatif dirumuskan.

Ke depan, dengan strategi pembangunan infrastruktur kelautan yang terencana dengan baik, dukungan finansial dan teknis untuk pembangunan

pelabuhan, galangan kapal, dan fasilitas pendukung lainnya serta pengelolaan dan pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan akan memperkuat daya saing Sulawesi Selatan di pasar global.

### **7.3 Aspek Kelembagaan dalam Pengembangan Ekonomi Biru**

#### **7.3.1 Kelembagaan Pemerintah**

##### **1 Koordinasi Antar Lembaga**

- Badan Koordinasi: Pembentukan badan koordinasi antar lembaga pemerintah (seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Lingkungan Hidup) untuk mengintegrasikan kebijakan dan program ekonomi biru.
- Perencanaan Terpadu: Penyusunan rencana pembangunan ekonomi biru yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan lainnya.

##### **2 Regulasi dan Kebijakan**

- Kebijakan Inklusif: Pembuatan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, inklusi sosial, dan pemberdayaan komunitas lokal dalam sektor ekonomi biru.
- Peraturan Lingkungan: Implementasi peraturan yang ketat terkait konservasi lingkungan laut dan pesisir untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam.

#### **7.3.2 Kelembagaan Non-Pemerintah**

1. Peran Organisasi Masyarakat Sipil/Lembaga Swadaya Masyarakat: OMS/LSM dapat memainkan peran penting dalam advokasi, penyuluhan, dan pelaksanaan program-program yang mendukung ekonomi biru, seperti konservasi terumbu karang dan pemberdayaan komunitas nelayan.
2. Kemitraan Publik-Swasta: Mendorong kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan LSM untuk pelaksanaan proyek-proyek ekonomi biru.
3. Komunitas Lokal dan Koperasi
4. Koperasi Perikanan: Pembentukan dan penguatan koperasi perikanan yang dikelola oleh komunitas lokal untuk meningkatkan akses ke pasar, modal, dan teknologi.
5. Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas): Pembentukan kelompok masyarakat pengawas yang berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir dan laut.

## **7.4 Nilai Kearifan Lokal dalam Pengembangan Ekonomi Biru**

1. Praktik Tradisional dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam
  - a. *Sasi Laut*: Tradisi lokal yang melarang pengambilan sumber daya laut dalam periode tertentu untuk memastikan regenerasi dan keberlanjutan sumber daya. Ini bisa diadopsi dalam pengelolaan modern untuk konservasi sumber daya laut.
  - b. *Pola Penangkapan Tradisional*: Metode penangkapan yang dilakukan secara ramah lingkungan, penggunaan metode penangkapan ikan tradisional yang ramah lingkungan, seperti penggunaan alat tangkap selektif yang mengurangi *bycatch* dan kerusakan habitat.
2. Nilai dan Adat Istiadat Lokal
  - a. *Nilai Gotong Royong*: Nilai gotong royong atau kerja sama kolektif dalam masyarakat dapat digunakan untuk mendukung proyek-proyek ekonomi biru, seperti pembangunan fasilitas komunitas atau kegiatan konservasi lingkungan.
  - b. *Pelestarian Budaya Lokal*: Mengembangkan ekowisata yang mengintegrasikan budaya lokal, seperti tarian tradisional, kerajinan tangan, dan festival laut, yang dapat menarik wisatawan dan memberikan manfaat ekonomi langsung kepada komunitas lokal.
3. Implementasi Kelembagaan dan Kearifan Lokal
  - a. *Pelatihan dan Penyuluhan*
    - Pendidikan Lingkungan: Program pendidikan dan penyuluhan tentang pentingnya konservasi laut dan praktik-praktik ekonomi biru yang berkelanjutan, ditujukan kepada masyarakat lokal, khususnya generasi muda.
    - Pelatihan Teknis: Pelatihan teknis bagi nelayan dan komunitas pesisir dalam teknologi perikanan berkelanjutan, pengolahan hasil laut, dan kewirausahaan.
  - b. *Inklusi Sosial*
    - Kesetaraan Gender: Program-program yang memastikan partisipasi perempuan dalam semua aspek ekonomi biru, dari pengambilan keputusan hingga pelaksanaan proyek.
    - Keterlibatan Pemuda: Mengajak pemuda lokal untuk terlibat aktif dalam pengembangan ekonomi biru melalui pendidikan, pelatihan, dan kesempatan kerja.

Dengan memperhatikan aspek kelembagaan dan nilai kearifan lokal, pengembangan ekonomi biru di Sulawesi Selatan dapat menjadi model pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan menghormati budaya lokal. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat

lokal, tetapi juga melestarikan lingkungan dan warisan budaya untuk generasi mendatang.

## 7.5 Aransemen kelembagaan

Pengembangan ekonomi biru di Sulawesi Selatan memerlukan aransemen kelembagaan yang jelas dan efektif untuk memastikan bahwa berbagai pemangku kepentingan dapat bekerja sama secara harmonis dan efisien. Aransemen kelembagaan ini mencakup relasi, kewajiban, dan kewenangan antara berbagai aktor yang terlibat, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat lokal, dan organisasi non-pemerintah (LSM). Berikut adalah penjelasan rinci mengenai aransemen kelembagaan tersebut:

### 1. Pemerintah Pusat dan Daerah

#### a. Relasi

- Koordinasi Kebijakan: Pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sama dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung ekonomi biru. Koordinasi ini penting untuk memastikan keselarasan antara kebijakan nasional dan lokal.
- Dukungan Teknis dan Finansial: Pemerintah pusat memberikan dukungan teknis dan finansial kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan program-program ekonomi biru.

#### b. Kewajiban

- Pemerintah Pusat:
  - Merumuskan kebijakan nasional yang mendukung ekonomi biru.
  - Menyediakan dana dan sumberdaya untuk mendukung program di tingkat daerah.
  - Memfasilitasi penelitian dan pengembangan teknologi terkait ekonomi biru.
- Pemerintah Daerah:
  - Mengimplementasikan kebijakan nasional di tingkat lokal.
  - Mengembangkan rencana pembangunan ekonomi biru yang sesuai dengan kondisi lokal.
  - Mengawasi dan mengelola sumber daya laut dan pesisir di wilayah yurisdiksinya.

#### c. Kewenangan

- Pemerintah Pusat:
  - Menetapkan regulasi dan standar nasional.
  - Menyediakan kerangka kerja hukum dan institusional.
  - Mengawasi implementasi kebijakan di seluruh wilayah Indonesia.
- Pemerintah Daerah:

- Melaksanakan dan menyesuaikan kebijakan nasional sesuai dengan kebutuhan lokal.
- Mengeluarkan peraturan daerah yang mendukung ekonomi biru.
- Mengelola anggaran dan sumber daya yang dialokasikan untuk proyek ekonomi biru.

## 2. Sektor Swasta

### a. Relasi

- Kemitraan Publik-Swasta: Sektor swasta bekerja sama dengan pemerintah dalam berbagai proyek ekonomi biru, seperti pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya, dan pengembangan pariwisata bahari.
- Kolaborasi dengan LSM dan Komunitas Lokal: Sektor swasta sering bekerja sama dengan LSM dan komunitas lokal untuk memastikan bahwa proyek mereka berdampak positif dan berkelanjutan.

### b. Kewajiban

- Tanggung Jawab Sosial: Melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat lokal.
- Kepatuhan terhadap Regulasi: Mematuhi semua regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah terkait lingkungan dan pengelolaan sumber daya.

### c. Kewenangan

- Investasi dan Pengelolaan: Menginvestasikan modal dalam proyek-proyek ekonomi biru dan mengelola operasi mereka sesuai dengan standar keberlanjutan.
- Inovasi dan Teknologi: Mengembangkan dan menerapkan teknologi baru yang mendukung efisiensi dan keberlanjutan dalam sektor ekonomi biru.

## 3. Masyarakat Lokal dan Komunitas Adat

### a. Relasi

- Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan: Masyarakat lokal harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan proyek ekonomi biru yang berdampak pada kehidupan mereka.
- Kolaborasi dengan Pemerintah dan LSM: Masyarakat bekerja sama dengan pemerintah dan LSM dalam pelaksanaan proyek-proyek ekonomi biru dan konservasi.

### b. Kewajiban

- Pelestarian Lingkungan: Masyarakat lokal bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar mereka, terutama dalam penggunaan sumber daya laut dan pesisir.

- Pemanfaatan Sumber Daya Secara BerkelaJutan: Menggunakan sumber daya laut dengan cara yang berkelanjutan dan tidak merusak, mengikuti praktik tradisional yang telah terbukti efektif dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

*c. Kewenangan*

- Hak atas Tanah dan Sumber Daya: Komunitas adat memiliki kewenangan untuk mengelola tanah dan sumber daya alam yang secara tradisional menjadi bagian dari wilayah mereka, sesuai dengan hukum adat dan peraturan yang berlaku.
- Partisipasi dalam Pengelolaan: Masyarakat lokal memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan proyek ekonomi biru, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan.

4. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

*a. Relasi*

- Advokasi dan Penyuluhan: LSM berperan dalam mengadvokasi kebijakan yang mendukung ekonomi biru dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya praktik berkelanjutan.
- Kemitraan dengan Pemerintah dan Komunitas: LSM sering bermitra dengan pemerintah dan komunitas lokal untuk melaksanakan program-program yang mendukung ekonomi biru, seperti proyek konservasi dan pemberdayaan masyarakat.

*b. Kewajiban*

- Pendidikan dan Kesadaran: Meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat mengenai pentingnya ekonomi biru dan keberlanjutan lingkungan.
- Pemantauan dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proyek ekonomi biru untuk memastikan bahwa tujuan keberlanjutan dan inklusi sosial tercapai.

*c. Kewenangan*

- Pengembangan Program: LSM memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan melaksanakan program-program yang mendukung ekonomi biru, sering kali dengan dukungan dana dari donor internasional.
- Pemantauan Independen: Melakukan pemantauan independen terhadap proyek-proyek ekonomi biru dan melaporkan temuan mereka kepada publik dan pemerintah.

5. Akademisi dan Institusi Penelitian

*a. Relasi*

- Penelitian dan Pengembangan: Akademisi dan institusi penelitian bekerja sama dengan pemerintah, sektor swasta, dan LSM untuk melakukan penelitian yang mendukung pengembangan ekonomi biru.
- Konsultasi dan Pelatihan: Memberikan konsultasi dan pelatihan kepada pemangku kepentingan tentang praktik terbaik dan teknologi terbaru dalam ekonomi biru.

*b. Kewajiban*

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan: Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan dalam praktik ekonomi biru.
- Diseminasi Informasi: Menyebarluaskan hasil penelitian kepada pemangku kepentingan untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti.

*c. Kewenangan*

- Penelitian Independen: Melakukan penelitian independen tentang berbagai aspek ekonomi biru, termasuk dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi.
- Rekomendasi Kebijakan: Memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan temuan penelitian untuk mendukung pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Contoh Implementasi Aransemen Kelembagaan dalam Ekonomi Biru di Sulawesi Selatan:

1. Program Konservasi Laut

- Pemerintah Daerah: Melakukan pemetaan kawasan konservasi dan menetapkan regulasi yang melindungi wilayah tersebut.
- LSM: Melakukan penyuluhan dan melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan konservasi, seperti penanaman mangrove dan restorasi terumbu karang.
- Komunitas Lokal: Mengikuti praktik konservasi dan melaporkan aktivitas ilegal kepada pihak berwenang.
- Akademisi: Meneliti kondisi ekosistem dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan konservasi.

2. Pengembangan Pariwisata Bahari

- Pemerintah Daerah: Membangun infrastruktur dasar dan menetapkan standar pariwisata berkelanjutan.
- Sektor Swasta: Mengembangkan fasilitas pariwisata yang ramah lingkungan dan berkontribusi pada ekonomi lokal.

- Komunitas Lokal: Terlibat dalam penyediaan layanan wisata, seperti pemandu wisata, akomodasi homestay, dan penjualan kerajinan tangan.
- LSM dan Akademisi: Melakukan pelatihan dan memberikan panduan tentang praktik pariwisata berkelanjutan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Aransemen kelembagaan yang jelas dan efektif sangat penting untuk keberhasilan pengembangan ekonomi biru di Sulawesi Selatan. Relasi, kewajiban, dan kewenangan yang terstruktur dengan baik antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat lokal, LSM, dan akademisi memastikan bahwa semua pihak dapat bekerja sama secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama. Pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal dan prinsip keberlanjutan dalam aransemen kelembagaan ini akan mendukung pembangunan yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi tetapi juga melestarikan lingkungan dan memperkuat identitas budaya lokal.

## 7.6 Aspek tata kelola

Aspek tata kelola ekonomi biru mencakup berbagai langkah dan kebijakan untuk mempromosikan keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Penekanan pada aspek-aspek ini dalam tata kelola ekonomi biru bertujuan untuk mencapai kemakmuran jangka panjang dan keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dalam implementasinya, dibutuhkan kerjasama dan komitmen semua pihak agar ekonomi biru dapat terwujud secara efektif dan berkelanjutan. Beberapa aspek utama dari tata kelola ekonomi biru termasuk:

### 1. Efisiensi sumber daya

Tata kelola ekonomi biru juga berfokus pada penggunaan sumber daya secara efisien (optimalisasi pemanfaatan sumber daya), restorative (memperbaiki yang terlanjur rusak di masa lalu) dan regenerative (sedapat mungkin meningkatkan kualitas ekosistem dan ketersediaan sumber daya alam). Hal ini meliputi pengurangan limbah dan polusi, penggunaan energi yang efisien, pengelolaan air yang baik, serta pembatasan penangkapan dibawah kemampuan ikan untuk berkembang biak.

### 2. Pemulihan ekonomi

Aspek ini melibatkan pengembangan ekonomi yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya yang terbarukan. Hal ini mencakup pengembangan industri terbarukan seperti energi terbarukan dan pengolahan limbah menjadi sumber energi.

### **3. Kolaborasi**

Keterlibatan masyarakat: Tata kelola ekonomi biru juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi dan perlindungan sumber daya alam. Ini melibatkan pembentukan kebijakan yang inklusif, transparan, dan partisipatif serta pendidikan masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan.

### **4. Kolaborasi sektor**

Aspek ini melibatkan kerjasama antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan ekonomi biru. Kerjasama ini dapat berbentuk pengembangan kemitraan, pembagian pengetahuan dan teknologi, serta penggabungan sumberdaya untuk mencapai hasil terbaik secara bersama-sama.

### **5. Ekonomi berkelanjutan**

Aspek ini melibatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini mencakup penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, diversifikasi ekonomi, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung keberlanjutan jangka panjang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adrianto, L., Nababan, B.O. Eishner N. 2020. Blue Economy Development Index (BEDI): Preliminary Study with The Case Studies of 10 Archipelagic and Island States. AIS UNDP - Ministry of Maritime and Investment of the Republic of Indonesia.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2019). Statistik Perikanan Sulawesi Selatan. Badan Pusat Statistik, Sulawesi Selatan, Indonesia.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). Statistik Perikanan Sulawesi Selatan. Badan Pusat Statistik, Sulawesi Selatan, Indonesia.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). Produksi Sub Sektor Perikanan Tangkap di Sulawesi Selatan: Statistik Perikanan 2018-2020. Badan Pusat Statistik, Sulawesi Selatan, Indonesia.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). Indeks Pembangunan Gender Provinsi Sulawesi Selatan. Badan Pusat Statistik, Sulawesi Selatan, Indonesia.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Statistik Perikanan Sulawesi Selatan. Badan Pusat Statistik, Sulawesi Selatan, Indonesia.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Jumlah Unit Pengolahan Ikan per Region. Badan Pusat Statistik, Sulawesi Selatan, Indonesia.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Badan Pusat Statistik, Sulawesi Selatan, Indonesia.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan (DKP Sulsel). (2024). Kontribusi Produksi Perikanan Budidaya di Sulawesi Selatan. Indonesia.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan. (2023). Kontribusi dan Jumlah Wisatawan Sulawesi Selatan. Indonesia.
- Dokumen Rancangan Akhir RPJPD Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045. (2024). Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Firdaus, M., & Rahardian, R. (2018). Potensi Sumber Daya Laut dan Pesisir sebagai Modal Pembangunan Nasional. *Jurnal Pengembangan Wilayah dan Kota*, 10(2), 89-102.
- Gani, A., Putra, M., & Suryadi, T. (2022). Dimensi Pengembangan Kawasan Laut dan Potensi Keanekaragaman Sumber Daya Laut. *Jurnal Sumber Daya Kelautan*, 12(1), 45-58.
- Kunarso, H. (2011). Kependudukan dan Mata Pencaharian di Daerah Pesisir Indonesia. *Jurnal Ilmu Kelautan*, 9(2), 75-84.
- Mosriula, L. (2018). Kawasan Pesisir dan Laut Provinsi Sulawesi Selatan: Potensi dan Tantangan. *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Perairan*, 5(1), 112-126.

- Nurkholis, L., Purnomo, H., & Hadi, S. (2016). Potensi Ekonomi Laut Indonesia: Peluang dan Tantangan di Berbagai Sektor. *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, 6(3), 123-135.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (2023). Statistik Ketenagalistrikan: Total Kapasitas Terpasang dari PLTA (MW). Indonesia.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (2022). Jumlah Lulusan Sekolah Perikanan di Sulawesi Selatan. Indonesia.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (2023). Perikanan Tangkap dan Budidaya di Sulawesi Selatan. Indonesia.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik (KKP). (2023). Tingkat Pemanfaatan Perikanan Tangkap di WPP 713. Indonesia.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik (KKP). (2023). Perkembangan Jumlah Kapal di Sulawesi Selatan. Indonesia.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik (KKP). (2023). Distribusi Volume Bongkar Barang di Sulawesi Selatan. Indonesia.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2021). Peta Sebaran Mangrove Sulawesi Selatan Tahun. Indonesia.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2021). Volume Timbulan Sampah di Sulawesi Selatan. Indonesia.
- Perusahaan Listrik Negara (PLN). (2023). Porsi Konsumsi Energi Berdasarkan Jenis Pelanggan. Indonesia.
- Rencana Umum Energi Daerah (RUED). (2021). Porsi Bauran Energi Primer Sulawesi Selatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Indonesia.
- Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. (2024). Distribusi Objek Wisata Tirta 119 Destinasi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Indonesia.
- RTZWP3K Sulawesi Selatan. (2019). Sebaran dan Kondisi Ekosistem Terumbu Karang. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- World Bank. (2017). *The Potential of the Blue Economy: Increasing Long-term Benefits of the Sustainable Use of Marine Resources for Small Island Developing States and Coastal Least Developed Countries*. The World Bank, Washington, DC.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Arah dan Target Pembangunan Ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2045

Arah Pembangunan	IUP	Target Daerah		Arah Kebijakan Transformasi
		2025	2045	
Produktivitas Ekonomi Tinggi dan Kemandirian Pangan	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	12,51 – 12,58	12,51 – 12,58	1) Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan berikut pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya.
	Pengembangan Pariwisata			
	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,41	2,4	2) Penumbuhan dan peningkatan kapasitas emerging sectors (bioekonomi dan bioteknologi, pendidikan dan riset, serta manajemen sumber daya)
	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu orang)	78,22	195,55	3) Peningkatan nilai tambah dan penerapan pariwisata berkelanjutan termasuk pengembangan wilayah konservasi alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi (eco-tourism).
	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	0,19	0,33	4) Penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan
				5) Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian, perikanan, pertambangan dan industri.
				6) Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya

Arah Pembangunan	IUP	Target Daerah		Arah Kebijakan Transformasi
		2025	2045	
	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			<p>produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.</p> <p>7) Penguatan regulasi, kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah, serta infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah</p>
	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah Non Pertanian pada level provinsi (%)	12,15	19,55	8) Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi (%)	2,06	6	9) Pengembangan industri hilir tangguh iklim berbasis masyarakat dan sarana pendukungnya
	Rasio kewirausahaan daerah (%)	3,53	10,02	<p>10) Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha</p> <p>11) Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, diantaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, dan perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah.</p>
	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	1,56	10	12) Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.

Arah Pembangunan	IUP	Target Daerah		Arah Kebijakan Transformasi
		2025	2045	
	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	0,97	5,62	13) Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
	Nilai Tukar Petani	113,74	130 - 140	14) Penguatan sektor pertanian, peningkatan produktivitas sektor perkebunan, serta pengembangan industri pengolahan sebagai penunjang ekonomi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)
				15) Perluasan akses dan literasi keuangan inklusif dan produktif bagi petani dan nelayan
	Nilai Tukar Nelayan	109,76 (Data 2023)	135 - 145	16) Peningkatan daya saing sektor tradisional untuk pertumbuhan berkelanjutan pada sektor perikanan budidaya, perikanan tangkap, wisata bahari, dan industri kemaritiman
	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi (%)	3,5 - 4,2	2,6 – 3,6	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	54,3	64,7	17) Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja perempuan
	Tingkat Penguasaan IPTEK			18) Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok
Indeks Kapabilitas Inovasi	Kapabilitas Inovasi	3,7 (Data 2023)	4,5 – 4,9	19) Penyediaan jaringan seluler khususnya daerah yang masih berada dalam titik blank spot sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan akses digital antara wilayah daratan dan kepulauan, serta antara wilayah perkotaan dan pedesaan
				20) Penyediaan infrastruktur TIK yang handal dan terjangkau di seluruh wilayah, termasuk kawasan perairan dan kepentingan

Arah Pembangunan	IUP	Target Daerah		Arah Kebijakan Transformasi
		2025	2045	
				pelayaran, mencakup akses internet yang cepat dan stabil, serta dukungan teknologi terbaru seperti 5G di kawasan-kawasan strategis  21) Peningkatan Literasi Digital Terpadu dan kemampuan SDM digital atau digital skill melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital, yang difokuskan pada pemahaman dan keterampilan penggunaan perangkat digital, navigasi internet, keamanan online dan siber
Penerapan Ekonomi Hijau Transformasi Digital	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		1) Pengembangan ekonomi hijau dan biru berbasis keunggulan wilayah melalui pengembangan berbagai komoditas unggulan yang dilakukan di wilayah daratan, pesisir, dan lautan
	Indeks Ekonomi Hijau	67,8	77,03	2) Pengembangan jasa lingkungan dan imbal jasa lingkungan  3) Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui praktik agroforestri, pertanian regeneratif, dan praktik pertanian berkelanjutan lain
				4) Peningkatan kapasitas sumberdaya pelaku sektor ekonomi dalam praktik budidaya yang rendah karbon, cerdas iklim, dan produktif serta inklusif
				5) Peningkatan penerapan Praktik Pertanian yang Baik seperti peningkatan kapasitas petani dan nelayan. pengembangan agroforestri untuk diversifikasi pendapatan petani, pelatihan teknik pemanenan dan budidaya yang berkelanjutan.

Arah Pembangunan	IUP	Target Daerah		Arah Kebijakan Transformasi
		2025	2045	
Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	53,85	79,69		6) Peningkatan partisipasi yang inklusif untuk perempuan maupun laki-laki dari berbagai kelompok sosial dalam pengelolaan bentang lahan dan sumberdaya alam
				7) Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik dan pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan
				8) Pemenuhan pasokan listrik rendah karbon. Terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia
Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	7,7		9) Pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat, kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan
				10) Penyediaan jaringan seluler khususnya daerah yang masih berada dalam titik blank spot sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan akses digital antara wilayah daratan dan kepulauan, serta antara wilayah perkotaan dan pedesaan
				11) Peningkatan Literasi Digital Terpadu dan kemampuan SDM digital atau digital skill melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital , yang difokuskan pada pemahaman dasar penggunaan perangkat digital, navigasi internet, keamanan online dan siber
				12) Penyediaan infrastruktur TIK yang handal dan terjangkau di seluruh wilayah, termasuk kawasan perairan dan kepentingan pelayaran, mencakup akses internet yang cepat dan stabil, serta

Arah Pembangunan	IUP	Target Daerah		Arah Kebijakan Transformasi
		2025	2045	
				dukungan teknologi terbaru seperti 5G di kawasan-kawasan strategis
<b>Integrasi Ekonomi Domestik dan Global</b>	Koefisien variasi harga antar wilayah Tingkat provinsi	8,67	5,25	<p>1) Penguatan integrasi konektivitas dengan intra dan antar kawasan pertumbuhan ekonomi</p> <p>2) Perbaikan sistem tata kelola investasi daerah (pelayanan perizinan, regulasi, kepastian hukum, pajak dan retribusi) dan digitalisasi informasi potensi investasi daerah beserta infrastruktur pendukungnya</p> <p>3) Peningkatan keterlibatan dan partisipasi para pelaku ekonomi dalam rantai pasok global (global supply chain)</p>
	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	36,5	35,2	<p>4) Peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antarwilayah, peningkatan kerja sama ekonomi dan promosi dagang antardaerah, serta mendorong partisipasi daerah dalam rantai pasok global</p>
				5) Peningkatan kerjasama perdagangan internasional, penyederhanaan prosedur kepabeanan, dan efisiensi biaya logistik
	Eksport Barang dan Jasa (% PDRB)	6,8	10,8	6) peningkatan pangsa ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global melalui ekspansi ekspor ke negara yang memiliki potensi pertumbuhan penduduk dan konsumsi yang tinggi
<b>Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan</b>	Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan			1) Mendorong percepatan perwujudan jalur kereta antar kota Makassar - Parepare, serta pengembangan kereta angkutan barang terpadu dengan pengembangan kawasan, simpul transportasi utama (pelabuhan), dan fasilitas antarmoda

Arah Pembangunan	IUP	Target Daerah		Arah Kebijakan Transformasi
		2025	2045	
<b>Ekonomi</b>	Proporsi kontribusi PDRB wilayah perkotaan Mamminasata terhadap nasional	1,47	1,81	2) Peningkatan peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif
				3) Mendorong percepatan Pembangunan jalan tol dan penyelesaiannya Trans Sulawesi serta pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan daerah pada koridor utama untuk mendukung integrasi rantai pasok domestik (menghubungkan kawasan ekonomi dan pelabuhan/bandara)
				4) Peningkatan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, khususnya: PKN (Mamminasata) dan PKW (Palopo, Watampone, Parepare, Barru, Pangkajene Kepulauan, Jeneponto dan Bulukumba) untuk mendukung pengembangan wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.
				5) Penerapan transportasi ramah lingkungan Electric Vehicle (EV), terutama di kawasan perkotaan dan metropolitan
				6) Mendorong percepatan perwujudan jalur kereta antar kota Makassar - Parepare, serta pengembangan kereta angkutan barang terpadu dengan pengembangan kawasan, simpul transportasi utama (pelabuhan), dan fasilitas antarmoda
				7) Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di Wilayah Metropolitan Makassar yang andal serta modern dalam melayani mobilitas penumpang

Arah Pembangunan	IUP	Target Daerah		Arah Kebijakan Transformasi
		2025	2045	
Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	77,5	100		<p>8) Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan bersubsidi yang memenuhi standar keandalan bangunan</p> <p>9) Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di KI, KEK, dan kawasan Strategis lainnya, khususnya untuk pekerja</p> <p>10) Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau terutama bagi penduduk berpenghasilan rendah sesuai dengan karakteristik wilayah</p> <p>11) Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan, utamanya perumahan bersubsidi</p> <p>12) Fasilitasi penyediaan rumah layak huni yang terjangkau sesuai karakteristik budaya dan wilayah serta kondisi geografis wilayah pesisir dan kepulauan</p> <p>13) Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah</p> <p>14) Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta pemukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh</p>

Arah Pembangunan	IUP	Target Daerah		Arah Kebijakan Transformasi
		2025	2045	
Percentase mandiri desa		0,75	9,93	15) Penataan kawasan permukiman wilayah Perkotaan dan sekitar wilayah pertumbuhan
				16) Optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik.
				17) Peningkatan peran pedesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif
				Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.

Sumber: Rancangan Akhir RPJPD Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045

## Lampiran 2 Regulasi terkait ekonomi biru tingkat nasional dan daerah

No	Landasan Hukum	Substansi	Deskripsi
1	Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	Definisi dan Prinsip Ekonomi Biru	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU Kelautan No. 32 Tahun 2014 mengamanatkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menjalankan Pengelolaan Kelautan melalui pemanfaatan dan pengusahaan Sumber Daya Kelautan dengan menggunakan prinsip Ekonomi Biru (Pasal 14 Ayat (1)).</li> <li>Yang dimaksud dengan Ekonomi Biru adalah sebuah pendekatan untuk meningkatkan Pengelolaan Kelautan berkelanjutan serta konservasi Laut dan sumber daya pesisir serta ekosistemnya dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber daya, meminimalkan limbah, dan nilai tambah ganda (multiple revenue) (Penjelasan Pasal 14 Ayat (1)).</li> <li>Lingkup Pengelolaan Kelautan tersebut termasuk penyelenggaraan kegiatan, penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan serta Konservasi Laut (Pasal 1 Ayat 8).</li> </ul>
2	UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009.	Undang-undang in mengatur hal terkait dengan perikanan, namun pengaturannya masih terfokus pada perikanan tangkap dan perikanan budidaya.	<p>Pasal 46 (1) UU No. 45/2009</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah dan pemerintah daerah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan</li> </ul> <p>Pasal 46 (2) UU No. 45/2009</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah dan pemerintah daerah mengadakan pusat data dan informasi perikanan</li> </ul> <p>Pasal 52 UU No. 31/2004</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah mengatur, mendorong, dan/atau menyelenggarakan penelitian dan pengembangan perikanan</li> </ul> <p>Pasal 57 UU No. 31/2004</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan</li> </ul> <p>Pasal 60 UU No. 31/2004</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah memberdayakan nelayan kecil</li> </ul> <p>Pasal 62 UU No. 31/2004</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah menyediakan dan mengusahakan dana untuk memberdayakan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil</li> </ul>
3	UU No. 27/2007 jo UU No. 1/2014 (PWP3K)	Mengatur tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk didalamnya perencanaan, konservasi kawasan perairan, penelitian dan pengembangan, pemberdayaan masyarakat,	<p>Pasal 15 (1) No. 27/2007</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengelola data dan informasi mengenai Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</li> </ul> <p>Pasal 28 (5) UU No. 27/2007</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan Kawasan Konservasi</li> </ul> <p>Pasal 30 (1) UU No. 1/2014</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan peruntukan dan fungsi zona inti pada kawasan konservasi untuk eksploitasi</li> </ul> <p>Pasal 30 (3) UU No. 1/2014</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan peruntukan dan fungsi zona inti yang berdampak Penting dan Cakupan yang Luas serta Bernilai Strategis, ditetapkan oleh Menteri dengan persetujuan DPR</li> </ul>

No	Landasan Hukum	Substansi	Deskripsi
		perizinan pemanfaatan, dan penegakan hukum.	<p>Pasal 33 (1) UU No. 27/2007</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</li> </ul> <p>Pasal 36 (5) UU No. 27/2007</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</li> </ul> <p>Pasal 40 (1) UU No. 27/2007</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelenggarakan Akreditasi terhadap program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</li> </ul> <p>Pasal 40 (2) UU No. 27/2007</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam hal penyelenggaraan akreditasi Pemerintah dapat melimpahkan wewenang penyelenggaraan akreditasi kepada Pemerintah Daerah</li> </ul> <p>Pasal 40 (4) UU No. 27/2007</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan insentif kepada pengelola program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah mendapat akreditasi</li> </ul> <p>Pasal 40 (5) UU No. 27/2007</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun dan/atau mengajukan usulan akreditasi program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</li> </ul> <p>Pasal 41 (1) UU No. 27/2007</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi Mitra Bahari</li> </ul> <p>Pasal 42 (1) UU No. 27/2007</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengatur, mendorong, dan/atau menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi</li> </ul> <p>Pasal 43 UU No. 27/2007</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian dan pengembangan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</li> </ul> <p>Pasal 47 (1) UU No. 27/2007</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</li> </ul> <p>Pasal 63 (1) UU No. 1/2014</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberdayakan Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya</li> </ul> <p>Pasal 63 (2) UU No. 1/2014</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong kegiatan usaha Masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar, dan aset ekonomi produktif lainnya</li> </ul>

No	Landasan Hukum	Substansi	Deskripsi
4	UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah	Undang-undang ini memuat mengenai sampah rumah tangga, dan sampah spesifik.	<p>Pasal 20 (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu</li> <li>Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;</li> <li>Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;</li> <li>Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan</li> <li>Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.</li> </ul> <p>Pasal 21 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; Disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah.</li> </ul> <p>Pasal 24 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Membayai penyelenggaraan pengelolaan sampah</li> </ul> <p>Pasal 25 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.</li> </ul>
5	UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa	Undang-undang ini terkait dengan kewenangan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, badan usaha milik desa, dan kerja sama desa.	<p>Pasal 26 (4) huruf o</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup</li> </ul> <p>Pasal 67 (2) d</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa</li> </ul>
6	UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	Undang-undang ini memuat mengenai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, termasuk urusan yang terkait dengan kelautan dan perikanan	<p>Pasal 27 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya</li> </ul>
7	UU No.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	Undang-undang ini berisikan perencanaan, penyelenggaraan perlindungan, penyelenggaraan pemberdayaan, pendanaan dan pembiayaan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat	<p>Pasal 9 (3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berkewajiban mencantumkan pekerjaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan/atau Petambak Garam di dalam pencatatan administrasi kependudukan</li> </ul> <p>Pasal 11 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan</li> </ul> <p>Pasal 12 (3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penetapan strategi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan.</li> </ul> <p>Pasal 13 (1)</p>

No	Landasan Hukum	Substansi	Deskripsi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran Pasal 16 (1)</li> <li>• Bertanggung jawab atas Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam Pasal 18 (1)</li> <li>• menyediakan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman Pasal 21 (1)</li> <li>• memberikan kemudahan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam memperoleh sarana Usaha Perikanan dan sarana Usaha Pergaraman Pasal 24 (1)</li> <li>• memberikan subsidi Pasal 25 (1)</li> <li>• menjamin kepastian usaha (harga ikan, pengendalian kualitas perairan, kualitas pengolahan, perjanjian tertulis) Pasal 26 (1)</li> <li>• menugasi badan atau lembaga yang menangani Komoditas Perikanan dan/atau Komoditas Pergaraman Pasal 30 (1)</li> <li>• memberikan Perlindungan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam atas risiko yang dihadapi saat melakukan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman Pasal 31</li> <li>• memberikan fasilitas akses Penjaminan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam guna meningkatkan kapasitas Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman melalui perusahaan Penjaminan Pasal 33 (1)</li> <li>• memfasilitasi setiap Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam menjadi peserta Asuransi Perikanan atau peserta Asuransi Pergaraman Pasal 36 (2)</li> <li>• membangun sistem perizinan terpadu yang efektif dan efisien Pasal 39 (1) memberikan jaminan keamanan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia Pasal 40 (1)</li> <li>• bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan</li> </ul>

No	Landasan Hukum	Substansi	Deskripsi
			<p>Pasal 41</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• berkewajiban melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya</li> </ul> <p>Pasal 42 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• memberikan bantuan hukum dan perlindungan bagi Nelayan yang mengalami permasalahan Penangkapan Ikan di wilayah negara lain</li> </ul> <p>Pasal 44</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bertanggung jawab atas Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam</li> </ul> <p>Pasal 46 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam termasuk keluarganya</li> </ul> <p>Pasal 47 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarganya, melalui pendidikan dan pelatihan.</li> </ul> <p>Pasal 49 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarganya.</li> </ul> <p>Pasal 50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• memfasilitasi kemitraan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman</li> </ul> <p>Pasal 52 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi</li> </ul> <p>Pasal 54 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• melakukan pembinaan untuk pengembangan Kelembagaan yang telah terbentuk</li> </ul> <p>Pasal 61 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• memfasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, Pembudi Daya Ikan Kecil, Penggarap Lahan Budi Daya, Petambak Garam Kecil, dan Penggarap Tambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran</li> </ul> <p>Pasal 62 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• menugasi badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah bidang perbankan, baik dengan prinsip konvensional maupun syariah untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.</li> </ul> <p>Pasal 65</p>

No	Landasan Hukum	Substansi	Deskripsi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>· menugasi lembaga pembiayaan Pemerintah Pusat atau lembaga pembiayaan Pemerintah Daerah untuk melayani Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam memperoleh pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman, baik dengan prinsip konvensional maupun syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul> <p>Pasal 69</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· menugasi badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Penjaminan untuk melaksanakan Penjaminan kredit dan Penjaminan pembiayaan terhadap Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.</li> </ul> <p>Pasal 70 (3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan</li> </ul>
8	UU No.11 Tahun 2019 tentang Cipta Kerja	Undang-undang ini berpengaruh terhadap UU No.31 Tahun 2004 jo UU No.45 Tahun 2009, UU No.27 Tahun 2007 jo UU No.1 Tahun 2014, dan UU No.7 Tahun 2016. Perubahan yang terjadi umumnya adalah terkait dengan Perizinan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Peraturan pelaksananya dijelaskan dalam PP No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan</li> <li>· PP No.27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan</li> </ul>
9	PP No.60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan	Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 31 Tahun 2004. Konservasi sumber daya ikan yang dimuat dalam aturan ini meliputi: konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetik ikan. Substansi yang dimuat dalam PP ini adalah pendidikan dan pelatihan, pembinaan masyarakat, dan pengawasan konservasi sumber daya ikan.	<p>Pasal 7 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· menetapkan pembukaan dan penutupan perairan tertentu untuk kegiatan penangkapan ikan</li> </ul> <p>Pasal 8 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Penetapan Kawasan konservasi perairan</li> </ul> <p>Pasal 13 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· melakukan identifikasi dan inventarisasi calon kawasan konservasi perairan dengan melibatkan masyarakat.</li> </ul> <p>Pasal 14 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Pencadangan kawasan konservasi perairan</li> </ul> <p>Pasal 14 (3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· mengusulkan kawasan konservasi perairan berdasarkan pencadangan yang telah ditetapkan</li> </ul> <p>Pasal 15 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan dikelola oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya</li> </ul> <p>Pasal 31 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Izin penangkapan ikan dalam kawasan konservasi perairan</li> </ul>

No	Landasan Hukum	Substansi	Deskripsi
			<p>Pasal 32 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Izin pembudidayaan ikan dalam kawasan konservasi perairan</li> </ul> <p>Pasal 33 (3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap orang dalam melakukan kegiatan dan pengusahaan pariwisata alam perairan wajib memiliki izin</li> </ul> <p>Pasal 34 (3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap orang dalam memanfaatkan kawasan konservasi perairan untuk kegiatan penelitian dan pendidikan wajib memiliki izin pemanfaatan</li> </ul> <p>Pasal 35 (3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengambilan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi dari alam wajib mendapat izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, setelah mendapat rekomendasi dari otoritas keilmuan</li> </ul> <p>Pasal 36 (3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan wajib mendapat izin pemanfaatan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk</li> </ul> <p>Pasal 37 (3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan pengembangbiakan wajib mendapat izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk</li> </ul> <p>Pasal 38 (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menteri menetapkan jumlah kuota pengambilan ikan yang tidak dilindungi dari alam untuk perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari otoritas keilmuan</li> </ul> <p>Pasal 39 (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• untuk melakukan perdagangan wajib mendapat izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, setelah memenuhi persyaratan teknis</li> </ul> <p>Pasal 42 (3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• yang melakukan aquaria ikan, wajib mendapat izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk</li> </ul> <p>Pasal 43 (3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertukaran jenis ikan wajib memiliki izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk</li> </ul> <p>Pasal 44 (4)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pemeliharaan jenis ikan yang dilindungi wajib memiliki izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk</li> </ul> <p>Pasal 46 (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi sumber daya ikan</li> </ul>
10	PP No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan	Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 6	<p>Pasal 117 (3) penjelasan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yang dimaksud dengan "kondisi objektif Desa" adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam,</li> </ul>

No	Landasan Hukum	Substansi	Deskripsi
	Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa	Tahun 2014. Sebagaimana peraturan pelaksana, PP ini juga merinci mengenai kewenangan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, badan usaha milik desa, dan kerja sama desa.	maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal  Pasal 127 (2) huruf b <ul style="list-style-type: none"> <li>• mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa.</li> </ul>
11	PP No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Substansinya salah satunya menyebutkan bahwa pemantauan mutu laut dilaksanakan untuk mengetahui kualitas air laut dan kerusakan ekosistem laut.	Pasal 225 (2) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan Mutu Laut dilaksanakan untuk mengetahui kualitas Air Laut dan kerusakan eksosistem Laut</li> </ul>
12	PP No.27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan	Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Substansi yang terkait adalah pengelolaan sumber daya ikan, standar mutu hasil perikanan, penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di WPPNRI bukan untuk tujuan komersial, kapal perikanan, kepelabuhanan perikanan, dan SLO	Pasal 39 (1) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Pusat mendelegasikan kewenangan kepada Menteri untuk menetapkan WPPNRI</li> </ul> Pasal 40 (1) dan (2) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah menetapkan estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, dan alokasi sumber daya ikan di setiap WPPNRI.</li> </ul> Pasal 41 (1) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah menetapkan rencana Pengelolaan Perikanan</li> </ul> Pasal 42 (2) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah menetapkan ukuran atau berat minimum jenis Ikan yang boleh ditangkap</li> </ul> Pasal 43 (1) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah menetapkan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya.</li> </ul>

No	Landasan Hukum	Substansi	Deskripsi
			<p>Pasal 44 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah menetapkan rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya.</li> </ul> <p>Pasal 45 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Pusat mengatur jenis alat bantu penangkapan Ikan di WPPNRI.</li> </ul> <p>Pasal 46 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah melakukan penataan andon penangkapan Ikan.</li> </ul> <p>Pasal 47 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah melakukan pengumpulan data melalui log book penangkapan Ikan.</li> </ul> <p>Pasal 52 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• menetapkan Penyedia SPK</li> </ul> <p>Pasal 101 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mengembangkan Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional dengan engintegrasikan sistem di lingkungan Kementerian.</li> </ul> <p>Pasal 102 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• melakukan pembinaan pemenuhan Standar Mutu kepada Pelaku Usaha dalam rangka jaminan Mutu dan keamanan Hasil Perikanan.</li> </ul> <p>Pasal 103 (3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• melakukan pengawasan terhadap konsistensi pemenuhan Standar Mutu kepada Pelaku Usaha melalui pemeriksaan lapangan terhadap UPI yang telah menerapkan cara Penanganan Ikan yang baik dan latau cara Pengolahan Ikan yang baik dan prosedur operasional Standar sanitasi melalui sertifikat kelayakan pengolahan</li> </ul> <p>Pasal 104</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran Ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan Mutu dan keamanan Hasil Perikanan.</li> </ul> <p>Pasal 105 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• memfasilitasi kegiatan pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan</li> </ul> <p>Pasal 106 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mendorong keberlanjutan usaha dan peningkatan investasi,</li> </ul> <p>Pasal 107 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha kelautan dan perikanan</li> </ul> <p>Pasal 108 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• melakukan fasilitasi akses pembiayaan bagi pelaku Usaha kelautan dan perikanan untuk menjamin keberlanjutan usaha</li> </ul>

No	Landasan Hukum	Substansi	Deskripsi
			<p>Pasal 111 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>melakukan pembinaan, pemantattan, dan evaluasi penyaluran kredit kepada Pelaku Usaha.</li> </ul> <p>Pasal 112 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>memfasilitasi kemudahan memperoleh prasarana dan sarana usaha bidang kelautan dan perikanan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan serta jaminan Mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.</li> </ul> <p>Pasal 113 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>fasilitasi pemasaran dan pembinaan Pelaku Usaha pemasaran agar memenuhi persyaratan Mutu dan jaminan keamanan pangan</li> </ul> <p>Pasal 114 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Setiap Orang yang melakukan penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan yang bukan untuk tujuan komersial harus mendapat persetujuan dari pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.</li> </ul> <p>Pasal 124 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>persetujuan pengadaan Kapal Perikanan</li> </ul> <p>Pasal 132 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengukuran Kapal Perikanan dilaksanakan oleh Ahli Ukur Kapal Perikanan yang ditunjuk oleh Menteri</li> </ul> <p>Pasal 132 (4)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal Ahli Ukur Kapal Perikanan belum tersedia di lokasi keberadaan Kapal Perikanan yang akan dilakukan pengukuran, pengukuran Kapal perikanan dapat dilakukan oleh unit pelaksana teknis kementerian yang membidangi pelayaran.</li> </ul> <p>Pasal 134 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemeriksaan terhadap persyaratan kelaikan Kapal Perikanan dilaksanakan oleh petugas pemeriksa kelaikan xapai Perikanan yang ditunjuk oleh Menteri.</li> </ul> <p>Pasal 138 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pendaftaran Kapal Perikanan</li> </ul> <p>Pasal 165 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sertifikat Pengukuhan terhadap Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan</li> </ul> <p>Pasal 167 (3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem standar mutu pengawakan Kapal Perikanan</li> </ul> <p>Pasal 170 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buku pelaut Awak Kapal Perikanan</li> </ul> <p>Pasal 187 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan Ikan</li> </ul> <p>Pasal 190 (1)</p>

No	Landasan Hukum	Substansi	Deskripsi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan Ikan Pasal 197 (1)</li> <li>• Penyusunan RIPPN Pasal 198 (1)</li> <li>• Penyusunan RIPPD Pasal 213 (1)</li> <li>• melakukan evaluasi terhadap penetapan kelas Pelabuhan Perikanan Pasal 218 (8)</li> <li>• Rekomendasi pembangunan pelabuhan Pasal 226 (2)</li> <li>• Penetapan WKOPP Pasal 257 (1)</li> <li>• melaksanakan pembinaan teknis perencanaan, pembangunan, dan operasional Pelabuhan Perikanan Pasal 258 (5)</li> <li>• melakukan evaluasi kinerja Pelabuhan Perikanan Pasal 259 (1)</li> <li>• membangun dan mengelola sistem informasi Kepelabuhanan Perikanan</li> </ul>
13	A. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia  B. Peraturan Presiden No. 34 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2025	Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI), definisi, cakupan program dan K/L yang terlibat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) yang merupakan pedoman umum bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan implementasi Poros Maritim Dunia sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2017 untuk Rencana Aksi KKI periode 2016-2019 dan Peraturan Presiden No. 34 Tahun 2022 Rencana Aksi KKI periode 2021-2025. Kedua regulasi tersebut disusun dengan merujuk pada Visi Pembangunan Indonesia yang tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 dan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.</li> <li>• Rencana Aksi KKI Tahun 2021-2025 berisikan 52 (lima puluh dua) dari 76 (tujuh puluh enam) program utama KKI. Instansi Penanggung Jawab di dalam Rencana Aksi KKI Tahun 2021-2025 secara keseluruhan sejumlah empat puluh kementerian/lembaga</li> </ul>
14	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri	Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu kepastian hukum dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, maka ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 21 Tahun 2022</li> </ul>

No	Landasan Hukum	Substansi	Deskripsi
	Koordinator Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional		
15	Buku DRPLN-JM/ <i>Blue Book</i> 2020-2024	Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) atau <i>Blue Book</i> 2020-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>DRPLN-JM/ <i>Blue Book</i> 2020-2024 berisikan 25 Program Utama dengan total nilai pinjaman 29,437 miliar dolar AS.</li> </ul>
16	Buku DRPPLN/ <i>Green Book</i> 2022  Buku DRPPLN/ <i>Green Book</i> 2023	<p>Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN/<i>Green Book</i>) 2022</p> <p>Daftar DRPPLN/<i>Green Book</i> 2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DRPPLN 2022 mencakup 32 proyek infrastruktur dan 54 non infrastruktur dari 21 K/L/BUMN/Pemda dengan total nilai pinjaman 18,52 miliar dolar AS yang didanai oleh 20 mitra pembangunan, serta 1,64 miliar dolar AS dana lokal. Sumber pendanaan yang teridentifikasi: Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), KSA, Jepang, ADB, IsDB, Bank Dunia, Korea Selatan, Denmark, Perancis (AFD), Jerman (KfW), Austria, EIB, UKEF, Spanyol, IFAD, Finlandia, Spanyol, Hungaria, IPEX, Norway, dan BPI French.</li> <li>DRPPLN 2023: Terdapat 77 Kegiatan Proyek dengan total pinjaman senilai 20,271 miliar dolar AS. Sumber pendanaan lainnya yang teridentifikasi (selain dari yang disebutkan diatas): Perancis (<i>French Treasury</i>) dan LPKE</li> </ul>
17	<i>Blue Economy Development Framework for Indonesia's Economic Transformation</i>	Kerangka Kerja Ekonomi Biru Indonesia	<p>Kerangka Kerja Ekonomi Biru Indonesia merupakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peletak dasar perencanaan dan implementasi kebijakan ekonomi biru di masa depan di Indonesia.</li> <li>Kerja sama pertama antara OECD dan BAPPENAS untuk menyediakan kerangka kerja bagi konsep pembangunan ekonomi biru Indonesia yang berkelanjutan.</li> </ul>
18	Permen KP No.4 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional kapal pengawas perikanan yang efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	<p>Pasal 9 (6)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penetapan penempatan Kapal Pengawas dalam rangka pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif.</li> </ul>

No	Landasan Hukum	Substansi	Deskripsi
19	Permen KP No.5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini merupakan pengganti atas Permen KP No.67/PERMEN-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan.	<p>Pasal 18 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>menerbitkan SIUP Bidang Pengolahan Ikan untuk Usaha Pengolahan Ikan yang menggunakan Penanaman Modal Asing</li> </ul> <p>Pasal 18 (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>menerbitkan SIUP Bidang Pengolahan Ikan untuk Usaha Pengolahan Ikan skala menengah dan skala besar dalam 1 (satu) provinsi yang menggunakan Penanaman Modal Dalam Negeri.</li> </ul> <p>Pasal 18 (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>menerbitkan TDU-PHP untuk Usaha Pengolahan Ikan skala mikro dan skala kecil</li> </ul> <p>Pasal 18 (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>menerbitkan TDU-PHP untuk Usaha Pengolahan Ikan skala mikro dan skala kecil</li> </ul> <p>Pasal 29 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pembinaan terhadap Usaha Pengolahan Ikan</li> </ul>
20	Permen KP NO.17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), dan Rajungan (Portunus Spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia	Permen KP ini merupakan pengganti atas Permen KP No.12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) di wilayah negara RI.	<p>Pasal 2 (5)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi pendaftaran kepada Lembaga Online Single Submission (OSS)</li> </ul> <p>Pasal 3 (3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>surat keterangan asal Benih Bening Lobster</li> </ul> <p>Pasal 8 (3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>surat keterangan asal kepiting (Scylla spp.)</li> </ul> <p>Pasal 11 (3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>surat keterangan asal rajungan (Portunus spp.)</li> </ul>
21	Permen KP No. 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan	Permen KP ini merupakan peraturan pelaksana PP No.27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.	<p>Pasal 18</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>menetapkan alokasi Rumpon</li> </ul> <p>Pasal 23 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Musim Penangkapan Ikan teri</li> </ul> <p>Pasal 49 (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perizinan Berusaha dan STKA</li> </ul> <p>Pasal 49 (3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>STPI Andon dan TDPI Andon</li> </ul> <p>Pasal 52 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan terhadap Nelayan dan Nelayan Kecil Andon Penangkapan Ikan</li> </ul> <p>Pasal 54 (2) b</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pemantauan dan evaluasi penempatan API dan ABPI di Jalur Penangkapan Ikan I, Jalur Penangkapan Ikan II, dan WPPNRI PD antar kabupaten/kota</li> </ul> <p>Pasal 54 (2) c</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pemantauan dan evaluasi untuk penempatan API dan ABPI di WPPNRI PD, dalam kabupaten/kota</li> </ul>

No	Landasan Hukum	Substansi	Deskripsi
22	Permen KP No.22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini merupakan peraturan pelaksana PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. selain itu, terkait juga dengan keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota sesuai kewenangan dalam penyusunan dokumen RPP jenis Ikan di Perairan Darat.	<p>Pasal 17 (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam penyusunan dokumen RPP jenis Ikan di Perairan Darat yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, kepala Dinas atas nama gubernur atau bupati/wali kota membentuk tim penyusun RPP sesuai kewenangannya</li> </ul> <p>Pasal 25 (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>mengelakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun terhadap RPP jenis Ikan di Perairan Darat</li> </ul>
23	Permen KP No.26 Tahun 2021 tentang Pencegahan Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rehabilitasi, dan Peningkatan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini merupakan peraturan pelaksana PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Hal ini terkait juga dengan dokumen Rencana Pencegahan Pencemaran yang berpotensi mencemari Sumber Daya Ikan dan lingkungannya, pencegahan pencemaran, dan rehabilitasi.	<p>Pasal 3 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pencegahan pencemaran dan pencegahan kerusakan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya</li> </ul> <p>Pasal 6 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kewajiban menyusun Dokumen Rencana Pencegahan Pencemaran yang berpotensi mencemari Sumber Daya Ikan dan lingkungannya</li> </ul> <p>Pasal 6 (5))</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wajib melakukan pencegahan Pencemaran Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya dari kegiatan dan/atau usaha pariwisata</li> </ul> <p>Pasal 42 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rehabilitasi Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya</li> </ul> <p>Pasal 75 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan dan evaluasi terhadap Rehabilitasi dan Peningkatan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya</li> </ul>
24	Permen KP No. 27 Tahun 2021 tentang Penangkapan Ikan Dan/Atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Yang Bukan Tujuan Komersial	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini merupakan peraturan pelaksana PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Hal ini terkait dengan persetujuan penangkapan Ikan yang	<p>Pasal 12 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Persetujuan penangkapan Ikan yang bukan tujuan komersial</li> </ul>

No	Landasan Hukum	Substansi	Deskripsi
		bukan tujuan komersial yang melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sesuai kewenangannya	
25	Permen KP No. 30/2021 tentang Pengawasan Ruang Laut	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini merupakan peraturan pelaksana PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pasal 3 (1) · melakukan pengawasan Ruang Laut
26	Permen KP No. 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, Dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini merupakan peraturan pelaksana dari PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Hal ini terkait dengan pembinaan log book penangkapan ikan dan persetujuan pengadaan kapal perikanan.	Pasal 10 (1) · Pembinaan Log Book Penangkapan Ikan Pasal 35 (1) · Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan Pasal 77 (2) · Pendaftaran Kapal Perikanan Pasal 79 (1) · melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan Pasal 79 (2) · menerbitkan Buku Kapal Perikanan Pasal 82 (1) · melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan (buku kapal)
27	Permen KP No. 58 Tahun 2021 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini merupakan peraturan pelaksana dari PP Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan. Hal ini terkait dengan juga dengan keberadaan kelompok kerja Sistem Logistik Ikan Nasional di tingkat provinsi.	Pasal 7 (6) · Kelompok kerja SLIN provinsi
28	Permen KP No. 59 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini merupakan peraturan pelaksana dari PP	Pasal 13 (1) · Pendampingan dalam rangka peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan Pasal 14 (1)

No	Landasan Hukum	Substansi	Deskripsi
	Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan	Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Supervisi dalam rangka peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan Pasal 15 (1)</li> <li>• Konsultasi dalam rangka peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan Pasal 18 (1)</li> <li>• Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam mendorong peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan Pasal 20 (1)</li> <li>• Pengembangan skema permodalan dalam rangka peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan Pasal 23 (1)</li> <li>• memberikan kemudahan kepada Pelaku Usaha yang melakukan peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan.</li> </ul>
29	Permen KP No. 20 Tahun 2020 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini merupakan pengganti atas Permen KP Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Permen KP Nomor 32/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup. Hal ini terkait juga dengan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan oleh Menteri dan Gubernur sesuai kewenangannya, yaitu 10-30 GT oleh gubernur, dan di atas >30 GT dan modal asing oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.	<p>Pasal 8 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• menerbitkan SIUP bidang pengangkutan ikan hidup dan SIKPI (diatas 30 GT) dan Kapal ikan asing</li> </ul> <p>Pasal 8 (3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• menerbitkan SIUP bidang pengangkutan ikan hidup dan SIKPI untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup berbendera Indonesia dengan ukuran lebih dari 10 – 30 GT</li> </ul>
30	Permen KP No. 25 Tahun 2020 tentang Andon Penangkapan Ikan	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini merupakan pengganti atas Permen KP	<p>Pasal 7</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerbitkan SIPI Andon dan TDKP A</li> </ul> <p>Pasal 15 (1)</p>

No	Landasan Hukum	Substansi	Deskripsi
		Nomor 36/PERMEN-KP/2014 tentang Andon Penangkapan Ikan. Hal terkait juga dengan penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan Andon dan Tanda Daftar kapal Perikanan Andon.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan terhadap Nelayan Andon dan Nelayan Kecil Andon</li> </ul>
31	Permen KP No. 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini merupakan pelaksanaan dari UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No 1 Tahun 2014. Hal terkait adalah pembentukan kelompok kerja, penetapan pencadangan kawasan konservasi, mengajukan usulan penetapan kawasan konservasi, dan pengelolaan kawasan konservasi perairan	<p>Pasal 19 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>melakukan: a. identifikasi dan inventarisasi; dan b. penilaian terhadap hasil identifikasi dan inventarisasi berdasarkan pengajuan usulan inisiatif calon Kawasan Konservasi</li> </ul> <p>Pasal 19 (3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan kelompok kerja identifikasi dan inventarisasi usulan inisiatif calon Kawasan Konservasi</li> </ul> <p>Pasal 24 (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penetapan pencadangan Kawasan Konservasi</li> </ul> <p>Pasal 25 (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>mengajukan usulan penetapan Kawasan Konservasi</li> </ul> <p>Pasal 34 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan kawasan konservasi nasional</li> </ul>
32	Permen KP No. 47/Permen-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini merupakan pelaksanaan dari UU No. 45 Tahun 2009. Hal terkait adalah pembinaan pengawas perikanan, termasuk kelompok masyarakat pengawas	<p>Pasal 29</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan Pengawas Perikanan</li> </ul>
33	Permen KP No. 58/Permen-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini merupakan pengganti dari Permen KP Nomor PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas, Permen KP Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan	<p>Pasal 12 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI, untuk Kapal Perikanan berukuran di atas 30 GT yang beroperasi di WPPNRI di atas 12 mil laut dan/atau di Laut Lepas</li> </ul> <p>Pasal 12 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>berwenang menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI, untuk Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan berukuran di atas 10- 30 GT</li> </ul> <p>Pasal 12 (3) huruf b</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SIUP, SIPI, dan SIKPI, untuk Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil yang</li> </ul>

No	Landasan Hukum	Substansi	Deskripsi
		<p>Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permen KP Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua atas Permen KP Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dan Permen KP Nomor 23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan sebagaimana telah diubah Permen KP Nomor 5/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan atas Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan</p>	<p>berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah laut sampai dengan 12 mil laut</p> <p>Pasal 12 (3) huruf c</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SIUP dan SIPI, untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di KKPN dan KKPD</li> </ul> <p>Pasal 12 (3) huruf c</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SIUP dan SIPI, untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di KKPN dan KKPD</li> </ul> <p>Pasal 12 (3) huruf d</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>TDKP, untuk Nelayan Kecil</li> </ul> <p>Pasal 30 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berwenang menerbitkan PPKP untuk Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut berukuran di atas 30 GT</li> </ul> <p>Pasal 30 (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>berwenang menerbitkan PPKP untuk Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan berukuran 7-30 GT yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah laut sampai dengan 12 mil laut, KKPN, dan KKPD.</li> </ul> <p>Pasal 35 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>berwenang melakukan pendaftaran Kapal Perikanan berukuran di atas 30 GT</li> </ul> <p>Pasal 35 (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>berwenang melakukan pendaftaran Kapal Perikanan berukuran di atas 30 GT yang beroperasi di WPPNRI di atas 12 mil laut dan/atau di Laut Lepas</li> </ul> <p>Pasal 35 (3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>berwenang melakukan pendaftaran Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan berukuran sampai dengan 30 GT yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah laut sampai dengan 12 mil laut, KKPN, dan KKPD</li> </ul> <p>Pasal 128 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>melakukan evaluasi berdasarkan laporan kegiatan usaha</li> </ul> <p>Pasal 139 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>melakukan pembinaan kepada Setiap Orang yang melakukan Usaha Perikanan Tangkap</li> </ul>
35	Permendes PDTT No. 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di	Peraturan Menteri ini merupakan pengganti dari Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Mekanisme	<p>Pasal 10</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya alam yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah</li> </ul> <p>Pasal 121 (2)</p>

No	Landasan Hukum	Substansi	Deskripsi
	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksana kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender</li> </ul>
36	Permendes PDTT No. 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022	Peraturan Menteri ini merupakan peraturan pelaksana PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hal terkait dengan pelaksanaan desa peduli lingkungan laut (SDG 14).	<p>Memuat desa peduli lingkungan laut (SDG 14), antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>pengolahan ikan;</li> <li>pengelolaan wisata hutan mangrove;</li> <li>pelatihan sentra pemberian mangrove dan vegetasi pantai;</li> <li>pelatihan pemberian ikan;</li> <li>pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan;</li> <li>Pengelolaan sampah</li> </ol> </li> <li>penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, melalui: pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan</li> <li>kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>pemasangan atau perawatan karamba bersama;</li> <li>bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan</li> <li>membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama</li> </ol> </li> </ol>
37	Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041	Perda ini salah satu substansinya menyangkut Integrasi RTRW dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	<p>Pasal 4</p> <p>Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi adalah untuk mewujudkan Ruang yang produktif, kompetitif, inklusif, inovatif, dan berkelanjutan melalui pendekatan kemandirian lokal menuju provinsi yang terkemuka di Indonesia.</p> <p>Pasal 5</p> <p>Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>kebijakan untuk mewujudkan Ruang Provinsi yang produktif berbasis keberlanjutan yang meliputi:(1) pengembangan Kawasan Perkotaan dan Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi; (2) pengembangan dan penguatan sistem produksi hulu hilir dalam peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan; dan (3) pengembangan Kawasan Perkotaan dan Kawasan strategis yang berbasis mitigasi</li> </ol>

No	Landasan Hukum	Substansi	Deskripsi
			<p>dan adaptasi bencana untuk mewujudkan Ruang Provinsi yang kompetitif melalui peningkatan keterkaitan antar Wilayah.</p> <p>b. kebijakan untuk mewujudkan Ruang Provinsi yang kompetitif dan inovatif melalui peningkatan keterkaitan antar Wilayah yang meliputi: (1) pengembangan sistem jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan dan aksesibilitas antar Wilayah dan antar Kawasan; (2) peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Wilayah darat, Laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (3) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana lainnya.</p> <p>c. kebijakan untuk mewujudkan Ruang Provinsi yang berkelanjutan melalui kelestarian Kawasan berfungsi lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya, yang meliputi: (1) pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu Kawasan berfungsi lindung; pemantapan dan rehabilitasi Kawasan berfungsi lindung; pelestarian Kawasan konservasi yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi; dan mewujudkan peningkatan konservasi dan rehabilitasi lahan kritis dan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.</p> <p>d. kebijakan untuk mewujudkan Ruang Provinsi yang inklusif melalui peningkatan produktivitas dan daya saing sumber daya alam meliputi: (1) perwujudan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan (2) pemanfaatan sumber daya alam dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.</p>
38	Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan Sumberdaya Perikanan	Pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan perlindungan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan. Juga terkait dengan kewenangan Pemda, perencanaan, perlindungan SDI, pendataan, pembiayaan, peran serta masyarakat, dan sanksi administratif	<p>Pasal 4</p> <p>Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk: (a) menjamin potensi Perikanan dan ekologinya agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan secara optimal demi tercapainya kemakmuran masyarakat dan keberlanjutan pemenuhan kebutuhan pangan generasi sekarang dan yang akan datang; (b) mendayagunakan Sumber Daya Perikanan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; © memanfaatkan Sumber Daya Perikanan secara berkelanjutan; (d) melestarikan budaya dan mengembangkan pengetahuan Perikanan bagi masyarakat Daerah; dan (e) mengembangkan sumber daya manusia di bidang Perikanan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mengedepankan kepentingan umum.</p>